PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsii Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat daerah kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai denggan tahun 2026.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola Daerah.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

21. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
24. Pokok-pokok Pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran *(out put)* dalam bentuk barang atau jasa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasrainya untuk periode 1 (satu) tahun .
29. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta target pembangunan nasional.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

31. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
32. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
33. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun yang dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendk dicapai dan tidak kaku.
34. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengana penggunaan sumber daya pembangunan.
35. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
36. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimum.
37. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapinya tujuan, berupa hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
38. Keluaran *(output)* adalah suatu produk akhir berupa barang dan jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
39. Dampak *(impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dadri pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program.
40. Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsingnya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJMD yaitu menyiapkan dokumen pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah oleh pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen Masyarakat di Daerah.

(2) Tujuan penyusunan RPJMD, sebagai berikut :

a. menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sehingga diperoleh tujuan, sasaran, straregi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
c. menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun;
d. menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD;
e. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan Masyarakat, serta dengan Kabupaten atau Provinsi yang berbatasan/berdekatan;
f. memampukan Pemerintah Daerah mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan;
g. menjadi instrument bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah;
h. menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di Daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMD;
i. menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar wilayah di Daerah secara efisien dan efektif; dan
j. menyediakan instrumen penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada setiap 5 (lima) tahun dan akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahunan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
i. BAB IX Penutup.

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

(4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) Bupati mengarahkan pelaksanaan RPJMD.

(2) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPELITBANGDA dan kepala Perangkat Daerah untuk Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi oleh BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

(3) Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi oleh kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

(2) Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi bahan dalam penyusunan perubahan RPJMD dan penyusunan RPJMD untuk periode selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/Urusan Pemerintahan dan kebijakan di bidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkenaan Peraturan Daerah yang mengatur susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap RPJMD ini.

Pasal 12

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Tahun 2020 hanya menjabat sampai dengan Tahun 2024, maka 2 (dua) tahun terakhir pelaksanaan RPJMD menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk periode Bupati/Wakil Bupati selanjutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 26 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MARJANI SULTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR 103

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.02.094.21

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Grafik	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan	I-14
1.5. Sistematika Penulisan	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-56
2.1.4. Aspek Daya Saing	II-174
2.2. Evaluasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Selayar	II-177
2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)	II-181
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-189
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-26
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-2
4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-9
4.3. Analisis Isu Strategis	IV-18
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi	V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-4
5.4. Keterkaitan RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan RPJPD Kab. Kepulauan Selayar dan RPJMD	V-10
5.5. Keterkaitan Misi RPJMN, Perubahan RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar	V-13
BAB VI STARTEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
6.1. Strategi	VI-1
6.2. Arah Kebijakan	VI-3
6.3. Program Pembangunan Daerah	VI-11
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah VIII-1
8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VIII-23
8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) VIII-27

BAB IX PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Antara RPJM Nasional tahun 2021-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 , dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026	I-13
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	II-1
Tabel 2.2	Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 – 2020	II-7
Tabel 2.3	Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar	II-7
Tabel 2.4	Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	II-22
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020	II-26
Tabel 2.6	Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun Terakhir	II-26
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	II-27
Tabel 2.8	Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex Ratio di Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2020	II-28
Tabel 2.9	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-28
Tabel 2.10	Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-29
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-30
Tabel 2.12	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2020	II-31
Tabel 2.13	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-32
Tabel 2.14	Perkembangan Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-32
Tabel 2.15	Perkembangan PDRB/Kapita (ADHB) Kabupaten Kepuluan Selayar Tahun 2016-2020	II-33
Tabel 2.16	Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-34
Tabel 2.17	Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-34
Tabel 2.18	Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.19	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.20	Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.21	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.22	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-37

Tabel 2.23	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.24	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-39
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.28	Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-42
Tabel 2.29	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.30	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.31	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.32	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.33	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.34	Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2020	II-47
Tabel 2.35	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-48
Tabel 2.36	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-48
Tabel 2.37	Penanganan daerah rawan pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.38	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.39	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.40	Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2.41	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2.42	Produksi sektor perkebunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.43	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.44	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.45	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.46	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.47	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.48	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-55

Tabel 2.49	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.50	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2.51	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.52	Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.53	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.54	Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-61
Tabel 2.55	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.56	Angka Putus Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.57	Angka Kelulusan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.58	Angka Melanjutkan Pendidikan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.59	Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.60	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.61	Rasio Guru/Murid Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-67
Tabel 2.62	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berasil Menamatkan Sekolah Dasar Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.63	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.64	Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2.65	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.66	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.67	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.68	Angka Kematian Ibu (AKI) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.69	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.70	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatupenduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.71	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatupenduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.72	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.73	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.74	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-77

Tabel 2.75	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.76	Cakupan Pertolongan Persalinan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.77	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.78	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.79	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.80	Cakupan balita pneumonia yang ditangani Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.81	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.82	Penderita diare yang ditangani Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.83	Angka kejadian Malaria Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.84	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.85	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.86	Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.87	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.88	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-88
Tabel 2.89	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.90	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.91	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.92	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Satahun Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.93	Presentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.94	Presentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.95	Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.96	Presentase Penduduk berakses Air Minum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.97	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-94

Tabel 2.98	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.99	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.100	Rasio Bangunan Ber IMB Per satuan Bangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2.101	Rasio Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.102	Rasio Permukiman Layak Huni Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.103	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-99
Tabel 2.104	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.105	Persentase Pemukiman yang Tertata Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2.106	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2.107	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.108	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.109	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.110	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.111	Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-106
Tabel 2.112	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2.113	Persentase PMKS yang tertangani Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2.114	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-109
Tabel 2.115	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.116	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-111
Tabel 2.117	Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat lengkap Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.118	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-112

Tabel 2.119	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.120	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-114
Tabel 2.121	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.122	Rasio lulusan S1/S2/S3 Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-116
Tabel 2.123	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.124	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.125	Rasio KDRT Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2.126	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2.127	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.128	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/SMP/SMA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.129	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2.130	Ketersediaan Pangan Utama Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.131	Ketersediaan Energi Perkapita Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.132	Ketersediaan Protein Perkapita Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-122
Tabel 2.133	Pengawasan dan Pembina Keamanan Pangan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-122
Tabel 2.134	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Menurut KecamatanKabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-123
Tabel 2.135	Timbulan sampah yang ditangani Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.136	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.137	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.138	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-127
Tabel 2.139	Rasio Pasangan Berakte Nikah Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-128
Tabel 2.140	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-128
Tabel 2.141	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-129

Tabel 2.142	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.143	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-131
Tabel 2.144	Persentase LSM Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-132
Tabel 2.145	Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.146	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.147	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Menurut KecamatanKabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-134
Tabel 2.148	Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-135
Tabel 2.149	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-136
Tabel 2.150	Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-137
Tabel 2.151	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-138
Tabel 2.152	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-139
Tabel 2.153	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-140
Tabel 2.154	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-141
Tabel 2.155	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-141
Tabel 2.256	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-142
Tabel 2.257	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-143
Tabel 2.258	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-145
Tabel 2.159	Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-146
Tabel 2.160	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-147
Tabel 2.161	Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-147

Tabel 2.262	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-148
Tabel 2.263	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-148
Tabel 2.164	Persentase Layanan Angkutan Darat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-149
Tabel 2.165	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-150
Tabel 2.266	Pemasangan Rambu-Rambu Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-150
Tabel 2.167	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-151
Tabel 2.168	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-152
Tabel 2.169	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-152
Tabel 2.170	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan SelayarTahun 2016-2020	II-153
Tabel 2.171	Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-154
Tabel 2.172	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-154
Tabel 2.173	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-155
Tabel 2.174	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-156
Tabel 2.175	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-157
Tabel 2.276	Persentase Wirausaha Muda Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-158
Tabel 2.177	Cakupan Pembinaan Olahraga Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-159
Tabel 2.178	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-159
Tabel 2.179	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-160
Tabel 2.180	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-160
Tabel 2.181	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-161
Tabel 2.182	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-162
Tabel 2.183	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-162
Tabel 2.184	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hekta Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-163
Tabel 2.185	Cakupan Bina Kelompok Tani Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-164
Tabel 2.186	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-165

Tabel 2.187	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-165
Tabel 2.188	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-166
Tabel 2.189	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-166
Tabel 2.190	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-167
Tabel 2.191	Pertumbuhan Industri Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-167
Tabel 2.192	Cakupan bina kelompok pengrajin Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-168
Tabel 2.193	Produksi Perikanan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauar Selayar Tahun 2016-2020	II-169
Tabel 2.194	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Menurut Kecamatar Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-170
Tabel 2.195	Konsistensi Program RKPD kedalam RPJMD Kabupater Kepulauan Selayar Tahun 2016-20320	II-170
Tabel 2.196	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupater Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-171
Tabel 2.197	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-172
Tabel 2.198	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-173
Tabel 2.199	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-174
Tabel 2.200	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-174
Tabel 2.201	Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-175
Tabel 2.202	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-175
Tabel 2.203	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita di Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-175
Tabel 2.204	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-176
Tabel 2.205	Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II-176
Tabel 2.206	Rasio Ketergantungan di Kabupaten kepulauan SelayarTahun 2016-2020	II-177
Tabel 2.207	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2019	II-177
Tabel 2.208	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	II-180
Tabel 2.209	Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2020	II-182
Tabel 2.210	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020	II-190
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-3

Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020	III-14
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016–2020	III-17
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3.5	Rasio Lancar Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-23
Tabel 3.6	Rasio Kas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-23
Tabel 3.7	Rasio Cepat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-24
Tabel 3.8	Rasio Solvabilitas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-25
Tabel 3.9	Rasio Utang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-25
Tabel 3.10	Rasio Utang Terhadap Aset Modal Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020	III-26
Tabel 3.11	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-29
Tabel 3.12	Surplus Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020	III-30
Tabel 3.13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020	III-31
Tabel 3.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020	III-32
Tabel 3.15	Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026	III-35
Tabel 3.16	Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	III-36
Tabel 3.17	Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026	III-37
Tabel 3.18	Target Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 – 2026	III-44
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026	III-46
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 – 2026 Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah	III-47
Tabel 3.21	Realisasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-53
Tabel 4.1	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD	IV-22
Tabel 5.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026	V-2
Tabel 5.2	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026	V-3
Tabel 5.3	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026	V-6
Tabel 5.4	Keterkaitan Misi RPJPD Kab. Kepulauan Selayar dengan Misi RPJMD	V-11
Tabel 5.5	Hubungan Sasaran RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar	V-11
Tabel 5.6	Keterkaitan Misi RPJMN, Perubahan RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar	V-13

Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepulauan Selayar	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	VI-5
Tabel 6.3	Keadaan Status Desa pada Tahun 2020 dan 2026	VI-15
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	VI-19
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kepualauan Selayar Tahun 2022-2026	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026	VIII-3
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadapa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026	VIII-5
Tabel 8.4	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022-2026	VIII-24
Tabel 8.5	Penetapan Target Indikator TPB/SDG Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026	VIII-28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencannaan Pembangunan	I-12
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	II-2
Gambar 2.2	Peta Geologi Pulau Selayar	II-4
Gambar 2.3	Peta Struktur Ruang Kabupaten kepulauan Selayar	II-13
Gambar 2.4	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar	II-15
Gambar 2.5	Peta Rawan Bencana Kab. Kepulauan Selayar	II-21
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	VI-4
Gambar 6.2	Peta Kawasan Pusat Distribusi Logistik Kawasan Timur Indonesia	VI-12
Gambar 6.3	Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	VI-13
Gambar 6.4	Peta Kawasan Industri Perikanan Terpadu	VI-14

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-4
Grafik 3.2	Postur Komponen Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-4
Grafik 3.3	Perkembangan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-5
Grafik 3.4	Postur PAD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-6
Grafik 3.5	Perkembangan Pajak Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-7
Grafik 3.6	Postur Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2018	III-8
Grafik 3.7	Postur Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2020	III-8
Grafik 3.8	Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-9
Grafik 3.9	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-10
Grafik 3.10	Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-11
Grafik 3.11	Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-12
Grafik 3.12	Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-12
Grafik 3.13	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-13
Grafik 3.14	Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	III-13
Grafik 3.15	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020	III-15
Grafik 3.16	Komposisi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020	III-16
Grafik 3.17	Komposisi Belanja Langsung Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020	III-17
Grafik 3.18	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016–2020	III-19

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah *(valid)* bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya, aspirasi yang paling humanistik tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat *(society welfare).* Pembangunan juga pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana, baik oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efesien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana itu tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis karena masing-masing daerah memiliki sumber daya yang berbeda, masalah, dan tantangan yang berbeda pula.

Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka titik berat pembangunan umumnya diletakkan pada bidang ekonomi dan bidang sosial yang merupakan penggerak utama pembangunan seirama dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan didorong secara saling memperkuat saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan amanat regulasi yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buipati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah menetapkan pasangan **H. MUH. BASLI ALI dan H. SAIFUL ARIF, SH** sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 melalui rapat pleno yang digelar pada tanggal 25 Januari 2021. Selanjutnya, dilantik

dan diambil sumpah oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-378 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar pada tanggal 26 Februari 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263 ayat (3) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 70 ayat (2) menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilantik.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 pada tahap keempat, dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2032. Sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Proses penyusunan RPJMD ditempuh dengan memperhatikan 4 (empat) aspek pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan atas-bawah/bawah-atas. Pendekatan teknoktratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai kerangka logis pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjaringan aspirasi dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme konsultasi publik. Pendekatan politis dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan oleh Bupati/ Wakil Bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan bersama DPRD. Terakhir pendekatan atas-bawah/ bawah-atas dilaksanakan melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang harus diimplementasikan oleh Daerah dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati serta inventarisasi masukan dari Renstra Perangkat (Renstra) Daerah yang harus diakomodir dalam RPJMD.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk melakukan pembangunan daerah dengan mendasari segenap regulasi yang ada mulai pada tahap perencanaan. Beberapa capaian hasil pembangunan dapat dilihat pada capaian ekonomi makro daerah yang relatif stabil dengan beberapa peningkatan meskipun dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease (Covid–19*) yang bermula pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar menurun drastis sampai pada -1,78 persen, masih

lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -2,07 persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 mencapai 12,48 persen, meskipun angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 hanya sebesar 2,44 persen jauh dibawah tingkatan pengangguran terbuka Sulawesi Selatan sebesar 6,31 Persen dan Nasional sebesar 7,07 persen. Untuk gini rasio Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki nilai 0,357 masih lebih baik dari pada gini rasio Sulawesi Selatan 0,389 dan Nasional 0,381. Terakhir tekait indeks pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 masih berada pada nilai indek 67,38 persen masih berada dibawah IPM Sulawesi Selatan 71,93 dan IPM Nasional 71,94.

Sebagaimana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga sangat memperhatikan dan mengedepankan pembangunan berkelanjutan khusunya dalam rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakatan masyarakat. Hasil identifikasi pencapaian indikator TPB, Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten. Untuk capaian TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data sebanyak 141 indikator atau sebanyak 72 persen. Masih terdapat 55 indikator atau sebanyak 28 persen yang belum dilaksanakan dan belum ada data. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik.

Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

28) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
40) Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
44) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

45) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
46) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
47) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
48) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
49) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
50) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6);

51) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
52) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
53) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47).

1.3. Hubungan antar Dokumen

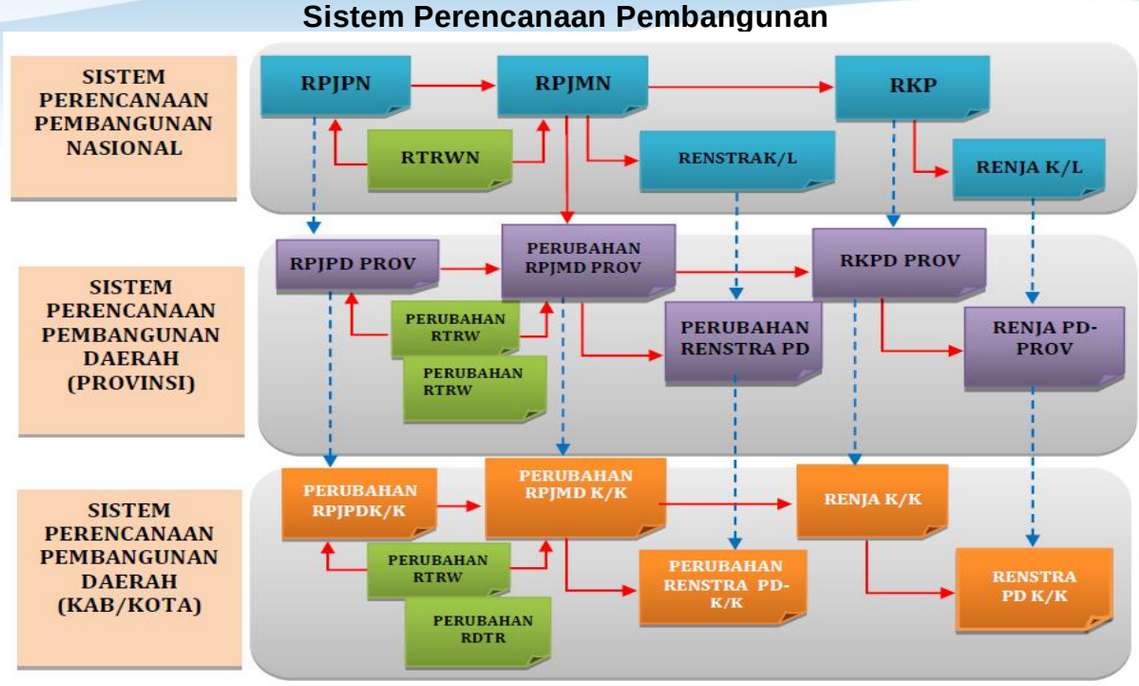
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Keterkaitan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen anggaran, secara vertikal yaitu: penyusunan RPJMD ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Keterkaitan secara horizontal mencakup yaitu: RPJMD ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032, kemudian dijabarkan kedalam Rentra Perangkat Daerah dan RKPD. RKPD kemudian menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan peraturan daerah, dokumen RKPD ditetapkan peraturan bupati, dan KUA-PPAS serta dokumen APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tabel 1.1.
Keterkaitan Antara Visi Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 "TerwujudnyanIndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"		Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter"		Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 "Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"	
No	MISI RPJMN	No	MISI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI	No	MISI RPJMD KABUPATEN
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	4	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
				5	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	4	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	6	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 "TerwujudnyanIndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"		Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter"		Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 "Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"	
No	MISI RPJMN	No	MISI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI	No	MISI RPJMD KABUPATEN
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	1	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya				
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga				
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya				
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan				

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah :

1. menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun;
4. menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD;
5. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar Perangka Daerah, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha dan masyarakat dan dengan Kabupaten atau Provinsi yang berbatasan/berdekatan;
6. memampukan Pemerintah Daerah mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan;
7. menjadi instrument bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah;
8. menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN;
9. menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar secara efisien dan efektif;
10. menyediakan instrument penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada setiap lima tahun dan akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahunan.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengolahan keuangan Daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu yang terurai ke kinerja pelaksanaan APBD dan neraca Daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang terurai ke proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta kerangka pendanaan yang terurai ke proyeksi pendapatan dan belanja, dan penghitungan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan Daerah dan isu-isu strategis Daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan lima tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kepala Daerah hingga akhir periode RPJMD.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarakan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja Daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Menegah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km^2, terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km^2, dan luas wilayah laut 9.146,66 km^2, dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

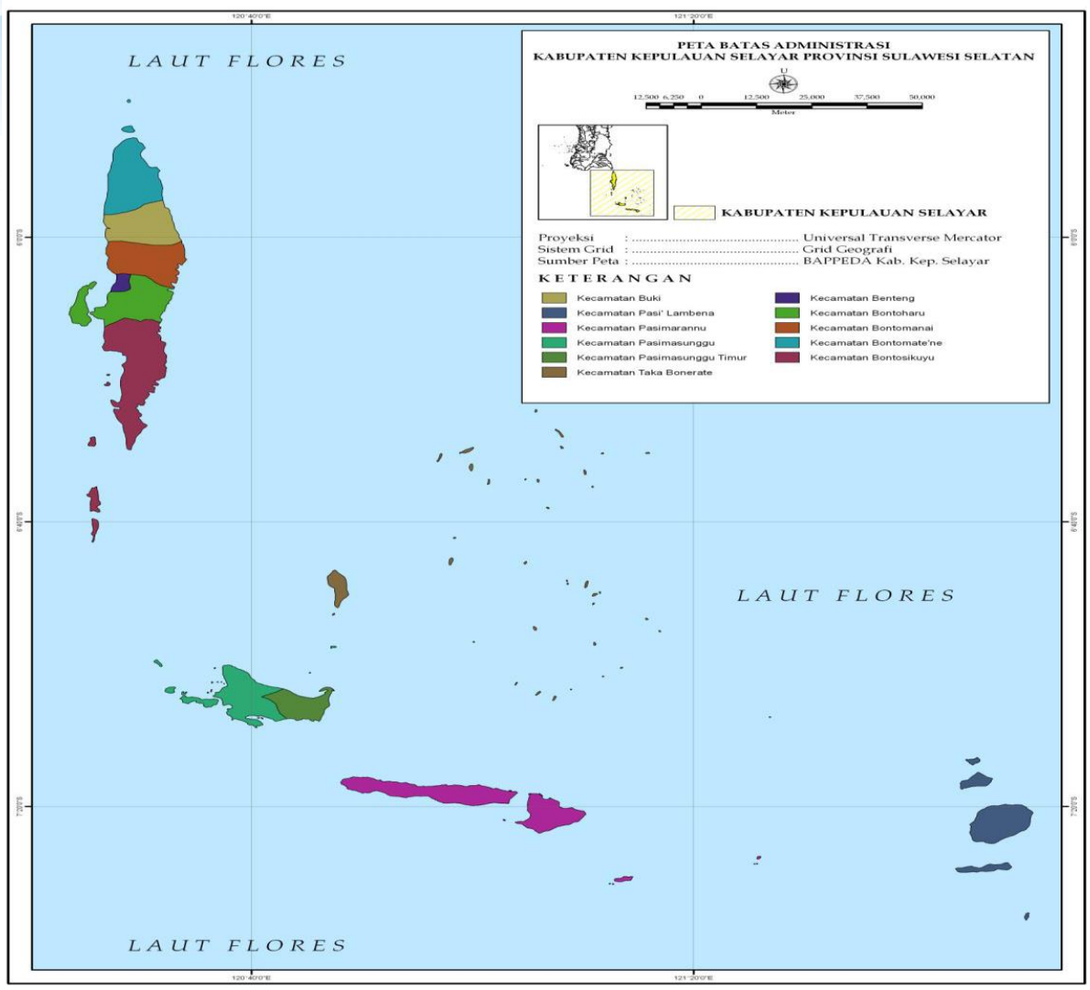
Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km^2)
1	Pasimarannu	195,33
2	Pasilambena	114,88
3	Pasimasunggu	131,8
4	Taka Bonerate	49,3
5	Pasimasunggu Timur	67,14
6	Bontosikuyu	248,22
7	Bontoharu	128,12
8	Benteng	24,63
9	Bontomanai	136,42
10	Bontomatene	193,05
11	Buki	68,14

Sumber Data : Kepulauan Selayar Dalam Angka 2021

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: Perda No 5 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kep. Selayar

Secara astronomis, Kepulauan Selayar terletak diantara 5°42’ - 7°35’ Lintang Selatan dan 120°15’ - 122°30’ Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia

(KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama disektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

Kepulauan Selayar terletak diantara 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur, Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Gugusan kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 34 buah.

Terkait dengan posisi strategis Kabupaten Kepualaun Selayara sebagaimana termuat dalam web site Sulsel prov bahwa *Selat Selayar* dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.

2.1.1.2.1 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi Pulau Selayar berdasarkan kondisi batuan dan kontrol struktur geologi terdiri dari tiga satuan morfologi, yaitu: Satuan morfologi daratan *alluvial* pantai, Satuan morfologi perbukitan bergelombang, dan Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi daratan *alluvial* pantai menempati daratan sempit di pantai barat. Pulau Selayar terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal secara dominan menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi disini diantaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa,

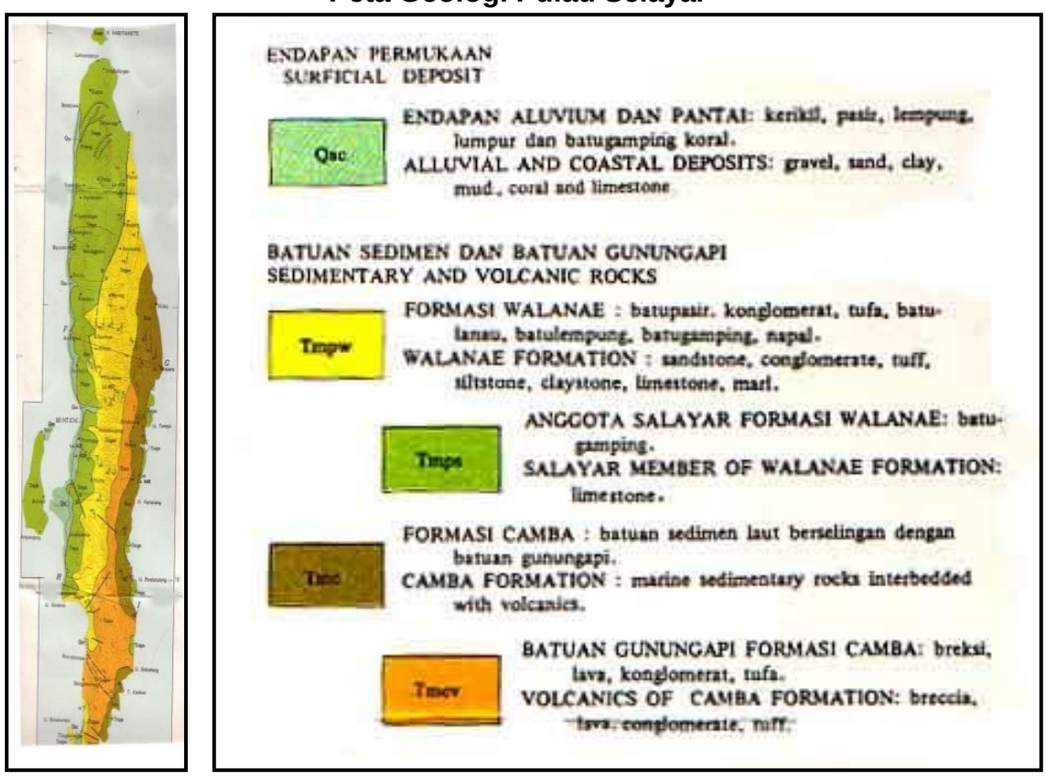
konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut.

Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan.

2.1.3.2.2 Kondisi Geologi

Kondisi lahan Kabupaten Kepulauan Selayar sangat dipengaruhi kondisi geologinya. Secara umum kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar (Gambar 2.3). Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Gambar 2.2.
Peta Geologi Pulau Selayar



Sumber: Perda No 5 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kep. Selayar

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur *Miosen* Tengah hingga *Miosen* Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya

dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan batu gamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batu pasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari *Miosen* Tengah hingga *Pliosen*.

Penyebaran batuan Formasi Walanae memanjang di bagian barat Pulau Selayar dari utara ke selatan. Batu gamping Selayar penyebarannya terutama di bagian utara dan barat, dan terdiri dari batu gamping pejal, batu gamping koral, dan kalkarenit dengan sisipan napal dan batu pasir gampingan.

Umur dari batu gamping Selayar adalah *Miosen* Akhir sampai *Pliosen* Awal. Batuan termuda yang tersingkap di Pulau Selayar adalah endapan aluvial dan terumbu karang. Endapan aluvial yang merupakan sedimen pantai dan terdiri dari hasil rombakan batuan yang tersingkap di daratan, dijumpai di sepanjang pantai barat bagian tengah dan utara pulau. Endapan aluvial terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur dan rombakan terumbu karang. Terumbu karang dijumpai hampir di sepanjang pantai Pulau Selayar, baik di bagian barat maupun bagian timur pulau.

Pada umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus perlapisannya relatif utara-selatan.

2.1.3.2.3 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan *(straight)* rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di Selayar sulit diukur. Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada

wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan *(aresian aquifes)* dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas *(watertable groundwater)* dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 – 6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah termanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang Lembang, Bonto dan sebelah timur Tile-tile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan *catchment area* sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan Utara.

2.1.3.2.4 Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Berikut disajikan jumlah hari hujan/curah hujan di stasiun meteorologi Benteng pada. Tabel berikut.

Tabel 2.2
Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 – 2020

Bulan	2017		2018		2019		2020	
	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
Januari	8	172	8	166	8	110	13	415
Februari	14	311	14	242	9	164	12	364
Maret	13	169	13	123	10	187	7	121
April	11	175	11	170	17	284	7	214
Mei	13	241	13	110	14	141	7	268
Juni	13	430	13	122	4	37	4	106
Juli	-	-	-	148	2	1	-	-
Agustus	10	122	10	-	-	-	2	4
September	2	3	2	-	-	-	5	137
Oktober	6	29,5	6	-	1	0	3	111
November	8	155,5	8	136	4	46	5	82
Desember	14	287	10	114	10	89	16	439
Rata-rata	9,33	174,58	9	110,92	6,58	88,25	6,75	188,42

Sumber Data: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS KKS, 2021)

Berdasarkan pencatatan stasiun meteorologi Benteng pada tahun 2020 secara rata-rata jumlah hari hujan di daerah ini terjadi peningkatan dari tahun lalu yaitu sekitar 6,75 hari per bulan dengan jumlah curah hujan 188,42mm dibanding dengan kondisi klimatologi pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019, jumlah hari hujan rata-rata 6,58 dengan jumlah curah hujan 88,25. Hal ini menandakan terjadinya musim kemarau yang cukup panjang akibat perubahan iklim yang terjadi secara global.

2.1.1.3. Kondisi Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Kebupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka Tahun 2020 adalah 10.503,69 km^2. Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas Kabupaten Kepulauan Selayar secara resmi. Dari total luasan tersebut terbagi dalam golongan penggunaan lahan antara lain Hutan Primer, Hutan Sekunder, Kebun dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui kondisi eksisting dan rencana penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kondisi Eksisting / Rencana Penggunaan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
1	2	3	4
1	Hutan Lindung	Kec. Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur , Pasimarannu	9.591,54
2	Kawasan Resapan Air	Kepulauan Selayar umumnya, dan di bagian Timur ke selatan Pulau Selayar.	1.078,53

No	Kondisi Eksisting / Rencana Penggunaan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
1	2	3	4
3	Sempadan Pantai	Pantai Barat dan Pantai Timur P. Selayar dan pulau-pulau lainnya	5.079,15
4	Sempadan Sungai	Bontosikuyu, Bontoharu+Benteng, Bontomanai, Buki, Bontomatene dan Pasimasunggu Timur	92,52
5	Sempadan Mata Air	Bontomatene, Buki, Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, dan Pasimarannu	80
6	Taman Nasional Laut Taka Bonerate	Taman Nasional Laut Takabonerate	474.328,81
7	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang	Pantai Barat Selayar dan Pulau-Pulau di Kecamatan Takabonerate, Pasimarannu dan Pasilambena	7.695
8	Kawasan Lindung Geologi		
	a. Kawasan rawan bencana alam geologi	Kawasan rawan abrasi terdapat di Pantai Barat Pulau Selayar;	31.795
	b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.	kawasan sempadan sungai / kawasan hydrologi	64.400
9	Hutan Produksi	Kecamatan Pasimarannu dan Bontosikuyu	10.785,64
10	Kawasan Pertanian		
	a. Pertanian Pangan	Kec. Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur	1.845,11
	b. Lahan Kering	Bontomatene, Buki, Bontomanai, Bontosikuyu dan Bontoharu	8.970,76
	c. Perkebunan	Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, Bontomatene dan Buki	68.994
	d. Agrowisata	Kecamatan Bontomatene	581,3
	e. Peternakan	Ternak besar (Kecamatan Pasimasunggu, Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomatene, dan Bontomanai) dan Ternak Kecil (Kecamatan Bontoharu dan Bontomanai)	10.513,40
	f. Perikanan Budidaya	Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur	836,73
11	Pertambangan	Bontosikuyu dan Bontoharu	7,6
12	Industri Perikanan Terpadu	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	± 51
13	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kecamatan Bontoharu, Buki, Bontomatene, Bontosikuyu	2.056,48
14	Kawasan Industri	Kecamatan Bontomatene dan Bontoharu	2.914,43
15	Permukiman Perkotaan	Benteng, Pamatata, Kayuadi, Bonerate, Batangmata, Baruiya (Buki), Polebungin, Matalalang, Pariangan, Benteng Jampea, Latokdok	3153,13
16	Permukiman Perdesaan	Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasilambena	2020,92

No	Kondisi Eksisting / Rencana Penggunaan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
1	2	3	4
17	Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	Pamatata, Benteng dan Jampea, Pattumbukang, Latokdok, Kayuadi, Bonerate.	250
18	Bandara	Bandara H. Aroepala di Padang dan Rencana pengembangan Bandara Perintis di Takabonerate	195,1042

Secara detail, uraian secara lengkap terkait kondisi eksisting dan atau rencana penggunaan lahan sebagaimana tampak pada tabel 2.3 di atas, dapat dibaca pada sub bab 2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah.

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kondisi keterpisahan tersebut diperparah dengan infrastruktur (aksesibilitas) yang masih terbatas, dan ini sangat berpengaruh terhadap laju pemeratan pembangunan karena transportasi ekonomi tidak efisien. Namun demikian dalam perspektif pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kondisi tersebut memiliki nilai strategis.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur NKRI dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensil dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate.

Terkait dengan kondisi tersebut serta dalam rangka pemerataan pembangunan KTI, kawasan utara Pulau Selayar dinilai memiliki peranan penting dalam mentransformasikan Kabupaten Kepulauan Selayar, dari salah satu daerah tertinggal di KTI menjadi daerah yang maju dan mandiri. Keadaan tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan kawasan utara Pulau Selayar sebagai Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang

lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;
c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

a. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
b. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
c. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Secara lebih spesifik terkait pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu, pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, pada Paragraf 10 Zona Industri Pasal 23 angka (2) hufuf b disebutkan KPU-ID-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-ID-PI-01. Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8/Q.02/PTSP/2019 tentang Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, mengizinkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu dengan luas kawasan 51 Ha, dan lokasi kawasan di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebelumnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 590/XI/Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sekitar 51 Ha (Lima

puluh satu hektar) dengan titik koordinat pada posisi S : 06 derajat 24’04.9” dan 120 derajat 29’24,9”.

Sehingga atas dasar arahan pengembangan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032, maupun Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 590/XI/Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8/Q.02/PTSP/2019 tentang Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Puau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 maka ditetapkan kembali 3 agenda strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung dan sekitarnya Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Taka Bonerate;
b. Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung Utara Pulau Selayar ; dan
c. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar;

Kawasan Pengembangan tersebut sebagai bentuk persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara umum. Pengembangan kawasan ini sebagai implikasi kebijakan Pemerintah melalui Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Inpres No.5/2008) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendagri No.19/2008) untuk percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat transaksi ekonomi terutama dalam meningkatkan arus barang dan jasa adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut di atas. Kawasan utara pulau Selayar sebagai Kawasan Bandar Niaga KTI pada hakikatnya akan berfungsi seperti ”Batam”-nya KTI agar masalah riil saat ini yakni minimnya pasokan barang yang berimbas kepada kenaikan harga dan inflasi yang penyebab utamanya adalah sistem logistik yang tidak efektif dan efisien di KTI dapat segera teratasi.

Permasalahan-permasalahan pada distribusi pupuk, BBM, beras, gula, dan logistik PEMILU adalah beberapa contoh persoalan distribusi barang tingkat domestik yang sering merepotkan pemerintah, yang tentunya menimbulkan persoalan sosial-ekonomi di KTI. Sistem distribusi logistik yang tidak efisien tercermin dari capaian sasaran yang hanya mencapai 14,08% dari biaya produksi yang mayoritas disebabkan tidak meratanya pembangunan industri di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan pokok pangan KTI masih dipasok dari Surabaya, sedangkan kebutuhan BBM KTI masih dipasok dari Balikpapan. Dengan contoh kasus tersebut maka peningkatan efisiensi biaya produksi menjadi suatu keharusan, dan ini hanya dapat dicapai dengan desentralisasi pembangunan di luar Pulau Jawa terutama di KTI yang saat ini merupakan daerah tertinggal di Indonesia. Daerah yang akan dikembangkan sebaiknya disyaratkan mempunyai potensi menyediakan bahan baku untuk industri yang hasilnya mempunyai daya saing dan berorintasi ekspor.

Kebijakan Pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI adalah sangat tepat mengingat pola pembangunan selama ini menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan pendapatan bagi daerah-daerah tertinggal yang berakibat meningkatkan rasa ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap Pemerintah, yang pada gilirannya mengganggu keutuhan NKRI. Kesenjangan kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan di KTI merupakan ironi karena disisi lain KTI memiliki kekayaan SDA yang berlimpah, baik sumberdaya terbarukan maupun nir-terbarukan.

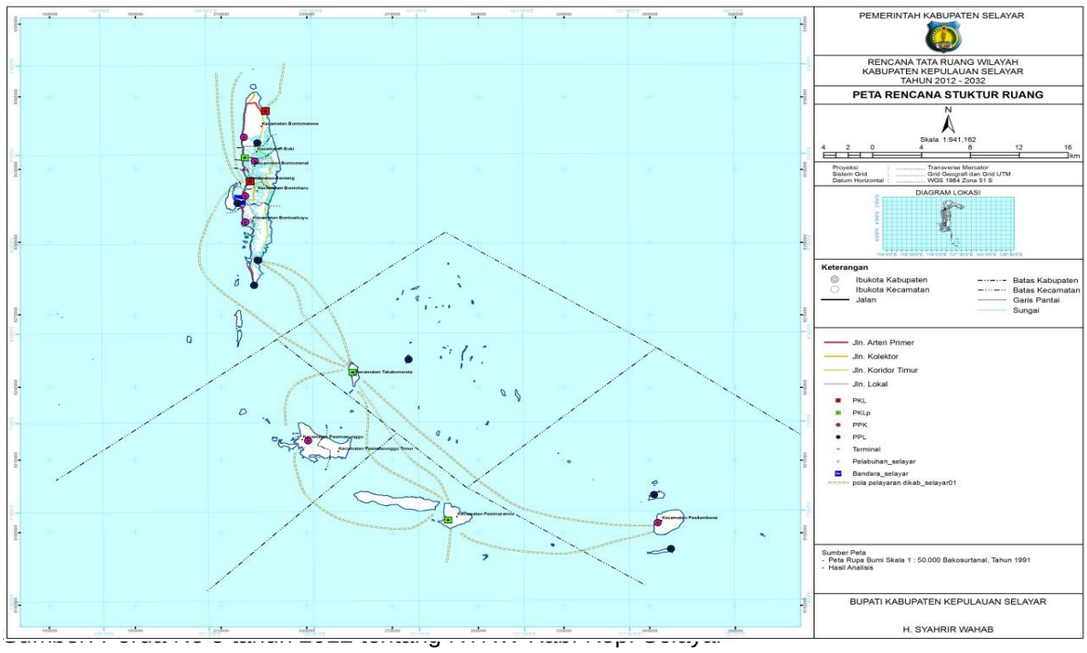
Dalam upaya pemerataan pembangunan agar KTI dapat sejajar dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, maka diperlukan langkah nyata yang terkoordinasi dengan baik agar percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI dapat segera terwujud dengan pemanfaatan sebesar-besarnya keunggulan komparatif yang ada. Mengingat di kawasan utara Pulau Selayar juga merupakan kawasan sumberdaya minyak, maka pembangunan Industri Perminyakan Terpadu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fungsionalisasi kawasan bandar niaga KTI seperti yang diarahkan dalam Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Selayar) pada tahun 2009. Atas hal tersebut maka pembentukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk kawasan (areal) industri perminyakan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam mempercepat pencapaian target yang telah ditentukan dari kajian tersebut.

2.1.1.4.1 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibangun dengan

beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem perkotaan, rencanan pengembangan sistem pedesaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

Gambar 2.3
Peta Struktur Ruang Kabupaten kepulauan Selayar



Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru.

Untuk mendukung fungsi PKL, di Kabupaten Kepulauan Selayar dikembangkan sejumlah PPK yang skala pelayanannya mencakup satu kecamatan atau beberapa desa. PPK yang dimaksud adalah Matalalang, Polebungin, Pariangan, Batangmata, Buki, Ujung Jampea dan Latokdok. Ketujuh PPK ini adalah ibukota kecamatan yang ada dalam wilayah pelayanan PKL Benteng dan Pamatata serta PKLp Bonerate dan Kayuadi.

Pusat kegiatan dalam hirarki terendah yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah PPL yang memiliki skala pelayanan desa atau beberapa

beberapa kegiatan antardesa. PPL yang dimaksud adalah Padang, Barugaiya, Appatanah, Pattumbukang, Jammeng, Onto di P. Selayar, Jinato, Tambuna, Rajuni, Karumpa, dan Pulo Madu di Kecamantan Takabonerate dan Pasilambena. Penetapan PPL ini dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan PPK.

2.1.1.4.2 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSP dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

(1) kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ;
(2) kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ;
(3) kawasan wisata bahari Takabonerate yang merupakan KSN dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(4) Kawasan pengembangan budidaya alternatif Komuditas Kelapa, Jambu mete, Kakao, Kenari dan Vanili. (KSP)

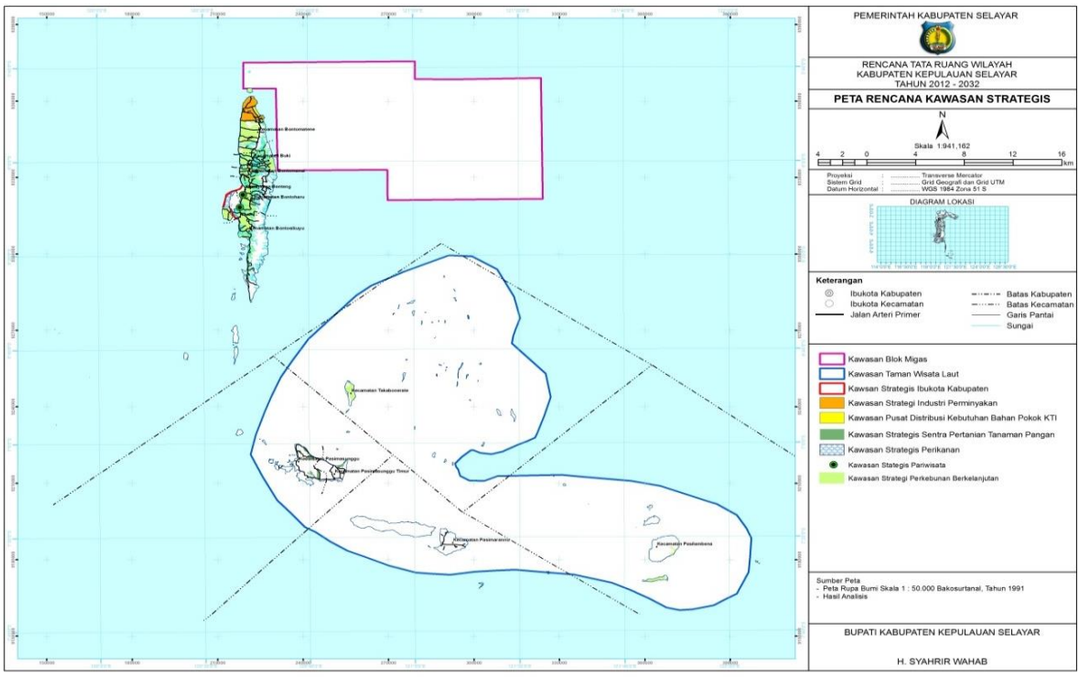
Berdasarkan arahan kebijakan dan hasil analisis yang dilakukan serta dinamika pembangunan yang terjadi menuntut adanya kawasan-kawasan pengembangan baru yang dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan wilayah kabupaten di masa mendatang. Dengan memperhitungkan kajian kualitatif dan kuantitaf terhadap aspek sosial, ekonomi dan fisik wilayah, maka Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang dikembangkan harus mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kegiatan sektoral yang diandalkan di wilayan ini, antara lain:

- pengembangan potensi kelautan/maritim,
- pengembangan potensi perikanan,
- pengembangan potensi agroindustri (tanaman pangan dan perkebunan),
- pengembangan industri hilir,
- pengembangan kegiatan pariwisata.

Memperhatikan kepentingan sektoral tersebut di atas, maka kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi serta dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, yaitu :

a. kawasan yang diprioritaskan untuk industri perminyakan di Kecamatan Bontomatene (KSK),
b. kawasan yang diprioritaskan untuk sentra kegiatan pertanian pangan di Jampea (KSK), serta
c. Kawasan Kawasan Budidaya Ikan Karang di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate. (KSK)
d. Kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan Bontoharu (KSK)
e. Kawasan Perkotaan Kayuadi di kecamatan Takabonerate dan Perkotaan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu,(KSK)

Gambar 2.4
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: Perda No 5 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kep. Selayar

2.1.1.4.3 Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Kawasan pertanian pangan terdiri atas sawah lahan basah dan lahan kering serta palawija dan hortikultura. Fungsi kawasan peruntukan pertanian yaitu menghasilkan bahan pangan, daerah resapan air hujan, dan sumber mata pencaharian penduduk bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis kemampuan lahan Pulau Selayar dan Jampea dijadikan kawasan pengembangan padi sawah hingga mencapai luas kurang lebih 4.057,18 Ha. Sedangkan, Pulau Bonerate dan P. Kayuadi serta Pulau Lambego dijadikan kawasan pengembangan palawija dan hortikultura sayuran.

Memperhatikan luas daerah/wilayah yang dapat dikembangkan untuk tanaman pangan padi sangat terbatas, untuk itu pengembangan tanaman pangan padi difokuskan pada areal yang sudah ada seperti yang terdapat di Pulau Jampea.

Tanaman palawija yang paling penting untuk dibudidayakan adalah jagung. Lokasi budidaya jagung diarahkan pada beberapa kecamatan di P. Selayar, yaitu : Bontomatene, Buki, Bontomanai, Bontosikuyu dan Bontoharu dengan total luas sekitar 4.429,63 ha.

b. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Jenis tanaman perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Selayar adalah perkebunan kelapa, dan umumnya termasuk perkebunan rakyat yang sudah sejak lama dikembangkan bahkan pertanaman kelapa di Kabupaten Selayar sudah menyatu dengan budaya penduduk Kabupaten Selayar pada umumnya. Untuk itu, tidak mengherankan luasan penyebaran perkebunan kelapa yang terluas di Kabupaten Selayar dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya. Karena pertanaman kelapa sudah membudaya, membuat tanaman ini tetap eksis dan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam, terdapat di Kecamatan Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Buki, Kec. Pasilambena dan Bontomatene;
b. kawasan peruntukan perkebunan jambe mete, terdapat di Kecamatan Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu, Bontomanai dan Bontomatene;
c. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Bontomanai;
d. kawasan peruntukan perkebunan kemiri, terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Bontomanai;
e. kawasan peruntukan perkebunan pala, terdapat di Kecamatan Bontomanai;
f. kawasan peruntukan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Bontomanai, Bontosikuyu dan Bontomatene; dan
g. kawasan peruntukan perkebunan vanili, terdapat di Kecamatan Bontomanai dan Bontosikuyu.
h. Kwasan Perkebunan Melinjo terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Bontomanai

i. Kawasan Perkebunan Jeruk di Kecamatan Bontomatene.

Adapun rencana peruntukan lahan perkebunan ditetapkan pada hampir keseluruhan P. Selayar, yaitu Kecamatan Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, Bontomatene dan Buki dengan luas 29.744,90 ha.

Kawasan Agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 581,3 Ha, terletak disebagian Kecamatan Bontomate'ne, Kawasan agropolitan di putabangun kecamatan bontoharu. dan Kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan ditetapkan di Pulau Jampea.

c. Kawasan Peruntukan Peternakan

Jenis usaha ternak yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar digolongkan atas dua yaitu ternak besar/kecil terdiri atas sapi, kuda, kerbau, kambing, dan domba, sedangkan ternak unggas meliputi ternak ayam buras, ras, dan itik. Sebaran lokasi, pengembangan dan pengusahaan ternak oleh masyarakat lebih banyak dikembangkan di wilayah Kecamatan Pasimasunggu, Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomatene, dan Bontomanai (khusus ternak kambing). Sedangkan, ternak kecil berupa ayam ras, ayam buras, dan itik lebih banyak dikembangkan di Kecamatan Bontoharu dan Bontomanai.

2.1.1.4.4 Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Kawasan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas perikanan darat dan perikanan laut. Kawasan perikanan laut meliputi zona penangkapan di perairan Kepulauan Selayar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Mengingat besarnya potensi perikanan laut di wilayah ini maka kegiatan penangkapan ikan di perairan Kepulauan Selayar perlu didukung oleh fasilitas PPN dan PPI. PPN dikembangkan di Benteng dan PPI di Labuan Beropa dan Latokdok.

Dengan adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berlokasi di Benteng diharapkan dapat menampung semua kegiatan perikanan dengan cakupan pelayanan yang lebih baik dan meluas. Melihat potensi perikanan berdasarkan cakupan wilayah dan sentra-sentra produksi perikanan, maka penting dilakukan pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpul pada sentra-sentra produksi perikanan tersebut, antara lain: pelabuhan perikanan rakyat Labuang Beropa di Kecamatan Pasimasunggu dan di Latokdok yang berfungsi membantu Pelabuhan Perikanan Nusantara Benteng. Kawasan penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan di perairan laut P. Jampea, P. Bonerate, P. Lambego (Kalao) dan P. Kalaotoa.

Kegiatan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas kegiatan budidaya laut dan kegiatan budidaya air payau (Tambak). Lokasi pengembangan yang potensial untuk budidaya air payau berada di bagian pantai Pulau Selayar, Pulau Jampea, Pulau Kalao, Pulau Bonerate dan Pulau Kalaotoa. Jenis komoditas unggulan perikanan budidaya yaitu ikan kerapu, udang, bandeng, dan rumput laut. Lokasi potensial pengembangan budidaya ikan kerapu berada di seluruh perairan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar tersebar di Kecamatan Bontomatene, Bontosikuyu, Bontoharu, Pasimarannu, Pasimasunggu dan Pasumasunggu Timur P. Tanajampea. Budidaya rumput laut dikembangkan di Kecamatan Bontomatene, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur. Budidaya bandeng dikembangkan di Kecamatan Bontosikuyu, Bontoharu, Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur. Budidaya udang dikembangkan di Kecamatan Bontosikuyu, Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur. Area penggaraman berupa penyediaan sumber air untuk penggaraman di Bontoharu.

2.1.1.4.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar diarahkan dengan pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate dsk, Perairan Pulau Tambolongan, Polassi dan Bahuluang diperuntukan kawasan wisata bahari. Sedangkan, kawasan wisata luar Taman Nasional Taka Bonerate dikembangkan untuk wisata budaya yaitu Gong Nekara di Kelurahan Bontobangun, Meriam Kuno dan jangkar raksasa di Desa Bontosunggu, Mesjid Tua Gantarang di Dusun Gantarang. Wisata bahari di luar kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yaitu Pantai Talloya di Desa Bungaya, Pantai Ngapolohe di Desa Boneamakmur, Pantai Babaere di Desa Bontomarannu, Pantai Liang Tarrusu dan Pantai Jeneiya di Desa Bontoburusu, Pantai Baloiya di Desa Patilereng, Pantai Patumbukang dan Appatanah di Desa Lowa.

Selain itu, terdapat wisata pegunungan dan tirta, yaitu Air Terjun Suttia di Desa Boneamakmur, Air Terjun Kalambu di Kelurahan Bontobangun, dan Bukit Pusara yang terletak di Desa Boneamakmur.

Berdasarkan pertimbangan aksesibilitas jalur jalan utama dan daya tarik wisata unggulan yang membentuk tema produk wisata, maka kawasan pengembangan pariwisata (KPP) Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi atas empat kawasan wisata yang masing-masing memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda. Keempat KPP tersebut adalah:

1. **KPP 1** meliputi P. Selayar (Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai, Bontoharu, Benteng dan Bontosikuyu) ;
2. **KPP 2** meliputi Kecamatan Takabonerate ;
3. **KPP 3** meliputi Kecamatan Pasilambena
4. **KPP 4** meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Pasimarannu.

Berdasarkan karakteristik obyek dan daya tarik wisata yang dimilikinya; KPP 1 dikembangkan sebagai pusat unggulan wisata alam, budaya masyarakat kepulauan dan minat khusus; KPP 2 diposisikan sebagai pusat unggulan wisata bahari; KPP 3 dan KPP 4 diposisikan sebagai kawasan wisata dengan potensi wisata alam (pantai dan agrowisata), wisata sejarah dan budaya.

2.1.1.4.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

Pada hakikatnya, KPP mencerminkan sebaran potensi bahan tambang di bawah permukaan tanah yang diproyeksikan ke atas permukaan tanah, sehingga dapat dipahami peruntukan lahan yang terletak di atasnya, baik berupa kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat kawasan potensi tambang non-logam (batu dan pasir) yang tersebar di Kecamatan Bontosikuyu. Saat ini, sebaran wilayah yang potensial adalah tambang galian C . Endapan pasir, kerikil dan bongkahan batu yang dapat digunakan untuk bahan bangunan umumnya dijumpai di beberapa aliran sungai yang berasal dari daerah yang ditempati oleh endapan hasil gunung api dan intrusi beku dan menempati wilayah Selatan Kabupaten Selayar, yakni di dua kecamatan tersebut di atas, serta tambang mineral logam dasar seperti seng dan pasir besi yang terkandung di daerah pulau jampea yang cukup prospek untuk dikembangkan.

2.1.1.4.7 Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Sektor perindustrian sebagai sektor usaha ekonomi potensial untuk dikembangkan, dimana sektor ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi

serta dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya.

Sedangkan, sebaran industri lebih banyak berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bontosikuyu dan Bontomanai. Sebaran industri menurut investasi jenis industri di Kabupaten Selayar per kecamatan terbanyak di Kecamatan Takabonerate, Pasimasunggu, Benteng. Namun, ditinjau dari jumlah jenis industri yang tersebar, jumlah terbanyak di Kecamatan Bontomanai dan Bontosikuyu. Untuk itu, pengembangan kegiatan industri yang ada diprioritaskan di Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, Benteng dan Bontosikuyu.

Selain mengembangkan industri yang sudah ada, di Kabupaten Kepulauan Selayar direncanakan juga pengembangan industri peminyakan (kilang minyak) di Kecamatan Bontomatene bagian utara dan Industri Perikanan Terpadu di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu. Sentra industri kecil dan menengah berupa sentra industri kecil tersebar di seluruh lingkungan permukiman Kecamatan.

2.1.1.4.8 Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial dan sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

a. Kawasan Permukiman Perkotaan

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ciri utama wilayah ini adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, serta jumlah penduduk yang relatif padat tetapi dengan luasan lahan yang relatif kecil. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan di Benteng dan ibukota kecamatan lainnya dengan luas keseluruhan sekitar 9.961 ha.

b. Kawasan Permukiman Perdesaan

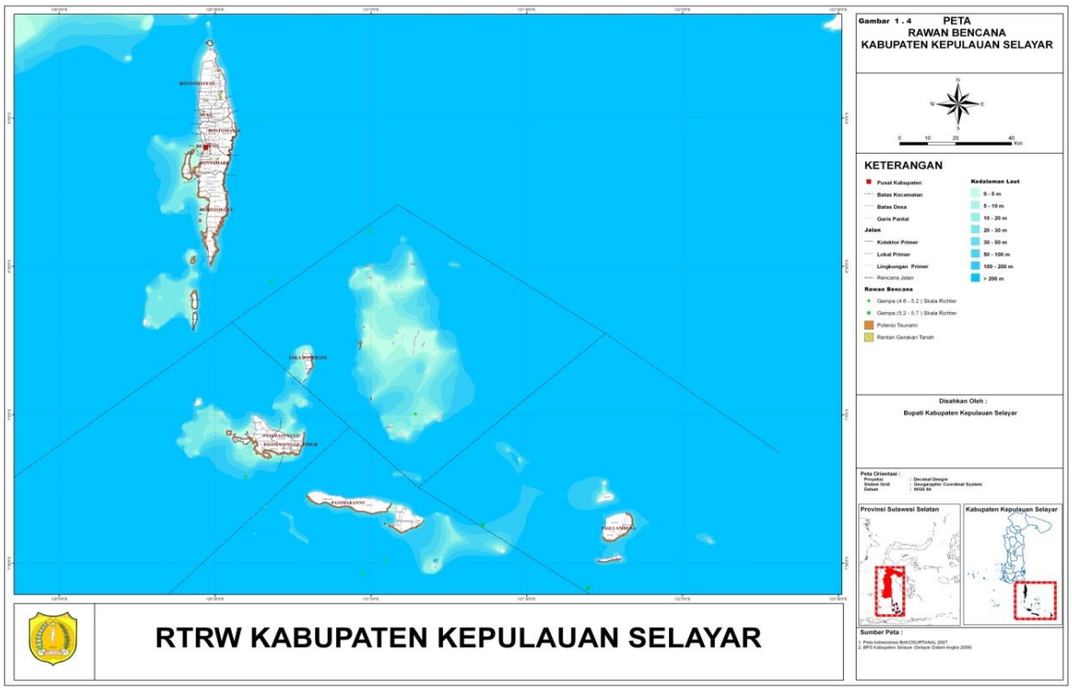
Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan lokasinya menyebar dalam bentuk pusat-pusat permukiman desa. Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan di pusat-pusat desa dengan total luas 11.276 ha.

2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana

Sebagai Kabupaten Kepulauan yang secara geografis terletak di ujung selatan jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (130 Pulau), Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan pantai timur serta 26 Pulau berpenghuni pada 5 (Lima) Kecamatan yang berada di Kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut.

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kab. Kepulauan Selayar



Sumber: Perda No 5 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kep. Selayar

Untuk mengetahui kejadian bencana yang terjadi 5 tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Selayar, luas wilayah yang terdampak. Serta lokasi rekolasi yang disiapkan jika terjadi bencana, berikut disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020

NO	JENIS BENCANA	LOKASI KEJADIAN	JUMLAH KORBAN BENCANA	LUAS WILAYAH TERDAMPAK
1	Longsor	Kecamtan Bontosikuyu	-	19,25 Km
2	Kebakaran	Kecamatan Bontomanai	1	200 M
3	Angin Kencang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontomatene	1	100 M
4	Ombak Besar Disertai Angin Kencang Membuat Kapal Tenggelam	Kecamatan Bontosikuyu	4	800 M
5	Angin Kencang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontomanai	1	100 M
6	Angin Kencang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontoharu	1	200 M
7	Angin Kencang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontoharu	1	100 M
8	Angin Kencang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	50 M
9	Angin Kencang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	1	200 M
10	Angin Kencang Merobohkan Pohon	Kecamatan Benteng	-	50 M
11	Angin Kencang	Kecamatan Pasimasunggu Timur	6	800 M
12	Angin Kencang	Kecamatan Pasimasunggu Timur	2	300 M
13	Angin Kencang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	50 M
14	Angin Kencang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menimpa Bangunan Sekolah	Kecamatan Bontomanai	-	100 M
15	Angin Kencang Merobohkan Pohon Cemara	Kecamatan Benteng	-	50 M
16	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	50 M
17	Angin Kencang	Kecamatan Bontomanai	4	300 M
18	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontomanai	-	50 M
19	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontomanai	1	100 M
20	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontomanai	-	50 M
21	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	-	100 M
22	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	50 M
23	Angin Kencang Dan Ombak Besar	Kecamatan Bontoharu	1	100 M
24	Angin Kencang	Kecamatan Bontoharu	-	70 M
25	Angin Kencang	Kecamatan Benteng	1	50 M
26	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Benteng	-	50 M



NO	JENIS BENCANA	LOKASI KEJADIAN	JUMLAH KORBAN BENCANA	LUAS WILAYAH TERDAMPAK
27	Angin Kencang	Kecamatan Benteng	1	70 M
28	Longsor	Kecamatan Bontosikuyu	-	10 Km
29	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontomanai	-	100 M
30	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontoharu	1	150 M
31	Kebakaran	Kecamatan Bontomatene	1	250 Km
33	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Cemara Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	50 M
34	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa	Kecamatan Bontomanai	-	50 M
35	Gempa Bumi Berkekuatan 4,3 Skala Richter	Kecamatan Bontomatene	-	159,92 Km
36	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	1	50 M
37	Kebakaran	Kecamatan Bontoharu	1	50 M
38	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Benteng	-	60 M
39	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Pasimasunggu	1	50 M
40	Angin Kencang Dan Ombak Besar	Kecamatan Bontoharu	2	100 M
41	Angin Puting Beliung	Kecamatan Benteng	-	50 M
42	Gempa Bumi Berkekuatan 4,5 Skala Richter	Kecamatan Benteng	-	7,12 Km
43	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontoharu	-	50 M
44	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Benteng	-	50 M
45	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontomatene	1	100 M
46	Gempa Bumi Berkekuatan 4,5 Skala Richter	Kecamatan Benteng	-	7,12 Km
47	Kebakaran	Kecamatan Bontomatene	1	100 M
48	Kebakaran	Kecamatan Bontomatene	5	10,05 Km
49	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	50 M
50	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	1	100 M
51	Hujan Deras Disertai Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	50 M
52	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Benteng	-	50 M
53	Kebakaran	Kecamatan Benteng	1	100 M
54	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Bontomatene	-	50 M
55	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Bontomanai	-	50 M
56	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontomanai	1	50 M

NO	JENIS BENCANA	LOKASI KEJADIAN	JUMLAH KORBAN BENCANA	LUAS WILAYAH TERDAMPAK
57	Banjir	Kecamatan Bontoharu	1	100 M
58	Banjir	Kecamatan Bontoharu	-	50 M
59	Banjir	Kecamatan Benteng	-	30 M
60	Banjir	Kecamatan Bontoharu	-	50 M
61	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontosikuyu	-	50 M
62	Banjir	Kecamatan Benteng	-	30 M
63	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	1	50 M
64	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	1	50 M
65	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	30 M
66	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontoharu	1	50 M
67	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontomatene	-	50 M
68	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontomatene	-	50 M
69	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	1	50 M
70	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Benteng	-	30 M
71	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontomanai	-	30 M
72	Angin Kencang	Kecamatan Takabonerate	13	8,48 Km
73	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontosikuyu	-	30 M
74	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontosikuyu	-	30 M
75	Angin Kencang Dan Ombak Besar	Kecamatan Benteng	7	300 Km
76	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontomanai	1	50 M
77	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontoharu	-	30 M
78	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	-	30 M
79	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Benteng	-	30 M
80	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Bontomanai	-	30 M
81	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan	Kecamatan Benteng	-	30 M

NO	JENIS BENCANA	LOKASI KEJADIAN	JUMLAH KORBAN BENCANA	LUAS WILAYAH TERDAMPAK
	Menghalangi Jalan			
82	Kebakaran	Kecamatan Bontosikuyu	1	200 M
83	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Bontoharu	-	30 M
84	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Bontosikuyu	-	30 M
85	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon	Kecamatan Bontoharu	-	30 M
86	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Cemara Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Benteng	-	30 M
87	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontosikuyu	-	30 M
88	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Buki	1	50 M
89	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Cemara	Kecamatan Benteng	-	30 M
90	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Dan Menimpa Rumah	Kecamatan Buki	1	50 M
91	Kebakaran	Kecamatan Bontosikuyu	1	200 M
92	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kelapa	Kecamatan Benteng	-	30 M
93	Angin Kencang Dan Abrasi Pantai Yang Merobohkan Pohon Kelapa	Kecamatan Buki	-	30 M
94	Angin Kencang Yang Merobohkan Pohon Kaju Jaha Dan Menghalangi Jalan	Kecamatan Bontosikuyu	-	30 M

Sumber : BPBD Kab. Kep. Selayar, 2021

2.1.1.6. Aspek Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepuluan Selayar Tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 berjumlah 137.071 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 24.849 jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatiff rendah dan berfluktuasi. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 adalah 131.605 jiwa, kemudian pada tahun 2017 sebesar 133 003 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 135.642 jiwa, dan pada tahu 2020 berjumlah 137.071 Jiwa atau tumbuh rata-rata sebesar 1,00% pertahun dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Benteng yaitu sebesar 24.849 jiwa, sedang yang paling rendah adalah di Kecamatan Buki. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020

KECAMATAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pasimarannu	9 141	9 281	9 310	9 367	10 492
Pasilambena	7 164	7 602	7 700	7 795	8 005
Pasimasunggu	7 987	8 392	8 483	8 585	8 638
Taka bonerate	12 922	13 643	13 804	13 960	13 484
Pasimasunggu Timur	7 429	7 515	7 536	7 577	7 866
Bontosikuyu	14 754	15 170	15 265	15 356	15 303
Bontoharu	12 959	13 471	13 566	13 683	14 608
Benteng	23 206	25 627	26 155	26 701	24 849
Bontomanai	12 514	12 768	12 829	12 889	13 703
Bontomatene	12 867	13 123	13 186	13 248	13 381
Buki	6 277	6 411	6 436	6 463	6 742
Kepulauan selayar	131 605	133 003	134 280	135 642	137 071

Sumber Data: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2021

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 101 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan. Kepadatan penduduk di Kepulauan Selayar masih belum merata. Kecamatan Benteng yang memiliki luas wilayah sebesar 24,63 km2 dihuni oleh 24.849 jiwa penduduk. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng pada tahun 2015 mencapai 1.009 jiwa/km2. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun Terakhir

Kecamatan	BANYAKNYA			RATA-RATA		
	Desa	Rumah Tangga	Penduduk	Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk per km^2	Anggota Rumah Tangga
Pasimarannu	8	3 452	10 492	1 312	54	3
Pasilambena	6	2 345	8 005	1 334	70	3
Pasimasunggu	7	2 715	8 638	1 234	66	3
Taka bonerate	9	3 972	13 484	1 498	274	3
Pasimasunggu Timur	6	2 469	7 866	1 311	117	3
Bontosikuyu	12	4 970	15 303	1 275	62	3
Bontoharu	8	4 347	14 608	1 826	114	3
Benteng	3	7 346	24 849	8 283	1 009	3
Bontomanai	10	4 332	13 703	1 370	100	3
Bontomatene	12	4 678	13 381	1 115	69	3
Buki	7	2 178	6 742	963	99	3
2020	88	42 808	137 071	1 558	101	3
2019	88	36 581	135 624	1 541	100	3
2018	88	33 713	134 280	1 525	99	4
2017	88	33 392	133 003	1 511	92	4
2016	88	33 041	131 605	1 495	97	4

Sumber Data: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2021

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar masih mempunyai struktur penduduk sedang. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 32.356 jiwa, terdiri dari 16.577 laki-laki dan 15.779 perempuan dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia 15-64 tahun berjumlah 93.749 jiwa (terdiri dari 45.989 laki-laki dan 47.760 perempuan) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 10.966 jiwa (terdiri dari 4.696 laki-laki dan 6.270 perempuan). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabelndan grafik berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Sex Rasio
1	00-04	4.976	4.688	9.664	106,14
2	05-09	5.178	4.876	10.054	106,19
3	10-14	6.423	6.215	12.638	103,35
4	15-19	6.961	6.580	13.541	105,79
5	20-24	5.780	5.548	11.328	104,18
6	25-29	5.208	5.111	10.319	101,90
7	30-34	5.214	5.489	10.703	94,99
8	35-39	5.049	5.390	10.439	93,67
9	40-44	4.537	4.765	9.302	95,22
10	45-49	4.181	4.337	8.518	96,40
11	50-54	3.424	3.975	7.399	86,14
12	55-59	3.137	3.471	6.608	90,38
13	60-64	2.498	3.094	5.592	80,74
14	65-69	1.944	2.280	4.224	85,26
15	70-74	1.328	1.783	3.111	74,48
16	>=75	1.424	2.207	3.631	64,52
JUMLAH (KAB/KOTA)		**67.262**	**69.809**	**137.071**	**96,35**

Sumber Data: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2021

Data sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Sensus penduduk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 96,35. Sex ratio terbesar terjadi di kecamatan Bontoharu yakni sebesar 99,95, sedangkan yang terkecil terjadi di kecamatan Bontomatene sebesar 92,87 Informasi tentang jumlah penduduk per jenis kelamin dan sex ratio diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2020

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasimarannu	5 170	5 322	10 492	97,14
2	Pasilambena	3 953	4 052	8 005	97,56
3	Pasimasunggu	4 226	4 412	8 638	95,78
4	Takabonerate	6 681	6 803	13 484	98,21
5	Pasimasunggu Timur	3 845	4 021	7 866	95,62
6	Bontosikuyu	7 507	7 796	15 303	96,29
7	Bontoharu	7 302	7 306	14 608	99,95
8	Benteng	12 013	12 836	24 849	93,59
9	Bontomanai	6 802	6 901	13 703	98,57
10	Bontomatene	6 443	6 938	13 381	92,87
11	Buki	3 320	3 422	6 742	97,02
	2020	67 262	69 809	137 071	96,35
	2019	68 332	71 138	139.470	96,06
	2018	64 672	69 608	134 280	92,91
	2017	63 968	69 035	133 003	92.66
	2016	63 292	68 313	131 605	93

Sumber Data: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Trend pertumbuhan ekonomi tersebut, sejalan dengan perkembangan secara nasional. Pola perkembangan ekonomi nasional juga menunjukkan besaran peningkatan yang menurun antara Tahun 2016-2020.

Memperhatikan lebih jauh pada struktur perekonomian Kepulauan Selayar, berdasarkan Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor primer, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor yang paling besar, pada Tahun 2020 nilai PDRB- ADHK sektor ini sebesar Rp 1.501,5 Miliar. Sektor kedua adalah Konstruksi sebesar Rp. 661,3 Miliar. Sektor ketiga adalah Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor dengan nilai PDRB pada Tahun 2019 sebesar Rp. 324 Miliar. Sektor keempat adalah Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 206,4 Miliar terhadap total PDRB.

Tabel 2.9
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA	Nilai PDRB-ADHK (Rp. Miliar)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 296,94	1 390,77	1 501,9	1 615,6	1 501,5
Pertambangan & Galian	24,42	26,44	27,9	29,1	29,6
Industri Pengolahan	90,95	97,78	99,6	118,7	118,4
Pengadaan Listrik & Gas	4,32	4,58	4,9	5,1	5,5

LAPANGAN USAHA	Nilai PDRB-ADHK (Rp. Miliar)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,78	4,11	4,4	4,9	5,5
Konstruksi	521,08	565,62	624,3	648,3	661,3
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	261,44	273,41	297,7	324,3	323,0
Transportasi dan Pergudangan	68,41	75,39	83,2	95,1	77,1
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,53	7,16	8,5	10,1	8,9
Informasi & Komunikasi	92,46	101,00	110,4	125,3	139,5
Jasa Keuangan & Asuransi	36,49	37,98	40,4	42,9	44,7
Real Estate	49,92	54,01	56,3	58,4	64,5
Jasa Perusahaan	0,49	0,53	0,6	0,6	0,6
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	227,79	240,29	278,1	295,6	306,4
Jasa Pendidikan	173,13	193,69	202,3	218,1	233,9
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	52,89	59,38	64,8	71,6	80,2
Jasa Lainnya	13,69	15,23	17,1	20,9	19,8
Total PDRB	**2 924,72**	**3 147,39**	**3 422,7**	**3 685,74**	**3 620,2**

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Table di atas, terlihat bahwa sekalipun terjadi wabah pandemic covid-19 yang mulai dirasakan sejak triwulan I tahun 2020, namun dampaknya tidak terlalu signifikan memengaruhi aktifitas perekonomian daerah. Hal ini terbukti dari capaian PDRB tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 3,620 trilliun, sedikit menurun jika dibandingkan capaian PDRB tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 3,69 triliun.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi distribusi, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB) Kabupaten Kepulauan Selayar disumbang oleh tiga sektor utama, yaitu sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang pada tahun 2020 menyumbang sekira 42,44 persen terhadap pembentukan PDRB. Disusul sektor konstruksi pada sekira 20,49 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib pada sekira 7,20 persen.

Tabel 2.10
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA	Persentase PDRB-ADHK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,32	45,85	45,17	44,69	42,44
Pertambangan & Galian	1,02	0,95	0,92	0,88	0,93
Industri Pengolahan	2,60	2,60	2,43	2,75	2,81
Pengadaan Listrik & Gas	0,07	0,09	0,08	0,08	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,11

LAPANGAN USAHA	Persentase PDRB-ADHK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Konstruksi	20,49	20,94	21,54	21,28	21,93
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,51	7,46	7,52	7,69	7,81
Transportasi dan Pergudangan	2,37	2,29	2,30	2,43	1,99
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,20	0,20	0,22	0,24	0,22
Informasi & Komunikasi	2,06	2,07	2,06	2,23	2,51
Jasa Keuangan & Asuransi	1,28	1,26	1,26	1,27	1,36
Real Estate	1,43	1,41	1,36	1,30	1,46
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	7,20	6,98	7,46	7,38	7,84
Jasa Pendidikan	5,27	5,64	5,37	5,29	5,81
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,64	1,70	1,72	1,85	2,18
Jasa Lainnya	0,42	0,44	0,48	0,53	0,51
Distribusi PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Pandemic Covid -19 yang melanda dunia, dan dampaknya juga turut mempengaruhi perekonomian, termasuk perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, menjadi factor determinan menurunnya secara signifikan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Mayoritas sector perekonomian daerah mengalami pertumbuhan minus dengan kisaran pada angka 0 hingga -11 persen. Bahkan sektor transportasi dan pergudangan mengalami minus pertumbuhhan sebesar -19 persen.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA	Laju Pertumbuhan PDRB				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,12	7,23	7,99	7,64	-7,12
Pertambangan & Galian	10,17	8,29	5,67	4,27	1,44
Industri Pengolahan	7,06	7,50	1,91	19,09	-0,20
Pengadaan Listrik & Gas	11,71	6,12	6,79	4,18	7,45
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,99	8,58	8,05	9,39	13,46
Konstruksi	10,06	8,55	10,37	3,84	2,01
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	9,93	4,58	8,89	8,94	-0,42
Transportasi dan Pergudangan	9,27	10,20	10,39	14,31	-19,00
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,27	9,71	19,22	17,90	-11,85
Informasi & Komunikasi	8,93	9,24	9,31	13,48	11,33

LAPANGAN USAHA	Laju Pertumbuhan PDRB				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Keuangan & Asuransi	15,19	4,10	6,34	6,12	4,23
Real Estate	7,48	8,19	4,20	3,84	10,32
Jasa Perusahaan	8,15	8,66	10,02	9,10	-10,56
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	-10,68	5,49	15,75	6,29	3,65
Jasa Pendidikan	7,09	11,88	4,46	7,81	7,22
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,07	12,28	9,12	10,51	12,01
Jasa Lainnya	10,16	11,22	12,56	21,80	-4,95
Pertumbuhan PDRB	**7,35**	**7,61**	**8,75**	**7,68**	**-1,78**

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2020

Tabel 2.12
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2020

NO	PDRB	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19 466,02	22 849,29	25 071,79	25 687,94	26 640,43
2	Pertambangan dan Penggalian	4 264,55	4 920,24	5 682,56	4 991,54	6 012,74
3	Industri Pengolahan	12 566,75	13 670,02	14 135,70	15 954,16	15 740,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	49,34	62,85	73,53	75,24	78,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	95,25	102,43	117,99	117,23	125,94
6	Konstruksi	11 221,51	12 334,72	14 975,88	16 184,50	17 072,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11 563,44	12 706,35	16 736,94	16 884,03	16 900,78
8	Transportasi dan Pergudangan	3 857,87	3 955,21	4 933,44	5 219,80	4 945,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 207,07	1 322,56	1 620,33	1 651,13	1 723,63
10	Informasi dan Komunikasi	4 146,92	4 704,74	5 468,10	6 129,72	6 750,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3 382,62	3 680,18	4 448,74	4 322,92	4 885,13
12	Real Estate	3 654,84	3 856,20	4 220,59	4 456,20	4 744,38
13	Jasa Perusahaan	396,44	434,88	514,18	540,36	575,58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 193,99	4 331,79	5 116,55	5 348,14	5 779,14

NO	PDRB	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
15	Jasa Pendidikan	4 538,11	4 943,44	5 918,01	6 271,75	6 818,67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 730,32	1 902,94	2 273,89	2 447,08	2 758,34
17	Jasa Lainnya	1 180,52	1 293,74	1 587,58	1 703,74	1 747,31
Produk Domestik Regional Bruto		87 515,56	97 071,58	115 558,60	117 985,49	123 299,90
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		86 977,35	96 373,04	115 038,25	117 425,52	122 808,63

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2020

Investasi pemerintah daerah yang diharapkan dapat menekan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian daerah, justeru tidak dapat diandalkan, mengingat selama tahun anggaran 2020 terjadi pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah (*refocusing*). Belanja pemerintah daerah untuk sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja lokal tidak dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Tabel 2.13
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Pertumbuhan Ekonomi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar	7,35	7,61	8,75	7,68	-1,78
2	Sulawesi Selatan	7.42	7.21	7.07	6.92	-0,70
3	Nasional	5.09	5.07	5.17	5.02	-2,07

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.2.1.2. Inflasi

Inflasi tahunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 adalah sebesar 1,85 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan 1,54 persen dan Nasional 1,23 persen.

Tabel 2.14
Perkembangan Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Inflasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar	1,48	4,66	3,85	2,25	1,85
2	Sulawesi Selatan	2,94	4,44	3,50	4,97	1,54
3	Nasional	3,02	3,61	3,13	5,28	1,23

Sumber : BPS Bulukumba, Tahun 2021

Inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar selain dipengaruhi oleh faktor distribusi barang dan jasa, juga dipengaruhi oleh faktor konsumsi masyarakat terhadap bahan/barang non pangan antara lain : rokok, pakaian, peralatan elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya.

2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah total PDRB dibagi dengan total penduduk pertengahan tahun pada suatu daerah untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk.

Angka PDBR per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2019 dimana keadaan PDRB per Kapita tahun 2016 yaitu 36.6 Juta, hingga pada tahun 2019 terus mengalami tren peningkatan yang mencapai 47.5 Juta. Namun jika dibandingkan nilai Kepulauan Selayar masih berada dibawah rata-rata nilai Sulawesi Selatan dan nasional.

Tabel 2.15
Perkembangan PDRB/Kapita (ADHB) Kabupaten Kepuluan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Perkembangan PDRB/Kapita (ADHB)	Tahun (Rp. Juta)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepulauan Selayar	35,60	39,67	43,57	47,52	46,71
2.	Sulawesi Selatan	35,34	39,17	43,68	48,21	56,51
3.	Nasional	41,80	45,12	47,96	51,89	56,9

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Penggunaan indikator pendapatan perkapita tentu tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesejahteraan penduduk, karena pada indikator ini tidak membedakan distribusi pendapatan menurut kelompok pendapatan tertentu, namun secara luas membandingkan antara besar pendapatan total dengan total jumlah penduduk. Lebih lanjut indikasi pendapatan perkapita harus disandingkan dengan keadaan inflasi, gini ratio dan beberapa indikasi kesenjangan pendapatan maupun pengeluaran termasuk perkembangan harga-harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok.

2.1.2.1.4. Indeks Gini Ratio

Ketimpangan pembangunan merupakan salah satu prime priority pembangunan saat ini. Mengacu pada data statistik yang ada ketimpangan pembangunan yang digambarkan dari nilai Gini Ratio (GR) memperlihatkan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi Kepulauan Selayar selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami naik turun. Ini dapat dibuktikan dari angka-angka statistik, yaitu:

a. Gini Ratio mengalami perubahan dari 0,338 (2018) menjadi 0.301 (2019).
b. Selanjutnya Gini Ratio pada tahun 2020 (0,357) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,301.

Tabel 2.16
Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Indeks Gini Ratio	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar	0.343	0.331	0.338	0.301	0,357
2	Sulawesi Selatan	0.400	0.429	0.388	0.389	0,389
3	Nasional	0.394	0.391	0.384	0.382	0,381

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami naik turun. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin sebesar 13,11 persen, Angka tersebut meningkat menjadi 13,28 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka tersebut menurun menjadi 13,13 persen, pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 12,83 persen dan tahun 2020 terus menurun menjadi 12,48 persen. Jika dibandingkan dengan angka Sulawesi Selatan dan Nasional, persentase penduduk miskin di Kepulauan Selayar lebih tinggi.

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Persentase Penduduk Miskin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Selayar	13,11	13,28	13,13	12,83	12,48
Sulawesi Selatan	9,40	9,38	9,06	8,96	8,99
Nasional	10,86	10,64	9,82	9,41	10,19

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Dalam rentang waktu 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjalankan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mengatasi kemiskinan. Antara lain, misalnya : (a) Bantuan Alat Pertukangan; (b) Bantuan Alat Perbengkelan; (c) Bantuan Mesin Jahit; (d) Bantuan Alat Tangkap Perikanan; (e) Bantuan Alat Pertanian; (f) Bantuan Bibit Pertanian; (g) Bantuan Bibit Ternak; (h) Bantuan Biaya Hidup bagi Keluarga Fakir Miskin, Orang Tua Jompo, Anak Terlantar, Orang Cacat. Sekalipun disadari, bahwa dampak dari pemberian berbagai bantuan dimaksud tidak langsung dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, namun diyakini, dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, dampak dari adanya kebijakan pengentasan kemiskinan ini terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar akan dapat dirasakan.

Tabel 2.18
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Penduduk Miskin	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kabupaten	Ribu Jw	17,21	17,62	17,59	17,36	17,04
	Persentase Kabupaten	%	13,11	13,28	13,13	12,83	12,48
2	Jumlah Provinsi	Ribu Jw	796,81	825,97	779,64	759,58	800,24
	Persentase Provinsi	%	9,24	9,48	8,87	8,56	8,99

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukan persentase penduduk miskin yang berada diatas rata-rata penduduk miskin sulawesi selatan dimana pada tahun 2020 sebesar 12.48 sedangakan Provinsi Sulawesi Selatan 8,99 persen.

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 angka IPM Kepulauan Selayar mengalami peningkatan sebesar 2,43 point, pada tahun 2020.

Angka IPM tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar relatif rendah jika dibandingkan dengan Sulawesi Selatan dan Nasional, Penyebab terjadinya variasi angka tersebut disebabkan sebahagian oleh kondisi sosial, ekonomi, kultural serta geografis yang berpengaruh pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan/daya beli.

Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten kepulauan Selayar
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Selayar	64.95	65.39	66,04	66.91	67,38
Sulawesi Selatan	69.76	70.34	70,90	71.66	71,93
Nasional	70.18	70.81	71,39	71.92	71,94

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Indeks Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat IPM, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu : (a) Umur panjang dan Hidup Sehat; (b) Pengetahuan; (c) Standar Hidup Layak.

2.1.2.2.7. Angka melek huruf

Angka melek huruf Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 sebesar 91.47 persen kemudian pada tahun 2020 berada pada angka 93,95 persen.

Tabel 2.20
Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	%	91.47	96	87.88	92,90	93,95

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Selayar Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat melek huruf di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah sudahefektif dan atau program keaksaraan yang dijalankan telah memungkinkan sebagian besar penduduk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

2.1.2.2.8. Angka rata-rata lama sekolah

Pada Tabel Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya, tercatat pada tahun 2016 angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah 7,17 persen dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 9,86 persen.

Tabel 2.21
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kepulauan Selayar	Tahun	7,17	9,73	9,26	9,78	9,86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dengan demikian, tabel 2.17 diatas memberikan gambaran bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,86 tahun atau setara dengan kelas X pada sekolah menengah atas. Penyebab hal ini diidentifikasi bahwa penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi kebanyakan merantau untuk bekerja kemudian menetap di daerah lain.

2.1.2.2.9. Angka usia harapan hidup

Salah satu dampak pembangunan kesehatan adalah meningkatnya umur harapan hidup. Meningkatnya umur harapan hidup menunjukkan pula perbaikan kesehatan dan perbaikan ekonomi sosial masyarakat. Data Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar terakhir memperlihatkan Umur Harapan Hidup (UHH) di

Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 mencapai angka 68,46 tahun. Secara terinci peningkatan Angka Usia Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Usia Harapan Hidup	Peningkatan/ Penurunan	Naik/Turun
2016	67,76 tahun	-	-
2017	67,82 tahun	0,06 tahun	Naik
2018	68,03 tahun	0,21 tahun	Naik
2019	68,34 tahun	0,31 tahun	Naik
2020	68,46 tahun	0,12 tahun	Naik

Sumber: Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat banyak hal yang mempengaruhi angka harapan hidup berdasarkan jumlah bayi lahir dan meninggal dalam periode tertentu. Berikut beberapa faktor di antaranya adalah:

- Harapan subjektif: keinginan yang dimiliki seseorang terhadap panjang usianya sendiri.
- Demografi: terdiri dari jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan yang dimaksud adalah catatan seseorang apakah ia pernah terkena salah satu dari penyakit berat, seperti hipertensi, osteoartritis, TBC, asma, diabetes, kanker, depresi, sirosis hati, maupun gagal ginjal.
- Sosio-ekonomi: termasuk kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal (mengontrak atau rumah sendiri), dan asuransi.
- Gaya hidup: misalnya merokok, konsumsi alkohol, atau rutin berolahraga atau tidak.
- Psikososial: menggambarkan kondisi mental seseorang, apakah ia merasa depresi, seberapa sering ia memiliki *quality time*, dan lain-lain.

Beberapa kebijakan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan angka harapan hidup antara lain berupa sosialisasi penerapan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol, dan berolahraga rutin. Selain itu pemerintah daerah juga menggalakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga masyarakat lebih terarah dalam menjalankan program hidup sehat untuk membantu meningkatkan harapan hidup

2.1.2.2.10. Persentase balita gizi buruk

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan di Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh data Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016

sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Walaupun belum mencapai target yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan di sektor gizi telah memberikan hasil yang cukup berarti. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

Tabel 2.23
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.07	0.08	0.05	0.12	0,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Saat ini dalam upaya penurunan penderita gizi buruk pada balita, program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar lebih diarahkan pada upaya penanggulangannya seperti pemberian makanan tambahan atau PMT. Walaupun sesungguhnya, kejadian gizi buruk di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan konsumsi makanannya tetapi juga faktor lainnya seperti keadaan ekonomi, pendidikan, pola asuh, sanitasi lingkungan, morbiditas (penyakit infeksi), dan akses ke pelayanan kesehatan.

Upaya untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui pelaksanaan surveilans gizi berupa Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 87 desa / kelurahan. PSG sebagai upaya monitoring dan evaluasi keberhasilan progam perbaikan gizi guna memberikan petunjuk apakah program yang dijalankan sudah berdampak pada penurunan masalah gizi seperti yang diharapkan yaitu menurunkan prevalensi *stunting*, *underweight* dan *wasting*.

Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengatasi dan atau menekan jumlah balita gizi buruk, antara lain :

a. Pemberian makanan tambahan bagi balita pada saat penimbangan di Posyandu;
b. Pemeriksaan kesehatan balita secara rutin;
c. Peningkatan ketahanan pangan keluarga;
d. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; dan
e. pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan.

2.1.2.2.11. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Saat ini dalam upaya penurunan penderita gizi kurang pada balita, program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar lebih diarahkan pada upaya penanggulangannya seperti pemberian makanan tambahan atau PMT. Walaupun

sesungguhnya, kejadian gizi kurang di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan konsumsi makanannya tetapi juga faktor lainnya seperti keadaan ekonomi, pendidikan, pola asuh, sanitasi lingkungan, morbiditas (penyakit infeksi), dan akses ke pelayanan kesehatan. Untuk prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	75	70	60	54	45

Sumber: Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Kasus penderita gizi kurang/kekurangan gizi *(underweight)* di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir, terjadi pada anak usia di bawah lima tahun (Balita) serta prevalensi pendek dan sangat pendek *(stunting)* pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta).

Upaya untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui pelaksanaan surveilans gizi berupa Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 87 desa / kelurahan. PSG sebagai upaya monitoring dan evaluasi keberhasilan progam perbaikan gizi guna memberikan petunjuk apakah program yang dijalankan sudah berdampak pada penurunan masalah gizi seperti yang diharapkan yaitu menurunkan prevalensi *stunting*, *underweight* dan *wasting*.

Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengatasi dan atau menekan jumlah balita gizi kurang, antara lain :

a. Pemberian makanan tambahan bagi balita pada saat penimbangan di Posyandu;
b. Pemeriksaan kesehatan balita secara rutin;
c. Peningkatan ketahanan pangan keluarga;
d. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; dan
e. pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan.

2.1.2.2.12. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup aspek ekonomi dan sosial. Perkembangan sektor ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dari besarnya penduduk yang memasuki pasar kerja.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	62 495	57 203	63 749	63 444	69 858

Sumber Data : Data BPS Kab.Kep. Selayar Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.21, diketahui bahwa angka partisipasi kerja Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir berfluktuasi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya fluktuasi, antara lain :

a. Motivasi penduduk usia kerja untuk bekerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia;
b. Adanya Penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan di luar daerah;
c. Adanya penduduk dari daerah lain yang datang dan menetap serta bekerja di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.2.2.13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau yang biasa disingkat TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang ikut andil dalam perekonomian, karena dengan melihat TPAK kita dapat mengetahui sejauhmana para angkatan kerja yang aktif dalam pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni : jumlah penduduk yang masih bersekolah, jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga, umur, tingkat upah, tingkat pendidikan, dan kegiatan ekonomi.

Untuk mengetahui TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan tabe berikut.

Tabel 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	Orang	62 495	57 203	63 749	63 444	69 858
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke atas	Orang	92 212	90 700	93 018	93 537	102 461
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,64	62,03	67,09	65,60	68,18

Sumber Data : Data BPS Kab.Kep. Selayar Tahun 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir berfluktuasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016,

TPAK tercatat sebesar 67,64 persen mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 62,03 persen, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi sebesar 67,09 persen, namun pada tahun 2019 turun lagi menjadi sebesar 65,60 persen, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 68,18 persen.

Terjadinya fluktuasi TPAK di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tampak pada tabel 2.21 menggambarkan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia dan mampu menyerap tenaga kerja tidak bersifat substainabel. Hal ini terjadi karena umumnya lapangan pekerjaan yang tersedia dipengaruhi oleh adanya investasi pemerintah berupa pelaksanaan berbagai proyek-proyek fisik yang jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sudah ditentukan. Selain itu, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga juga menjadi faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan TPAK di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Secara umum, faktor – faktor penyebab terjadinya fluktuasi TPAK di KAbupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

a. Motivasi penduduk usia kerja untuk bekerja pada sector-sektor yang dapat menerima mereka untuk bekerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia;
b. Adanya Penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan di luar daerah;
c. Adanya penduduk dari daerah lain yang datang dan menetap serta bekerja di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.2.2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja.

Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Selayar, di sajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Tingkat Pengangguran Terbuka	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Selayar	%	0,9	2,34	1,74	1,1	2,44
Sulawesi Selatan	%	4,77	5,61	5,34	4,97	6,31
Nasional	%	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber Data : Data BPS Kab.Kep. Selayar Tahun 2020

Tingkat pengganggguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir berfuktuatif. Pada tahun 2016 TPT sangat rendah hanya 0,9 persen dan meninngkat pada tahun 2017 mencapai 2,34 persen dan seterusnya berfluktuatif hingga tahun 2020 naik kembali menjadi 2,44 persen. Umumnya tenaga kerja yang menganggur atau tidak bekerja merupakan tenaga kerja yang mengandalkan tenaga (fisik) semata yang hanya dapat terserap ketika terbuka lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kasar, seperti pekerjaan bangunan, jalan, jembatan dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan tenaga manusia.

Sejalan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja kasar pada pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat yang berbeda dan umumnya tidak mampu menyerap seluruh tenaga karja kasar yang ada, menjadi factor penyebab naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.2.2.15. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Untuk mengetahui Rasio Penduduk yang bekerja di kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.28
Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio penduduk yang bekerja	%	0,99	0,98	0,98	0,99	0,98

Sumber Data : Data BPS Kab.Kep. Selayar Tahun 2021

Jumlah dan rasio tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel diatas, Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk tingkat Kabupaten berkisar 0,98 persen – 0,99 persen sebesar. Ini menunjukkan di tahun 2019 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 63.444 jiwa sedangkan jumlah yang tidak bekerja sebanyak 742 jiwa. Rasio penduduk yang bekerja tahun 2020 ini menurun dibandingkan tahun 2019, ini karena jumlah penduduk yang bekerja tahun 2020 (68.156 jiwa) menurun jumlahnya dibandingkan tahun 2019 (63.444 jiwa).

2.1.2.2.16. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Tabel 2.29
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	7,35	7,61	8,75	7,66	8,31

Sumber Data : Dinas PTMPTSPTK Kepulauan Selayar Tahun 2021

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar fluktuatif. Tahun 2019 (7,66 persen) menurun jika dibndingka tahun 2018 (8,75 persen), hal ini disebabkan jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2019 menurun disebabkan beberapa sektor jasa yang berkontribusi terhadap yang menyerap banyak tenaga kerja tidak beroperasi di tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 meningkat kembali 8,31 persen dimana jumlah penduduk yang bekerja 68.156 jiwa.

2.1.2.2.17. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga harus dilihat dari keberhasilan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga diukur dari tingkat keberhasilan mengurangi jumlah jumlah penduduk miskin serta keberhasilan dalam upaya menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesempatan kerja merupakan peluang bagi angkatan kerja yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan yang berarti pula peluang atau kesempatan untuk mendapatkan penghasilan.

Tabel 2.30
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	1,15	0,98	1,00	0,64	1,00

Sumber Data : Data BPS Kab.Kep. Selayar Tahun 2021

Keadaan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar ditandai oleh adanya beberapa masalah pokok yang bersifat struktural. Umumnya tenaga kerja yang berusia muda dan kurang atau belum trampil serta kurang pengalaman. Selain itu masalah ketenagakerjaan juga ditandai oleh adanya kekurangseimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumberdaya alam yang tersedia. Di lain pihak pasar kerja belum berfungsi dengan baik dalam menyebarkan tenaga kerja dari wilayah yang kelebihan tenaga kerja ke wilayah yang kekurangan tenaga kerja. Adanya kelebihan tenaga kerja secara umum dan belum terserapnya seluruh tenaga kerja yang tersedia, menimbulkan masalah lain pada bidang perburuhan seperti kurang layaknya syarat kerja dan kondisi kerja.

Dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh. Sasaran yang ingin dicapai adalah perluasan kesempatan kerja produktif, pemerataan kegiatan dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam hubungan ini telah dirumuskan empat bentuk kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan umum di bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, kebijaksanaan mencakup kebijaksanaan fiskal ketenagakerjaan, moneter dan investasi; di bidang sosial diadakan kebijaksanaan kependudukan yang bertujuan mewujudkan masyarakat berkeluarga kecil yang sejahtera. Kedua, kebijaksanaan sektoral di berbagai sektor mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja berikut peningkatan produksi. Ketiga, kebijaksanaan daerah berupa pengerahan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan ke daerah yang membutuhkan, misalnya melalui Antar Kerja Antar Daerah. Keempat, kebijaksanaan khusus yang secara langsung dan tidak langsung menyediakan lapangan kerja untuk waktu yang relatif pendek bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, misalnya waktu sepi kerja di sektor pertanian, atau perikanan.

2.1.2.2.18. Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas, Dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas (dinyatakan dalam format persentase). Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.

Untuk mengetahui Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas, Dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja di Kabupaten

Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel berikut.

Tabel 2.31
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	41,3	48,7	43,7	44,1	48,9

Sumber Data : Data BPS Kab.Kep. Selayar Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 hampir 50 persen (48,9 persen) tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar bekerja di sector informal dan pekerja bebas. Dan 51,1 persen bekerja di sector formal sebagai pegawai di lembaga/institusi pemerintah dan karyawan swasta (BUMN). Tingginya tenaga kerja bebas di Kabupaten Kepulauan Selayar karena belum adanya industry skala besar yang beroperasi yang dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar.

2.1.2.2.19. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga prasejahtera merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti agama, pangan, sandang dan Kesehatan. Sedangkan keluarga sejahtera I telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologinya. Di Kabupaten Kepulauan Selayar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 11.785 KK. Memasuki tahun 2017, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 9.363 KK dan meningkat Kembali pada tahun 2018 menjadi 9.685 KK. Pada tahun 2019 jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I mengalami penurunan menjadi 8.907 dan bertahan hingga memasuki tahun 2020. Adanya penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I tersebut, tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus menekan jumlah masyarakat miskin diwillayahnya. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun untuk menigkatkan taraf hidup masyarakat, antara lain Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Rentan melalui UEP, Pengadaan bantuan pangan, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui KUBE, Program Keluarga Harapan, Program Sembako BNT, Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu pemerintah daerah juga memberikan berbagai bantuan peralatan usaha seperti bantuan pertukangan, perbengkelan dan mesin jahit, bantuan kapal nelayan, bantuan bibit dan peralatan pertanian, serta pemberian pelatihan industri bagi UMKM. Pada bidang sarana dan prasaran,

pemerintah daerah berupaya memenuhi sarana air bersih dengan melakukan pemasangan sambungan air bersih kerumah penduduk serta membangun jalan desa sebagai upaya perbaikan ekonomi masyarakat. Dibidang perumahan, pemerintah daerah memberikan bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dan bantuan renovasi bagi rumah tidak layak huni. Tidak ketinggalan pula perhatian pemerintah pada bidang pendidikan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan memberikan bantuan pendidikan dan alat sekolah gratis, pelaksanaan program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB, , sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.32
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	11.785	9.363	9.685	8.907	8.907

Sumber Data : Data BPS Kab.Kep. Selayar Tahun 2021

2.1.2.2.20. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.

Selama periode 2016 – 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat tehadap penyelenggaraan pelayanan public, khususnya pada sector pendidikan, kesehatan perikanan, pertanian, pekerjaan umum, penanaman modal, ketenagakerjaan dan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya berkisar antara 66,68 hingga 70,10 persen sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70,10	82,20	69,55	68,58	66,68

Sumber Data : Data BPS Kab.Kep. Selayar Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016 –

2020, cenderung mengalami penurunan pertahunnya, Kecuali IKM tahun 2017 naik menjadi 82,20 yang sebelumnya (2016) baru tercatat sebesar 70,10 persen. Selanjutnya tiga tahun berikutnya terus mengalami penurunan.

Terjadinya penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Kabupaten Kepulauan Selayar sesunggunya lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang mengharapkan memperoleh bantuan gratis dari perangkat daerah penyelenggara pelayanan public, yang selama periode 2016-2020, jumlah penduduk yang mengharapkan bantuan gratis terus mengalami peningkatan. Namun dari sekian banyak jumlah penduduk yang mengharapkan bantuan gratis dimaksud, yang dapat menerima adalah mereka yang datanya tersedia dalam Database Kemiskinan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Sementara bagi mereka yang belum memperoleh bantuan karena terkendala prasyarat sesuai ketentuan, pasti mengalami kekecewaan.

Oleh karena itu, dalam periode lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan mengupayakan perbaikan data kemiskinan daerah sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang masuk dalam kategori miskin yang tidak terdata atau tidak ada namanya dalam data base dimaksud.

2.1.2.2.21. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2016, Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Selayar sebesar 4,93 persen dan meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi 7,31 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 6,74 persen. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel 2.34
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah pendapatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	4,93	8,60	6,12	7,31	6,74

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.2.2.22. Opini BPK

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan Opini BPK atas Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya mampu dipertahankan pada posisi "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).

Tabel 2.35
Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mampu menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditandai dengan terlaksananya sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

2.1.2.2.23. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Tabel 2.36
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	78,3	66,9	84,1	78,9	79,8

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian Skor PHH Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2020 sudah berada di atas 50%, sekalipun perkembangannya masih berfluktuatif. Pencapaian skor PHH di atas 50% menandakan bahwa, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten

Kepulauan Selayar selain telah memenuhi aspek kuantitas, juga telah memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi.

2.1.2.2.24. Penanganan daerah rawan pangan

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kerawanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar, umumnya dialami oleh desa-desa yang berada di wilayah kepulauan. Selama periode 2016-2020, sejumlah desa rawan pangan telah ditangani. Berikut disajikan tabel berikut tentang jumlah desa rawan pangan yang tertangani.

Tabel 2.37
Penanganan daerah rawan pangan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan daerah rawan pangan	Desa	9	5	4	5	19

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Kondisi rawan pangan yang dialami oleh sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Selain itu, kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditetntukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan berbagai upaya penanganan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan sitausi yang ada. Salah satu upaya tersebut adalah melalui

penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/ informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Penanganan rawan pangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, antara lain : *pertama,* melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan sedini mungkin; dan *kedua,* melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada desa-desa yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di desa tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

2.1.2.2.25. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Tabel 2.38
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	18,82	18,18	17,61	15,84	16,03

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap produk domestik bruto (PDRB) mengalami penguatan pada tahun 2016 yang mencapai 18,82% dan menjadi penyangga utama PDRB yang tumbuh positif sepanjang tahun hingga tahun 2017. Namun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 kontribusi sektor pertanian/perkebunan mengalami penurunan menjadi 16,03% .Terjadinya penurunan pada sektor pertanian/ perkebunan tersebut secara umum dipengaruhi oleh 5 sektor utama yaitu sektor industri, sektor pertanian/perkebunan, sektor perikanan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi.

2.1.2.2.26. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Tabel 2.39
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	3,66	3,52	3,50	2,88	2,94

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Kontribusi sektor pertanian sub sektor tanaman palawija di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 adalah sebesar 3,66%. Nilai kontribusi

tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, dari 3,52% di tahun 2017 menjadi 2,94% di tahun 2020. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan karena masyarakat beralih dari menaman tanaman palawija ke sektor usaha lain yang lebih menjanjikan. Terdapat berbagai faktor penyebab berkurangnya minat masyarakat pada sub sektor tanaman palawija antara lain tingkat pengetahuan petani mengenai cara bercocok tanam palawija, tingkat permintaan pasar tehadap tanaman palawija, tingkat pendapatan/harga pasar dimana semakin tinggi pendapatan maka semakin besar minat petani terhadap tanaman palawija, karakteristik lahan yang dimiliiki petani serta adanya dukungan dan bantuan yang diberikan oleh lingkungan sosial petani tersebut.

2.1.2.2.27. Produksi Sektor Pertanian

Tabel 2.40
Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Produksi sektor pertanian	ton	25.835,85	27.665,00	39.523,14	29.372,00	26.337,98

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Hasil produksi pada sektor pertanian mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2018 yang mencapai 39.523,14 ton. Namun sejak tahun 2019 hasil produksi sektor pertanian tersebut mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 26.337,98 ton. Terjadinya penurunan hasil produksi disebabkan oleh luas panen pertanian dan hasil produksi yang berubah-ubah. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain produksi hasil pertanian yang masih dipengaruhi oleh iklim, terjadinya serangan hama dan penyakit yang kemudian menyebabkan panen mengalami kegagalan, kurangnya perawatan tanaman seperti pemberian pupuk dan obat tanamanan serta alih fungsi lahan menjadi lahan komersil.

2.1.2.2.28. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Tabel 2.41
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	12,91	12,43	11,80	10,57	10,99

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Kontribusi sektor pertanian sub sektor tanaman keras terhadap produk domestik bruto (PDRB) mengalami penguatan pada tahun 2016 yang mencapai

12,91% dan menjadi penyangga utama PDRB yang tumbuh positif sepanjang tahun hingga tahun 2017. Memasuki tahun 2018 hingga tahun 2020 perkembangan kontribusi sub sektor tanaman keras mengalami penurunan menjadi 11,80% pada tahun 2018, 10,57% pada tahun 2019 dan menjadi 10,99% pada tahun 2020. Penurunan kontribusi sub sektor tanaman keras tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain terjadinya penurunan harga komoditas kelapa yang merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan selayar di awal tahun 2018, sehingga para pekebun beralih pekerjaan di sektor lain yang lebih menjanjikan baik di sektor perdagangan, industri, perikanan, perdagangan, perhubungan dan konstruksi, sebagaimana tersaji dalam tabel di atas

2.1.2.2.29. Produksi sektor perkebunan

Tabel 2.42
Produksi sektor perkebunan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Produksi sektor perkebunan	ton	24.743,28	27.357,01	27.916,67	27.063,90	26.893,90

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Hasil produksi pada sektor perkebunan mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu sebesar 24.743,28 ton pada tahun 2016, meningkat menjadi 27.357,01 ton pada tahun 2017 dan 27.916,67 ton pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 hasil produksi pada sektor perkebunan mengalami penurunan menjadi 27.063,90 ton dan 26.893,90 ton pada tahun 2020. Berkurangnya hasil produksi perkebunan sejak tahun 2019 disebabkan karena beberapa faktor antara lain penurunan luas areal lahan perkebunan akibat kerusakan lahan, kurang produktifnya tanaman perkebunan akibat umur tanaman sudah banyak yang tua dan tanaman yang tidak berasal dari bibit unggul , serta tenaga kerja pekebun yang relatif semakin sedikit.

2.1.2.2.30. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Tabel 2.43
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB dalam kurung waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 mencapai 100 persen. Ini menunjukkan produksi pertanian dari kelompok tani berkontribusi signifikan terhadap PDRB, sebagaimana tersaji dalam tabel di atas.

2.1.2.2.31. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Tabel 2.44
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Pada di atas menunjukkan bahwa konstribusi sektor kehutanan di Kabupaten kepulauan Selayar relatif kecil yaitu 0,19% pada tahun 2016, 0,18% pada tahun 2017, 0,17% pada tahun 2018 dan menurun Kembali menjadi 0,16 pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan karena karena Kepulauan Selayar hanya memiliki Hutan Mangrove Primer 225,79 Ha, Hutan Mangrove Sekunder 338,73 Ha, Hutan Mangrove Primer 26,56 Ha, Hutan Sekunder 15.781,82 Ha, dan Hutan Tanaman 1.158,01 Ha dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.362/Menhut-II/2019 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan. Sejak tahun 2017, urusan kehutanan telah dialihkan ke provinsi sehingga masyarakat semakin sedikit yang menjadikan sektor kehutanan sebagai mata pencaharian mereka

2.1.2.2.32. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Tabel 2.45
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	1,02	0,95	0,92	0,88	0,93

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Sama halnya dengan kontribusi sektor kehutanan, di sektor pertambangan pun kontribusinya teradap PDRB relatif kecil yaitu hanya sebesar 1,02% pada tahun 2016. Angka tersebut terus mengalami penurunan memasuki tahun 2017 sampai tahun 2020 yaitu berkisar pada angka 0,95% di tahun 2017, 0,92% pada tahun 2018, 0,88% pada tahun 2019 dan 0,93% pada tahun 2020. Relatif kecilnya

kontribusi pada sektor pertambangan disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Selayar bukan tergolong daerah pertambangan sehingga masyarakatnya tidak menjadikan sektor pertambangan sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar masyarakat adalah petani/pekebun yang beralih menjadi petambang (tambang pasir galian C) pada saat musim kemarau dimana sektor pertanian/perkebunan kurang menghasilkan. Faktor penyebab lainnya adalah dialihkannya pengelolaan sektor pertambangan ke provinsi sejak tahun 2017 sehingga menyulitkan masyarakat dalam pengurusan izin usaha pertambangan.

2.1.2.2.33. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tabel 2.46
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,20	0,20	0,22	0,24	0,22

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa konstribusi sektor pariwisata di Kabupaten kepulauan Selayar relatif kecil yaitu 0,20% pada tahun 2016 dan 2017, 0,22% pada tahun 2018, 0,24 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 0,22% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam tahap pengembangan sehingga masyarakat belum menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber utama mata pencaharian mereka

2.1.2.2.34. Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB

Tabel 2.47
Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	24,81	25,45	25,87	27,26	25,96

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Konstribusi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi dari 24,81% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 25,45% di tahun 2017 dan .25,87% pada tahun 2018. Memasuki tahun 2019 terjadi peningkatan kembali menjadi 27,26 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 25,96%. Peningkatan kontribusi sektor perikanan dan kelautan tersebut

didukung oleh upaya pemerintah daerah yang terus berusaha menarik minat masyarakat dengan pemberian berbagai fasilitas antara lain pembagian alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan, pembagian bantuan kapal penangkap ikan dan angkut, pelatihan dan bimbingan teknis kepada nelayan, penataan perizinan usaha perikanan, serta pembangunan tempat pelelangan ikan modern.

2.1.2.2.35. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Tabel 2.48
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,51	7,46	7,52	7,69	7,81

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Sektor perdagangan baik besar maupun eceran masih cukup menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan adalah sebesar 7,51% yang kemudian menurun menjadi 7,46 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan mengalami kenaikan menjadi 7,52% dan 7,69 di tahun 2019. Kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2020 yang mencapai 7,81%. Walaupun pertumbuhannya masih relatif kecil namun pemerintah daerah terus berupaya menciptakan strategi khsusus guna mendorong dan mengembangkan sektor perdagangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu mendorong pengembangan UMKM melalui upaya peningkatan kapasitas sehingga semakin bertumbuh besar dan naik kelas menjadi usaha besar atau bahkan menjadi suatu industri.

2.1.2.2.36. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Tabel 2.49
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,60	2,60	2,43	2,75	2,81

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Kontribusi sektor industri pada struktur PDRB sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 berkisar antara 2,69% pada tahun 2016 dan 2017, 2,43% pada tahun 2018, 2,75% pada tahun 2019 dan 2,81% pada tahun 2020. Walaupun pertumbuhannya relatif kecil, namun pemerintah daerah terus mendorong

peningkatan kinerja dan peran industri pada perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi, serta pengembangan padat karya yang berorientasi ekspor.

2.1.2.2.37. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

Tabel 2.50
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	69,99	70,76	70,65	74,56	

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Sektor industri rumah tangga memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 yang mencapai 69,99% pada tahun 2016, 70,76 pada tahun 2017 dan 70,65 pada tahun 2018. Memasuki tahun 2019, sektor industri rumah tangga mengalami peningkatan hingga mencapai 74,56% dan pada tahun 2020. Hal ini didukung upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkomitmen untuk memberikan stimulus kepada pelaku industri rumah tangga dan terus melakukan berbagai upaya strategis sehingga dunia usaha khususnya industri rumah tangga bisa tetap menjadi mata pencaharian andalan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam rmeningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahateraan masyarakat.

Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mengggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah.

Beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan, diantaranya yaitu angka partisipasi sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah, Fasilitas Pendidikan dan Angka Melanjutkan Pendidikan.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan menunjukkan adanya peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini merupakan dampak dari pelaksanaan sejumlah kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pendididkan, antara lain :

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Teknis Tenaga Pendidik;
b. Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) dan atau Sekolah Satu Atap (SATAP);
c. Pemberian bantuan gratis Seragam dan perlengkapan sekolah bagi Anak keluarga miskin yang baru mendaftar/lanjut;
d. Peningkatan Income per kapita penduduk;
e. Peningkatan kualias dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
f. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik barupa tunjangan guru yang bertugas di wilayah kepulauan; dan
g. Kebijakan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap peningkatan kinerja pelayanan pendidikan.

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Upaya menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut *the golden age* (usia emas) (Diadha, 2015).

Meskipun demikian, pembangunan pada sektor pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak lepas dari berbagai kendala yang ditemui di lapangan, sehingga perkembangan PAUD belum dapat dikatakan telah optimal. Hal ini bersesuaian dengan kondisi perkembangan PAUD di Kabupaten Kepulauan Selayar. PAUD di Kabupaten Kepulauan Selayar telah banyak dibangun baik dari partisipasi masyarakat maupun dari pemerintah daerah sendiri. Tercatat sebanyak 187 Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang ada saat ini yang terdiri dari TPA/KB/TK dan RA. Hal ini cukup mendukung program pemerintah yang

telah mencanangkan satu desa untuk satu lembaga PAUD, sehingga APS PAUD meningkat sampai pada tahun 2020 mencapai 83,56%.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kepulauan Selayar, di antaranya: (1) pengelolaan lembaga PAUD belum memenuhi standar mutu SPM PAUD, yaitu minimal 9(sembilan) peserta Didik PAUD untuk 1(satu) rombongan belajar, (2) Kebanyakan PAUD yang ada belum memiliki kualifikasi mutu sekolah dalam kategori baik; (3) banyak Lembaga PAUD yang lokasinya menumpuk sehingga bersaing ketat untuk menarik minat siswa; (4) Selain memiliki keterbatasan dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas ketersediaan guru PAUD dengan kompetensi yang memadai masih terbilang sedikit; (5) Umumnya PAUD yang ada belum memiliki sarana dan prasarana sekolah yang memadai, khususnya PAUD yang umumnya ada di desa baik desa yang lokasinya di wilayah kepulauan maupun di daratan Selayar sendiri. Permasalahan yang diungkapkan menjadi perhatian penuh oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.51
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	63,00	42,00	67	67,00	68,86
2	Pasilambena	47,00	42,00	24	40,45	56,04
3	Pasimasunggu	64,04	42,00	63	61,34	81,10
4	Taka bonerate	62,01	42,00	72	67,00	75,58
5	Pasimasunggu Timur	42,44	42,00	58	70,00	85,83
6	Bontosikuyu	53,00	42,30	52	67,00	94,49
7	Bontoharu	43,92	42,15	51	64,00	73,40
8	Benteng	53,17	42,45	58	77,00	91,55
9	Bontomanai	53,35	42,45	80	77,00	83,45
10	Bontomatene	41,20	42,30	54	73,00	101,61
11	Buki	60,62	42,00	72	75,00	96,26
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**53,07**	**42,15**	**59**	**67,34**	**83,56**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rentang waktu 2016-2020 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017, turun dari 53,07% pada tahun 2016 menjadi 42,15 % pada tahun 2017. Namun dalam 4 tahun setelahnya, APS PAUD mengalami peningkatan, APS-nya cukup meningkat dibandingkan dengan jumlah anak usia 4-6 tahun yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi anak usia 4-6 tahun terhadap PAUD di

Kabupaten Kepulauan Selayar sudah meningkat dan relatif memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan

Dalam rangka mengoptimalkan APS PAUD, sejumlah kebijakan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

a. Kampanye penyadaran keluarga ke seluruh desa/kelurahan tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Setiap Desa diwajibkan memfasilitasi dan atau menyiapkan anggaran Insentif bagi tenaga pendidik PAUD di wilayahnya masing-masing;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah PAUD;
d. Peningkatan kuantitas dan kompetensi guru PAUD;
e. Peningkatan kualifikasi mutu sekolah.

2.1.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 2.52
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	116	125	129	124	124
2	Pasilambena	135	140	159	165	177
3	Pasimasunggu	115	120	77	179	179
4	Taka bonerate	98	100	75	76	78
5	Pasimasunggu Timur	100	111	89	86	87
6	Bontosikuyu	95	100	102	98	99
7	Bontoharu	89	107	107	104	104
8	Benteng	75	87	123	108	113
9	Bontomanai	80	98	108	110	113
10	Bontomatene	82	90	120	118	123
11	Buki	72	79	113	100	102
Angka Partisipasi Kasar		**96**	**105**	**109**	**115**	**118**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021, APK di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan kinerja dalam penyelenggaraan Bidang Pendidikan. Adapun kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

a. Pemberian Bantuan Gratis Seragam dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang baru mendaftar baik jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

b. Pembukaan Sekolah Satu Atap pada setiap satuan pemukiman dengan akses yang jauh dari layanan sekolah inti.
c. Peningkatan Peran Sekolah dalam proses penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

2.1.3.1.1.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).

Tabel 2.53
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	76	78	80	85	87
2	Pasilambena	76	78	80	84	86
3	Pasimasunggu	77	78	80	83	86
4	Taka bonerate	75	76	80	84	86
5	Pasimasunggu Timur	78	78	80	84	86
6	Bontosikuyu	81	83	88	90	92
7	Bontoharu	82	85	88	90	92
8	Benteng	86	90	93	95	96
9	Bontomanai	85	86	88	90	92
10	Bontomatene	84	86	88	90	92
11	Buki	83	85	89	90	92
Angka Pendidikan yang ditamatkan		**80,00**	**82,00**	**85,00**	**88,00**	**90,00**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Angka Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan penddikan khususnya dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang dijalankan para tenaga pendidik di setiap sekolah sudah semakin baik.

Beberapa factor yang mendorong peningkatan Angka Pendidikan yang ditamatkan, adalah :

a. Adanya pemberian jam tambahan pembelajaran di luar dari biasanya;
b. Keaktifan tenaga pendidik dalam sanggar kegiatan belajar mengajar;
c. Kemampuan Tenaga Pendidik dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian penamatan.

2.1.3.1.1.4. Angka Partispasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok

umurnya yang dinyatakan dalam persentasi. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, Angka Partisipasi Murni (APM) baik jenjang SD, maupun SMP, keduanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.54
Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Pasimarannu	100	85	99	90	100	93	99	94	98	97
2	Pasilambena	100	85	100	90	114	91	120	92	99	95
3	Pasimasunggu	118	85	125	90	103	83	114	84	99	85
4	Taka bonerate	115	80	121	87	107	82	110	84	100	85
5	Pasimasunggu Timur	92	80	108	88	95,37	85	100	86	98,41	87
6	Bontosikuyu	89	80	95	85	81,34	84	94	85	99	88
7	Bontoharu	87	80	90	87	81	90	92	90	99	93
8	Benteng	80	80	62	89	80	89	88	90	98	97
9	Bontomanai	79	80	87	87	79	83	86	83	99	84
10	Bontomatene	73	80	80	90	74,4	84	96	84	99	85
11	Buki	64	80	70	83	67	84	76	85	98	86
Angka Partispasi Murni		91	81	94	88	89	86	98	87	99	89

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Beberapa factor pendorong terjadinya peningkatan terhadap Angka Partisipasi Murni baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan;
b. Adanya Kebijakan dari Pemerintah daerah untuk menggratiskan pendidikan;
c. dilaksanakannya Program Pemberian Seragam Gratis dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru baik SD/MI maupun SMP/MTs.

2.1.3.1.1.5. Angka Partispasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

APS di Kabupaten Kepulauan Selayar baik SD/MI maupun SMP/MTs, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, APS SD/ MI baru tercatat sebesar 80,72 persen dan APS SMP/MTs sebesar 56,92 persen meningkat manjadi APS SD/ MI sebesar 83,66 persen dan APS SMP/ MTs sebesar 60,08 persen.

Tabel 2.55
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Pasimarannu	80,53	75,09	81,53	77,09	82,53	79,09	82,53	80,09	90.53	77.09
2	Pasilambena	80,81	80,44	88,81	80,44	88,81	80,44	88,81	80,44	88.81	81.44
3	Pasimasunggu	81,17	60,64	81,17	60,64	81,17	70,64	81,17	70,64	81.17	60.64
4	Taka bonerate	72,11	60,04	72,11	60,04	72,11	60,04	72,11	70,04	72.11	60.04
5	Pasimasunggu Timur	72,86	37,55	72,86	37,55	72,86	37,55	72,86	37,55	72.86	37.55
6	Bontosikuyu	92,67	52,98	92,67	52,98	92,67	52,98	92,67	52,98	92.67	52.98
7	Bontoharu	89,81	65,42	89,81	65,42	89,81	65,42	89,81	65,42	89.81	65.42
8	Benteng	65,11	24,79	65,11	24,79	65,11	24,79	65,11	24,79	65.11	24.79
9	Bontomanai	80,88	52,29	80,88	52,29	80,88	52,29	80,88	52,29	80.88	52.29
10	Bontomatene	91,94	55,78	91,94	55,78	92,94	60,78	92,94	60,78	91.94	55.78
11	Buki	80,08	61,08	80,08	60,08	80,08	60,08	80,08	60,08	80.08	61.08
Angka Partispasi Sekolah		**80,72**	**56,92**	**81,54**	**57,01**	**81,72**	**58,55**	**81,81**	**59,55**	**83.66**	**60.08**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Realisasi APS SMP/MTs pada tahun 2020 hanya mengalami peningkatan sebesar 3,16 persen sejak tahun 2016 yaitu dari 56,92 menjadi 60,08 persen. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi anak usia 13-15 tahun terhadap SMP/MTs di Kabupaten Kepulauan Selayar masih relative rendah. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang melanjutkan ke sekolah diluar daerah kabupaten Kepulauan Selayar, tapi dalam data kependudukannya masih tercatat di database kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikian pula pada jenjang pendidikan SD/MI Angka Partisipasi sekolah tercatat bahwa pada tahun 2016 masih relative sedang yaitu 80,72 pada tahun 2020 menjadi 83,66. Kondisi geografis yang terdiri dari beberapa pulau dengan akses jarak yang berbeda menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan penduduk usia sekolah untuk bersekolah, namun demikian usaha yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan peningkatan angka partisipasi sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTS mulai menunjukkan hasil yang baik.

Adapun Capaian keberhasilan yang diraih Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap peingkatan angka pastisipasi sekolah dari tahun ke tahun selanjutnya, merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan *Mandatory Planning* yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD kabupaten sebesar 20 persen, selain kebijakan lainnya yang mendukung sebagaimana telah dijelaskan.

2.1.3.1.1.6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, baik tingkat SD maupun SMP, masih terdapat kasus Angka Putus Sekolah. Walaupun persentase kasusnya menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa pada tahun 2016, Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,86% dan SMP sebesar 1,38% turun menjadi 0,5% untuk tingkat SD/MI dan 0,08% untuk tingkat SMP/MTs.

Tabel 2.56
Angka Putus Sekolah Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Pasimarannu	0,85	1,54	0,64	0,54	0,15	0,36	0,23	0,38	0,64	0,15
2	Pasilambena	0,88	2,50	0,70	2,03	0,08	2,44	0,36	1,23	0,70	0,08
3	Pasimasunggu	0,88	1,76	0,38	0,76	0,00	0,8	0,33	0,2	0,38	0,00
4	Taka bonerate	1,50	2,63	0,80	0,63	0,30	1,43	0,15	3,04	0,80	0,30
5	Pasimasunggu Timur	0,87	1,45	0,56	0,84	0,32	0,5	0,10	0,26	0,56	0,32
6	Bontosikuyu	0,80	0,90	0,80	0,67	0,00	0,67	0,58	1,05	0,80	0,00
7	Bontoharu	0,77	0,84	0,80	0,58	0,00	0,87	0,42	0,61	0,80	0,00
8	Benteng	0,80	0,82	0,22	0,82	0,00	0,82	0,27	0,31	0,22	0,00
9	Bontomanai	0,80	0,90	0,20	0,39	0,00	0,19	0,24	0,66	0,20	0,00
10	Bontomatene	0,80	1,00	0,25	0,25	0,00	0,12	0,17	0,54	0,25	0,00
11	Buki	0,55	0,84	0,25	0,84	0,00	0,84	0,20	0,78	0,25	0,15
Angka Putus Sekolah		**0,86**	**1,38**	**0,5**	**0,73**	**0,08**	**0,8**	**0,28**	**0,7**	**0,5**	**0,08**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Faktor-faktor yang menjadi penyebab masih adanya peserta didik yang putus sekolah baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs, di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

a. Factor keluarga dan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Beberapa kasus ditemukan bahwa mereka yang putus sekolah terpaksa harus berhenti sekolah karena membantu pekerjaan orang tua;
b. Rendahnya motivasi Anak Putus Sekolah untuk tetap bersekolah;
c. Beberapa kasus Anak Putus Sekolah, karena ikut orang tua yang pindah ke daerah lain dan yang bersangkutan tidak mengambil surat pindah sekolah;

2.1.3.1.1.7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.57
Angka Kelulusan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Pasimarannu	98	100	100	94	97	96	100	99	100	100
2	Pasilambena	97	100	100	93	98,48	99	97	97	100	100
3	Pasimasunggu	99	100	100	99	98	99	100	99	100	100
4	Taka bonerate	97	100	100	96	93,5	96	97	97	100	100
5	Pasimasunggu Timur	97	100	100	97	99,31	98	100	99	100	100
6	Bontosikuyu	97	100	100	91	98	95	98	97	100	100
7	Bontoharu	97	100	100	92	98,36	97	97	97	100	100
8	Benteng	99	100	100	98	99	96	99	99	100	100
9	Bontomanai	99	100	100	100	99	99	99	99	100	100
10	Bontomatene	99	100	100	98	99	99	99	99	100	100
11	Buki	99	100	100	98	99,25	98	100	99	100	100
Angka Kelulusan		**98**	**100**	**100**	**96**	**98**	**97**	**99**	**98**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Angka kelulusan baik jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs menunjukkan adanya perbaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2016, Angka Kelulusan SD/MI tercatat masih sebesar 98 persen dan SMP/MTs sudah 100 persen, maka pada tahun 2020, baik SD/MI maupun SMP/MTs masing-masing telah mencapai 100 persen.

Beberapa factor yang menyebabkan terjadinya penurunan angka kelulusan pada tahun tertentu selama periode 2016-2021, antara lain :

a. Adanya peserta didik yang karena alasan sakit, tidak dapat mengikuti ujian akhir;
b. Adanya peserta didik yang putus sekolah.

2.1.3.1.1.8. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka Melanjutkan Pendidikan adalah jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menamatkan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.58
Angka Melanjutkan Pendidikan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	88,00	97	95	99	100
2	Pasilambena	78,00	90	88	99	100
3	Pasimasunggu	92,00	97	97	99	100
4	Taka bonerate	77,00	80	88	94	96,02

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pasimasunggu Timur	87,00	87	88	90	98
6	Bontosikuyu	81,00	90	86	107	99
7	Bontoharu	96,00	99	85	88	99
8	Benteng	99,00	112	99	105	97
9	Bontomanai	80,00	96	88	95	97
10	Bontomatene	89,40	114	95	96	98
11	Buki	88,00	96	94	97	107
Angka Melanjutkan Pendidikan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS		**86,85**	**96**	**91**	**97**	**99**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Dalam gambar di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan Angka Melanjutkan (AM) pada tahun 2018 dibanding tahun 2017. Tercatat bahwa pada tahun 2017, AM tercatat sebesar 96 persen namun di tahun 2018 turun menjadi 91 persen. Terjadinya penurunan ini lebih diakibatkan oleh kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya yang masih rendah.

Namun demikian, dalam tiga tahun berikutnya (208-2020), terjadi peningkatan AM setiap tahunnya. Capaian keberhasilan ini merupakan implikasi dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terutama dalam memperbaiki income per kapita masyarakat sehingga jumlah keluarga dengan standar hidup layak semakin bertambah pula, selain itu, factor keberhasilan dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye “Ayo Ke Sekolah”.

2.1.3.1.1.9. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Data menunjukkan bahwa Persentase Bangunan Sekolah dalam kondisi baik dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan signifikan.

Tabel 2.59
Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Pasimarannu	70	68	75	71	77	76	85	78	87	84
2	Pasilambena	50	68	60	71	65	74	75	79	77	84
3	Pasimasunggu	75	68	80	71	80	75	85	79	88	85
4	Taka bonerate	75	68	80	71	85	75	90	80	92	85
5	Pasimasunggu Timur	80	68	85	71	82	75	85	80	88	85
6	Bontosikuyu	80	68	85	71	87	75	90	80	92	85

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
7	Bontoharu	75	68	78	71	80	75	85	80	92	85
8	Benteng	75	68	80	71	82	76	90	85	92	88
9	Bontomanai	75	68	80	71	84	75	85	80	88	85
10	Bontomatene	75	68	79	71	82	75	85	80	88	85
11	Buki	75	67	79	71	80	75	84	80	88	85
Fasilitas Pendidikan		**73**	**68**	**78**	**71**	**80**	**75**	**85**	**80**	**88**	**85**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar Tahun 2021

Terjadinya peningkatan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik di Kabupaten Kepulauan Selayar, selain karena upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara berkelanjutan dalam memelihara kondisi bangunan sekolah yang ada, juga karena adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah di tingkat atas, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan.

2.1.3.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, rasio ketersediaan sekolah menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan dari tahun 2016 yang masih tercatat sebesar 1 : 89 menjadi 1 : 97 pada tahun 2020.

Tabel 2.60
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1 : 89	1 : 80	1 : 89	1 : 83	1 : 94	1 : 88	1 : 95	1 : 85	1 : 97	1 : 132

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Sebagaimana halnya pada data Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap pendidik Usia Sekolah Dasar, Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah juga mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2016 rasio ini masih tercatat sebesar 1 : 80 maka pada tahun 2020, naik menjadi 1 : 132.

Adapun faktor utama yang menjadi pendorong meningkatnya rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah adanya pembangunan unit-unit sekolah baru baik pada jenjang pendidikan SD maupun

pada jenjang pendidikan SMP yang dilakukan baik oleh Pemerintah daerah sendiri melalui Dana Alokasi Khusus, maupun oleh kelompok masyarakat (swasta);

2.1.3.1.1.11. Rasio Guru/Murid

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, Rasio Guru terhadap Murid dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Rasio Guru/Murid Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Benteng	1: 17	1 : 15	1 : 16	1 : 13	1 : 18	1 : 14	1 : 18	1 : 14	1 : 15	1 : 10
2	Bontomatene	1 : 8	1 : 11	1 : 8	1 : 12	1 : 8	1 : 11	1 : 8	1 : 10	1 : 7	1 : 6
3	Bontosikuyu	1 : 12	1 : 16	1 : 14	1 : 16	1 : 13	1 : 15	1 : 13	1 : 15	1 : 11	1 : 9
4	Bontoharu	1 : 11	1 : 11	1 : 13	1 : 13	1 : 12	1 : 14	1 : 12	1 : 17	1 : 11	1 : 8
5	Bontomanai	1 : 9	1 : 8	1 : 10	1 : 9	1 : 10	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 6
6	Taka Bonerate	1 : 24	1 : 25	1 : 36	1 : 35	1 : 26	1 : 21	1 : 27	1 : 19	1 : 24	1 : 13
7	Pasimasunggu	1 : 17	1 : 21	1 : 23	1 : 27	1 : 17	1 : 23	1 : 14	1 : 20	1 : 13	1 : 12
8	Buki	1 : 7	1 : 10	1 : 6	1 : 5	1 : 7	1 : 7	1 : 6	1 : 8	1 : 6	1 : 4
9	Pasimasunggu Timur	1 : 14	1 : 17	1 : 17	1 : 27	1 : 16	1 : 18	1 : 15	1 : 15	1 : 14	1 : 12
10	Pasimarannu	1 : 28	1 : 31	1 : 54	1 : 25	1 : 32	1 : 24	1 : 38	1 : 24	1 : 37	1 : 11
11	Pasilambena	1 : 26	1 : 23	1 : 27	1 : 32	1 : 27	1 : 35	1 : 23	1 : 22	1 : 18	1 : 12
Rasio Guru/Murid		**1:14**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1:15**	**1:15**	**1 : 14**	**1 : 15**	**1 : 13**	**1 : 9**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Rasio guru terhadap murid baik pada tingkat Sekoah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021 sudah memenuhi standar sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008, yaitu rata-rata Rasio Guru terhadap Murid pada jenjang pendidikan SD adalah 1 orang guru melayani 13 murid (1 : 13) dan jenjang pendidikan SMP adalah 1 orang guru melayani 9 murid (1 : 9).

2.1.3.1.1.12. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berasil Menamatkan Sekolah Dasar

Selama periode 2016-2021, Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasarnya dan selanjutnya menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Selayar, proporsi siswa yang menyelesaikan satu siklus pendidikan dasar tertentu.

secara implisit mengindikasikan tingkat kesuksesan pelaksanaan program wajib belajar serta kemajuan tingkat penyelesaian pendidikan dasar dalam kurun waktu 5 tahun. Dari data arus siswa yang masuk SD tahun 2015/2016, sekitar 90 persen yang lulus dari SD pada 2020/2021.

Tabel 2.62
Proporsi Murid Kelas 1 yang Berasil Menamatkan Sekolah Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berasil Menamatkan Sekolah Dasar	80,00	83,00	85,00	88,00	90,00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

proporsi Murid Kelas 1 yang Berasil Menamatkan Sekolah Dasar selama periode 2016-2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa faktor pendukung terjadinya peningkatan tersebut, antara lain :

a. Meningkatnya kesadaran penduduk usia 6-12 tahun untuk bersekolah;
b. Menurunnya angka putus sekolah; dan
c. Semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan pendidikan.
d. Kesemua perbaikan itu antara lain merupakan dampak positif dari program wajib belajar yang telah dilakukan selama ini.

2.1.3.1.1.13. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator ini merupakan gambaran kondisi guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik baik pada setiap jenjang pendidikan. Untuk mengetahui kondisi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV selama periode 2016-2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	78,00	79,00	80,00	90,00	81,00
2	Pasilambena	78,00	79,00	80,00	90,00	80,00
3	Pasimasunggu	78,00	78,00	80,00	90,00	81,00
4	Taka bonerate	75,00	77,00	77,00	88,00	80,00
5	Pasimasunggu Timur	75,00	78,00	82,00	90,00	81,00
6	Bontosikuyu	72,00	72,00	75,00	88,00	81,00
7	Bontoharu	70,00	70,00	72,00	88,00	81,10
8	Benteng	80,00	85,00	87,00	98,00	90,00
9	Bontomanai	69,00	72,00	75,00	88,00	81,00
10	Bontomatene	75,00	78,00	80,00	90,00	81,00
11	Buki	75,00	78,00	80,00	90,00	80,00
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV		**75,00**	**77,00**	**79,00**	**90,00**	**81,60**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa faktor pendorong adanya peningkatan ini, adalah :

a. Meningkatnya kesadaran dan motivasi Guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya;
b. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendorong peningkatan kualifikasi Guru melalui pemberian kesempatan berupa izin maupun tugas belajar;
c. Adanya tuntutan bahwa hanya guru dengan kualifikasi S1/D-IV yang bersyarat untuk menerima tunjangan sertifikasi.

2.1.3.1.2 Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor demografi, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang kesehatan serta keadaan dan perkembangan lingkungan baik fisik, maupun biologi. Sementara itu, mutu upaya dan manajemen kesehatan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana kesehatan yang tersedia, obat-obatan serta sarana penunjang lainnya seperti ketersediaan alat komunikasi jarak jauh khususnya daerah terpencil, alat transportasi seperti Puskesmas terapung/keliling terutama bagi daerah terpencil/ kepulauan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, ibu nifas, bayi, baduta/ batita/ balita, lanjut usia, dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui peningkatan: (1) upaya kesehatan, (2) pembiayaan kesehatan, (3) sumber daya manusia kesehatan, (4) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, (5) manajemen dan informasi kesehatan, dan (6) pemberdayaan masyarakat. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Kepulaun Selayar, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Kepulaaun Selayar melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran terkait kinerja pelayanan bidang kesehatan di, Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut ini diuraikan perkembangan capaian beberapa indicator pembangunan di bidang kesehatan.

2.1.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi merupakan banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untyk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.64
Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	3	0	0	1	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	1	1	0	0	0
4	Taka bonerate	5	4	3	0	1
5	Pasimasunggu Timur	1	0	0	0	1
6	Bontosikuyu	2	4	0	2	3
7	Bontoharu	2	1	2	1	3
8	Benteng	2	0	0	3	0
9	Bontomanai	0	1	2	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	3	0	1	4	0
Jumlah		**19**	**11**	**8**	**11**	**8**
Angka Kematian Bayi		**10,2**	**5,75**	**3,95**	**5,62**	**3,70**

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Masih adanya angka kematian bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih disebabkan oleh faktor budaya, dimana dalam kasus kematian bayi, kebanyakan disebabkan oleh rendahnya kesadaran pihak keluarga untuk melaksanakan persainan di pusat pelayanan kesehatan (Pustu/Puskesmas/RSU). Beberapa kasus ditemukan dimana perempuan yang melahirkan sudah dalam keadaan darurat sehingga tidak tertolong nyawanya. Ini lantaran keluarga terdekat melarang dirujuk ke fasilitas medis yang memadai.

2.1.3.1.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indicator ini menunjukkan besarnya peluang bayi untuk hidup sampai dengan usia 1 (satu) tahun. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa jumlah bayi yang memiliki peluang hidup sampai dengan satu tahun selama periode 2016-2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena jumlah bayi yang lahir setiap tahunnya juga berfluktuasi.

Tabel 2.65
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	200	170	155	180	190
2	Pasilambena	190	200	148	175	224
3	Pasimasunggu	125	175	160	168	100
4	Taka bonerate	115	130	152	266	169
5	Pasimasunggu Timur	160	150	136	175	278
6	Bontosikuyu	139	201	180	140	90
7	Bontoharu	352	363	230	200	234
8	Benteng	230	150	153	145	85
9	Bontomanai	98	111	168	150	240
10	Bontomatene	105	130	150	170	170
11	Buki	225	130	253	185	200
Angka Kelangsungan Hidup Bayi		1.912	1.910	1.885	1.954	1.980

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.2.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Tabel 2.66
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	3	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	1	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	1
7	Bontoharu	0	0	2	0	0
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	0	0	0	1	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
11	Buki	2	0	1	1	1
Jumlah		2	3	4	2	2
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		**1,07**	**1,57**	**1,97**	**1,02**	**0,92**

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Masih adanya kematian yang terjadi pada balita di kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan beberapa faktor, diantaranya: kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan dan lain-lain

2.1.3.1.2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Tabel 2.67
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1	0	0	2	0
2	Pasilambena	0	1	0	1	0
3	Pasimasunggu	0	0	2	0	2
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	1	0	1	0	0
6	Bontosikuyu	0	2	0	3	1
7	Bontoharu	3	0	0	0	0
8	Benteng	0	0	3	0	2
9	Bontomanai	1	0	0	1	0
10	Bontomatene	0	0	0	1	0
11	Buki	0	1	1	0	1
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup		9,937	5,759	4,244	5,629	4,545

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Angka kematian bayi di Kabupaten Kepulauaan Selayar berfluktuasi. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, Angka Kematian Neonatal selama periode 2016-2020, diakibatkan oleh beberapa factor, yaitu : a) masih adanya Ibu yang Melahirkan tidak ditangani oleh petugas kesehatan karena factor geografis, maupun kesadaran keluarga; b) Bayi yang laihr, kekurangan gizi; c) kesalahan perawatan dari keluarga; d) terdapat satu kasus kematian neonatal akibat kecelakaan.

Dalam upaya menurunkan angka kematian neonatal, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah paya preventif, antara lain melaksanakan sweeping ibu hamil, peningkatan pelayanan melalui kunjungan petugas kebidanan ke keluarga balita, serta peningkatan keterampilan keluarga dalam merwat dan mengasuh anak.

2.1.3.1.2.5. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain di setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang cukup penting untuk menggambarkan status kesehatan ibu dan gizi, kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan.

Tabel 2.68
Angka Kematian Ibu (AKI) Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1	1	0	0	1
2	Pasilambena	0	0	0	1	1
3	Pasimasunggu	0	0	1	0	0
4	Taka bonerate	1	1	1	1	2
5	Pasimasunggu Timur	1	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	1
7	Bontoharu	0	1	0	2	2
8	Benteng	1	0	0	1	0
9	Bontomanai	2	0	0	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Jumlah		**6**	**3**	**2**	**5**	**7**
Angka Kematian Ibu (AKI)		**322,2**	**157,06**	**98,81**	**255,8**	**324,2**

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Beberapa faktor penyebab kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Peningkatan kualitas pelayanan pemantauan resiko tinggi belum maksimal, kondisi geografis sebagai Kabupaten kepulauan yang tidak mendukung saat terjadi kasus emergensi yang segera harus dirujuk pada saat persalinan, asupan nutrisi masa kehamilan yang tidak tercukupi sehingga terjadi komplikasi pada Ibu Hamil misalnya Anemia dan Hipertensi.

2.1.3.1.2.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Indicator ini menunjukkan ketersediaan posyandu untuk melayani balita dalam satu wilayah pemukiman. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Rasio Posyandu per satuan balita rata-rata sebesar 1:15

Tabel 2.69
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu (buah)	300	302	305	305	307
2	Jumlah Balita	1.912	1.910	1.885	1.954	1.980
3	Rasio Posyandu persatuan balita	1:15	1:15	1:16	1:15	1:15

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Dari standar rasio ketersediaan posyandu sebesar 1 : 50, sesuai tabel 2.69, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan posyandu di kabupaten Kepulauan Selayar untuk melayani balita sudah memadai dengan rasio sebesar 1 :15. Angka rasio tersebut sudah melampai standar yang ditetapkan.

2.1.3.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatupenduduk

Rasio ini menunjukkan ketersediaan puskesmas, poliklinik, maupun pustu yang mampu melayani penduduk dalam satu satuan pemukiman. Dari sisi ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memadai, rata-rata setiap desa sudah memiliki sarana pelayanan kesehatan berupa pustu ataupun polindes. Selain itu, Dari sisi ketersediaan puskesmas, terdapat 3 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas yaitu Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, dan Bontosikuyu. Sekalipun demikian, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari banyak pulau, menyebabkan akses penduduk terhadap layanan kesehatan berbeda-beda, karena belum semua pulau terdapat fasilitas kesehatan.

Tabel 2.70
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatupenduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	8	8	8	8	8
2	Pasilambena	5	5	5	5	5
3	Pasimasunggu	7	7	7	7	7
4	Taka Bonerate	9	9	9	9	10
5	Pasimasunggu Timur	6	6	6	6	7
6	Bontosikuyu	13	13	13	13	13
7	Bontoharu	9	9	9	9	10
8	Benteng	2	3	3	3	4
9	Bontomanai	12	12	12	13	13
10	Bontomatene	10	10	10	10	10
11	Buki	6	6	6	6	6
Kabupaten Kepulauan Selayar		**87**	**88**	**88**	**89**	**93**

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa puskesmas, poliklinik, dan pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021 meningkat setiap tahun. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada periode yang sama, maka diperoleh rasio puskesmas, poliklinik, pustu sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatupenduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah *Puskesmas, Poliklinik, Pustu* (buah)	87	88	88	89	93
2	Jumlah Penduduk	131 605	133 003	134 280	135 642	137 071
3	Rasio *Puskesmas, Poliklinik, Pustu* persatuan Penduduk	7 : 10 000	7 : 10 000	7 : 10 000	7 : 10 000	7 : 10 000
		1 : 1513	1 : 1511	1 : 1526	1 : 1524	1 : 1474

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021, rasio puskesmas, poliklinik, pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah rata-rata dalam 7 unit faslitas kesehatan melayani 10 ribu penduduk, atau 1 unit fasilitas kesehatan melayani sebanyak 1.500 penduduk. Rasio tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk adalah 1 fasilitas kesehatan maksimal melayani 10.000 penduduk.

2.1.3.1.2.8. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Ketersediaan Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2020, baru 1 buah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Haiyung untuk melayani . Pembangunan rumah sakit pratama di Pulau Jampea pada tahun 2018, hingga kini belum dapat dioperasikan karena kelengakapan alat, obat, dan tenaga kesehatan yang belum memadai. Adapun Rasio Rumah Sakit selama periode 2016 – 2021, di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah *Rumah Sakit* (buah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	131 605	133 003	134 280	135 642	137 071
3	**Rasio *Rumah Sakit* per100 rb Penduduk**	1 : 1,32	1 : 1,33	1 : 1,34	1 : 1,35	1 ; 1,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Pelayanan di RSUD KH. Haiyung yang merupakan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Oleh karena itu, selama rentang waktu 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain berupa :

a. Penambahan gedung perawatan;
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah sakit;
c. Penambahan jumlah dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya
d. Peningkatan jumlah dan kualitas obat dan perbekalan kesehatan.

2.1.3.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Sebagai kabupaten yang terpisah dari jazirah Sulawesi Selatan, ketersediaan tenaga dokter baik dokter umum apatah lagi dokter ahli, di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum memadai.

Ketersediaan dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Kepulauan Selayar masih jauh dari memadai, apalagi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Adapun Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.73
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,238	0,135	0,112	0,108	0,109

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021, terjadi penurunan rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain karena pertambahan jumlah penduduk, beberapa faktor terjadinya penurunan rasio dokter di Kabupaten Keplauan Selayar, antara lain, yaitu :

a. Habis masa tugas. Sejumlah dokter yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokter dengan status Dokter Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan. Tenaga dokter yang bersangutan, segera meninggalkan daerah setelah masa tugas mereka sesuai kontrak telah berakhir;
b. Pindah Ikut Suami/Isteri. Terdapat juga kasus, dimana dokter yang dulunya terangkat pertama kalinya sebagai Dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun setelah diangkat dan bertugas, kemudian bermohon pindah dengan alasan ikut suami atau ingin dekat dengan keluarga.

Sesungguhnya, sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dokter antara lain melakukan kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Mayarakat Universitas Hasanuddin dalam hal penyediaan tenaga dokter. Selain itu, mengusulkan ke kementerian terkait untuk menempatkan tenaga dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui recruitment

maupun penempatan tugas dari daerah lain ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun upaya tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga dokter yang ada.

2.1.3.1.2.10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk. Indicator ini menunjukkan ketersediaan tenaga medis untuk melayani penduduk. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, dari sisi ketersediaan tenaga medis sudah memadai, namun dari sisi penyebarannya sehingga mampu menjangkau seluruh penduduk belum merata. Hal ini disebabkan karena factor geografis dimana belum semua pulau memiliki sarana dan fasilitas kesehatan, selain itu, akses perhubungan baik darat, maupun laut yang masih terbatas serta kondisi cuaca yang kadang tidak bersahabat.

Tabel 2.74
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,35	0,203	0,216	0,545	0,547

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Rasio tenaga medis per 10000 penduduk selama rentang waktu 2016-2021 berfluktuasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk. Dinamika penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan faktor berpengaruh naik turunnya rasio tenaga medis, selain juga karena faktor ketersediaan jumlah tenaga medis itu sendiri.

2.1.3.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani. Seperti halnya tenaga dokter, ketersediaan tenaga kebidanan di Kabupaten Kepulauan Selayar juga belum memadai. Belum semua desa memiliki petugas kebidanan. Hal tersebut, diperkuat dengan data cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani sesuai tabel berikut yang menunjukkan angka rata-rata 0,7 persen. Hal ini terjadi selain karena pengangkatan tenaga kebidanan yang masih terbatas, juga karena tingkat kelulusan calon bidang dalam uji sertifikasi profesi bidan yang relative rendah setiap ada kesempatan ujian.

Tabel 2.75
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	0,768	0,745	0,726	0,717	0,616

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Faktor utama penyebab masih rendahnya cakupan konplikasi kebidanan yang tertangani dalam rentang waktu 2016-2017 adalah

a. Masih terbatasnya tenaga bidan;
b. Distribusi tenaga bidan yang beum merata, kebanyakan tenaga bidan yang ada bertugas di Kota Benteng atau di daratan pulau Selayar.

Masih terbatasnya tenaga bidan di kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan oleh terbatasnya jumlah formasi pengangkatan tenaga kebidanan, serta rendahnya tingkat kelulusan calon bidang dalam uji sertifikasi profesi bidan pada setiap ada kesempatan ujian.

2.1.3.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF).

Tabel 2.76
Cakupan Pertolongan Persalinan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
2	Pasilambena	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
3	Pasimasunggu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
4	Taka bonerate	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
5	Pasimasunggu Timur	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
6	Bontosikuyu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
7	Bontoharu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
8	Benteng	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
9	Bontomanai	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
10	Bontomatene	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
11	Buki	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
Cakupan Pertolongan Persalinan		0,800	0,861	0,906	0,840	0,840

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021, cakupan pertolongan persalinan menurut kecamatan umumnya sama setiap tahunnya, kecuali pada tingkat kabupaten, dalam tiga tahun pertama mengalami kenaikan dan tahun berikutnya turun lagi.

Faktor utama penyebab naik atau turunnya realisasi cakupan pertolongan persalinan di kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

a. Belum semua satuan pemukiman tersedia tenaga bidan;
b. Akses jarak antara tempat tinggal ibu hamil dengan tempat pelayanan kesehatan yang relatif jauh atau sulit dikunjungi oleh tenaga bidan;
c. Kondisi geografis dengan cuaca yang kurang bersahabat pada waktu-waktu tertentu.

2.1.3.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi yaitu *Universal Child Immunization* (UCI) desa/kelurahan. Desa/kelurahan UCI adalah Gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
2	Pasilambena	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
3	Pasimasunggu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
4	Taka bonerate	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
5	Pasimasunggu Timur	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
6	Bontosikuyu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
7	Bontoharu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
8	Benteng	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
9	Bontomanai	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
10	Bontomatene	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
11	Buki	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Wilayah ber HPL/HGB		0,142	0,181	0,181	0,181	0,259

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Cakupan Desa/Kelurahan UCI dari 88 Desa/Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sebanyak 68 Desa/Kelurahan (77,3%), pada tahun 2017 meningkat menjadi 81 Desa/ Kelurahan (92%), pada tahun 2018 turun kembali menjadi 78 Desa/ Kelurahan (88,6%) dan pada tahun 2019 jumlahnya sebanyak 79 Desa/Kelurahan (89,8%). Tahun 2020 turun menjadi 75 Desa/Kelurahan atau sebesar 85,2 %.

Beberapa faktor yang menyebabkan meningkat dan menurunnya Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan karena jumlah petugas imunisasi yang terlatih masih kurang selain itu petugas imunisasi mempunyai tugas rangkap dan adanya penggantian koordinator imunisasi disebabkan pindah tugas atau pensiun selain masalah intern masalah ekstern seperti adanya desa sulit tempat antara puskesmas menyeberangi lautan dan faktor cuaca sehingga pelayanan terhambat. Faktor lain yaitu biaya operasional untuk wilayah sulit yang masih kurang. Selain itu, maraknya isu terkait Vaksin MR (Measless Rubella) yang menimbulkan berkurangnya masyarakat yang mau mengantar anaknya untuk diimunisasi.

2.1.3.1.2.14. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan yang memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Tabel 2.78
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	75	60	55	50	50
2	Pasilambena	75	60	55	50	50
3	Pasimasunggu	75	60	55	50	50
4	Taka bonerate	75	60	55	50	50
5	Pasimasunggu Timur	75	60	55	50	50
6	Bontosikuyu	75	60	55	50	50
7	Bontoharu	75	60	55	50	50
8	Benteng	75	60	55	50	50
9	Bontomanai	75	60	55	50	50
10	Bontomatene	75	60	55	50	50
11	Buki	75	60	55	50	50
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		4,184	3,926	3,926	3,824	3,726

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021, Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100

Kkal/kapita/hari) di Kabupaten Kepulauan Selayar menurun setiap tahunnya. Faktor penyebab terjadinya penurunan dimaksud adalah :

a. masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang makanan yang bergizi;
b. kondisi geografis dengan tingkat ketersediaan pangan yang tidak merata diantara pulau-pulau yang berpenduduk.

2.1.3.1.2.15. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Tabel 2.79
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
2	Pasilambena	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
3	Pasimasunggu	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
4	Taka bonerate	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
5	Pasimasunggu Timur	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
6	Bontosikuyu	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
7	Bontoharu	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
8	Benteng	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
9	Bontomanai	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
10	Bontomatene	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
11	Buki	6,36	7,27	7,72	8,09	8,54
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		70	80	85	89	95

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terjadi kenaikan setiap tahunnya. Adanya peningkatan tersebut disebabkan oleh, beberapa faktor, antara lain :

a. Semakin tingginya kesadaran keluarga dalam mengunjungi posyandu dan atau tempat pelayanan kesehatan terutama pada saat imunisasi;
b. Dilaksanakannya program pelayanan imunisasi khususnya campak secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan;

2.1.3.1.2.16. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia merupakan peradangan pada parenkim paru distal dari bronkiolus terminalis yang meliputi bronkiolus respiratorius dan alveoli sehingga

menyebabkan terjadinya gangguan pertukaran gas setempat dan konsolidasi jaringan paru-paru. Kasus penemuan pneumonia pada balita di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rentang waktu 2016-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun demikian, peningkatan penemuan pneumonia khususnya pada balita juga diringi dengan peningkatan cakupan pneumonia yang tertangani, sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.80
Cakupan balita pneumonia yang ditangani Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	6	0	2	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	1	0
3	Pasimasunggu	0	0	16	14	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	7	1
6	Bontosikuyu	0	8	8	0	11
7	Bontoharu	0	0	0	20	87
8	Benteng	0	0	0	9	3
9	Bontomanai	0	7	7	20	4
10	Bontomatene	0	19	19	2	3
11	Buki	0	0	1	0	4
Cakupan balita pneumonia yang ditangani		0,56	0,54	0,57	0,6	0,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Kasus pneumonia pada balita di Kabupaten kepulauan Selayar terjadi disebabkan oleh faktor risiko intrinsik dan faktor risiko ekstrinsik. Faktor risiko ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari lingkungan sedangkan faktor risiko intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor risiko untuk pneumonia yang berasal dari lingkungan misalnya adalah polusi udara di rumah, kondisi fisik rumah misalnya fentilasi rumah dan pencahayaan serta kepadatan hunian. Faktor yang berasal dari diri sendiri misalnya adalah status imunisasi serta status gizi.

2.1.3.1.2.17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sumber penularan yaitu pasien TB BTA (bakteri tahan asam) positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang

kecil. Bebanpenyakit yang disebabkan oleh tuberculosis dapat diukur dengan Case Notification Rate (CNR), prevalensi, dan mortalitas/kematian.

Tabel 2.81
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	5	7	32	18	5
2	Pasilambena	1	1	18	15	8
3	Pasimasunggu	9	2	28	9	21
4	Taka bonerate	1	4	31	10	8
5	Pasimasunggu Timur	2	12	12	12	12
6	Bontosikuyu	7	9	17	24	11
7	Bontoharu	5	10	8	24	21
8	Benteng	5	43	62	70	40
9	Bontomanai	10	6	7	18	17
10	Bontomatene	5	7	23	17	13
11	Buki	1	4	10	5	7
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA		0,800	0,768	0,409	0,487	0,475

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Terjadinya penurunan ini, disebabkan oleh semakin berkurangnya temuan kasus penderita TBC BTA di masyarakat, serta meningkatnya angka kesembuhan bagi penderita TBC BTA.

2.1.3.1.2.18. Penderita diare yang ditangani

Diare merupakan gejala gangguan pada saluran pencernaan yang menyebabkan tinja seseorang berubah menjadi encer dan berair. Selain perubahan bentuk tinja, diare juga ditandai dengan perut mulas akibat gerakan saluran pencernaan yang menjadi lebih aktif. Diare yang berlangsung singkat biasanya bukan merupakan kondisi medis serius. Sebaliknya, diare yang berlangsung lama dan tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam nyawa.

Tabel 2.82
Penderita diare yang ditangani Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	84	223	247	260	125
2	Pasilambena	56	44	157	141	113
3	Pasimasunggu	91	201	315	68	17
4	Taka bonerate	68	65	189	324	135

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pasimasunggu Timur	37	163	321	200	106
6	Bontosikuyu	345	302	368	290	106
7	Bontoharu	162	50	42	92	153
8	Benteng	298	317	366	268	210
9	Bontomanai	593	578	1044	576	376
10	Bontomatene	633	724	833	576	376
11	Buki	214	191	191	321	155
Penderita diare yang ditangani		0,5	0,7	0,6	0,5	0,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021 terjadi fluktuasi dalam hal penderita diare tertangani. Kondisi dipengaruhi oleh faktor penemuan kasus yang jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya. Adapun penanganan terhadap penderita diare, dilakukan melalui :

a. Anjuran agar penderita diare mengonsumsi makanan rendah serat
b. Banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi
c. Menghindari minuman berkafein dan beralkohol
d. Tidak makan berlebihan

2.1.3.1.2.19. Angka kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa.

Tabel 2.83
Angka kejadian Malaria Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	5	18	5	0	5
2	Pasilambena	4	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	10	8	11	2	0
4	Taka bonerate	0	2	4	0	0
5	Pasimasunggu Timur	5	4	3	0	0
6	Bontosikuyu	8	0	0	0	0
7	Bontoharu	0	0	1	0	1
8	Benteng	5	0	0	1	1
9	Bontomanai	4	1	1	0	0
10	Bontomatene	0	0	4	0	0
11	Buki	0	0	1	4	0
Angka kejadian Malaria		41	32	30	7	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rentang waktu 2016-2021 pada umumnya menurun kecuali pada tahun 2017 yang mengalami kenaikan dari 32 kasus pada tahun 2016 menjadi 41 kasus pada tahun 2017. Kasus kejadian malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya terjadi karena faktor lingkungan yang kurang bersih sehingga menjadi sarang berkembangnya nyamuk malaria.

2.1.3.1.2.20. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Untuk mengetahui prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihata pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	2	0	4	4
2	Pasilambena	0	0	1	4	4
3	Pasimasunggu	0	0	3	0	0
4	Taka bonerate	1	3	1	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	3	2	7	7
6	Bontosikuyu	1	0	0	1	1
7	Bontoharu	0	0	0	0	0
8	Benteng	0	2	2	5	5
9	Bontomanai	0	1	1	1	1
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,007	0,004	0,006	0,007	0,005

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021 berfluktuasi. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar terjadi umumnya karena ditemukan pada orang-orang dengan riwayat perjalanan pulang dari merantau. Dengan demikian, prevalensi HIV /AIDS dipengaruhi oleh jumlah orang yang datang dari rantau dengan indikasi terinfeksi HIV/AIDS. Walaupun terdapat juga kasus penemuan penderita HIV/AIDS akibat resiko aktivitas yang penderita lakukan sebelum terinfeksi.

2.1.3.1.2.21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Adapun perkembangan

realisasi Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.85
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
2	Pasilambena	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
3	Pasimasunggu	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
4	Taka bonerate	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
5	Pasimasunggu Timur	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
6	Bontosikuyu	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
7	Bontoharu	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
8	Benteng	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
9	Bontomanai	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
10	Bontomatene	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
11	Buki	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin		0,115	0,116	0,117	0,116	0,118

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama periode 2016-2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar relatif masih rendah meningkat. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kondisi kesehatan masyarakat miskin itu sendiri. Walaupun demikian, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, dari seluruh pasien miskin yang berobat, 100% tertangani.

2.1.3.1.2.22. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Adapun Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, pada kurun waktu 2016-2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.86
Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
2	Pasilambena	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
3	Pasimasunggu	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
4	Taka bonerate	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pasimasunggu Timur	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
6	Bontosikuyu	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
7	Bontoharu	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
8	Benteng	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
9	Bontomanai	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
10	Bontomatene	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
11	Buki	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
Cakupan Kunjungan Bayi		1,029	0,924	0,934	0,915	0,930

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa cakupan kunjungan bayi selama periode 2016-2021 relatif tetap, kecuali dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan. Realisasi Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Tingkat kesadaran orang tua;
b. Akses keluarga bayi dengan lokasi tempat pelayanan kesehatan;
c. Kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggal keluarga bayi

2.1.3.1.2.23. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jenis penyakit yang pernah mengalami Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021 antara lain : rabies, diare, malaria, dan demam berdarah.

Tabel 2.87
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	1	0	0
2	Pasilambena	1	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	0
7	Bontoharu	0	0	0	0	0
8	Benteng	1	1	0	0	1
9	Bontomanai	0	0	0	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	1	0
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		2	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Selama periode 2016-2021, Kabupaten Kepulauan Selayar, setiap tahunnya pernah mengalami KLB. Adapun bentuk penanganannya, adalah :

a. melakukan penyeledikan epidemologis untuk mengetahui penyebabnya dan upaya antisipatif agar penyakit terkait tidak berulang;
b. Perbaikan sarana dan prasarana air bersih dan atau air minum;
c. Pembangunan jamban keluarga;
d. Sosialisasi gerakan 1 rumah 1 jumantik;
e. Sosialisasi penggunaan Kelambu;
f. Pengadaan Vaksin Anti Rabies;
g. Peningkatan kompetensi Petugas Kesehatan dalam penanganan KLB.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jarigan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

2.1.3.1.3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Berdasarkan SK Jalan Kabupaten Nomor 605 / XII / Tahun 2018, panjang jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten 824,8 km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten kepulauan Selayar, pada tahun 2016 adalah 0,53, kemudian menurun pada tahun 2017 sebesar 0,36, kemudian pada tahun 2018 meningkat manjadi 0,58, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 0,75 dan tahun 2020 sebesar 0,70. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,06	0,03	0,06	0,07	0,07
2	Pasilambena	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
3	Pasimasunggu	0,03	0,00	0,03	0,04	0,04
4	Taka bonerate	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03
5	Pasimasunggu Timur	0,02	0,00	0,02	0,03	0,03
6	Bontosikuyu	0,05	0,03	0,06	0,09	0,05
7	Bontoharu	0,08	0,05	0,08	0,10	0,10
8	Benteng	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Bontomanai	0,11	0,10	0,12	0,15	0,15
10	Bontomatene	0,07	0,05	0,07	0,11	0,11

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
11	Buki	0,06	0,05	0,07	0,07	0,07
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		**0,53**	**0,36**	**0,58**	**0,75**	**0,70**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Salah satu indikator kinerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2016, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0.005, pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 0.007 dan 0,006, pada tahun 2019 sebesar 0.006 dan pada tahun 2020 sebesar 0,006. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dari tahun 2018-2020 tetap disebabkan panjang jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten Kepulauan Selayar tetap denga peningkatan jumlah penduduk yang kecil dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahunnya 1,00%. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,0005	0,0001	0,0001	0,0006	0,0006
2	Pasilambena	0,0003	0,0000	0,0000	0,0004	0,0004
3	Pasimasunggu	0,0002	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
4	Taka bonerate	0,0001	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
5	Pasimasunggu Timur	0,0003	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003
6	Bontosikuyu	0,0006	0,0001	0,0001	0,0007	0,0006
7	Bontoharu	0,0007	0,0001	0,0001	0,0008	0,0007
8	Benteng	0,0001	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002
9	Bontomanai	0,0011	0,0001	0,0001	0,0013	0,0002
10	Bontomatene	0,0007	0,0001	0,0001	0,0008	0,0008
11	Buki	0,0004	0,0000	0,0000	0,0005	0,0004
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,005	0,007	0,006	0,006	0,006

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi didefenisikan dengan rumah tangga yang telah memiliki/ mengakses jamban kelurga dan jamban umum, dan tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Angka rumah tinggal bersanitasi diperoleh

dari persentase akses penduduk terhadap jamban, dimana pada terdapat peningkatan sebesar 0,01% - 0,58% dalam 5 tahun terakhir. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sudah mencapai 74,93 persen dimana jumlah total rumah tangga Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 33.713 sedangkan jumlah rumah tangga bersanitasi 25.263. Faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pola perilaku hidup bersih dan sehat meningkat dan bantuan pembangunan jamban keluarga dan jamban umum yang dibangun melalui dana kabupaten dan dana desa serta bantuan dari pemerintah pusat. Selengkapnya persentase rumah tinggal bersanitasi menurut kecamatan pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,15	7,82	7,82	8,10	8,10
2	Pasilambena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pasimasunggu	0,15	7,72	7,87	8,90	8,90
4	Taka bonerate	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
5	Pasimasunggu Timur	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
6	Bontosikuyu	0,00	0,00	0,15	0,30	0,83
7	Bontoharu	0,15	7,72	7,72	7,86	8,75
8	Benteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bontomanai	0,44	22,73	22,73	23,14	23,73
10	Bontomatene	0,44	23,17	23,46	23,88	23,88
11	Buki	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)		69,17	69,17	69,75	72,92	74,93

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.4. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Kepulauan Selayar hampir mencapai 100 persen (95,00 persen) terhadap panjang seluruh drainase. Ini menunjukkan bahwa kondisi fisik drainase di Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya tidak tersumbat dan mempunyai kemampuan mengalirkan air pada saat musim hujan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Persentase drainase dalam kondisi baik menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
2	Pasilambena	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Pasimasunggu	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
4	Taka bonerate	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
5	Pasimasunggu Timur	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
6	Bontosikuyu	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04
7	Bontoharu	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
8	Benteng	17,45	17,45	17,45	17,45	17,45
9	Bontomanai	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16
10	Bontomatene	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81
11	Buki	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran air tidak Tersumbat (%)		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.5. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Satahun

Persentase genangan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan banjir Rob dan intensitas hujan yang lama. Berkurangnya persentase genagan dari tahun 2016 sebesar 19,20 persen dan tahun 2020 sebesar 28,61 persen disebabkan pembangunan drainase dalam kondisi baik pada daerah rawan genangan dan berpotensi tergenang yang di lakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui anggaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Satahun Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1,15	2,31	1,73	2,66	2,77
2	Pasilambena	1,72	1,67	2,01	3,19	3,19
3	Pasimasunggu	1,96	2,99	3,29	3,57	3,53
4	Taka bonerate	1,88	1,98	2,17	2,36	2,35
5	Pasimasunggu Timur	2,70	2,60	3,06	3,53	3,22
6	Bontosikuyu	1,80	1,86	2,04	2,19	2,19
7	Bontoharu	1,88	2,00	2,03	2,22	2,22
8	Benteng	1,25	1,13	1,33	1,43	1,43
9	Bontomanai	1,62	1,80	1,87	2,12	2,11
10	Bontomatene	1,25	1,54	1,57	1,80	1,80
11	Buki	1,99	2,65	2,71	3,80	3,79
Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Satahun (%)		19,20	22,52	23,80	28,87	28,61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.6. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai

Persentase pembangunan turap pada wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat rendah antara 16 persen sampai dengan 17 persen. Tahun 2016 sebesar 16,28 persen dan tahun 2020 sebesar 17,85 persen. Persentase pembangunan turap yang masih rendah dengan luas wilayah rawan longsor membutuhkan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0,05	0,09	0,09
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0,03	0,03	0,03
6	Bontosikuyu	0	0,05	0,05	0,05	0,05
7	Bontoharu	0,11	0,41	0,43	0,67	0,88
8	Benteng	0,04	0,04	0,04	0,04	0,10
9	Bontomanai	0,12	0,38	0,42	0,62	0,68
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0,03	0,03
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai		16,28	16,89	17,02	17,531	17,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.7. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Peningkatan capaian luas irigasi kondisi baik seiring dengan peningkatan kondisi saluran induk dan saluran sekunder pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2016 yaitu 86,69% dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 5,18% persen, sehingga persentase irigasi dalam kondisi baik di tahun 2020 yaitu 91,87%. Luas irigasi kewenangan kabupaten sebesar 1.695 Ha. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	46,16	45,36	45,36	52,74	52,74
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	28,36	28,01	28,01	28,01	28,01
6	Bontosikuyu	3,08	2,73	2,73	2,73	2,73
7	Bontoharu	4,49	4,14	4,14	4,14	4,14
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	4,61	4,26	4,26	4,26	4,26
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)		86,69	84,94	84,49	91,87	91,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.8. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan Irigasi diperoleh dari Panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian dimana Panjang saluran irigasi ataupun luas lahan hanya sedikit bertambah tiap tahunnya diakibatkan panjang saluran irigasi yang dibangun tidak signifikan menyebabkan rasio jaringan irigasi sebesar 0,48 dan tidak ada perubahan dari tahun 2016-2020. Faktor yang mempengaruhi masih banyaknya jaringan irigasi kondisi baik. Rasio jaringan irigasi menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
6	Bontosikuyu	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	Bontoharu	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Rasio Jaringan Irigasi		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.9. Persentase Penduduk berakses Air Minum

Peningkatan yang cukup signifikan penuduk berakses air minum pada tahun 2020 . Hal ini disebabkan karena akses air minum merupakan indikator RPJMN dan indikator SDGs yang harus dicapai. Dari data tersebut terlihat bahwa 85,96% penduduk atau sebesar 116.589 jiwa sudah bias mengakses air untuk kebutuhan minum langsung baik sumbernya dari sungai, sumur dan atau mata air terbuka lainnya. Persentase penduduk berakss air minum menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96
Persentase Penduduk berakses Air Minum Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	79.02	80.00	85.58	100.00	91.13
2	Pasilambena	44.48	44.53	47.17	54.82	54.45
3	Pasimasunggu	79.74	80.00	84.93	98.73	100.09
4	Taka bonerate	13.46	13.49	14.31	16.65	17.58
5	Pasimasunggu Timur	72.39	73.32	78.36	91.81	90.21
6	Bontosikuyu	71.42	72.06	76.85	89.87	91.99
7	Bontoharu	79.53	80.00	85.25	99.44	95.00
8	Benteng	80.70	80.00	84.12	96.94	106.25
9	Bontomanai	79.14	80.00	85.44	100.00	95.99
10	Bontomatene	75.11	75.93	81.09	94.95	95.89
11	Buki	78.64	79.49	84.97	99.55	97.34
Persentase Penduduk berakses Air Minum		**69,12**	**69.12**	**69.44**	**73.81**	**85.96**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.10. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan masih sangat rendah yaitu 20,97.Hal ini disebabkan rumah tangga yang memperoleh air minum layak merupakan rumah tangga yang menggunakan air minum yang dikelolah PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0,98	1,03	1,33	1,39	1,43
7	Bontoharu	3,46	3,52	3,81	3,87	3,91
8	Benteng	8,92	8,97	9,27	9,33	9,37
9	Bontomanai	2,96	3,01	3,31	3,37	3,41
10	Bontomatene	1,52	1,57	1,87	1,93	1,97
11	Buki	0,44	0,49	0,79	0,85	0,89
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		18,27	18,59	20,39	20,73	20,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.11. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 sebesar 0,71. Bertambahnya jumlah rumah ibadah setiap tahunnya ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rasio tempat ibadah per satuan penduduk, dikarenakan laju pertambahan penduduk lebih besar daripada laju peningkatan rasio tempat ibadah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
2	Pasilambena	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
3	Pasimasunggu	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Taka bonerate	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
5	Pasimasunggu Timur	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
6	Bontosikuyu	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
7	Bontoharu	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8	Benteng	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
9	Bontomanai	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
10	Bontomatene	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
11	Buki	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk		0,80	0,79	0,78	0,78	0,71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.12. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (RTH) sebesar 30% yang terdiri dari RTH publik sebesar 20 persen dan RTH privat sebesar 10 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Akan tetapi sampai saat ini, pemenuhan kebutuhan RTH sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar belum tercapai sampai pada tahun 2020 baru mencapai 1,37 persen. Hal ini dikarenakan hampir semua lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH pada RTRW merupakan milik masyarakat yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mewujudkannya menjadi RTH. Kebijakan saat ini diprioritaskan pada upaya menjaga keberadaan RTH yang telah terbangun, agar tidak dialihfungsikan penggunaannya, yang tergambar pada persentase pemenuhan RTH public sebesar 1,37 persen dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
2	Pasilambena	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Pasimasunggu	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
4	Taka bonerate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pasimasunggu Timur	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Bontosikuyu	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
7	Bontoharu	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
8	Benteng	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
9	Bontomanai	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32
10	Bontomatene	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
11	Buki	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		**0,04**	**1,37**	**1,37**	**1,37**	**1,37**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.13. Rasio Bangunan Ber IMB Per satuan Bangunan

Rasio bangunan ber–IMB per satuan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan yakni dari 12,21 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 19,00 persen pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa ketaatan masyarakat atau pemilik bangunan akan pentingnya izin IMB semakin meningkat dalam membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Rasio bangunan ber-IMB menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Rasio Bangunan Ber IMB Per satuan Bangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0,36	0,41	0,41	0,77	0,86
7	Bontoharu	0,90	0,98	0,98	1,52	2,93
8	Benteng	8,94	9,40	10,05	11,03	12,29
9	Bontomanai	0,81	0,99	1,09	1,17	1,48
10	Bontomatene	0,53	0,53	0,53	0,53	0,72
11	Buki	0,66	0,66	0,72	0,72	0,72
Rasio Bangunan Ber IMB Per satuan Bangunan		**12,21**	**12,98**	**13,79**	**15,75**	**19,00**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.3.14. Ketaatan Terghadap RTRW

Ketaatan terhadap rencana tata ruang didasarkan pada persentase implementasi indikasi program pembangunan yang tercantum dalam rencana tata ruang yang mengindikasikan kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pelaksanaan pembangunan. Memperhatikan implementasi indikasi program dalam RTRW Kabuapten Kepulauan Slayar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012-2032, maka dapat digambarkan bahwa ketaatan terhadap rencana tata ruang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mencapai 95 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran para stakeholder untuk melaksanakan pembangunan dengan mengacu pada rencana tata ruang.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh.

Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan.

2.1.3.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni Kabupaten Kepulauan Salayar pada tahun 2017 sebanyak 0,76, pada tahun 2018 sebanyak 0,78, pada tahun 2019 sebanyak 0,80 dan pada tahun 2020 sebanyak 0,81. Peningkatan rasio rumah layak huni dari tahun 2016-2019 disebabkan banyaknya rumah tidak layak huni yang mendapat perbaikan melalui bantuan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan dana Dana Alokasi Khusus (DAK). Rasio rumah layak huni menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.101
Rasio Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Pasilambena	0,04	0,04	0,05	0,05
3	Pasimasunggu	0,05	0,05	0,05	0,05
4	Taka bonerate	0,08	0,07	0,08	0,08
5	Pasimasunggu Timur	0,04	0,04	0,04	0,04
6	Bontosikuyu	0,09	0,09	0,09	0,09
7	Bontoharu	0,07	0,08	0,08	0,08
8	Benteng	0,13	0,13	0,13	0,13
9	Bontomanai	0,08	0,08	0,08	0,09
10	Bontomatene	0,09	0,08	0,09	0,09
11	Buki	0,04	0,04	0,04	0,04
Rasio Rumah Layak Huni		0,76	0,78	0,80	0,81

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.4.2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio rumah layak huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni. Tahun 2020 besaran rasio rumah layak huni sebesar 0,72 yang menunjukkan adanya penurunan rasio dari 0,75 pada tahun 2019. Kenaikan pencapaian rasio rumah layak huni didukung tingginya alokasi bantuan stimulan perumahan pada tahun 2019 di Kabupaten Kepuluan Selayar. Rasio pemukiman layak huni menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Rasio Permukiman Layak Huni Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	n/a	0,95	0,65	0,65	0,65
2	Pasilambena	n/a	0,53	0,24	0,24	0,24
3	Pasimasunggu	n/a	0,99	0,94	0,94	0,94
4	Taka bonerate	n/a	0,71	0,23	0,23	0,23

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pasimasunggu Timur	n/a	0,98	0,84	0,84	0,84
6	Bontosikuyu	n/a	0,99	0,93	0,93	0,93
7	Bontoharu	n/a	0,93	0,88	0,88	0,88
8	Benteng	n/a	0,51	0,51	0,71	0,41
9	Bontomanai	n/a	0,96	0,94	0,94	0,94
10	Bontomatene	n/a	0,98	0,96	0,96	0,96
11	Buki	n/a	0,95	0,93	0,93	0,93
Rasio Permukiman Layak Huni		n/a	0,86	0,73	0,75	0,72

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.4.3. Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni

Cakupan ketersedian rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 207 sampai tahun 2020 terus meningkat, di tahun 2017 sebesar 75,52 persen dan tahun 2020 sebesar 80,29 persen. Meningkatnya cakupan ketersedian rumah layak huni disebabkan semakin besarnya rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya dari tahun 2026 sampai tahun 2020 melalui dana pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya (BSPS). Cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	n/a	73,11	74,16	74,16	74,16
2	Pasilambena	n/a	67,54	68,92	73,92	73,92
3	Pasimasunggu	n/a	73,08	74,88	74,88	74,88
4	Taka bonerate	n/a	72,28	70,19	74,75	74,75
5	Pasimasunggu Timur	n/a	70,80	71,09	71,09	71,09
6	Bontosikuyu	n/a	71,25	74,43	75,68	76,16
7	Bontoharu	n/a	73,50	76,89	76,89	81,30
8	Benteng	n/a	88,72	88,88	91,83	92,06
9	Bontomanai	n/a	80,27	82,09	82,09	89,22
10	Bontomatene	n/a	78,91	81,20	84,16	85,34
11	Buki	n/a	81,31	85,99	85,99	90,35
Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni (%)		n/a	75,52	77,16	78,68	80,29

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.4.4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal yang belum layak huni juga berkurang. Hal ini disebabkan banyaknya program pemerintah (daerah dan pusat) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat miskin / Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 2.104
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	16,1	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	15,3	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	6,98	4,88	2,05
7	Bontoharu	7,65	11,24	0	19,06
8	Benteng	0	0	28,57	0
9	Bontomanai	12,65	6,12	0	19,79
10	Bontomatene	5,19	12,87	15,72	14,92
11	Buki	0	26,23	0	31,1
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau (%)		25,49	63,44	80,57	86,92

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.4.5. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang tertata di banding dengan luas wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum masih sangat kecil, yaitu di tahun 2017 sebesar 0,003 persen dan terus meningkat sampai tahun 2019 sebesar 0,006 dan menurun di tahun 2020 sebesar 0,003 persen. Luas area permukiman kumuh yang tetata di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat tergantung dengan besarnya anggaran yang digunakan pada kegiatan tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk penataan pemukiman melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berkisar Rp. 3.765.920.000,- di tahun 2019 dan Rp. 206.542.471,- di tahun 2020. Persentase permukiman yang tertata menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Persentase Pemukiman yang Tertata Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0,033		0
2	Pasilambena	0	0		0
3	Pasimasunggu	0	0	0,037	0
4	Taka bonerate	0,283	0,379	0,391	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0,021
6	Bontosikuyu	0,004	0,004	0,014	0
7	Bontoharu	0,005	0,038	0,004	0,008
8	Benteng	0	0	0,178	0
9	Bontomanai	0	0,003	0	0
10	Bontomatene	0,005	0.007	0,014	0
11	Buki	0	0	0	0
Persentase Pemukiman yang Tertata (%)		0,003	0,004	0,006	0,003

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Selayar, Tahun 2020

2.1.3.1.4.6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase lingkungan pemukiman kumuh di kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 semakin meningkat. Hal ini berdasarkan up-date data kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk juga menambah spot-spot lingkungan kumuh di perkotaan dan di perdesaan. Tahun 2016 persentase lingkungan kumuh sebesar 4,6 persen dan meningkat tajam pada tahun 2020 sebesar 17,5 persen atau meningkat 12,9 persen. Persentase lingkungan pemukiman kumuh menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,03	0,17	0,17	0,17
2	Pasilambena	0,09	0,43	0,43	0,43
3	Pasimasunggu	0,01	010	010	010
4	Taka bonerate	0,03	0,18	0,18	0,18
5	Pasimasunggu Timur	0,03	0,31	0,31	0,31
6	Bontosikuyu	0,05	0,19	0,19	0,19
7	Bontoharu	0,23	0,19	0,19	0,19
8	Benteng	3,41	3,41	2,04	15,60
9	Bontomanai	0,20	0,09	0,09	0,09
10	Bontomatene	0,08	0,08	0,08	0,08
11	Buki	0,42	0,20	0,20	0,20
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh		4,6	5,4	4,0	17,5

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.4.7. Persentase Luas Permukiman Kumuh

Persentase luas permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada pendataan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan Benteng. Data menunjukkan pengurangan luasan kumuh di Kota Benteng sebesar 3,00 persen di tahun 2020, dimana luas pemukiman kumuh di tahun 2019 sebesar 5,27 Ha dan di tahun 2020 sebesar 2,27%. Peran Pemerintah Daerah dalam pengurangan permukiman sangat besar juga dukungan Program KOTAKU di Kabupaten Kepulauan Selayar juga berhasil.

2.1.3.1.4.8. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat rendah berkisar antara 8 sampai 25 persen. Ini menunjukkan bahwa jumlah lingkungan perumahan yang sehat dana man serta didukung dengan PSU masih sangat randah. Data cakupan lingkungan sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 sebesar 10,3 persen dan tahun 2020 sebesar 12,0 persen, tertinggi di tahun 2017 sebesar 26,4 persen. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,58	4,02	1,89	0,00	0,00
2	Pasilambena	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
3	Pasimasunggu	1,91	11,53	1,56	1,87	2,92
4	Taka bonerate	0,42	0,77	0,44	0,46	0,00
5	Pasimasunggu Timur	3,63	0,00	3,98	0,00	4,24
6	Bontosikuyu	0,85	1,80	0,33	0,92	0,37
7	Bontoharu	0,77	3,93	1,24	2,24	1,38
8	Benteng	1,62	3,37	1,48	3,20	2,29
9	Bontomanai	0,33	0,36	0,00	0,00	0,00
10	Bontomatene	0,21	0,30	0,57	0,00	0,81
11	Buki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)		10,3	26,4	11,5	8,7	12,0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan

pertumbuhan investasi di daerah.

Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

2.1.3.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas linmas adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perubahan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tipe B menjadi Tipe A tahun 2017 diikuti dengan beralihnya bidang perlindungan masyarakat (Linmas) yang sebelumnya berada pada Kesbangpol ke Satuan Polisi Pamong Praja. Data Linmas yang diperoleh berdasarkan jumlah TPS dan hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan Pemilu. Cakupan petugas linmas di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihata pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,0267	0,0267	0,0167	0,0167	0,0167
2	Pasilambena	0,0367	0,0367	0,0267	0,0267	0,0267
3	Pasimasunggu	0,0367	0,0367	0,0267	0,0267	0,0267
4	Taka bonerate	0,0265	0,0265	0,0165	0,0165	0,0165
5	Pasimasunggu Timur	0,0265	0,0265	0,0165	0,0165	0,0165
6	Bontosikuyu	0,0267	0,0267	0,0167	0,0167	0,0167
7	Bontoharu	0,0337	0,0337	0,0237	0,0237	0,0237
8	Benteng	0,0937	0,0937	0,0537	0,0537	0,0537
9	Bontomanai	0,0367	0,0367	0,0267	0,0267	0,0267
10	Bontomatene	0,0396	0,0396	0,0296	0,0296	0,0296
11	Buki	0,0265	0,0265	0,0165	0,0165	0,0165
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0.41	0.41	0.27	0.27	0,27

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Cakupan petugas linmas yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Minimnya dukungan sumber daya aparatur yang ada.
b. Keterbatasan anggaran terhadap indikator-indikator yang dilakukan.
c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung program/kegiatan.

2.1.3.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilapokan masyarakat dari hasil operasi terkait, dikali 100 persen. Pada tahun 2016-2020, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) sebanyak 100 persen.

Tabel 2.109
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	8,4	7,4	9	9	7
2	Pasilambena	5,1	5,19	6	6	5
3	Pasimasunggu	7,4	6,7	8	8	7
4	Taka bonerate	5,8	5,9	6	6	6
5	Pasimasunggu Timur	4,6	6,4	6	6	6
6	Bontosikuyu	4	5,5	7	7	9
7	Bontoharu	9,3	9,9	10	11	14
8	Benteng	15,5	20	21	19	18
9	Bontomanai	5,1	4,1	7	7	7
10	Bontomatene	9	9	10	10	11
11	Buki	8,3	9,2	10	11	10
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		82.5	89.29	100	100	100

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran atau disebut penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012.

Tabel 2.110
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas WMK	137	137	251	251	457
2	Luas potensi kebakaran	1357	1357	1357	1357	1357
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran		10,1	10,1	18,5	18,5	33,67

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Pemadam Kebakaran baru bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pada tahun 2017, sehingga Data SPM Pemadam Kebakaran Tahun 2011-2015 diperoleh dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Pada tahun 2016-2017 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 137 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 10,1 persen. Sedangkan tahun 2018-2019 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 251 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 18,5 persen.

Pada tahun 2020 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 457 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga Cakupan pelayanan bencana kebakaran hanya mencapai 33,67 persen, karena wilayah manajemen kebakaran yang bisa tertangani tidak sampai seperempat luas potensi kebakaran. Sarana dan prasarana, sumber daya aparatur serta belum adanya UPTD menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

Cakupan pelayanan bencanan kebakaran yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Minimnya dukungan sumber daya aparatur yang ada.
b. Keterbatasan anggaran terhadap indikator-indikator yang dilakukan.
c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung program/kegiatan.

2.1.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15

(lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2.111
Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	2	4	2,78
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	5,56
7	Bontoharu	0	0	0	0	0
8	Benteng	30	30	40	58	60,55
9	Bontomanai	0	0	0	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	11,11
11	Buki	0	0	0	0	0
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		30	30	42	62	80

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Pada tahun 2017, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap yaitu sebanyak 30 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 30 kasus. Pada tahun 2018, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 42 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 42 kasus. Pada tahun 2019, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 62 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 62 kasus. Sedangkan Pada tahun 2020, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 80 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 80 kasus.

2.1.3.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Peraturan Daerah Kabupeten Kepulauan Selayar pada lima tahun terakhi dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar 100 persen.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulaaun Selayar yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial.

2.1.3.1.6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara intensif memberikan berbagai bantuan sosial setiap tahun kepada para PMKS yang terdapat di 11 kecamatan. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah sebesar 12,52 persen. dan 19,4 persen pada tahun 2017. Memasuki tahun 2018, persentase tersebut meningkat menjadi 22,53 persen yang terus mengalami peningkatan menjadi 47,73 persen di tahun 2019 dan mencapai angka 98,7 persen pada tahun 2020. Semakin meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial disebabkan beberapa faktor, antara lain:

a. Pelaksanaan pemutakhiran data PMKS by name by address dimana pendataan dimulai dari tingkat desa oleh pendata desa/kelurahan dengan mencermati dan melengkapi data apabila ditemukan data yang belum lengkap atau berubah, menghapus data jika dalam daftar ditemukan ada seseorang/lkeluarga yang bukan termasuk PMKS, meninggal dunia atau ganda dan menambah data apabila ada PMKS baru yang belum terdaftar serta memverifikasi dan memvalidasi data.
b. Upaya pemerintah daerah yang terus mengoptimalkan kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial di Kabuaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.112
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1,138	1,76	2,048	4,339	1052
2	Pasilambena	1,138	1,76	2,048	4,339	340
3	Pasimasunggu	1,138	1,76	2,048	4,339	730
4	Taka bonerate	1,138	1,76	2,048	4,339	1045
5	Pasimasunggu Timur	1,138	1,76	2,048	4,339	612
6	Bontosikuyu	1,138	1,76	2,048	4,339	1679
7	Bontoharu	1,138	1,76	2,048	4,339	981
8	Benteng	1,138	1,76	2,048	4,339	468
9	Bontomanai	1,138	1,76	2,048	4,339	1273
10	Bontomatene	1,138	1,76	2,048	4,339	1728
11	Buki	1,138	1,76	2,048	4,339	950
Persentase		12,52	19,4	22,53	47,73	98,7

Sumber : Dinas Sosial Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.6.2. Persentase PMKS yang tertangani

Penanganan para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Data pada tabel berikut dapat dilihat tahun 2016 persentase PMKS yang tertangani hanya sebesar 0,32% dan 0,55% pada tahun 2017. Memasuki tahun 2018, persentase PMKS yang tertangani mengalami kenaikan menjadi 6,49%, 6,93% pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020. Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani dari tahun ke tahun sejalan dengan upaya pemerintah yang terus mengoptimalkan kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar serta telah dilaksanakannya pemutakhiran data PMKS by name by address sehingga penyerahan bantuan sosial tepat sasaran dan tepat anggaran.

Tabel 2.113
Persentase PMKS yang tertangani Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,029	0,05	0,59	0,63	45
2	Pasilambena	0,029	0,05	0,59	0,63	19
3	Pasimasunggu	0,029	0,05	0,59	0,63	6
4	Taka bonerate	0,029	0,05	0,59	0,63	7
5	Pasimasunggu Timur	0,029	0,05	0,59	0,63	1
6	Bontosikuyu	0,029	0,05	0,59	0,63	4
7	Bontoharu	0,029	0,05	0,59	0,63	23
8	Benteng	0,029	0,05	0,59	0,63	18
9	Bontomanai	0,029	0,05	0,59	0,63	2

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Bontomatene	0,029	0,05	0,59	0,63	4
11	Buki	0,029	0,05	0,59	0,63	1
Persentase		0,32	0,55	6,49	6,93	11,81

Sumber : Dinas Sosial Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.6.3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Berbagai langkah dan kebijakan telah dilaksanakan pemerintah daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui perlindungan sosial, peningkatan kesempatan berusaha, penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan bagi keluarga miskin melalui program antara lain Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, RTLH, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan, peningkatan ketahanan dan kualitas hidup keluarga dan lain-lain. Namun dikarenakan munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS mengalami penurunan yang disebabkan oleh anggaran yang mengalami *refocusing.*

Persoalan yang mendasar bagi PMKS adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebesar 17,27% yang mengalami penurunan menjadi 9,08% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, persentase tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 22,55%, namun memasuki tahun 2019 hingga 2020, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar tersebut mengalami penurunan menjadi 17,07% dan 16,36% di tahun 2020.

Tabel 2.114
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	161	77	161	24	84
2	Pasilambena	93	13	120	17	319
3	Pasimasunggu	139	2	149	48	6
4	Taka bonerate	299	68	342	56	103
5	Pasimasunggu Timur	50	80	125	1	24
6	Bontosikuyu	276	154	244	113	430
7	Bontoharu	221	198	175	568	136

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Benteng	118	44	70	284	91
9	Bontomanai	135	151	512	168	209
10	Bontomatene	260	142	243	508	225
11	Buki	148	70	340	91	139
Persentase		17,27	9,08	22,55	17,07	16,36

Sumber : Dinas Sosial Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.6.4. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) merupakan sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2016 adalah sebanyak 23,3% dan turun pada tahun 2017 menjadi 14,0%. Pada tahun 2018, persentase tersebut mengalami kenaikan kembali menjadi 28,2%, 28,4% pada tahun 2019 dan menjadi 33,4% pada tahun 2020. Semakin meningkatnya WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan semakin besarnya kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan sosial yang pada akhirnya akan menyadari bahwa kesejahteraan sosial bisa diwujudkan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat

Tabel 2.115
Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1	1	57	57	81
2	Pasilambena	2	2	1	2	1
3	Pasimasunggu	1	1	1	1	1
4	Taka bonerate	2	1	1	2	1
5	Pasimasunggu Timur	1	1	1	1	1
6	Bontosikuyu	139	139	139	139	114
7	Bontoharu	2	2	2	2	26
8	Benteng	9	2	9	9	9
9	Bontomanai	1	1	1	1	34
10	Bontomatene	66	2	66	66	67
11	Buki	33	2	33	33	20
Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		23,3	14,0	28,2	28,4	33,4

Sumber : Dinas Sosial Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.6.5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Masa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Adapun bantuan darurat bencana yang diberikan berupa bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2016 adalah sebesar 3,45%, 3,27% pada tahun 2017, 31,7% pada tahun 2018, 3,18% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 82,9% pada tahun 2020. Terjadinya peningkatan yang sangat siginifikan tersebut disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Tabel 2.116
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1	1	1	1	841
2	Pasilambena	2	2	1	1	526
3	Pasimasunggu	3	3	3	1	716
4	Taka bonerate	2	2	2	2	905
5	Pasimasunggu Timur	1	1	1	1	585
6	Bontosikuyu	10	10	10	7	1120
7	Bontoharu	3	3	9	4	794
8	Benteng	9	9	9	8	345
9	Bontomanai	3	3	3	1	1010
10	Bontomatene	2	1	309	8	1425
11	Buki	2	1	1	1	784
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		3,45	3,27	31,7	3,18	82,9

Sumber : Dinas Sosial Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.6.6. Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat lengkap

persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 adalah sekitar 3,18% dan mengalami peningkatan yang sangat siginifikan pada tahun 2020. Hal ini seiring dengan diberlakukannya Status Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Tabel 2.117
Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat lengkap Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1	1	1	1	841
2	Pasilambena	2	2	1	1	526
3	Pasimasunggu	3	3	3	1	716
4	Taka bonerate	2	2	2	2	905
5	Pasimasunggu Timur	1	1	1	1	585
6	Bontosikuyu	10	10	10	7	1120
7	Bontoharu	3	3	9	4	794
8	Benteng	9	9	9	8	345
9	Bontomanai	3	3	3	1	1010
10	Bontomatene	2	1	309	8	1425
11	Buki	2	1	1	1	784
Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat lengkap		3,45	3,27	31,7	3,18	82,9

Sumber : Dinas Sosial Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.1.6.7. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial adalah 16,9% pada tahun 2016, 14,6% pada tahun 2017, 18,4% pada tahun 2018, 16,63% pada tahun 2019 dan 12,63% pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menaruh perhatian besar terhadap kaum penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial dan berkomitmen untuk memberikan jaminan sosial (jamsos) baik kesehatan maupun ketenagakerjaan dengan tujuan untuk menjamin seluruh penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.

Tabel 2.118
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	161	2	4	4	1
2	Pasilambena	93	2	2	2	56
3	Pasimasunggu	139	2	3	2	1
4	Taka bonerate	299	13	6	12	29
5	Pasimasunggu Timur	50	1	1	1	1
6	Bontosikuyu	270	23	27	56	11
7	Bontoharu	215	23	36	17	2
8	Benteng	112	11	8	30	5

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Bontomanai	129	19	47	19	18
10	Bontomatene	254	48	56	39	7
11	Buki	137	17	13	1	8
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial		16,9	14,6	18,4	16,63	12,63

Sumber : Dinas Sosial Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

2.1.3.2.1.1. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Persentase besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek meningkat secara signifikan. Dimana pada tahun 2016 sebesar 7,01 persen, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 30,80. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sangat tinggi tehadap keselmatan tenaga kerja / pekerja. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	15	54	120	414	511
2	Pasilambena	11	53	112	401	410
3	Pasimasunggu	51	112	218	714	1051
4	Taka bonerate	24	84	144	511	614
5	Pasimasunggu Timur	44	101	201	602	1011
6	Bontosikuyu	322	422	541	1051	1121

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Bontoharu	551	1051	1471	2221	2412
8	Benteng	951	1934	2734	6699	7027
9	Bontomanai	601	1123	1543	2752	2901
10	Bontomatene	423	523	661	1123	1253
11	Buki	423	623	746	1013	1521
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		3.416	6.080	8.491	17.501	19.832
		7,01 %	11,67 %	14,41 %	29,90 %	30,80 %

Sumber : Dinas PMPTSPTK Kepulauan Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.1.2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensinya mencapai 93%, namun tahun 2019 dan tahun 2020 (tahun 2019 : 72% dan tahun 2020 : 70%) mengalami penurunan disebabkan masa pandemi dimana sektor konstruksi dan perbengkelan yang memerlukan tenaga kerja sesuai kompetensinya juga mengalami penurunan.

2.1.3.2.1.3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat

Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat terhadap total tenaga kerja selama kurun waktu 2016-2020 pada umumnya mengalami nol dan tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat efektif dilaksanakan pada 2 tahun terakhir. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	48	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	32
6	Bontosikuyu	0	0	0	48	16
7	Bontoharu	0	0	0	32	0
8	Benteng	0	0	0	16	16
9	Bontomanai	0	0	0	64	16
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Presentase		0	0	0	100	100

Sumber : Dinas PMPTSPTK Kepulauan Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.1.4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan kurun waktu 2017-2019 mengalami persentase yang tetap, ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan hanya seperdua dari jumlah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan. Dimana pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.121
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	2	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	1	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	3	0	0
7	Bontoharu	0	18	61	29	0
8	Benteng	0	1	46	8	0
9	Bontomanai	0	1	5	0	0
10	Bontomatene	0	0	1	5	0
11	Buki	0	0	1	3	0
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		0	20	120	45	0
		0 %	50 %	50 %	50 %	0 %

Sumber : Dinas PMPTSPTK Kepulauan Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.1.5. Rasio lulusan S1/S2/S3

Rasio Kesempatan Kerja adalah merupakan persentase penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2016 hingga 2020 persentase penduduk yang bekerja terhadap total jumlah penduduk usia kerja cenderung mengalami fluktuasi. Dilihat dari rasio lulusan tenaga kerja yang bekerja dari tahun 2016 sampai dengantahun 2020 semakin meningkat, tahun 2016 sebesar 47,41 persen dan tahun 2020 meningkat menjadi 51,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan S1/S2/S3 yang bekerja meningkat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rasio lulusan S1/S2/S3 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122
Rasio lulusan S1/S2/S3 Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,34	0,36	0,41	0,43	0,44
2	Pasilambena	0,33	0,35	0,4	0,42	0,42
3	Pasimasunggu	0,58	0,6	0,64	0,66	0,66
4	Taka bonerate	0,39	0,41	0,45	0,47	0,47
5	Pasimasunggu Timur	0,19	0,21	0,25	0,27	0,27
6	Bontosikuyu	0,49	0,51	0,55	0,57	0,57
7	Bontoharu	0,43	0,45	0,49	0,5	0,5
8	Benteng	2,73	2,75	2,83	2,85	2,86
9	Bontomanai	0,33	0,35	0,37	0,39	0,39
10	Bontomatene	0,41	0,44	0,43	0,45	0,45
11	Buki	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
Rasio lulusan S1/S2/S3		47,41	48,57	51,08	52,05	51,65

Sumber : Dinas PMPTSPTK Kepulauan Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.

Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio KDRT, persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

2.1.3.2.2.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Selama tahun 2016 samapai tahun 2020, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 12,96 persen dan tahun 2020 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 13,48 persen. Faktor pendorong peningkatan partisipasi perempuan ditandai dengan makin masifnya program kegiatan peningkatan kompetensi perempuan dalam pembangunan, selain itu makin aktifnya lembaga-lembaga perempuan khususnya lembaga keagamaan dan profesi.

Sementara faktor penghambat masih seputar budaya masyarakat yang masih memandang keberadaan perempuan sebagai sub ordinat dari peran laki-laki.

Tabel 2.123
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	10,34	10,46	10,57	10,57	10,97
2	Pasilambena	7,52	7,79	7,96	7,99	8,09
3	Pasimasunggu	8,53	8,83	8,89	8,99	9,07
4	Taka bonerate	4,62	4,92	4,98	4,99	5,04
5	Pasimasunggu Timur	4,22	4,60	4,78	4,88	5,01
6	Bontosikuyu	6,82	6,93	6,99	6,99	7,07
7	Bontoharu	16,27	16,31	16,55	16,59	16,99
8	Benteng	40,96	40,96	40,99	41,92	41,94
9	Bontomanai	11,55	11,55	11,69	11,75	11,78
10	Bontomatene	19,56	19,56	19,69	19,76	19,83
11	Buki	12,12	12,12	12,28	12,39	12,52
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		12,96	13,09	13,22	13,35	13,48

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.2.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu tahun 2016 sebesar 32,22 persen meningkat menjadi 40,22 persen pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan sudah terbuka secara luas.

Tabel 2.124
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	26,82	28,92	31,95	33,96	36,91
2	Pasilambena	26,53	28,83	31,94	33,98	36,94
3	Pasimasunggu	25,30	27,54	30,89	32,99	34,84
4	Taka bonerate	25,24	27,54	30,87	32,96	34,61
5	Pasimasunggu Timur	25,75	28,85	30,95	32,96	35,09
6	Bontosikuyu	34,65	37,65	36,80	38,85	39,21
7	Bontoharu	36,24	39,44	40,67	42,68	43,32
8	Benteng	50,15	51,15	51,99	52,11	53,01
9	Bontomanai	33,82	37,82	38,90	40,93	42,92

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Bontomatene	34,93	37,93	38,99	40,87	42,81
11	Buki	34,94	39,03	39,99	40,84	42,81
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		32,22	34,97	36,72	38,47	40,22

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.2.3. Rasio KDRT

Rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan setiapa tahunnya dimana tahun 2016 sebesar 2,09 dan terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 0,27.

Tabel 2.125
Rasio KDRT Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	1	0	0	0	0
4	Taka bonerate	2	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	1	0	0	0	0
7	Bontoharu	0	1	0	4	1
8	Benteng	18	3	5	2	2
9	Bontomanai	0	0	0	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	1	0	0	0	0
Rasio KDRT		2,09	0,36	0,45	0,55	0,27

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.2.4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di kabupaten kepulauan selayar mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 43,39 persen sampai dengan tahun 2020 sebanyak 43,03 persen.

Tabel 2.126
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	39,92	39,90	39,68	39,68	39,21
2	Pasilambena	34,68	34,27	34,20	34,20	34,16
3	Pasimasunggu	37,15	37,05	37,01	37,01	37,00
4	Taka bonerate	44,74	44,54	44,52	44,52	44,21

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pasimasunggu Timur	29,81	29,67	29,54	29,54	29,23
6	Bontosikuyu	49,06	49,06	49,01	49,01	49,01
7	Bontoharu	47,66	47,66	47,65	47,65	47,64
8	Benteng	77,74	77,70	77,49	77,49	77,23
9	Bontomanai	42,46	42,46	42,43	42,43	42,41
10	Bontomatene	45,15	45,15	45,10	45,10	45,01
11	Buki	28,89	28,81	28,72	28,72	28,17
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		43,39	43,30	43,21	43,21	43,03

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.2.5. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 2 (dua) peride pemilu, yaitu periode 2014 – 2019, dan peride 2019 – 2024 meningkat, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatife periode 2014 – 2019 sebanyak 16 persen, kemudian periode 2019-2024 sebanyak 20 persen. Untuk tahun 2020 keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 24 persen, hal ini dikarenakan adanya perempuan yang menjadi pengganti pengganti antar waktu.

Tabel 2.127
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16	16	16	20	24

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.2.6. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/SMP/SMA

Rasio APM perempuan dan laki laki pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Rasio AMP perempuan dan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA untuk kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan hanya berada di angka 50 an persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/SMP/SMA
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	96,52	96,52	99,63	99,20	99,29

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	87,89	87,89	80,55	79,68	79,83
3	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	49,23	49,23	50,52	49,60	49,87

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.2.7. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	n/a	n/a	198,8	199,5	99,67

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.3 Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

2.1.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi. Dimana tahun 2016-2018 ketersedian pangan utama mengalami peningkatan yaitu tahun 2016 sebesar 140,74 ton tahun 2017 sebesar 146,90 ton dan tahun 2018 sebesar 157,59 ton. Selanjutnya mengalami penurunan tahun 2019 menjadi 149,90 ton dan pada tahun 2020 menurun menjadi 138,40 ton. Ini menunjukkan bahwa ketersedian beras dan jagung sebagai pangan utama di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan stok dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan produksi beras dan jagung mengalami penurunan diakibatkan anomali iklim dan organisme perusak tanaman. Ketersedian pangan utama menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Ketersediaan Pangan Utama Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	108,83	112,77	120,13	113,94	117,42
2	Pasilambena	88,24	92,41	99,50	94,81	89,86
3	Pasimasunggu	97,53	101,94	109,56	104,38	97,56
4	Taka bonerate	158,37	165,76	178,20	169,67	150,85
5	Pasimasunggu Timur	88,24	91,28	97,42	92,17	87,35
6	Bontosikuyu	177,26	184,34	197,10	186,66	171,31
7	Bontoharu	156,98	163,66	175,08	166,37	160,79
8	Benteng	294,30	311,32	337,68	324,67	269,99
9	Bontomanai	149,55	155,09	165,55	156,65	153,00
10	Bontomatene	153,73	159,46	170,23	161,10	148,92
11	Buki	75,08	77,87	83,03	78,49	75,35
Ketersediaan Pangan Utama		140,74	146,90	157,59	149,90	138,40

Sumber : Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.3.2. Ketersediaan Energi Perkapita

Kondisi Ketersedian energi perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016-2020 terus meningkat, tahun 2016 sebesar 3.037 kkal/kapita/hari dan tahun 2020 sebesar 3.118 kkal/kapita/hari. Ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kepulauan Selayar juga meningkat berbarengan dengan meningkatkan jumlah penduduk. Ketersedian energy perkapita menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Ketersediaan Energi Perkapita Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	2.348,51	2.333,34	2.425,64	2.493,89	2.645,37
2	Pasilambena	1.904,20	1.912,14	2.009,11	2.075,23	2.024,43
3	Pasimasunggu	2.104,64	2.109,37	2.212,13	2.284,56	2.198,03
4	Taka bonerate	3.417,54	3.429,82	3.598,21	3.713,76	3.398,53
5	Pasimasunggu Timur	1.904,20	1.888,74	1.967,11	2.017,49	1.967,87
6	Bontosikuyu	3.825,10	3.814,25	3.979,73	4.085,50	3.859,34
7	Bontoharu	3.387,47	3.386,36	3.535,20	3.641,58	3.622,33
8	Benteng	6.350,67	6.441,77	6.818,39	7.106,32	6.082,59
9	Bontomanai	3.227,12	3.209,18	3.342,69	3.428,65	3.447,01
10	Bontomatene	3.317,32	3.299,44	3.437,20	3.526,09	3.354,95
11	Buki	1.620,24	1.611,28	1.676,60	1.717,93	1.697,55
Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kap/hari)		3.037	3.039	3.182	3.281	3.118

Sumber : Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.3.3. Ketersediaan Protein Perkapita

Kondisi Ketersedian protein perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016-2020 terus meningkat, tahun 2017 sebesar 90,44 kkal/kapita/hari dan tahun 2020 sebesar 95,32 kkal/kapita/hari. Ini menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat Kepulauan Selayar juga meningkat berbarengan dengan meningkatkan jumlah penduduk. Ketersedian protein perkapita menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132
Ketersediaan Protein Perkapita Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	76,65	68,94	71,95	72,25	72,66
2	Pasilambena	62,15	57,10	59,60	59,84	60,19
3	Pasimasunggu	68,69	62,87	65,62	65,89	66,27
4	Taka bonerate	111,54	102,27	106,74	107,18	107,79
5	Pasimasunggu Timur	62,15	55,91	58,35	58,59	58,93
6	Bontosikuyu	124,84	113,11	118,05	118,54	119,22
7	Bontoharu	110,56	100,48	104,87	105,30	105,90
8	Benteng	207,27	193,79	202,26	203,09	204,25
9	Bontomanai	105,32	95,01	99,16	99,57	100,13
10	Bontomatene	108,27	97,69	101,96	102,38	102,96
11	Buki	52,88	47,65	49,73	49,94	50,22
Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kap/hari)		99,12	90,44	94,39	94,78	95,32

Sumber : Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.3.4. Pengawasan dan Pembina Keamanan Pangan

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun 2016-2020 mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap petani dilaksanakan secara maksimal. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Pengawasan dan Pembina Keamanan Pangan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	10	0	30	20
7	Bontoharu	50	60	90	50	30

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Benteng	0	30	10	20	0
9	Bontomanai	30	0	0	0	10
10	Bontomatene	20	0	0	0	10
11	Buki	0	0	0	0	10
Pengawasan dan Pembina Keamanan Pangan		100	100	100	100	80

Sumber : Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.4. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tabel 2.165 menunjukkan data tahun 2016 sebesar 0,0007 persen, pada tahun 2017 sebesar 0,0031 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,0028 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,0002 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 0,0019 persen. Persentase lahan bersertifikat yang sangat kecil menunjukkan bahwa masih banyak lahan milik masyarakat yang belum tersertifikasi.

2.1.3.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Berdasarkan tabel berikut, menunjukkan data persentase lahan bersertifikat umumnya berada di kecamatan daratan, sementara di kecamatan kepulauan hanya beberapa daerah saja yang bersertifikat. Ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat kecamatan kepulauan masih sangat rendah dalam hal kepemilikan tanah yang mereka kelolah secara legal.

Tabel 2.134
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0,0022	0	0,0012
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	0,0001
7	Bontoharu	0,0007	0,0007	0	0	0,0003
8	Benteng	0	0,0004	0,0006	0,0002	0
9	Bontomanai	0	0,0020	0	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0,0003
11	Buki	0	0	0	0	0
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)		**0,0007**	**0,0031**	**0,0028**	**0,0002**	**0,0019**

Sumber : Dinas PUTR Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan,penanganan sampah, pengendaliaan pencemaran lingkungan, dan pemulihan keualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

2.1.3.2.5.1. Timbulan sampah yang ditangani

Jumlah timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sebanyak 20,49 ton kemudian meningkat pada tahun 2018 sebanyak 6.169,58 ton. Pada tahun 2019 penangan timbulan sampah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6.045,34 ton, Pada tahun 2020 sedikit menurun sebanyak 5.999,26 ton. Jumlah timbulan sampah yang ditangani menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Timbulan sampah yang ditangani Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	60,00	0
7	Bontoharu	0	0	0	0	1,50
8	Benteng	20,49	4.050,75	6.169,58	5.825,84	5.799,02
9	Bontomanai	0	0	0	0	121,25
10	Bontomatene	0	0	0	159,50	77,49
11	Buki	0	0	0	0	0
Timbulan sampah yang ditangani (Ton)		20,49	4.050,75	6.169,58	6.045,34	5.999,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.5.2. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2017 sebanyak 0,40 persen kemudian meningkat pada tahun 2019

sebanyak 2,89 persen. Pada tahun 2020 persentase penangan sampah menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,21 persen. Hal ini disebabkan armada pengangkutan sampah banyak yang mengalami maintenance sehingga pelayanan pengangkutan sampah mengalami hambatan, disamping itu operasional Bank Sampah juga mengalami penurunan produksi. Persentase jumlah sampah yang terkurangi menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0,14	0
7	Bontoharu	0	0	0	0	0,003
8	Benteng	0,05	0,40	3,29	0,98	0,83
9	Bontomanai	0	0	0	0	0,29
10	Bontomatene	0	0	0	0,37	0,18
11	Buki	0	0	0	0	0
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi (%)		0,05	0,40	3,29	1,51	1,30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.5.3. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Persentase cakupan area pelayanan persampahan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tetap, yakni 275,83 Ha. Hal ini dikarenakan area pelayanan persampahan masih terbatas yakni di perkotaan Benteng sedangkan wilayah diluar Kota Benteng belum mendapatkan pelayanan persampahan. Sehingga Persentase cakupan area pelayanan persampahan 100% di Kecamatan Benteng sedangkan 10 kecamatan lainnya belum terlayani pelayanan persampahan.

2.1.3.2.5.4. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka jumlah sampah juga akan mengalami peningkatan yang akan mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah, khususnya sampah di perkotaan. Pengelolaan sampah di kawasan perkotaan (Kota Benteng) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengurangan sampah yang tergambar dari meningkatnya volume sampah tertangani dari 3.888,72 ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.449,95 ton pada tahun 2020. Meningkatnya volume sampah yang tertangani karena melalui prinsip 3R pada Bank Sampah di tingkat kelurahan.

2.1.3.2.5.5. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota

Nilai operasional TPA di Kabupaten Kepulauan Selayar ditentukan dengan penilaian Tim seleksi Adipura. Tahun 2016 tidak ada nilai dikarenakan tidak adanya penilaian Adipura begitu pula pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penilaian Adipura yang semakin meningkat di tahun 2017 dan tahun 2018. Tahun 2017 dengan nilai 63,45 dan tahun 2018 dengan nilai 71,89 nilai ini sudah lebih tinggi untuk penilaiam Program Adipura yang dipersyaratkan yaitu >71.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.3.2.6.1. Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin yang ber KTP dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin. Untuk tahun 2016, rasio penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin yang ber KTP di Kabupaten Kepulauan Selayar 0,82 dari total penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin sebanyak 94.717 jiwa dan terus meningkat sampai dengan pada tahun 2020 yaitu 0,91 dari total penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin sebanyak 100.618 jiwa. Kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el, juga semakin mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusiannya ke instansi pelaksana di kabupaten. Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,73	0,79	0,86	0,9	0,88
2	Pasilambena	0,73	0,75	0,84	0,88	0,87
3	Pasimasunggu	0,74	0,77	0,89	0,89	0,87
4	Taka bonerate	0,74	0,75	0,85	0,86	0,84
5	Pasimasunggu Timur	0,78	0,8	0,88	0,89	0,91
6	Bontosikuyu	0,85	0,89	0,94	0,94	0,93

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Bontoharu	0,387	0,9	0,94	0,94	0,95
8	Benteng	0,84	0,86	0,9	0,93	0,9
9	Bontomanai	0,88	0,89	0,95	0,94	0,94
10	Bontomatene	0,88	0,89	0,94	0,94	0,94
11	Buki	0,88	0,89	0,96	0,95	0,97
Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk		0,82	0,84	0,91	0,92	0,91

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.6.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Untuk tahun 2016, rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 0,89 dari jumlah bayi 1.115 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2020 rasio bayi berakte kelahiran menurun 0,77 dari jumlah bayi 32.727 jiwa. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman sebagian masyarakat masih rendah untuk segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir, dimana akta kelahiran merupakan bukti sah status dan peristiwa kelahiran seorang bayi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rasio bayi berakte kelahirann dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut

Tabel 2.138
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,81	0,89	0,84	0,79	0,68
2	Pasilambena	0,72	0,71	0,85	0,83	0,73
3	Pasimasunggu	0,92	0,91	0,82	0,71	0,66
4	Taka bonerate	0,74	0,71	0,79	0,62	0,56
5	Pasimasunggu Timur	0,88	0,78	0,64	0,72	0,76
6	Bontosikuyu	0,84	0,76	0,86	0,86	0,68
7	Bontoharu	0,92	0,82	0,93	0,97	0,82
8	Benteng	0,94	0,95	0,93	0,88	0,85
9	Bontomanai	0,93	0,91	0,91	0,92	0,84
10	Bontomatene	0,92	0,93	0,86	0,83	0,82
11	Buki	0,89	0,94	0,86	0,85	0,73
Rasio Bayi Berakte Kelahiran		0.89	0.87	0.88	0.83	0,77

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.6.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah merupakan jumlah pasangan nikah berakte nikah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Untuk tahun 2016, rasio pasangan nikah berakte nikah di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai

6,51 dari total keseluruhan pasangan nikah. Terus meningkat di tahun 2020 yakni 0,61. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pasangan yang nikah semakin tinggi, karena mereka mengetahui bahwa akte nikah merupakan alat bukti otentik seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Rasio pasangan berakte nikah dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.139
Rasio Pasangan Berakte Nikah Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,46	0,53	0,47	0,53	0,57
2	Pasilambena	0,24	0,4	0,3	0,4	0,48
3	Pasimasunggu	0,27	0,38	0,31	0,38	0,46
4	Taka bonerate	0,67	0,58	0,56	0,58	0,59
5	Pasimasunggu Timur	0,34	0,36	0,29	0,36	0,41
6	Bontosikuyu	0,69	0,69	0,67	0,69	0,72
7	Bontoharu	0,42	0,51	0,44	0,51	0,59
8	Benteng	0,47	0,55	0,46	0,55	0,63
9	Bontomanai	0,62	0,65	0,6	0,65	0,71
10	Bontomatene	0,53	0,59	0,54	0,59	0,65
11	Buki	0,57	0,63	0,58	0,55	0,68
Rasio Pasangan Berakte Nikah		0,51	0,55	0,49	0,55	0,61

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.6.4. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan perbandingan jumah KTP ber-NIK yang diterbitkan dengan jumlah penduduk wajib KTP. Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 sebesar 82 persen dan terus meningkat sampai tahun 2020 mencapai 91 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat baik dalam hal penerbitan KTP hal ini disebabkan adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan terlaksananya koordinasi secara sinergi antara stakeholder terkait pengguna layanan. Cakupan penerbitan KTP dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.140
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	73	79	86	90	88
2	Pasilambena	73	75	84	88	87
3	Pasimasunggu	74	77	87	89	87

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Taka bonerate	74	75	85	86	84
5	Pasimasunggu Timur	78	80	88	89	91
6	Bontosikuyu	85	89	94	94	93
7	Bontoharu	87	90	94	94	95
8	Benteng	84	86	90	93	90
9	Bontomanai	88	89	95	94	94
10	Bontomatene	88	89	94	94	94
11	Buki	88	89	96	95	97
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)		82	84	91	92	91

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.6.5. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran merupakan perbandingan jumah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran dengan jumlah kelahiran. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 sebesar 60,06 persen dan terus meningkat sampai tahun 2020 mencapai 71,77 persen. Hal ini disebabkan penerbitan akta kelahiran dipermudah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terintegrasi. Cakupan penerbitan KTP dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.141
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	53,38	53,86	67,47	58,58	62,63
2	Pasilambena	56,82	55,32	72,3	61,56	65,95
3	Pasimasunggu	54,4	53,12	70,2	62,01	66,01
4	Taka bonerate	45,35	43,48	60,31	54,21	56,36
5	Pasimasunggu Timur	50,21	49,64	63,45	58,6	64,17
6	Bontosikuyu	67,52	66,78	78,97	77,99	80,84
7	Bontoharu	64,9	63,77	74,5	71,4	76,31
8	Benteng	61,92	60,8	72,71	68,19	72,51
9	Bontomanai	70,54	69,73	79,25	75,59	84,16
10	Bontomatene	62,2	60,44	73,23	63,78	75,08
11	Buki	66,15	65,28	78,19	73,84	83,05
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)		60,06	58,99	72,1	66,61	71,77

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat serta pembinaan PKK.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

2.1.3.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, dari tahun ke tahun meningkat, disemua wilayah kecamatan, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, cakupan tertinggi terdapat di Kecamatan Buki. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah pada tahun 2016 sebesar 76,19%, dan pada tahun 2020 sebesar 90,48%. Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepemilikan sarana dan prasarana kantor desa, kantor BPD sebagai kantor pemerintahan dan Baruga sayang (Balai Rujukan Keluarga dan Pusat Layanan Pembangunan) sebagai pusat aktivitas layanan masyarakat yang multi-fungsi dan pusat terbangunnya kembali tatanan kehidupan yang harmonis yang mengedepankan nilai-nilai dan norma lokal secara berkesinambungan.

Tabel 2.142
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	75,00	79,17	83,33	87,50	87,50
2	Pasilambena	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
3	Pasimasunggu	71,43	76,19	80,95	85,71	85,71
4	Taka bonerate	74,07	77,78	81,48	85,19	85,19
5	Pasimasunggu Timur	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
6	Bontosikuyu	83,33	86,11	86,11	88,89	88,89
7	Bontoharu	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	76,67	80,00	83,33	86,67	86,67
10	Bontomatene	80,00	83,33	86,67	90,00	90,00
11	Buki	76,19	80,95	85,71	90,48	90,48
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik		76,19	80,95	85,71	90,48	90,48

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.7.2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,

menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 7 (tujuh) Kelurahan dan masing-masing kelurahan memiliki 1 (satu) kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).

2.1.3.2.7.3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui desa / kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan / kabupaten, terutama bagi 88 desa / kelurahan yang menjadi lokasi desa / kelurahan binaan secara berjenjang. Dari 88 desa / kelurahan atau 88 kelompok binaan PKK yang ada. Distribusi kelompok binaan PKK dan persentase PKK aktif berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	8	8	8	8	8
2	Pasilambena	6	6	6	6	6
3	Pasimasunggu	7	7	7	7	7
4	Taka bonerate	9	9	9	9	9
5	Pasimasunggu Timur	6	6	6	6	6
6	Bontosikuyu	12	12	12	12	12
7	Bontoharu	8	8	8	8	8
8	Benteng	3	3	3	3	3
9	Bontomanai	10	10	10	10	10
10	Bontomatene	12	12	12	12	12
11	Buki	7	7	7	7	7
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		8	8	8	8	8

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.7.4. Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi / lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Persentase LSM aktif dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 terus menurus menurun, hal ini disebabkan kurangnya pendampingan dan fasilitasi yang di lakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Adapun jumlah LSM aktif

dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.144
Persentase LSM Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	1	2	2	2	2
4	Taka bonerate	1	1	1	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	0
7	Bontoharu	2	3	2	3	3
8	Benteng	74	73	55	41	43
9	Bontomanai	1	1	2	2	2
10	Bontomatene	2	2	2	0	1
11	Buki	0	0	0	1	1
Persentase LSM Aktif		69	70	55	42	45

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.7.5. Persentase PKK Aktif

Persentase keaktifan PKK ditingkat kabupaten sampai tingkat desa / kelurahan sebesar 100 %. Ruang lingkup pembinaan TP. PKK baik desa / kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah, provinsi dan pusat.

2.1.3.2.7.6. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia secara empirik telah dapat meratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di Kabupaten Kepulauan selayar pada lima tahun terakhir, persentase posyandu aktif berfluktuatif. Pada tahun 2016, persentase keaktifan sebesar 99,30 %, bahkan pada tahun 2017 sebesar 100%. Namun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan sampai pada 46,56%. Hal ini disebabkan pergantian kader posyandu di beberapa dusun di tingkat desa, sehingga kader yang baru belum memiliki kompetensi karena belum mengikuti pelatihan sehingga yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.

Tabel 2.145
Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	100,00	100,00	58,82	0,00	86,96
2	Pasilambena	100,00	100,00	35,29	84,62	0,00
3	Pasimasunggu	100,00	100,00	60,00	33,33	0,00
4	Taka bonerate	100,00	100,00	84,62	10,00	0,00
5	Pasimasunggu Timur	100,00	100,00	60,00	0,00	10,00
6	Bontosikuyu	100,00	100,00	45,83	51,35	45,83
7	Bontoharu	100,00	100,00	73,08	72,00	72,00
8	Benteng	95,45	100,00	41,67	40,74	40,74
9	Bontomanai	97,37	100,00	62,50	72,73	65,85
10	Bontomatene	100,00	100,00	58,82	62,50	82,35
11	Buki	100,00	100,00	100,00	0,00	63,64
Persentase Posyandu Aktif		99,30	100,00	61,36	45,21	46,56

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.7.7. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan merupakan cerminan dari kegotong royongan masyarakat. swadaya masayarakat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 semakin meningkat. Semakin banyak masyarakat berkontribusi dalam program pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan keberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga dan memperluas lapangan kerja melalui program padat karya.

Tabel 2.146
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	33,33	35,80	37,04	38,27	39,51
2	Pasilambena	20.98	23,46	24,69	25,93	27,16
3	Pasimasunggu	19,75	22,22	23,46	24,69	25,93
4	Taka bonerate	23,46	25,93	27,16	28,40	29,63
5	Pasimasunggu Timur	23,45	27,16	28,40	29,63	30,86
6	Bontosikuyu	30,86	33,33	34,57	35,80	37,04
7	Bontoharu	32,09	34,57	35,80	37,04	38,27
8	Benteng	18,51	20,99	22,22	23,46	24,69
9	Bontomanai	35,80	38,27	39,51	40,74	41,98
10	Bontomatene	32,09	34,57	35,80	37,04	38,27
11	Buki	37,04	38,27	39,51	40,74	41,98
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		26,03	30,42	39,51	40,74	41,98

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.7.8. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan 100% oleh masyarakat setempat atau lokasi program pemberdayaan. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dikoordinir oleh Kelompok Pemelihara. Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk Tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan pasa program, maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

2.1.3.2.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Kelahiran, Kematian, dan Migrasi. faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.147
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,40	0,29	0,31	0,61	1,54
2	Pasilambena	1,45	1,43	1,29	1,23	1,61
3	Pasimasunggu	1,22	1,21	1,08	1,20	1,21
4	Taka bonerate	1,32	1,29	1,18	1,13	0,90

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pasimasunggu Timur	0,25	0,24	0,41	0,41	0,72
6	Bontosikuyu	0,63	0,64	0,63	0,60	0,64
7	Bontoharu	0,91	0,94	0,71	0,86	1,53
8	Benteng	2,48	2,43	2,06	2,09	1,48
9	Bontomanai	0,46	0,44	0,48	0,47	1,11
10	Bontomatene	0,45	0,44	0,48	0,47	0,61
11	Buki	0,46	0,45	0,39	0,42	0,93
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		**1,08**	**1,06**	**0,96**	**1**	**1,13**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.2. Total Fertility Rate (TFR)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat).

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi.

Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik utnuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Faktor-faktor ini pula yang mempengaruhi TFR diKabupaten Kepulauan Selayar. Total fertility rate (TFR) Kabupaten Kepulauan Sleayar tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.148
Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	n/a	1,7	5,2	1,9	1,9
2	Pasilambena	n/a	1,9	2,6	2,8	2,8

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Pasimasunggu	n/a	1,8	2,2	1,6	1,6
4	Taka bonerate	n/a	1,8	2,4	2,0	2,0
5	Pasimasunggu Timur	n/a	1,9	4,2	1,6	1,6
6	Bontosikuyu	n/a	2,3	6,7	2,3	2,3
7	Bontoharu	n/a	1,7	2,4	1,5	1,5
8	Benteng	n/a	2,8	3,5	3,1	3,1
9	Bontomanai	n/a	2,1	2,0	1,9	1,9
10	Bontomatene	n/a	1,5	1,8	1,8	1,8
11	Buki	n/a	2,1	2,1	2,0	2,0
Total Fertility Rate (TFR)		**n/a**	**2,0**	**3,2**	**2,1**	**2,1**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.3. Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dimana tahun 2015 sebanyak 5 sektor kemudian meningkat ditahun 2017 sampai 2018 menjadi 6 sektor dan ditahun 2019 sampai 2020 menjadi 7 sektor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	1	1	1	1	1
7	Bontoharu	1	1	1	1	1
8	Benteng	2	2	2	2	2
9	Bontomanai	1	1	1	1	1
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	1	1	2	2
Jumlah Sektor		**5**	**6**	**6**	**7**	**7**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.4. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Jumlah anak per keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anak dalam keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Pemenuhan hak dasar anak akan lebih maksimal, demikian juga kualitas pengasuhan kedua orangtuanya diasumsikan akan jauh lebih baik.

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kepulauan Selayar pada kisaran angka 2. Diharapkan untuk tahun berikutnya angka ini tetap, sehingga secara umum akan mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas generasi.

2.1.3.2.8.5. Rasio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	77,19	79,23	77,2	65,51	65,51
2	Pasilambena	72,05	74,56	66,31	68	68
3	Pasimasunggu	66,57	70,01	70,6	64,47	64,47
4	Taka bonerate	66,62	75,03	82,77	81,61	81,61
5	Pasimasunggu Timur	60,53	60,93	63,78	64,88	64,88
6	Bontosikuyu	77,46	74,56	70,77	68,52	68,52
7	Bontoharu	73,61	73,59	70,11	69,08	69,08
8	Benteng	75,64	70,25	73,29	71,93	71,93
9	Bontomanai	75,67	76	75,08	73,46	73,46
10	Bontomatene	72,08	72,16	70,11	70,31	70,31
11	Buki	68,76	55,6	66,21	65,48	65,48
Rasio Akseptor KB		**71,47**	**71,08**	**71,48**	**63,49**	**63,49**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.6. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern.

Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Kabupaten Kepulauan Selayar menurun dari tahun 2016 sampai 2020. Hal ini disebabkan karena promosi keluarga berencana belum merata.

Tabel 2.151
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	77,19	79,23	77,20	76,51	76,51
2	Pasilambena	72,05	74,56	66,31	68,00	68,00
3	Pasimasunggu	66,57	70,01	70,60	64,47	64,47
4	Taka bonerate	66,62	75,03	82,77	81,61	81,61
5	Pasimasunggu Timur	60,53	60,93	63,78	64,88	64,88
6	Bontosikuyu	77,46	74,56	70,77	68,52	68,52
7	Bontoharu	73,61	73,59	70,11	69,08	69,08
8	Benteng	75,64	70,25	73,29	71,93	71,93
9	Bontomanai	75,67	76,00	75,08	73,46	73,46
10	Bontomatene	72,08	72,16	70,11	70,31	70,31
11	Buki	68,76	55,60	66,21	65,48	65,48
Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49		**71,47**	**71,08**	**70,84**	**70,39**	**70,39**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.7. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Unmet need adalah semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya.

Cakupan unmet need Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurun pada kurun waktu 2016 hingga 2020, karena menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, persentase unmet need KB

dimasa datang bisa semakin turun persentasenya. Olehnya itu, upaya penurunan unmet need di Kabupaten Kepulauan Selayar harus menjadi prioritas untuk keberhasilan pelayanan KB dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan unmet need terdiri dari tiga faktor, antara lain: a) Faktor predisposing yang meliputi umur WUS, pendidikan, jumlah anak, pendapatan, dan pengetahuan, b) Faktor enabling, meliputi ketersediaan sarana pelayanan KB, dan jarak pelayanan kesehatan, serta c) Faktor reinforcing, yaitu Kinerja PLKB. Serta beberapa faktor yang sifatnya positif untuk menurunkan unmet need KB di Kabupaten Kepulauan Sleayar perlu ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.152
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	4,04	3,39	4,51	3,89	3,89
2	Pasilambena	14,97	12,56	21,55	19,57	19,57
3	Pasimasunggu	20,04	13,86	15,24	20,42	20,42
4	Taka bonerate	14,00	8,67	4,40	4,75	4,75
5	Pasimasunggu Timur	22,80	22,11	16,83	17,39	17,39
6	Bontosikuyu	8,51	9,07	11,85	13,61	13,61
7	Bontoharu	8,94	11,64	13,34	14,32	14,32
8	Benteng	9,46	8,92	8,86	9,02	9,02
9	Bontomanai	7,19	7,41	9,05	7,09	7,09
10	Bontomatene	9,29	8,44	9,05	7,36	7,36
11	Buki	15,73	24,45	18,11	16,96	16,96
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		**12,27**	**11,87**	**12,07**	**12,22**	**12,22**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif dari segi biaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, namun peningkatan penggunaan MKJP di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat lambat.

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pemilihan MKJP ini adalah faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secara substansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Untuk dapat meningkatkan penggunaan MKJP, peran pasangan dan penyedia layanan untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor perlu ditingkatkan.

MKJP ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan usia subur laki-laki maupun perempuan, sehingga memberi kontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.153
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	34,05	17,85	11,68	11,43	11,43
2	Pasilambena	2,61	7,5	4,95	6,68	6,68
3	Pasimasunggu	30,12	26,2	26,31	26,21	26,21
4	Taka bonerate	11,43	6,2	10,77	11,24	11,24
5	Pasimasunggu Timur	11,78	16,35	16,51	15,8	15,8
6	Bontosikuyu	12,52	11,4	12,71	17,79	17,79
7	Bontoharu	9,8	10,18	12,01	14,61	14,61
8	Benteng	14,74	21,28	14,05	16,16	16,16
9	Bontomanai	8,82	8,54	14,2	14,77	14,77
10	Bontomatene	19,57	16,96	18,17	20,12	20,12
11	Buki	8,29	16,56	16,26	12,93	12,93
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		**14,88**	**14,46**	**14,33**	**15,25**	**15,25**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.9. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas. Pentingnya kualitas pelayanan dalam pemberian pelayanan keluarga berencana (KB) atau kesehatan reproduksi (KR) melalui pola pendekatan “kesehatan reproduktif” yang lebih komprehensif yang menekankan pada pelayanan keluarga berencana yang berkualitas yang berorientasi pada klien sehingga membuat klien mampu membuat pilihan sesuai informasi yang didapat.

Kualitas pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu elemen yang penting dalam mencapai pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung lama (lestari). Salah satu elemen kualitas pelayanan keluarga berencana adalah informasi yang diberikan kepada klien dan mekanisme follow-up dan kontak kembali.

Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB

di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.154
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	77,19	79,23	77,2	76,51	76,51
2	Pasilambena	72,05	74,56	66,31	68	68
3	Pasimasunggu	66,57	70,01	70,6	64,47	64,47
4	Taka bonerate	66,62	75,03	82,77	81,61	81,61
5	Pasimasunggu Timur	60,53	60,93	63,78	64,88	64,88
6	Bontosikuyu	77,46	74,56	70,77	68,52	68,52
7	Bontoharu	73,61	73,59	70,11	69,08	69,08
8	Benteng	75,64	70,25	73,29	71,93	71,93
9	Bontomanai	75,67	70,6	75,08	73,46	73,46
10	Bontomatene	72,08	72,16	70,11	70,31	70,31
11	Buki	68,76	55,6	66,21	65,48	65,48
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi		**71.47**	**70.59**	**71.48**	**70.39**	**70.39**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.10. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal.

Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat fokus pada pengasuhan balitanya.

Pada kurun waktu 2015 hingga 2019 persentase anggota BKB yang ber KB cenderung meningkat di Kabupaten Kepulauan Selayar. selengkapnya pada tabel berikut

Tabel 2.155
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	31,76	24,28	23,92	20,62	20,62
2	Pasilambena	76,92	60,00	63,84	64,59	64,65
3	Pasimasunggu	83,30	42,80	40,80	37,38	37,38
4	Taka bonerate	41,17	68,49	35,00	64,28	72,27
5	Pasimasunggu Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
6	Bontosikuyu	14,29	14,29	30,60	43,33	43,33

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Bontoharu	63,22	61,22	64,58	61,34	61,34
8	Benteng	62,94	58,30	59,85	70,59	83,38
9	Bontomanai	30,63	61,86	60,94	62,03	62,81
10	Bontomatene	41,74	20,04	23,03	61,87	61,87
11	Buki	76,67	77,24	82,14	82,14	82,14
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		**47,51**	**44,41**	**44,06**	**51,65**	**53,70**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.11. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok.

Persentase anggota Bina Keluarga Remaja yg ber KB di Kabupaten kepulauan Selayar pada kurun waktu 2016 hingga 2020 mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: intensitas sosialisasi dan edukasi yang belum optimal terutama untukdaerah yang sulit dijangkau, dan motivasi dari keluarga BKR kurang karena masalah kesibukan mencari nafkah dan menganggap bahwa hal tersebut tidak penting. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.156
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	17,63	17,65	0,96	0,96	0,96
2	Pasilambena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pasimasunggu	0,00	0,00	0,00	25,58	26,25
4	Taka bonerate	11,11	54,55	35,00	50,00	50,20
5	Pasimasunggu Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bontosikuyu	14,29	60,00	42,86	53,33	53,50
7	Bontoharu	63,87	70,00	78,05	77,29	80,38
8	Benteng	77,73	79,31	80,83	86,86	87,48
9	Bontomanai	45,22	50,13	60,13	66,03	66,05
10	Bontomatene	16,03	16,03	16,03	20,13	20,16
11	Buki	27,12	27,12	32,00	32,00	33,17
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		**24,82**	**34,07**	**31.44**	**37,47**	**38,01**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.12. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB.

Untuk membuat cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin meningkat setiap tahunya, dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pasangan usia subur yang tergabung dalam kelompok BKL.

Tabel 2.157
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	20,00	6,67	5,36	5,36	0,05
2	Pasilambena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pasimasunggu	0,00	0,00	0,00	38,32	0,38
4	Taka bonerate	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14
5	Pasimasunggu Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bontosikuyu	50,00	50,00	50,00	46,67	50,00
7	Bontoharu	34,30	35,80	43,27	41,74	44,00
8	Benteng	54,01	49,39	71,93	49,44	56,00
9	Bontomanai	24,32	54,34	54,34	54,34	54,34
10	Bontomatene	8,46	8,46	8,46	8,50	8,50
11	Buki	36,30	36,36	31,25	31,25	27,78
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		**25,87**	**27,11**	**29,25**	**30,25**	**27,11**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS berperan sebagai wadah yang memberikan informasi bagi keluarga dalam hal: Merawat kehamilan dan mempersiapkan kelahiran, Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), Membangun komunikasi yg baik dan efektif bagi orang tua dengan anak, Mempersiapkan keluarga memasuki kehidupan lansia dan merawat lansia agar

tetap produktif. Masalah kesehatan reproduksi, Konsultasi kewirausahaan, dan 8. Memberikan rujukan terhadap permasalahan keluarga.

Pada kurun waktu 2016 hingga 2020 keberadaan PPKS di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten kepulauan Selayar baru berkisar 0,83 persen, Artinya masih banyak kecamatan yang belum menyediakan wadah layanan PPKS. Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperluakan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.3.2.8.14. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor pendiring, diantaranya adanya reward pemerintah bagi penyuluh dan peserta KB mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB mandiri.

Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi: pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelopok UPPKS tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya sosialisasi. Hal tersebut lah yang menyebabkan Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 0 dari tahun 2016 sampai 2020.

2.1.3.2.8.15. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Petugas Pembantu Pembina KeluargaBerencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB.

Seiring dengan diterapkannya paradigma pelayanan publik di bidang KB yang bersifat desentralistik, maka perlu dan penting untuk dikaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja PPKBD.

Pada kurun waktu 2016 hingga 2020 Rasio PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,49. Untuk meningkatkan kinerja PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya adalah 1) Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, 2) Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentir bagi kader PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.158
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39
2	Pasilambena	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
3	Pasimasunggu	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Taka bonerate	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
5	Pasimasunggu Timur	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
6	Bontosikuyu	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
7	Bontoharu	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
8	Benteng	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
9	Bontomanai	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
10	Bontomatene	0,70	0,70	0,73	0,73	0,73
11	Buki	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		0,48	0,48	0,49	0,49	0,49

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.8.16. Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui anggaran pembangunan belanja daerah semakin meningkat seiiring dengan peningkatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Pasilambena	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Pasimasunggu	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Taka bonerate	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Pasimasunggu Timur	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	Bontosikuyu	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7	Bontoharu	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8	Benteng	63.300.000	1.144.146.600	654.900.000	665.747.870	418.024.000
9	Bontomanai	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	Bontomatene	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Buki	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Persediaan Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes		113.300.000	1.194.146.600	704.900.000	715.747.870	468.024.000

Sumber : Dinas P3AP2KB Kepulauar Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.9. Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

2.1.3.2.9.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum terjadi kenaikan jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sebesar 95.768 penumpang. Arus penumpang mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 52.358 penumpang, hal ini disebabkan masa pandemi yang menyebabkan mobilitas penumpang juga mengalami pembatasan. Secara umum tren peningkatan ini dapat diartikanbahwa masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar masih menjadikan angkutan umumsebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah. Jumlah arus penumpang angkutan umum menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	675	1.253	2.853	3.296	1.218
2	Pasilambena	415	1.215	3.359	3.512	1.318
3	Pasimasunggu	689	1.636	3.834	4.284	1.523
4	Taka bonerate	525	1.087	3.208	3.580	1.105
5	Pasimasunggu Timur	365	986	2.054	2.874	975
6	Bontosikuyu	1.535	9.827	11.952	12.108	5.693
7	Bontoharu	1.698	7.785	9.875	9.875	4.963
8	Benteng	13.993	25.385	43.375	45.519	31.179
9	Bontomanai	1.385	10.013	10.354	11.391	5.662
10	Bontomatene	4.413	11.734	12.713	14.089	8.935
11	Buki	1.275	7.945	9.222	11.208	7.807
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		26.968	78.866	112.799	122.736	70.378

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.2. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek secara umum tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jika melihat kecenderungan kenaikan penumpang yang naik, tetapi rasio ijin trayek yang dikeluarkan tidak mengalami peningkatan. Ini menunjukkan tidak terdapat penambahan jumlah armada angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar juga disebabkan oleh maraknya angkutan umum yang berplat hitam (angkutan travel). Rasio ijin trayek menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161
Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
7	Bontoharu	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
8	Benteng	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
9	Bontomanai	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
10	Bontomatene	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
11	Buki	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
Rasio Ijin Trayek		0,001	0,001	0,001	0,001	0

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Salah satu indikator di bidang berhubungan adalah jumlah uji KIR angkutan umum, pelaksanaan uji KIR angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum. Pada tahun 2016 jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 79 kendaraan dan pada tahun 2020, jumlah uji KIR kendaraan umum sebanyak 102 kendaraan. Jumlah uni Kir angkutan umum menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	13	15	15	15	15
7	Bontoharu	10	10	10	10	10
8	Benteng	26	35	37	39	39
9	Bontomanai	7	11	11	11	11
10	Bontomatene	15	17	17	17	17
11	Buki	8	10	10	10	10
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum		79	98	100	102	102

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah penumpang dan semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di tahun 2016 sampai tahun 2019. Direncanakan akan dibangun pelabuhan laut di tahun 2020 sebanyak 14 buah tetapi hal ini tidak terwujud karena memerlukan perencanaan dokumen koordinasi-koordinasiyang lebih intensif untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis meurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1	1	1	1	1
2	Pasilambena	1	1	1	1	1
3	Pasimasunggu	1	1	1	1	1

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Taka bonerate	2	2	2	2	2
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	1	1	1	1	1
7	Bontoharu	1	1	1	1	1
8	Benteng	2	2	2	2	2
9	Bontomanai	0	0	0	0	0
10	Bontomatene	2	2	2	2	2
11	Buki	0	0	0	0	0
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		11	11	11	11	11

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat kecil. Ini menujukkan jumlah angkutan darat yang tersedia masih sedit dibandingkan jumlah penumpang angkutan darat yang akan terangkut yang semakin meningkat. Data tahun 2016 persentase layanan angkutan darat sebesar 38,24 persen dan tahun 2019 sebesar 54,24 persen. Persentase layanan angkutan darat menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164
Persentase Layanan Angkutan Darat Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	50	39,56	36,87	36,87	36,87
2	Pasilambena	50	49,53	47,49	47,49	47,49
3	Pasimasunggu	50	40,31	43,54	43,54	43,54
4	Taka bonerate	50	49,75	48,68	48,68	48,68
5	Pasimasunggu Timur	50	47,21	45,30	45,30	45,30
6	Bontosikuyu	46,72	43,20	44,31	44,31	44,31
7	Bontoharu	49,03	42,32	41,35	41,35	41,35
8	Benteng	34,31	58,81	29,95	41,12	41,12
9	Bontomanai	49,16	45,93	45,78	45,78	45,78
10	Bontomatene	48,16	49,48	42,75	42,75	42,75
11	Buki	49,25	47,06	46,26	46,26	46,26
Persentase Layanan Angkutan Darat		38,24	34,04	61,02	54,24	

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikam KIR di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah dibawah 50 persen dari jumlah angkutan umum yang wajib KIR. Ini menujukkan masih kurangnya pengusaha angkutan darat untuk mengurus KIR kendaraannya

tiap tahunnya. Data tahun 2016 persentase kepemilikanKIR angkutan umum sebesar 52,32 persen dan meningkat tahun 2020 sebesar 67,55 persen. Persentase kepemilikan KIR angkutan darat menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	8,61	9,93	9,93	9,93	9,93
7	Bontoharu	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
8	Benteng	17,22	23,18	24,50	25,83	25,83
9	Bontomanai	4,64	7,28	7,28	7,28	7,28
10	Bontomatene	9,93	11,26	11,26	11,26	11,26
11	Buki	5,30	6,62	6,62	6,62	6,62
Persentase PKK Aktif		52,32	64,90	66,23	67,55	67,55

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.7. Pemasangan Rambu-Rambu

Jumlah rambu-rambu petunjuk, kesalamatan dan pelengkap jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan banyak kontrobusi angaran untuk pengadaan kelengkapan jalan dimaksud, baik melalui anggaran pemerintah daerah maupun dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus). Jumlah pemasangan rambu-rambu pelengkap jalan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166
Pemasangan Rambu-Rambu Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	50	85	100	100	100
7	Bontoharu	50	80	85	100	100

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Benteng	86	141	141	151	151
9	Bontomanai	50	75	100	100	100
10	Bontomatene	50	95	100	100	100
11	Buki	50	75	75	100	100
Pemasangan Rambu-Rambu		336	551	601	651	651

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 semakin menurut sampai tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan semakin meningkat tidak diiringi dengan penambahan jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 sebesar 1,472 dan tahun 2019 0,376 dan secara rinci menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,177	0,204	0,129	0,129	0,129
2	Pasilambena	0,0558	0,038	0,038	0,038	0,038
3	Pasimasunggu	0,035	0,026	0,021	0,021	0,021
4	Taka bonerate	0,021	0,019	0,021	0,021	0,021
5	Pasimasunggu Timur	0,0195	0,036	0,028	0,028	0,028
6	Bontosikuyu	0,156	0,054	0,043	0,043	0,043
7	Bontoharu	0,0357	0,037	0,035	0,035	0,035
8	Benteng	0,007	0,005	0,004	0,004	0,004
9	Bontomanai	0,068	0,059	0,067	0,067	0,067
10	Bontomatene	0,04	0,033	0,029	0,029	0,029
11	Buki	0,017	0,025	0,033	0,033	0,033
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		1,472	0,038	0,360	0,376	

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.9. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang dan orang terangkut angkutan umum terjadi kenaikan jumlah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sebesar 70.985 barang dan orang terangkut dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 36.744 barang dan orang terangkut. Jumlah orang**/**barang yang terangkut angkutan umum menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	358	7.637	8.650	8.650	6.480
7	Bontoharu	225	4.898	8.776	8.776	2.675
8	Benteng	4.125	21.652	35.128	35.148	19.330
9	Bontomanai	235	7.484	7.832	7.897	3.501
10	Bontomatene	1.081	10.321	11.094	11.094	5.378
11	Buki	211	2.386	5.635	5.655	3.112
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum		6.235	54.378	77.115	77.220	40.476

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.9.10. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

Jumlah barang dan orang melalui dermaga atau bandara dan terminal terjadi kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sebesar 40.962 barang dan orang terangkut dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 39.953 barang dan orang terangkut, hal ini disebabkan masa pandemi yang terjadi di tahun 2020. Jumlah orang/barang melalui dermaga ata bandara dan terminal menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	125	255	515	395	173
2	Pasilambena	98	200	455	328	73
3	Pasimasunggu	428	782	1.523	1.142	451
4	Taka bonerate	276	524	1.105	928	235
5	Pasimasunggu Timur	315	640	1.318	1.191	268
6	Bontosikuyu	1.386	2.735	5.693	5.112	1.171
7	Bontoharu	1.405	2.875	4.963	5.316	1.405
8	Benteng	13.142	18.959	31.179	28.715	15.310
9	Bontomanai	1.285	3.286	5.478	5.191	1.285
10	Bontomatene	4.225	7.428	8.945	8.670	3.423
11	Buki	1.067	3.505	7.835	7.726	967
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun		23.752	41.189	69.009	64.714	24.761

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2021

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat https://kepulauanselayarkab.go.id/ dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah.

Tabel 2.170
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan SelayarTahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM	13	13	13	13	13
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		71	0	71	71	73
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85	87	90	92	94
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		26.433/ 33.041	28.049/ 33.392	29.330/ 33.713	30.998/ 34.064	32.666/ 34.385
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		2.272/ 333.041	2.307 / 33.392	2.341 / 33.713	2.421 / 34.064	2.704 / 34.385

Sumber Data: Diskominfo SP Kepulauan Selayar, tahun 2021

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian daerah, keberadaan Koperasi terbukti merupakan pelaku usaha mandiri, kukuh dan fleksibel dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi memberikan konstribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi daerah, ia dapat menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor pertumbuhan ekonomi rakyat.

2.1.3.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 71,96 persen, tahun 2017 sebesar 76,72 persen tahun 2018 sebesar 81,37 persen dan

tahun 2019 sebesar 81,48 persen dan tahun 2020 sebesar 82,42 persen. Ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pemberdayaan koperasi meningkat. Persentase koperasi aktif yang tiap tahun meningkat dapat meningkatkan sector ekonomi mikro, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sebesar 7,68 persen. Persentase koperasi aktif menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171
Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	100	100	100	100	100
2	Pasilambena	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
3	Pasimasunggu	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
4	Taka bonerate	100	100	100	100	100
5	Pasimasunggu Timur	66,67	66,67	100	100	100
6	Bontosikuyu	85,71	85,71	80	80	81
7	Bontoharu	83,33	83,33	90	90	90
8	Benteng	55,81	66,28	69,84	69,84	69,84
9	Bontomanai	78,57	78,57	83,33	83,33	83,33
10	Bontomatene	83,33	83,33	88,89	88,89	88,89
11	Buki	80	80	80	80	80
Persentase Koperasi Aktif		**71,96**	**76,72**	**81,37**	**81,48**	**82,42**

Sumber Data: Dinas PERNDAG KUKM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.11.2. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat baik yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid – 19. Persentase UKM non BPR/LKM aktif menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	n/a	4,22	8,55	4,05	12,12
2	Pasilambena	n/a	0	0	12,22	8,58
3	Pasimasunggu	n/a	9,74	11,89	9,99	5,29
4	Taka bonerate	n/a	6,49	7,00	2,19	6,49
5	Pasimasunggu Timur	n/a	4,87	6,65	6,44	5,41
6	Bontosikuyu	n/a	27,92	23,29	49,09	10,75
7	Bontoharu	n/a	3,90	4,70	5,53	11,29

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Benteng	n/a	1,30	2,10	1,36	12,17
9	Bontomanai	n/a	3,57	4,95	4,34	8,27
10	Bontomatene	n/a	34,74	26,59	8,51	10,24
11	Buki	n/a	3,25	4,30	4,54	9,39
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif		**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data: Dinas PERNDAG KUKM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif juga sangat baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas BPR di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid – 19. BPR/LKM aktif di Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada Kecamatan Benteng sedangkan 10 kecamatan lainnya belum memiliki BPR.

2.1.3.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil juga sangat baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemic Covid – 19. Persentase BPR/LKM aktif menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	n/a	4,21	8,54	4,04	12,12
2	Pasilambena	n/a	0	0	12,22	8,58
3	Pasimasunggu	n/a	9,71	11,89	9,99	5,29
4	Taka bonerate	n/a	6,47	6,99	2,19	6,48
5	Pasimasunggu Timur	n/a	4,85	6,64	6,44	5,41
6	Bontosikuyu	n/a	27,83	23,28	49,07	10,75
7	Bontoharu	n/a	3,88	4,70	5,53	11,29
8	Benteng	n/a	1,62	2,15	1,40	12,19
9	Bontomanai	n/a	3,56	4,95	4,33	8,26
10	Bontomatene	n/a	34,63	26,57	8,50	10,24
11	Buki	n/a	3,24	4,30	4,54	9,39
Persentase Usaha Mikro dan Kecil		**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data: Dinas PERNDAG KUKM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari

kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Realisasi capaian indikator kinerja penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	597	727	792	350	209
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	-	6.254.800.000	94.255.870.000	25.716.000.000	39.200.520.000
	Nilai Investasi PMDN (Rp)	-	2.761.300.000	-	6.480.000.000	28.418.800.000
	Nilai Investasi PMA(Rp)	-	3.493.500.000	94.255.870.000	9.865.858	7.487.000
3	Rasio daya serap tenaga kerja	2,73	1,98	9,42	2,00	5,21
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0%	100 %	0 %	100 %	77,20 %

Sumber : Dinas PMPTSPTK Kepulauan Selayar,Tahun 2021

Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2016 sebanayak 597 meningkat hingga tahun 2018 sebanyak 792 namun di akhir tahun 2019 menurun menjadi 350 dan pada tahun 2020 sebanyak 209. Peningkatan investor tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang memberi berbagai kemudahan kepada investor. Jumlah nila investasi berskala nasional juga meningkat di tahun 2020 nilai investasi mencapai Rp. 39.200.520.000. ini menunjukkan iklim investasi sangat baik dan kegiatan sektor andalan (pariwisata perikanan dan kelautan) yang akan diinvestasikan juga menjanjikan bagi investor.

Rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami fluktuasi, tertinggi pada tahun 2018 adalah sebesar 10 (9,42) orang/proyek. Hal ini disebabkan oleh investasi yang masuk pada kurun waktu lima tahun terakhir mayoritas dari sektor industri yang menggunakan tenaga kerja dan juga jumlah proyekproyek terealisasi cukup banyak.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap

suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit- bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana.

2.1.3.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkenbangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, namun keberadaan dan kiprah organisasi pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan adanya trend peningkatan organisasi pemuda yang aktif. Seperti pada tabel berikut

Tabel 2.175
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,5	0,5	0,5	0,5	1,00
2	Pasilambena	0,5	0,5	0,5	0,5	1,00
3	Pasimasunggu	0,5	0,5	0,5	0,5	1,00
4	Taka bonerate	0,5	0,5	0,5	0,5	1,00
5	Pasimasunggu Timur	0,5	0,5	0,5	0,5	1,00
6	Bontosikuyu	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
7	Bontoharu	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
8	Benteng	0,5	0,5	1,00	2,00	3,00
9	Bontomanai	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
10	Bontomatene	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
11	Buki	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif		0,50	0,50	0,55	0,86	1,64

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Presentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dari 0,50 persen hinggal 1,64 persen. Peningkatan ini didorong oleh adanya forum-forum pemuda yang berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan.

2.1.3.2.13.2. Persentase Wirausaha Muda

Tabel 2.176
Persentase Wirausaha Muda Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
2	Pasilambena	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
3	Pasimasunggu	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
4	Taka bonerate	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
5	Pasimasunggu Timur	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
6	Bontosikuyu	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
7	Bontoharu	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
8	Benteng	0,5	1,00	2,00	2,00	3,00
9	Bontomanai	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
10	Bontomatene	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
11	Buki	0,5	0,5	0,5	1,00	2,00
Persentase Wirausaha Muda		0,50	0,55	0,64	1,09	2,09

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Persentase Wirausaha muda di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dari 0,50 persen hinggal 2,09 persen. Dalam rangka pengembangan minat pemuda dalam bidang kewirausahaan maka perlu dilakukan pendampingan terhadap wirausaha muda secara berkelanjutan mulai dari fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi kaum pemuda yang masih pemula yang disertai dengan bantuan modal usaha kewirausahaan bagi yang sudah memiliki usaha.

2.1.3.2.13.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkanjasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu pembinaan olahraga seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupetan Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177
Cakupan Pembinaan Olahraga Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Pasilambena	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Pasimasunggu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Taka bonerate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Pasimasunggu Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Bontosikuyu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Bontoharu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Benteng	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
9	Bontomanai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Bontomatene	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Buki	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cakupan Pembinaan Olahraga		1,00	1,09	1,18	1,27	1,36

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Cakupan pembinaan olahraga di Kabupetan Kepulauan Selayar mengalami peningkatan setiap tahunya dimana tahun 2016 sebanyak 1,00 meingkat hingga tahun 2020 sebanyak 1,36.

2.1.3.2.14. Statistik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terus melakukan upaya untuk menyediakan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Beberapa dokumen yang telah disusun oleh Kabupaten Kepulauan Selayar, baik disusun oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait. Dokumen-dokumen statistik tersebut diantaranya yaitu Kepulauan Selayar Dalam Angka, Produks Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dokumen statistik lainnya.

Tabel 2.178
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Statistik
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Buku ”Kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data: Diskominfo SP Kepulauan Selayar, tahun 2021

2.1.3.2.15. Persandian

Urusan wajib persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib persandian merupakan urusan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

Tabel 2.179
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persandian
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Diskominfo SP Kepulauan Selayar, tahun 2021

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kepulaaun Selayar pada Tahun 2016 sebanyak 561 buah, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 1.996, pada tahun 2018 sebanyak 2.272, pada tahun 2019 sebanyak 5.463 buah dan tahun 2020 sebanyak 67.

Tabel 2.180
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	4	15	6	0
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	561	1.996	2.272	5.463	5.527
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		1	1	1	1	1
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memnuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Berdasarkan Tabel di bawah menunjukkan adanya Peningkatan Jumlah kunjungan di perpustakaan dari Tahun 2016 sebesar 31.457 orang dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 63.957 orang, kemudian menurun ditahun 2018 sebanyak 37.793, pada tahun 2019 34.026, dan pada tahun 2017 sebanyak 7.190. hal ini dimungkin karena tercapainya indikator utama dari urusan ini.

Tabel 2.181
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	31.457	63.957	37.793	34.026	7.190
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp	28.785	28.210	28.993	30.645	93.579
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,067	0,006	0,066	0,08	0,063
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	31.457	63.957	37.793	34.026	7.190
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	28.785	28.210	28.993	30.645	48.149
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	209	209	210	210	302

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Selayar,Tahun 2021

2.1.3.2.18. Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan ditujukan sebagai daya dukung penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Persentase Peningkatan Jumlah Khasanah Arsip Warisan Budaya.

Pencapaian kinerja ini diukur dengan menggunakan indikator sasaran adalah adanya kesiapan pengeloa arsip secara baku di OPD dan peningkatan SDM pengeloa kerasipan dalam peningkatan penerapan standar, norma kearsipan dari SKPD. Jika sasaran inidikator tersebut tercapai maka outcome dari urusan ini dapat dianggap berhasil dengan memperhatikan indikator kunjungan masyarakat tentang kearsipan, peningkatan wawasan dan pengetahuan pengelolaan kearsipan di Kepulauan Selayar.

Kinerja urusan perpustakaan diukur dengan indikator Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Perkembangan kinerja dari waktu ke waktu ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.182
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengelolahan Arsip secara Baku (OPD)	%	2	2	6	0	0
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Peserta)	Peserta	0	40	40	40	20

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Selayar,Tahun 2021

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kepualaun Sleayar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatakan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sleayar dari Sektor pariwisata. Realisasi capaian indikator kinerja ursan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisata	%	134,26	101,72	87,80	78,22	24,23
2	Perkembangan Lama Tinggal Wisata		2	2	2	2	2
3	PAD sektor pariwisata	%	0,18	2,78	5,81	4,45	3,44

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan data yang di peroleh, kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebanyak 9.291 orang, tahun 2017 sebanyak 8.582 orang, pada tahun 2018 sebanyak 9.783 orang, pada tahun 2019 mencapai 12.423 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 5.889. Pencapaian target kunjungan wisata setiap tahunnya tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintah untuk terus mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada. Dan peran pemerintah untuk menwujudkan kawasan KEK Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.3.3.2. Pertanian

Kabupaten kepulauan Selayar menjadikan sektor pertanian sebagai secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan kinerja

pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu menodorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

2.1.3.3.2.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sampai tahun 2020, menunjukkan bahwa produksi padi fluktuatif dimana pada tahun 2016 mencapai 5,50 ton/hektar, tahun 2017 mencapai 5,70 ton/hektar, tahun 2018 mencapai 6,73 ton/hektar, tahun 2019 mencapai 7,98 ton/hektar dan tahun 2020 mencapai 6,65 ton/hektar. Produktivitas padi untuk bahan pangan utama local naik turun disebabkan produksi petani dalam lima tahun juga naik turun, hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen yang disebabkan oleh anomali iklim. Lahan sawah pada Kabupaten Kepulauan Selayar sebahagian besar masih merupakan sawah tadah hujan sehingga luas tanam masih sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Selain itu, alat-lat pertanian (Alsintan) yang digunakan kelompok tani belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah kelompk tani sehingga dalam penggunaan Alsintan tersebut masih bergiliran antara satu kelompok tani dengan kelompok tani lainnya. Produktifitas padi sebagai bahan pangan utama local per hektarnya menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.184
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	3,2	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	5,64	5,71	6,73	7,8	5,69
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	5,44	5,72	6,73	8,27	7,61
6	Bontosikuyu	2,78	3,48	67	6,31	6,38
7	Bontoharu	4,9	5,27	6,72	7,17	3,68
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	4,93	5,72	6,71	7,33	5,15
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	2,91	0	0	0	5,00
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hekta		5,50	5,70	6,73	7,98	6,65

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.2.2. Cakupan Bina Kelompok Tani

Kelompok tani di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai tahun 2020 sebanyak 845 kelompok tani yang tersebar di tiap desa dan kelurahan. Kelompok tani yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar fluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Cakupan bina kelompok tani tahun 2016 sebesar 24,73%, tahun 2017 sebesar 19,26%, tahun 2018 sebesar 24,07%, tahun 2019 sebesar 25,47% dan tahun 2020 sebesar 15,62%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan yang baik dalam meningkatkan produksi pertanian para kelompok tani di Kabupaten Kepulauan Selayar. Cakupan bina kelompok tani menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut**.**

Tabel 2.185
Cakupan Bina Kelompok Tani Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	9,38	0,00	17,07	14,58	4,69
2	Pasilambena	0,00	6,67	0,00	2,50	12,50
3	Pasimasunggu	15,85	48,78	47,56	53,66	29,07
4	Taka bonerate	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
5	Pasimasunggu Timur	52,17	29,35	29,35	61,96	27,37
6	Bontosikuyu	26,32	13,33	15,24	21,30	15,52
7	Bontoharu	15,73	15,73	16,85	11,24	12,36
8	Benteng	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
9	Bontomanai	48,08	27,88	36,54	39,42	22,64
10	Bontomatene	17,71	12,07	22,41	8,62	8,00
11	Buki	16,95	10,17	25,42	10,14	13,70
Cakupan Bina Kelompok Tani		**24,73**	**19,26**	**24,07**	**25,47**	**15,62**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.3. Kehutanan

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2019 mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yakni dari luas total hutan dan lahan kritis sebanyak 1.267,25 Ha tahun 2016 menjadi 185,00 Ha tahun 2019. Penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kepulauan Selayar dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara luas kerusakan kawasan hutan selama kurun waktu 2016-2019 cenderung mengalami penurunan, yakni dari 43.045,17 ha menurun menjadi 1.555,14 Ha tahun 2019. Penurunan luas kerusakan kawasan hutan di Kepulauan

Selayar merupakan upaya yang saling bersinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar. Realisasi capaian indikator kinerja urusan kehutanan Kabuapten Kepulauan Selayar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	1.267,25	375,45	206,90	185,00	n/a
2	Kerusakan Kawasan Hutan(Ha)	43.045,17	42.775,76	1.555,14	1.555,14	n/a

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Selayar, Tahun 2020

2.1.3.3.4. Energi Sumber Daya Mineral

Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 62,76 persen dan mengalami peningkatan menjadi 75,47 persen pada tahun 2020. Indikator ini mengagambarkan bahwa sebesar 75,47 persen rumah tangga telah memiliki listrik. Indikator terkait rasio ketersediaan listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir cenderung statis yakni sebesar 104,54. Indikator ini menggambarkan bahwa antara antara kebutuhan listrik dan jumlah daya yang terpasang sudah masih besar. Realisasi capaian indicator kinerja urusan ESDM Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi Sumber Daya Mineral
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	62,76	63,34	62,99	70,30	75,47
2	Rasio ketersediaan daya listrik	104,54	104,54	104,01	104,54	n/a

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.5. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik.

Kotribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 7.51 persen meningkat pada tahun 2019 sebesar 7,69 persen.

Sementara cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Kepulaaun Selayar pada tahun 2016 sebanyak 28 pasar dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 32 pasar. Realisasi capaian indicator kinerja urusan perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB)	%	7,51	7,46	7,52	7.69	7.81
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal		28	28	30	32	31

Sumber Data: Dinas PERNDAG KUKM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.5.1. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 18 dan meningkat menjadi 31 pada tahun 2020. Hal ini disebakan dukungan yang besar pemerintah daerah terhadap pedagang/usaha informal yang ada di daerahnya. Cakupan bina kelompok pedagang usaha informal menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.189
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	2	2	2	2	2
2	Pasilambena	1	1	2	2	2
3	Pasimasunggu	3	3	3	3	3
4	Taka bonerate	2	2	2	3	3
5	Pasimasunggu Timur	2	2	2	2	3
6	Bontosikuyu	5	5	5	5	5
7	Bontoharu	1	1	1	1	1
8	Benteng	2	2	2	2	2
9	Bontomanai	2	2	3	3	2
10	Bontomatene	6	6	6	6	6
11	Buki	2	2	2	3	2
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal		28	28	30	32	31

Sumber Data: Dinas PERNDAG KUKM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.6. Perindustrian

Sektor Perindustrian memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik. Realisasi capaian indikator kinerja urusan industri Kabupaten Kepulauan Selayar tahu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Industri	IKM	8.078	8.153	1.227	1.227	1.227
Cakupan bina kelompok pengrajin		1.085	75	86	102	102

Sumber Data: Dinas PERINDAGKUM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.6.1. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sebanyak 8.153 IKM terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 1.227 IKM. Ini menunjukkan di masa pandemi, industry kecil dan menengah masih dapat bertahan dan tidak tutup atau mengalami kebangrutan. Pertumbuhan industry menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191
Pertumbuhan Industri Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	571	84	85	86	86
2	Pasilambena	489	72	73	74	74
3	Pasimasunggu	408	60	61	61	61
4	Taka bonerate	326	48	48	49	49
5	Pasimasunggu Timur	652	96	97	98	98
6	Bontosikuyu	734	108	109	110	110
7	Bontoharu	978	144	145	147	147
8	Benteng	2.283	336	339	344	344
9	Bontomanai	571	84	85	86	86
10	Bontomatene	652	96	97	98	98
11	Buki	489	72	73	74	74
Pertumbuhan Industri		8.078	8.153	1.227	1.227	1.227

Sumber Data: Dinas PERNDAG KUKM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.6.2. Cakupan bina kelompok pengrajin

Capaian cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 cakupan

bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 75 dan meningkat menjadi 102 pada tahun 2020. Hal ini disebakan dukungan yang besar pemerintah daerah terhadap pengrajin yang ada di daerahnya. Cakupan bina kelompok pengrajin menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.192
Cakupan bina kelompok pengrajin Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	33	2	3	3	3
2	Pasilambena	43	3	3	4	4
3	Pasimasunggu	98	7	8	9	9
4	Taka bonerate	22	2	2	2	2
5	Pasimasunggu Timur	76	5	6	7	7
6	Bontosikuyu	119	8	9	11	11
7	Bontoharu	130	9	10	12	12
8	Benteng	271	19	22	26	26
9	Bontomanai	130	9	10	12	12
10	Bontomatene	98	7	8	9	9
11	Buki	65	3	5	6	6
Cakupan bina kelompok pengrajin		1.085	75	86	102	102

Sumber Data: Dinas PERNDAG KUKM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.7. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah maritim, produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan cukup tinggi sehingga merupakan produsen perikanan terbesar karena merupakan daerah *fish ground*. Produksi perikanan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Usaha dalam rangka peningkatan produksi perikanan maka didukung beberapa program pembangunan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lainnya melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung, meningkatkan pembinaan kepada petani. Dan salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kapasitas nelayan dan pembangunan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Sementara untuk konsumsi ikan pada tahun 2020 sebesar 63,02 kg/kap/th. Hal ini dimungkinkan karena Kepulauan Selayar memiliki masyarakat yang mengkonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi serta pencapaian dari perikanan tangkap dan budidaya yang cukup mendukung.

2.1.3.3.7.1. Produksi perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat pada tahun 2016 sebesar 24.558 ton, tahun 2017 sebesar 20.608 ton, tahun 2018 sebesar 22.086 ton, tahun 2019 sebesar 28.842 ton, dan menurun pada tahun 2020 sebanyak 19.729,2 ton. Produksi perikanan tahun 2020 menurun disebabkan masa Pandemi yang membatasi pergerakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar begitu pula nelayan yang akan melaut sehingga produksi perikanan berkurang. Produksi perikanan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.193
Produksi Perikanan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	2.735	3.378	3.645	4.581	3.098
2	Pasilambena	4.373	1.603	1.714	2.355	1.560
3	Pasimasunggu	2.141	1.152	1.241	2.194	1.456
4	Taka bonerate	5.487	4.430	4.744	6.461	4.290
5	Pasimasunggu Timur	1.094	842	907	979	663
6	Bontosikuyu	3.002	3.482	3.726	4.329	3.158
7	Bontoharu	2.884	2.522	2.696	4.128	2.807
8	Benteng	234	170	180	185	123
9	Bontomanai	650	582	626	717	472
10	Bontomatene	1.366	2.002	2.131	2.290	1.526
11	Buki	592	445	477	624	414
Produksi perikanan (Ton)		**24.558**	**20.608**	**22.086**	**28.842**	**19.567**

Sumber: Dinas Perikanan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.3.7.2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan kelompok yang mendapatkan bantuan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 semakin meningkat, dimana tahun 2016 cakupan bina kelompok nelayan 15 kelompok dan tahun 2019 mencapai 136 kelompok. Meningkatnya jumlah kelompok nelayan dari tahun 2016-2019 karena sector perikanan dan kelautan merupakan sector unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tahun 2020 cakupan nelayan sedikit menurun yaitu 82 kelompok dari tahun 2019 disebabkan adanya Recofusing anggaran yang menyebabkan kelompok nelayan yang mendapat bantuan juga berkurang. Bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan. Hal lain yang menyebabkan tidak maksimalnya bantuan pada kelompok nelayan disebabkan karena adanya pembagian urusan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang termuat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dibawah kapal 5 GT adalah kewenangan kabupaten/Kota sehingga tahun 2017 – 2019 pembinaan nelayan fokus pada usaha

nelayan skala menengah keatas (nelayan yang memiliki kapal 5 – 30 GT). Cakupan bina kelompok nelayan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.194
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	7	3	4	7
2	Pasilambena	0	0	8	0	1
3	Pasimasunggu	1	0		5	8
4	Taka bonerate	0	7	21	21	11
5	Pasimasunggu Timur	0	1	15	5	6
6	Bontosikuyu	4	13	33	27	15
7	Bontoharu	5	15	3	27	12
8	Benteng	0	1	4	3	3
9	Bontomanai	0	3	3	4	6
10	Bontomatene	3	13	37	31	7
11	Buki	2	6	11	9	6
Cakupan Bina Kelompok Nelayan		**15**	**66**	**138**	**136**	**82**

Sumber: Dinas Perikanan Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.4. Layanan Penunjang Urusan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.195
Konsistensi Program RKPD kedalam RPJMD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-20320

NO	Bidang dan Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	78,03	93,06	87,86	80,35	75,72

Sumber: Bappelitbangda Kepulauan Selayar, tahun 2021

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD yang tidak mencapai realisasi 100% disebabkan karena adanya beberapa program dalam RPJMD yang targetnya tidak ada, sementara program yang termuat dalam RKPD tidak lagi memuat program yang tidak memliliki target pada RPJMD. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi di tingkat Pemerintah Pusat yang berimplikasi pada perubahan Kelembagaan serta kewenangan pada Pemerintah Daerah. Adanya ruang pada Sistem Informasi Manajemen Daerah yang masih membuka ruang ds.. (dan seterusnya) sehingga banyak program RKPD yang muncul tiba-tiba diluar program RPJMD.

2.1.3.4.2 Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan-RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk opini LKPD tahun anggaran 2020 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK–RI, namun Inspektorat Kabupaten telah melakukan langkah – langkah preventif dalam rangka menghasilkan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi. Sebagai perbandingan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 3 tahun secara berturut turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Selain itu, Keberhasilan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih baik, namun predikat tersebut harus tetap dipertahankan keberlanjutannya, olehnya itu Inspektorat Kabupaten melaksanakan peran pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penguatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi dan monitoring ,Konsultasi dan Reviu Laporan Keuangan.

Tabel 2.196
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Bidang dan Indikator	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	%	6,76	10,01	10,20	6,97
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6,76	10,01	10,20	6,97
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	1,72	1,99	1,17	5,21
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	18,45	14,97	21,03	28,26
6	Persentase belanja	%	9,62	11,65	10,91	22,33

No	Bidang dan Indikator	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
	kesehatan (10%)					
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	56,33 / 49,87	58,95 / 47,54	56,54 / 43,40	51,27 / 48,73
8	Bagi hasil kabupaten / kota dan desa	Rp.	1.735.000.000	1.000.000.000	1.322.875.000	1.300.000.000
9	Penetapan APBD	tw/ttw	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKPD Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.197
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

NO	Bidang dan Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	24	24	24	40	40
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	16,77	18,04	13,47	13,90	15,17
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,23	0,17	0,13	0,2	0,02
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	30	32	32	32	32
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	157	168	168	168	168
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	753	937	1.170	1.380	1.444

Sumber: BKPSDM Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Jumlah kelitbangan yang tertuan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diimplementasikan dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut didukung oleh para pemangku kepentingan utama dalam penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat kaya dan beragam. Walaupun mensinergikan sumber daya kelitbangan yang kaya tidaklah mudah, akan tetapi dikarenakan ini tetap menjadi kebutuhan bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar maka semua hal tersebut dapat terimplementasikan dengan baik.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya peningkatan daya saing. Maka beberapa perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar berlomba-lomba untuk mengembangkan inovasi untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun persentase inovasi Perangkat Daerah yang penerapannya difasilitasi dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar 100 persen.

Tabel 2.198
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

NO	Bidang dan Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	100	100	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.3.4.5 Pengawasan

Indikator persentase tindak lanjut temuan ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Terkait dengan adanya temuan hasil pemeriksaandikarenakan pelaksanaan kegiatan tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing perangkat daerah dalam memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pegawai pengelola keuangan. persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 mencapai 80,45 persen kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 100 persen kemudia pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 61,14 persen.

Selanjutnya terkait dengan indikator persentase tindak lanjut temuan ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan capaian indikator dari tahun 2016 sampai dengan 2020 pelanggaran pegawai yang ada mengalami fluktuasi.

Sementara perkembangan jumlah temuan oleh BPK dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dilakukan ditahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 33 rekomendasi temuan sementar ditahun 2018 sebanyak 80 rekomendasi temuan,

tahun 2019 54 rekomendasi temuan dan tahun 2020 sebnayak 37 rekomendasi temuan. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.199
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

NO	Bidang dan Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	80,45	100	71,17	87,06	61,14
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	n/a	0,005	00032	0,0036	0,003
3	Jumlah temuan BPK	Rekomendasi	95	33	80	54	37

Sumber: Inspektorat Kepulauan Selayar, tahun 2021

2.1.3.4.5 Sekretariat Dewan

Tabel 2.200
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

NO	Bidang dan Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kepulauan Selayar, tahun 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunya pendapatan yang besar pula.

Pengeluaran perkapita konsumsi Rumah Tangga mencapai Rp. 982.570 per bulan di tahun 2020.

Tabel 2.201
Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rp	712.601	941.869	936.760	1.003.365	982.570

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.1.4.2. Nilai tukar petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Realisasi NTP mengacu pada NTP gabungan Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 2.202
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	%	104,73	100,85	102,29	104,42	97,86

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2020

2.1.4.3. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

Tabel 2.203
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
di Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	44,30	42,10	43,14	45,14	47,37

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Tahun 2020

Tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan total rumah tangga maka pola konsumsi pangan akan semakin berkurang atau rendah, sedangkan pola konsumsi non pangan akan semakin tinggi, dengan kata lain pola konsumsi non pangan akan berbanding lurus dengan pertambahan pendapatan, artinya jika terjadi kenaikan pendapatan pada rumah tangga maka proporsi alokasi non pangan akan bertambah dengan asumsi kebutuhan pangan telah terpenuhi. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, persentase pengeluaran konsumsi non pangan

perkapita adalah sebesar 44,30% pada tahun 2016, 42,10% pada tahun 2017 dan 43,14% pada tahun 2018, 45,14% pada tahun 2019 serta mengalaami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 47,37%. Hal ini menandakan bahwa persentase rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 sebesar 47,37% dan konsumsi pangan sebesar 52,63%. Fenomena pangsa pengeluaran konsumsi non pangan yang kurang dari 50% ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk bahan makanan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sedikit lebih besar porsinya dibandingkan dengan pengeluaran untuk non pangan.

2.1.4.4. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Tabel 2.204
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	66,94	65,29	66,41	57,81	n/a

Sumber: BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2020

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 samapai tahun 2019 mengalami fluktuas, dimana tahun 2016 sebesar 66,94 persen, menurun pada tahun 2017 sebesar 65,29 persen, kemudian meningkat sebesar 66,41 persen pada tahun 2018, dan kembali menurun pada tahun 2019 sebesar 57,81 persen.

2.1.4.5. Angka kriminalitas yang tertangani

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian.

Tabel 2.205
Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas	37,23	36,84	6,93	22,93	10,65

Sumber: BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016

sebesar 37,23 persen, tahun 2017 sebesar 36,84 persen, tahun 2018 sebesar 6,93 persen, tahun 2019 sebesar 22,93 persen, dan tahun 2020 sebesar 10,65 persen.

2.1.4.6. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2.206
Rasio Ketergantungan di Kabupaten kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	40.143	38.212	38.166	34.138	32.356
2	Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	8.643	9.179	10.226	11.930	10.966
3	Jumlah Penduduk usia 15-64 Tahun	78.434	81.353	85.886	93.402	93.749
4	Rasio Ketergantungan	62,20	58,25	56.35	36,55	46,21

Sumber : BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2021

2.2. Evaluasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kepulauan Selayar

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Kepulauan Selayar di ukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.207
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2019

No	Urusan/ indikator	Capaian (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	**Pendidikan**	**75,59**	**78,05**	**80,33**	**72,44**
1,1	Persentase warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	53,07	42,15	59,00	54,24
1,2	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	86,85	96,00	91,00	94,50

No	Urusan/ indikator	Capaian (%)			
		2016	2017	2018	2019
1,3	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	86,85	96,00	91,00	68,57
2	**Kesehatan**	**81,32**	**74,16**	**83,83**	**80,43**
2,1	Persentase Ibu Hamil yang mendapat layanan kesehatan	76,80	85,12	72,60	92,37
2,2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapat layanan kesehatan	80,00	86,15	90,60	83,97
2,3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapat layanan kesehatan	100	100	100	100
2,4	Persentase Balita yang mendapat layanan kesehatan	75,68	66,90	69,62	59,84
2,5	Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapat layanan kesehatan	60,35	41,21	n.a	97,84
2,6	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapat layanan kesehatan	72,03	5,93	100	68,04
2,7	Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang mendapat layanan kesehatan	25,00	20,57	24,27	32,79
2,8	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	100	100	100	81,06
2,9	Persentase Warga Negara Penderita *diabetes melitus* yang mendapat layanan kesehatan	100	100	100	98,72
2,10	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapat layanan kesehatan	100	100	100	77,77
2,11	Persentase Warga Negara terduga *tuberkulosis* yang mendapat layanan kesehatan	86,00	84,00	65,00	72,70
2,12	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi HIV *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapat layanan kesehatan	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**36,54**	**36,94**	**38,38**	**45,00**
3,1	Tersedianya Akses Air Minum yang Aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari.	69,12	69,12	69,44	80,00
3,2	Tersedianya SPALD untuk pelayanan air limbah domestic	3,95	4,75	7,31	10,00
4	**Perumahan Rakyat**	**10,30**	**42,47**	**50,70**	**47,39**
4,1	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	n.a	75,52	77,16	83,65
4,2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	n.a	25,49	63,44	11,61

No	Urusan/ indikator	Capaian (%)			
		2016	2017	2018	2019
4,3	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10,30	26,40	11,50	46,91
5	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**55,05**	**58,75**	**59,25**	**98,10**
5,1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100
5,2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	10,10	17,50	18,50	96,2
6	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**91,25**	**90,06**	**92,75**	**94,53**
6,1	Terlaksananya pelayanan Informasi Potensi Bencana Alam	100	100	100	100
6,2	Terlaksananya pemasangan Rambu Jalur Evakuasi	100	100	100	100
6,3	Terlaksananya Pengurangan Resiko Bencana Akibat Cuaca Ekstrim	100	100	100	100
6,4	Terlaksananya Edukasi Kebencanaan di Tingkat Sekolah	100	100	100	99,50
6,5	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Resiko Bencana	100	100	100	100
6,6	Persentase Korban bencana yang dibantu	100	90,47	100	95,25
6,7	Tersedianya Data Korban Bencana	100	100	100	99,50
6,8	Persentase TRC (TIM REAKSI CEPAT) yang melakukan penanganan Korban Bencana	30,00	30,00	42,00	62,00
7	**Sosial**	**45,32**	**49,82**	**45,97**	**55,01**
7,1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	6,26	6,91	6,81	17,06
7,2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	16,32	36,90	16,11	38,71
7,3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	4,00	5,30	6,91	19,29
7,4	Persentase penduduk/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100	100
7,5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan	100	100	100	100
Capaian SPM Kabupaten Kepulauan Selayar		**56,48**	**61,46**	**64,46**	**70,41**

Tabel 2.208
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Urusan/ Indikator	Capaian (%)
1	**Pendidikan**	**84.83**
1.1	Persentase anak usia 5 (Lima) sampai dengan 6 (Enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	97,97
1.2	Persentase anak usia 7 (Tujuh) sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	92,29
1.3	Persentase anak usia 12 (Dua Belas) sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	64,37
1.4	Persentase jumlah anak usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	89,86
2	**Kesehatan**	**85.00**
2.1	Persentase Ibu Hamil yang mendapat layanan kesehatan	81
2.2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapat layanan kesehatan	75
2.3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapat layanan kesehatan	79
2.4	Persentase Balita yang mendapat layanan kesehatan	63
2.5	Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapat layanan kesehatan	76
2.6	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapat layanan kesehatan	93
2.7	Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang mendapat layanan kesehatan	75
2.8	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	93
2.9	Persentase Warga Negara Penderita *diabetes mellitus* yang mendapat layanan kesehatan	92
2.10	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapat layanan kesehatan	100
2.11	Persentase Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapat layanan kesehatan	100
2.12	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat layanan kesehatan	93
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**43.96**
3.1	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	85,96
3.2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	39.62
4	**Perumahan Rakyat**	**100**
4.1	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
4.2	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100
5	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**95.55**
5.1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100
5.2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	91.10

No	Urusan/ Indikator	Capaian (%)
6	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**100**
6.1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana	100
6.2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100
6.3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100
7	**Sosial**	**38.666**
7.1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18.99
7.2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	31.99
7.3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	17.35
7.4	Persentase penduduk/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	25
7.5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan	100
Capaian SPM Kabupaten Kepulauan Selayar		**78.29**

2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14)

Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Capaian target indikator 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan tahun 2019 sampai tahun 2020 mengacu pada Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Capaian target TPB/SDGs dapat dilihata pada tabel 2.209.

Tabel 2.209
Capaian Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2020

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
Pilar Pembangunan Sosial				
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan				
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	12,83	12,48
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.			
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	100	96,7
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	8,88%	43,31
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	16,31	18,99
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	KPM	5.589	6.597
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnyamasyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.			
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	83,98%	75,11
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	93,7%	69,7
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	56,5%	56,65
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	22,98	22,98
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	23,02	24,52
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	%		18,73
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	%	98	99
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	%	87	89
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	66,61	71,77



Kode Indikator	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana			
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	-	5
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	%	30	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	0	100
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan				
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun			
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	8,7%	19,17
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	12,80	21,90
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remajaperempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.			
2.2.1/ 2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18,99%	19,17
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	3,53%	21,90
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	19,04%	68,60
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	59,04%	58,10
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera				
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.			
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	kematian per 100.000 kelahiran hidup	255/ 100.000	324 /100.000
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	83,98%	75,1
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	77,69%	69,8
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.			
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1000 kelahiran hidup	1,5 / 1000 Kelahiran hidup	3,7 / 1000 Kelahiran hidup
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.			
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	per 1000 Penduduk	0,07/1000 penduduk	0,10/1000 penduduk
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,001	0,00071
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS)	222	159
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	%	14	14
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan			

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
	kesejahteraan.			
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	33,2	16,35
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	13,2	13,2
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.			
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	62,8	71,2
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	79,07	56,65
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	15,5	15,25
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	194	158
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		2,1	2,09
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.			
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.		0	0,30
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	100	99,70
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas				
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.			
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	60,67	63,83
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	64,12	65,38
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	108,75	107,82
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	89,42	89,50
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.			
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	67,34	68,00
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.			
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.			
	(1) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD;	%	99,20	99,29
	(2) Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP;	%	79,68	79,83
	(3) Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA;	%	49,60	49,87
	(4) Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	n/a	n/a
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.			
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15	%	92,90	93,95

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
	tahun.			
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	99,77	99,67
Tujuan 5. Kesetaraan Gender				
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.			
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	0,15	0,12
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan			
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Usia	22	22
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	1,61	1,70
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut			
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	11,54	24,00
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	N/A	63,11
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	%	100	100
Pilar Pembangunan Lingkungan				
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak				
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.			
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	73,81	85,96
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan			
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	72,92	74,94
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	88	88
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.			
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	-	-
6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.			
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	DAS	1	1
Pilar Pembangunan Sosial				

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau				
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.			
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	%	70,39	94,31
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kwh	20.318	27.223
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.			
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta/Jiwa	47,50 juta	46,71 juta
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.			
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	0,16	9,72
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.			
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	43,1	51,10
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.			
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	5,17	20
8.8	Melindungi hakhak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.			
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	unit	1	1
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.			
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	0,24	0,22
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	1.068	155
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	11.355	5734
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur				
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.			
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Unit	1	1
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	2	2
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis. / laut	Unit	7	7
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.			
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	%	177,5	179,4
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari			

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
	teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.			
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	%	83,76	89,1
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan				
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.			
10.1.1*	Koefisien Gini.	Poin	0,301	0,357
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	12,83	12,48
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	-	-	-
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal.	Jumlah Desa	6	34
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Jumlah Desa	1	0
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	-	-
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.			
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	45,08	43,31
Tujuan 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan				
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.			
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	14,39	14,22
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab				
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.			
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	ton	6.045,34	5.999,26
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka			
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Unit	2	2
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.			
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk	25	26
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim				
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara			
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	N/A	N/A
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.			

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	N/A	N/A
Tujuan 14. Ekosistem Lautan				
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.			
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	100	100
Tujuan 15. Ekosistem Daratan				
15.1	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.			
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Ha	N/A	N/A
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.			
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.			
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dokumen	-	-
15.9	Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.			
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	1	1
15.c	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.			
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola				
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh				
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak			
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	0,00072	0,00070
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.			
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Poin	3,7	3,84
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.			
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	100	100
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.			
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	24,00	24,00

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	6,67	6,45
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.			
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	N/A	2,07
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional			
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	%	100	100
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Badan Publik	1	1
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	%	100	100
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Orang	N/A	N/A
Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan				
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.			
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	0,72	0,79

2.4. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran daerah yang ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kepulauan Selayar, memuat target dan capaian yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai pada pelaksanaan tahun 2020 sebagai tahapan tahun kelima pelaksanaan RPJMD tersebut.

Capaian Kinerja tersebut dilengkapi persentase tingkat capaian tahun 2020 sebagai standarisasi dengan membandingkan capaian dan target yang ditetapkan sebelumnya. Akhirnya memunculkan interpretasi untuk melihat ketercapaian atau ketidakcapaian dan keseuaiannya antara target dan capaian. Interpretasi tersebut adalah >100% ketika capaian lebih besar dari target yang diinterpretasikan melampaui, =100% ketika capaian sama dengan target yang diinterpretasikan sesuai, dan <100% ketika capaian lebih kecil dari target yang diinterpretasikan belum tercapai.



TABEL 2.210
HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016 – 2020

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**											
1.1	**KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**											
1.1.1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian**											
1.1.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	64,95	64,95	65,35	65,39	65,85	66,04	70,25	66,91	70,55	67,38	Belum Tercapai (<)
1.1.1.2	Pertumbuhan Ekonomi	7,38	7,35	7,55	7,61	7,8	8,75	8,05	7,68	8,25	-1,78	Belum Tercapai (<)
1.1.1.3	PDRB per kapita (juta)	22.5	35,6	25	39,67	30	43,57	32.5	47,52	35,00	46,71	Melampaui (>)
1.1.1.4	Laju Inflasi	3,25	1,48	3,00	4,66	2,75	3,85	2,50	2,25	2,00	1,85	Melampaui (>)
1.1.1.5	Angka Kemiskinan	9,8	13,11	9	13,28	8,75	13,13	8,40	12,83	8,15	12,48	Belum Tercapai (<)
1.1.1.6	Angka kriminalitas	0.070	37,23	0.065	36,84	0.035	6,93	0.02	22,93	0,015	10,65	Belum Tercapai (<)
1.1.1.7	Angka Pengangguran	5,60	0,90	5,15	2,34	4,85	1,74	4,50	1,10	4,25	2,44	Melampaui (>)
1.2	**Kesejahteraan Sosial**											
1.2.1	Pendidikan											
1.2.1.1	Angka melek huruf	95,15	91,47	96	96	97	87,88	98	92,90	98,5	93,95	Belum Tercapai (<)
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	12,00	7,17	12,32	9,73	12,40	9,26	12,47	9,78	12,54	9,86	Belum Tercapai (<)
1.2.1.3	Angka Partisipasi kasar											
1.2.1.3.1	Angka Partisipasi kasar Penddiikan Anak Usia Dini (PAUD)	55,09	53,07	57	42,15	59	59	61	67,34	63	68,00	Melampaui (>)
1.2.1.3.2	Angka Partisipasi kasar SD/MI/Paket A	100	96	100	105	100	109	100	115	100	118	Melampaui (>)
1.2.1.3.3	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	97	96	97,58	105	97,85	109	97,90	115	98,65	118	Melampaui (>)
1.2.1.4	Angka pendidikan yang ditamatkan											
1.2.1.4.1	SD/MI	100	98	100	100	100	98	100	99	100	100	Sesuai (=)
1.2.1.4.2	SMP/MTs	100	100	100	96	100	97	100	98	100	100	Sesuai (=)
1.2.1.5	Angka Partisipasi Murni											
1.2.1.5.1	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ PAket A	100	91	100	94	100	89	100	98	100	98	Belum Tercapai (<)
1.2.1.5.2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	100	81	100	88	100	86	100	87	100	87	Belum Tercapai (<)
1.2.2	Kesehatan											
1.2.2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	1-25,00	1.912	1-25,00	1.910	1-25,00	1.885	1-25,00	1.954	1-25,00	1.980	Melampaui (>)
1.2.2.2	Angka usia harapan hidu7p	67,52	69,80	67,54	69,81	67,56	68,03	67,57	68,34	67,58	68,46	Melampaui (>)
1.2.2.3	Persentase balita gizi buruk	0,07	0,07	0,06	0,08	0,05	0,05	0,04	0,12	0,04	0,09	Melampaui (>)
1.2.3	Pertanahan											
1.2.3.1	Persentase penduduk yang memiliki lahan		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a	
1.2.4	Ketenagakerjaan											
1.2.4.1	Rasio daya serap tenaga kerja	6,40	2,73	10,48	1,98	16,30	9,42	27,95	2	40,76	35,22	Belum Tercapai (<)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.3.	**Fokus Seni Budaya dan olah raga**											
1.3.1.1	Jumlah grup kesenian	6	7	6	9	6	9	6	11	6	11	Melampaui (>)
1.3.1.2	Jumlah Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
1.3.2.	Pemuda dan Olahraga											
1.3.2.1	a. Jumlah klub olahraga	207	215	207	220	207	227	207	230	207	230	Melampaui (>)
1.3.2.2	b. Jumlah gedung olahraga	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	Sesuai (=)
2.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**											
2.1.	**Fokus Layanan Urusan Wajib**											
2.1.1	Pendidikan											
2.1.1.1	**Pendidikan dasar:**											
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah											
	SD/MI	80	80,72	80	81,54	81	81,72	82	81,81	83	83,66	Melampaui (>)
	SMP/MTs	80	56,92	80	57,01	81	58,55	82	59,55	83	60,08	Belum Tercapai (<)
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah											
	SD/MI	1 : 90	1 : 89	1 : 90	1 : 89	1 : 91	1 : 84	1 : 92	1 : 95	1 : 92	1 : 97	Melampaui (>)
	SMP/MTs	1 : 86	1 : 80	1 : 89	1 : 83	1 : 92	1 : 88	1 : 95	1 : 85	1 : 98	1 : 132	Melampaui (>)
2.1.1.1.3	Rasio guru/murid											
	SD/MI	1 : 20	1 : 14	1 : 20	1 : 15	1 : 20	1 : 15	1 : 20	1 : 14	1 : 20	1 : 13	Melampaui (>)
	SMP/MTs	1 : 20	1 : 15	1 : 20	1 : 15	1 : 20	1 : 15	1 : 20	1 : 15	1 : 20	1 : 9	Melampaui (>)
2.1.1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD/MI)	1 : 28	1 : 18	1 : 28	1 : 18	1 : 28	1 : 12	1 : 28	1 : 8	1 : 28	1 : 8	Melampaui (>)
2.1.1.2.4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (SMP/MTs)	1 : 32	1 : 14	1 : 32	1 : 14	1 : 32	1 : 11	1 : 32	1 : 6	1 : 32	1 : 6	Melampaui (>)
2.1.2	Fasilitas Pendidikan:											
2.1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	79	73	80	78	81	80	83	85	84	88	Melampaui (>)
2.1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	71	68	71	71	71	75	71	80	71	85	Melampaui (>)
2.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):											
2.1.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55,09	53,07	57	42,15	59	59	61	67,34	63	83,56	Melampaui (>)
2.1.4	Angka Putus Sekolah:											
2.1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,22	0,86	0,21	0,5	0,20	0,08	0,19	0,28	0,18	0,5	Belum Tercapai (<)
2.1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,21	1,38	0,20	0,73	0,19	0,8	0,18	0,7	0,17	0,08	Belum Tercapai (<)
2.1.4	AngkaKelulusan:											
2.1.4.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	98	100	100	100	98	100	99	100	100	Sesuai (=)
2.1.4.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	97	100	98	100	100	Sesuai (=)
2.1.4.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,50	86,85	97,00	96	97,50	91	98,00	97	98,50	99	Melampaui (>)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.1.4.4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,40	75	85,32	77	87,48	79	89,52	90	91,51	81,60	Belum Tercapai (<)
2.2.	Kesehatan											
2.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	2,95	40,27	2,95	40,314	2,95	40,848	3,00	39,4	3,00	38,88	Melampaui (>)
2.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,064	0,1	0,070	0,1	0,080	0,1	0,090	0,1	0,095	0,1	Melampaui (>)
2.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,007	0,01	0,007	0,01	0,007	0,01	0,007	0,01	0,007	Belum Tercapai (<)
2.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,65	0,238	0,65	0,135	0,65	0,112	0,65	0,108	0,65	0,109	Melampaui (>)
2.2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,4	0,35	1,4	0,203	1,4	0,216	1,4	0,545	1,4	0,547	Belum Tercapai (<)
2.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	0,768	100	0,745	100	0,726	100	0,717	100	0,616	Belum Tercapai (<)
2.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87,28%	0,800	90%	0,861	90%	0,906	95%	0,840	95%	0,855	Belum Tercapai (<)
2.2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	78,41%	0,142	80%	0,181	85%	0,181	90%	0,181	95%	0,259	Belum Tercapai (<)
2.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
2.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	53,33%	0,800	65%	0,768	70%	0,409	80%	0,487	90%	0,475	Belum Tercapai (<)
2.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	0,115	100%	0,116	100%	0,117	100%	0,116	100%	0,118	Belum Tercapai (<)
2.2.13	Cakupan kunjungan bayi	99,95%	1,029	100%	0,924	100%	0,934	100%	0,915	100%	0,93	Belum Tercapai (<)
2.2.14	Cakupan puskesmas	127,27%	1,272	136%	1,272	136%	1,272	136%	1,272	135%	1,363	Belum Tercapai (<)
2.2.15	Cakupan pembantu puskesmas	87,65%	0,77	100%	0,77	100%	0,77	100%	0,77	100%	0,90	Belum Tercapai (<)
2.3	Pekerjaan Umum											
2.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,63	0,53	69,91	0,36	74,19	0,58	78,47	0,75	82,75	0,70	Belum Tercapai (<)
2.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	63,22	86,69	65,00	84,94	70,00	84,49	75,00	91,87	80,00	95,90	Melampaui (>)
2.3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,38	69,17	77,74	69,17	85,97	69,75	94,50	72,916	100	74,936	Belum Tercapai (<)
2.3.4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	145,39%		145,39%		145,39%		145,39%		145,39 %		
2.3.5	Rasio rumah layak huni	80,81	n/a	80,81	0,70	84.00	0,78	87.19	0,80	90,38	0,81	Melampaui (>)
2.3.6	Rasio permukiman layak huni	80,81	n/a	80,81	0,86	84.00	0,73	87.19	0,75	90,38	0,72	Belum Tercapai (<)
2.3.7	Panjang jalan dilalui Roda 4	548,81	872,22	548,81	867,6	548,81	824,79	548,81	824,79	548,81	824,79	Melampaui (>)
2.3.8	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	402,69	872,2	402,69	867,6	402,69	480,78	402,69	615,43	40,69	615,43	Melampaui (>)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.3.9	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	317,44	458,59	317,44	225,9	317,44	480,78	317,44	615,43	317,44	575,02	Melampaui (>)
2.3.10	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	14.417	1,653	14.417	1,662	14.417	1,992	14.417	1,992	14.417	1,992	Melampaui (>)
2.3.11	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	80,00	95	85,00	95	89,00	95	93,00	95	97,00	95	Belum Tercapai (<)
2.3.12	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	62,50	16,28	71,31	16,89	79,83	17,02	90,34	17,53	100	17,85	Belum Tercapai (<)
2.3.13	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	71,87	86,69	77,96	84,94	78,74	84,49	79,04	91,87	80	95,90	Melampaui (>)
2.4.	Perumahan											
2.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	85,00	81,38	89,72	77,10	95,05	77,23	96,77	77,14	98,80	77,14	Belum Tercapai (<)
2.4.2	Rumah tangga pengguna listrik	47,85	62,76	49,85	63,34	52,35	62,99	55,45	70,30	59,15	70,30	Melampaui (>)
2.4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	77,74	96,34	85,97	69,17	94,50	69,75	100,00	72,92	100	74,94	Belum Tercapai (<)
2.4.4	Lingkungan pemukiman kumuh tertangani	0 Ha	0	220 Ha	0	220 Ha	0	220 Ha	9,71	220 Ha	9,71	Belum Tercapai (<)
2.4.5	Rumah layak huni	80,81	80,81	80,81	81,59	84.00	80,65	87.19	89,84	90,38	90,50	Melampaui (>)
2.8.6	Persentase Penduduk berakses airminum	60	18,27	61	18,59	62	20,39	63	20,73	64	20,97	Belum Tercapai (<)
2.8.7	Persentase Luas pemukiman yang tertata	0,35		1	0,03	2	0,04	5	0,06	10	0,003	Belum Tercapai (<)
2.5.	Penataan Ruang											
2.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	12,97	26,86	12,97	26,86	12,97	26,86	12,97	26,86	12,97	26,86	Melampaui (>)
2.5.2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	70,00	12,21	75,00	12,98	80,00	13,79	85,00	15,75	95,00	19,00	Belum Tercapai (<)
2.5.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
2.6.	Perencanaan Pembangunan											
2.6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	80,50	78,03	90,00	93,06	90,50	87,86	90,50	80,35	90,50	75,72	Belum Tercapai (<)
2.7.	Perhubungan											
2.7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	63.000	26.968	76.000	78.866	89.000	112.799	103.000	122.736	115.000	70.378	Belum Tercapai (<)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.7.2.	Rasio izin trayek	0,0995	0,095	0,1027	0,096	0,1059	0,0963	0,1091	0,1038	0,1123	0	Belum Tercapai (<)
2.7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	163	142	170	150	175	150	180	142	185	102	Belum Tercapai (<)
2.7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	9/2/1	7/1/1	11/2/1	7/2/1	13/2/1	7/2/1	15/2/1	7/2/1	17/2/1	11	Belum Tercapai (<)
2.7.5	Kepemilikan KIR angkutan umum	160	222	200	152	240	222	280	152	320	152	Belum Tercapai (<)
2.7.6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	± 5 Jam	1	± 5 Jam	1	± 5 Jam	1	± 5 Jam	1	± 5 Jam	1	Belum Tercapai (<)
2.7.7.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	Sesuai (=)
2.8.	Lingkungan Hidup											
2.8.1.	Persentase penanganan sampah	97,00		97,00	9,71	98,00	11,97	98,00	12,89	99,00	12,92	Belum Tercapai (<)
2.8.2.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	2	2	2	2	3	2	4	0,02	5	0,02	Belum Tercapai (<)
2.8.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, termasuk SPPL dan UKL-UPL	12	12	15	8	20	5	25	6,82	30	6,82	Belum Tercapai (<)
2.8.4.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,53	0,0108	0,6	0,0095	0,7	0,0094	0,8	0,0092	0,9	0,0092	Jumlah TPA 5 (3 di Kec Benteng, 1 Bontoharu, 1 Taka
2.8.5.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100 % (9 Kasus)	100	100	Sesuai (=)
2.8.6.	Hasil pengukuran indeks kualitas air	52,90	42,01	53	41,50	54	30,71	55	61,04	55	50,00	Belum Tercapai (<)
2.8.7.	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	99,98	99,97	99,98	87,55	99,98	82,62	99,98	84,19	99,98	88,80	Belum Tercapai (<)
2.8.8.	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	70,54	80,59	70,60	80,59	70,67	80,59	70,74	89,12	70,74	89,12	Melampaui (>)
2.9	Pertanahan											
2.9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat		0,0007		0,0031		0,0028		0,0002		0,0019	Data BPN
2.9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
2.9.2.	Penyelesaian Izin Lokasi	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	
2.10	Kependudukan dan Catatan Sipil											
2.10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,89	0,82	0,91	0,84	0,93	0,91	0,95	0,92	0,97	0,91	Belum Tercapai (<)
2.10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,77	0,89	0,80	0,87	0,82	0,88	0,85	0,83	0,87	0,77	Belum Tercapai (<)
2.10.3.	Kepemilikan KTP	89	82	91	84	93	91	95	92	97	91	Belum Tercapai (<)
2.10.4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	85	60,06	87	59,99	89	72,10	91	66,61	93	71,77	Belum Tercapai (<)
2.10.5.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	10		25		35		50		70		
2.10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.10.7.	Rasio pasangan berakte nikah	0,50	0,51	0,50	0,55	0,50	0,49	0,50	0,55	0,50	0,61	Melampaui (>)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.10.8.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sesuai (=)
2.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	12,96	12,26	13,09	13,09	13,22	13,22	13,35	13,35	13,48	13,48	Sesuai (=)
2.11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	33,22	29,72	34,97	31,47	36,72	0.19	38,47	0,11	40,22	40,22	Sesuai (=)
2.11.3.	Rasio KDRT	0,19	0,05	0,05	0,24	0,05	0,43	0,05	0,11	0,05	0,05	Sesuai (=)
2.11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	24,46	25,54	24,42	24,5	24,38	0	24,14	n/a	24,34	n/a	
2.11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43,39	43,39	43,30	43,48	43,21	39,48	43,12	0,25	43,03	43,03	Sesuai (=)
2.11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0,06	2,91	0,05	2,82	0,04	1,09	0,03	1,27	0,02	0,55	Melampaui (>)
2.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
2.12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	1,85	2	2	2	2	2	2	2	2	Sesuai (=)
2.12.2.	Rasio akseptor KBBaru	1,95	1,86	2.04	1,86	2,13	1,14	2,22	1,43	2,31	1,43	Belum Tercapai (<)
2.12.3.	Cakupan peserta KB aktif	76,12	14,45	75,76	14,21	75,40	14,30	75,04	14,01	74,68	14,01	Belum Tercapai (<)
2.12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	28,30	11,78	28,10	9,36	27,90	9,68	27,70	8,9	27,50	8,9	Belum Tercapai (<)
2.13.	Sosial											
2.13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
2.13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	26,28	12,52	45,68	19,4	65,08	22,53	84,48	47,73	84,48	98,7	Melampaui (>)
2.13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,78	0,32	1,01	0,55	1,24	6,49	1,47	6,93	1,70	11,81	Melampaui (>)
2.14.	Ketenagakerjaan											
2.14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	7,30	62.495	7,38	57.203	7,46	63.749	7,54	63.444	7,62	69.858	Data Realisasi Beda dengan Target
2.1.4.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	Belum Tercapai (<)
2.14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0	67,64	0	62,03	0	67,09	0	65,60	0	68,18	Melampaui (>)
2.14.4.	Pencari Kerja yang ditempatkan	275		450	214	700	302	1200	375	1750	252	Belum Tercapai (<)
2.14.5.	Tingkat pengangguran terbuka		0,90		2,34		1,88		1,17	2,44	2,44	Sesuai (=)
2.14.6.	Keselamatan dan perlindungan		-		-		14.617		19.450	0	25.837	Melampaui (>)
2.14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
2.15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
2.15.1.	Persentase koperasi aktif	93,34	71,96	93,47	76,72	94,34	81,37	94,66	81,48	94,90	82,42	Belum Tercapai (<)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.15.2.	Jumlah BPR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai (=)
2.15.3.	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil	16.087	11.380	17.210	15.016	18.242	18.631	19.270	20.020	20,304	4.102	Belum Tercapai (<)
2.16	Penanaman Modal											
2.16.1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	35.147.336.660	173.194.182.236	38.662.070.000	205.995.888.236	42.528.277.500	240.892.182.463	46.781.105.000	778.127.584.761	51.459.215.500	28.418.800.000	Belum Tercapai (<)
2.16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	1.450.000	5.830.000	2.000.000	9.330.000	3.000.000	9.330.000	5.250.000	67.504.939	10.500.000	7.487.000	Belum Tercapai (<)
2.16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	6,40	2,73	10,48	1,98	16,30	9,42	27,95	12,64	40,76	35,22	Belum Tercapai (<)
2.16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	3.514.733.340	65.370.615.600	3.866.207.500	32.801.706.000	4.252.827.500	34.896.294.227	7.017.165.750	537.235.402.298	10.759.654.150	13.484.520.00	Melampaui (>)
2.17.	Kebudayaan											
2.17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	3	6	6	6	5	6	1	6	0	Belum Tercapai (<)
2.17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	4	2	4	2	4	Melampaui (>)
2.17.3.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.357	558	1.400	1.993	1.500	2.269	1.600	5.460	1.700	67	Belum Tercapai (<)
2.18.	Kepemudaan dan Olahraga											
2.18.1.	Jumlah organisasi pemuda	35	35	35	35	35	35	35	50	35	50	Melampaui (>)
2.18.2.	Jumlah organisasi olahraga	26	26	26	25	26	26	26	97	26	97	Melampaui (>)
2.18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Sesuai (=)
2.18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	6	5	6	6	6	5	6	5	6	5	Belum Tercapai (<)
2.18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	6	6	6	6	6	5	6	5	6	5	Belum Tercapai (<)
2.18.6.	Lapangan olahraga	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	Sesuai (=)
2.19.	Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri											
2.19.1	Persentase gangguan kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	20		20		20		19		29		
2.19.2	Jumlah konflik-konflik etnis, agama, ras dan adat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
2.19.3	Tingkat kesadaran berpolitik masyarakat	70	Tidak ada Pemilu	73	Tidak ada Pemilu	75	80,2% (data pilgub Sulsel)	78	82,14% (data pileg)	79	83,86 %	Melampaui (>)
2.19.4	Jumlah Pengaduan mengenaikecurangan dalam pemilih	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0	Belum Tercapai (<)
2.19.5	pembinaan pemantauan dan fasilitas Ormas dan LSM	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	Belum Tercapai (<)
2.19.6	Pembinaan, Pemantauan dan fasilitas Orsospol	5	5	5	4	6	4	7	4	7	5	Belum Tercapai (<)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
2.20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	19,88	13,22	23,41	13,38	26,94	11,69	30,47	19,02	34,00	19,92	Belum Tercapai (<)
2.20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	46,83	46,65	46,83	46,23	46,83	45,72	46,83	45,41	46,83	45,37	Belum Tercapai (<)
2.20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,14	0,14	0,31	0,31	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34	0.34	Sesuai (=)
2.20.4.	Pertumbuhan ekonomi		7,37		7,61		8,75		7,68		-1,78	
2.20.5.	Kemiskinan	6,69	13,11	6,23	13,28	5,76	13,13	5,29	12,83	4,78	12,48	Belum Tercapai (<)
2.20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan adiministrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.20.7.	Penegakan PERDA	100	93,75	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	Sesuai (=)
2.20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	89,29	82,50	89,29	89,29	96,08	100	96,08	100	96,08	100	Melampaui (>)
2.20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1,48	1,45	1,48	1,45	1,48	1,45	1,48	1,46	1,48	1,47	Belum Tercapai (<)
2.20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	40	10,1	40	10,1	40	18,5	40	18,5	40	33,67	Belum Tercapai (<)
2.20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90	30	90	30	90	42	90	62	90	80	Belum Tercapai (<)
2.20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	76,19	100	80,95	100	85,71	100	90,48	100	90,48	Belum Tercapai (<)
2.20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.21.	Ketahanan Pangan											
2.21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.21.2.	Ketersediaan pangan utama	20 ton	129	20 ton	141	40 ton	195,37	50 ton	188,65	60 ton	138	Melampaui (>)
2.21.3.	Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen	CV <10%	2,55%	CV <10%	4,07%	CV <10%	3,29%	CV <10%	1,54%	CV <10%	2,0%	Sesuai (=)
2.21.4	Penurunan wilayah rawan pangan	2	9	2	5	2	4	2	5	2	19	Melampaui (>)
2.21.5.	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	75,0	78,3	75,0	66,9	77,5	84,1	80,0	78,9	82,5	79,8	Belum Tercapai (<)
2.2.1.6	Persen keamanan pangan	90	100	90	100	90	100	90	100	90	80	Melampaui (>)
2.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2.22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Sesuai (=)
2.22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	Belum Tercapai (<)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.22.3.	Jumlah LSM	75	69	75	70	75	55	75	42	75	45	Belum Tercapai (<)
2.22.4.	LPM Berprestasi	90	85	90	90	90	100	90	100	90	100	Belum Tercapai (<)
2.22.5.	PKK aktif	99	98	99	99	99	100	99	100	99	100	Melampaui (>)
2.22.6.	Posyandu aktif	99	98	99	99	99	100	99	100	99	100	Melampaui (>)
2.22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	77	75	78	76	79	79	80	80	81	81	Sesuai (=)
2.23.	Statistik											
2.23.1.	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.23.2.	Buku ”PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.24.	Kearsipan											
2.24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	100	2	100	2	100	6	100	0	100	0	Belum Tercapai (<)
2.24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	0	1	40	1	40	1	40	1	20	Melampaui (>)
2.25.	Komunikasi dan Informatika											
2.25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	Belum Tercapai (<)
2.25.2.	Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk	0,228		0,272		0,316		0,360		0,404		Sdh tidak relevan
2.25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	24		24		24		24		24		Sdh tidak relevan
2.25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	3		3		3		3	1	3	1	Belum Tercapai (<)
2.25.5.	Web site milik Pemerintah Daerah	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	Belum Tercapai (<)
2.25.6.	Pameran/expo	1		1		1		1		1	0	Belum Tercapai (<)
2.26.	Perpustakaan											
2.26.1.	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai (=)
2.26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	45.708	31.457	46.708	63.957	48.708	37.793	50.708	34.026	52.708	7.190	Belum Tercapai (<)
2.26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	66.983	26.907	3.000	28.210	3.200	28.993	3.200	30.645	3.600	98.179	Melampaui (>)
2.26.4	Surat kabar	6	5	6	5	6	6	7	7	7	7	Sesuai (=)
2.26.5	Majalah	5	5	6	5	7	6	8	8	8	8	Sesuai (=)
2	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**											
2.1.	Pertanian											
2.1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	66,99	54,98	71,25	57,04	67,64	67,25	70,55	79,79	73,88	66,48	Belum Tercapai (<)
2.1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	18,82	18,82	18,18	18,18	17,61	17,61	15,84	15,84	16,03	16,03	Sesuai (=)
2.1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1,00	3,66	2,00	3,52	2,50	3,50	2,88	2,88	2,94	2,94	Sesuai (=)
2.1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	9,25	19,91	9,50	12,43	10,00	11,8	10,57	10,57	10,99	10,99	Sesuai (=)
2.1.5.	Cakupan bina kelompok petani		123		758		777	797	797	845	845	Sesuai (=)
2.2.	Pariwisata											
2.3.1.	Kunjungan wisatawan	(10%)		(20%)		(30%)		(40%)		(50%)	5.889	Belum Tercapai (<)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	- Domestik - Asing	6.541 379 (50%)	8.434 857	7.849 588 (55%)	8.088 494	10,203 940 (60%)	9.209 574	14,285 1.598 (70%)	11.355 1.068	21.427 2.877 (80%)		
2.2.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB											
2.3.	Kelautan dan Perikanan											
2.3.1.	Produksi perikanan											
	- Perikanan Tangkap (ton dan %)	26.598.77	24.092,60	28.992.66	20.152,20	31.312,07	21.592,50	33.503.92	28.268,30	35.179,12	18.729,2	Belum Tercapai (<)
	- Perikanan Budidaya (ton dan %)	829,08	465,30	853,95	456,20	879,57	493,02	905,96	573,12	933,14	573,12	Belum Tercapai (<)
2.3.2.	Konsumsi ikan	50,5	53,45	51	53,45	51,5	53,45	52	57,4	52,5	63,02	Melampaui (>)
2.3.3.	Produksi perikanan kelompok nelayan	120	24.734,15	123	20.752,65	126	22.327,23	130	29.163,38	132	29.163,38	Melampaui (>)
2.3.4.	Cakupan bina kelompok nelayan	165	15	170	66	175	138	180	136	185	82	Belum Tercapai (<)
2.4.	Perdagangan											
2.4.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		4,3		7,46		7,53	7,69	7,69	7,81	7,81	Sesuai (=)
2.4.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	80	28	85	28	85	30	85	32	85	31	Belum Tercapai (<)
2.5.	Perindustrian											
2.5.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		2,60		2,60		2,43		2,75	2,81	2,81	Sesuai (=)
2.5.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri		69,99		70,76		70,65		74,56	74,56	74,56	Sesuai (=)
2.5.3.	Pertumbuhan Industri.	8.985	8.078	9.896	8.153	10.807	1.227	11.718	1.227	12.629	1.227	Belum Tercapai (<)
2.5.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	13	8	14	8	15	8	16	8	1.090	102	Belum Tercapai (<)
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**											
1.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**											
1.1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**											
1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita		167.070		173.700		170.580		164.580	180.000	164.580	Belum Tercapai (<)
1.1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		132.930		126.300		129.420		135.420	150.000	135.420	Belum Tercapai (<)
1.1.3.	Produktivitas total daerah											
2.1.	Pertanian											
2.1.1.	Nilai tukar petani		104,73		100,85		102,29		104,42		97,86	Hanya Tersedia pada level Prop.
3.1.	Perhubungan											
3.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,54	0,54	0,55	0,55	0,58	0,58	0,6	0,6	0,53	0,53	Sesuai (=)
3.1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	6.235	6.235	54.378	54.378	77.115	77.115	77.220	77.220	40.476	40.476	Sesuai (=)



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	23.752	23.752	41.189	41.189	60.009	60.009	64.714	64.714	24.761	24.761	Sesuai (=)
4.1.	Penataan Ruang											
4.1.1.	Ketaatan terhadap RTRW	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Sesuai (=)
4.1.2.	Luas wilayah produktif											Perda Tata Ruang Belum Selesai
4.1.3.	Luas wilayah industri											
4.1.5.	Luas wilayah kebanjiran											
4.1.6.	Luas wilayah kekeringan											
4.1.7.	Luas wilayah perkotaan											
5.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
5.1.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	4	3	4	5	4	5	4	5	4	5	Melampaui (>)
5.1.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Melampaui (>)
5.1.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	59	61	60	81	60	104	61	108	61	108	Melampaui (>)
5.1.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	175	26	175	29	175	29	175	29	175	29	Belum Tercapai (<)
6.1.	Lingkungan Hidup											
6.1.1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	85,00	19,08	89,72	19,19	95,05	22,41	96,77	22,98	98,80	22,98	Pelanggan PDAM
6.1.2.	Komunikas dan Informatika											
6.1.3.	Rasio ketersediaan daya listrik	10.578	104,52	10.898	104,54	11.218	104,01	11.538	104,54	11.858		
6.1.4.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	47,85	61,41	49,85	65,73	52,35	68,46	55,45	70,00	59,15	75,47	Melampaui (>)
6.1.5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	50,00	85	55,00	87	60,00	90	65,00	92	70,00	94	Melampaui (>)
III	Fokus Iklim Berinvestasi											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	Angka kriminalitas	0.070	37,23	0.065	36,84	0.035	6,93	0.0040	22,93		10,65	Belum Tercapai (<)
1.2.	Jumlah demo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Sesuai (=)
1.3.	Lama proses perizinan	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 Hari	1 Hari	Sesuai (=)
1.4.	Jumlah pajak daerah	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Sesuai (=)
1.5.	Jumlah retribusi daerah -Jasa Umum -Jasa Usaha -Izin Tertentu	 6 9 4	 10 10	 6 9 4	 10 10	 6 9 4	 10 10	 6 9 4	 10 10	 6 9 4		Data sesuai Perda, untuk izin tertentu tdi
1.6	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	Perda No. 2 Tahun 2013 ttg Penanaman Modal Daerah Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang



No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
												Pemberian Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal
1.7.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	3 desa (3,70)	63,63	1 desa (4,94)	66,94	5 desa (11,11)	65,29	1 desa (12,35)	66,41	1 desa (12,35)	57,81	Belum Tercapai (<)
IV	Fokus Sumber Daya Manusia											
1	Ketenagakerjaan											
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	84,26	6,24	99,36	6,46	99,36	6,86	99,36	7,06	99,36	7,08	Belum Tercapai (<)

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Analisis gambaran keuangan daerah mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, kerangka pendanaan, dan sumber pendanaan pembangunan lainnya. Bagian ini ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir sebagai *existing condition*, yang selanjutnya menjadi landasan dalam menghitung kemampuan keuangan daerah untuk satu periode kepemimpinan daerah, selama lima tahun mendatang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis perhitungan keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan perkembangan neraca daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dalam rangka menyesuaiakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal maka dilakukan perubahan/pergeseran anggaran antar kelompok belanja, anggaran unit organisasi dan antar program dan kegiatan, serta antar jenis belanja.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan

penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan peran dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD, di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah serta perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020, sebagai berikut.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komponen pendapatan daerah berjumlah tiga komponen yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerimtah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk

kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Pertumbuhan pendapatan daerah secara detail disajikan pada tabel berikut.

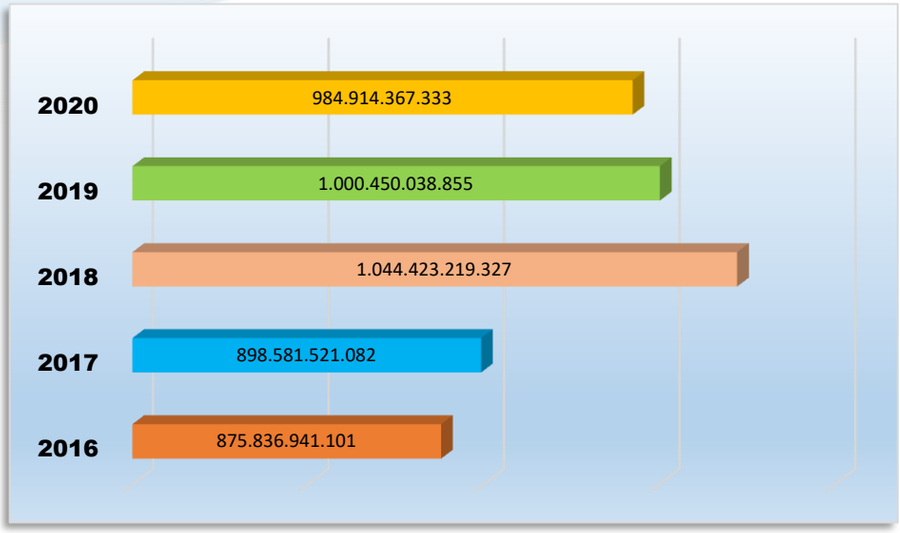
Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PENDAPATAN						
1.1	***Pendapatan Asli Daerah***	**43,167,309,586**	**77,300,086,267**	**63,941,473,429**	**73,170,334,485**	**66,359,401,904**	**16.73**
1.1.1	Pajak Daerah	6,635,495,792	7,512,613,362	9,325,798,483	8,919,725,943	7,963,533,659	5.57
1.1.2	Retribusi Daerah	10,672,596,122	1,527,406,655	1,668,715,105	1,919,871,020	1,735,588,105	(17.75)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,584,859,991	11,164,786,664	9,492,702,269	10,078,930,064	9,219,514,000	(2.96)
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15,274,357,681	57,095,279,585	43,454,257,572	52,251,807,458	47,440,766,140	65.24
1.2	***Dana Perimbangan***	**751,553,019,395**	**709,530,394,275**	**828,217,727,831**	**784,863,362,311**	**760,088,689,963**	**0.69**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	21,649,329,164	13,908,386,187	15,308,762,829	11,997,709,967	15,606,065,342	(4.31)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	535,836,163,000	531,175,255,000	580,780,803,000	600,422,533,000	565,134,101,000	1.49
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	194,067,527,231	164,446,753,088	232,128,162,002	172,443,119,344	179,348,523,621	1.05
1.3	***Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah***	**81,116,612,120**	**111,751,040,540**	**152,264,018,067**	**142,416,342,059**	**158,466,275,466**	**19.71**
1.3.1	Hibah	-	15,000,000,000	690,000,000		674,000,000	(97.70)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	23,958,749,370	26,850,357,340	25,622,918,867	34,096,963,259	30,697,311,466	7.65
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	52,042,480,000	22,245,960,000	36,297,259,000	2.95
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,310,877,750	5,191,299,200	3,150,871,200	3,851,064,800	6,264,748,000	6.96
1.3.6	Dana Desa	50,846,985,000	64,709,384,000	70,757,748,000	82,222,354,000	84,532,957,000	13.91
JUMLAH PENDAPATAN		**875,836,941,101**	**898,581,521,082**	**1,044,423,219,327**	**1,000,450,038,855**	**984,914,367,333**	**3.27**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Meskipun kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer masih lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah hingga tahun 2020, namun rata-rata pertumbuhan pendapatan dari sumber PAD lebih tinggi (16,73 persen) dibanding rata-rata pertumbuhan sumber pendapatan dari dana transfer pusat (0,69 persen), sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya PAD dapat mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan semakin memperkokoh struktur anggaran pendapatan daerah. Adapun perkembangan pendapatan daerah dan postur pendapatan daerah secara berturut-turut terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1
Perkembangan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Grafik 3.2
Postur Komponen Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

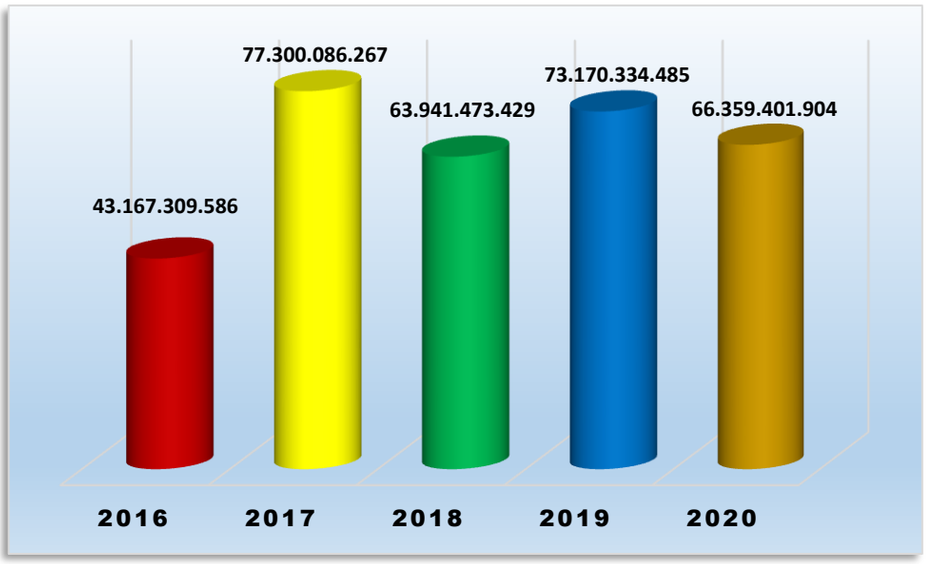
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD adalah salah satu komponen pendapatan daerah, merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu dan terus berusaha meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016-2018, kemudian menurun pada periode 2019-2020. Tahun 2016 nilai PAD Kabupaten Kepulauan Selayar masih sekitar Rp.43,16 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp.66,35 Milyar lebih. Perkembangan PAD yang fluktuatif ini mengindikasikan agar pemerintah daerah melakukan upaya lebih untuk bisa mendapatkan tambahan PAD. Gambaran perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

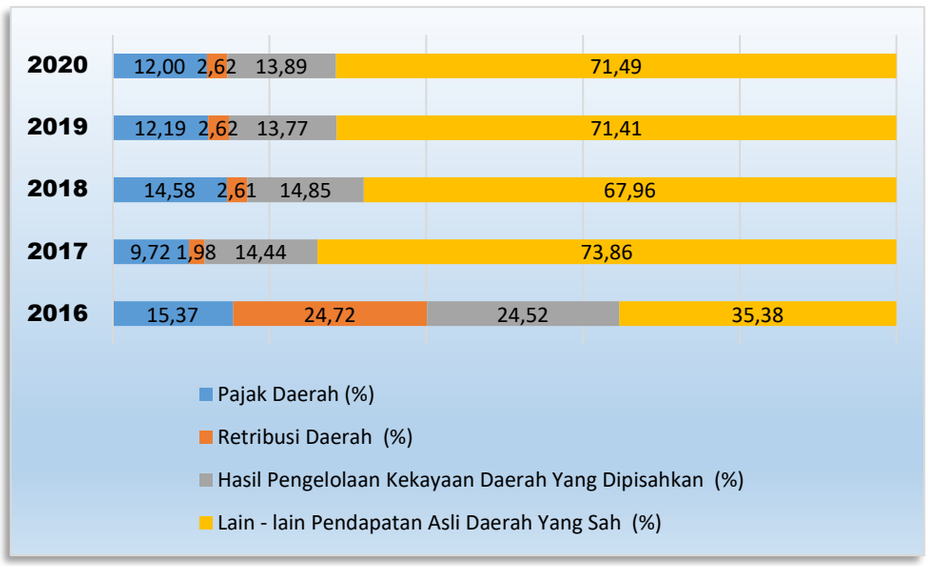
Grafik 3.3
Perkembangan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Dari segi Postur, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2016-2020 masih didominasi oleh kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah rata–rata (64,02 persen), diikuti dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ratar-ata (16,30 persen), Pajak Daerah rata–rata (12,77 persen), dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah rata-rata (6,91 persen). Kontribusi Retribusi Daerah menurun signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 disebabkan oleh berpindahnya ASKES/BPJS dari pos Retribusi Daerah ke pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Grafik 3.4
Postur PAD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

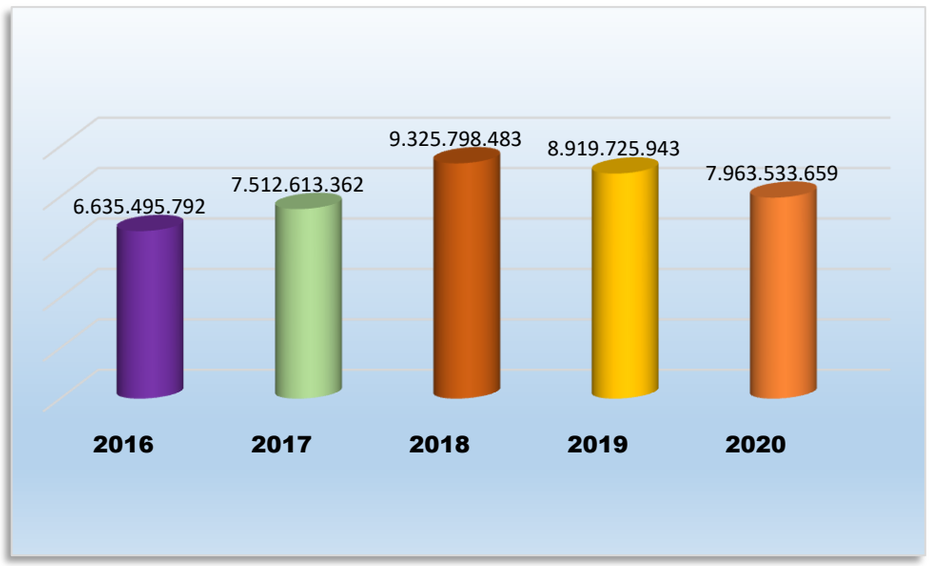
Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Pajak daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pungutan

meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Tambang Galian Gol C (sejak tahun 2019 menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Mineral Lainnya), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pajak Daerah meningkat sepanjang periode 2016-2018 kemudian menurun pada periode 2019-2020. rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 5,57 persen dalam kurun waktu 2016-2020.

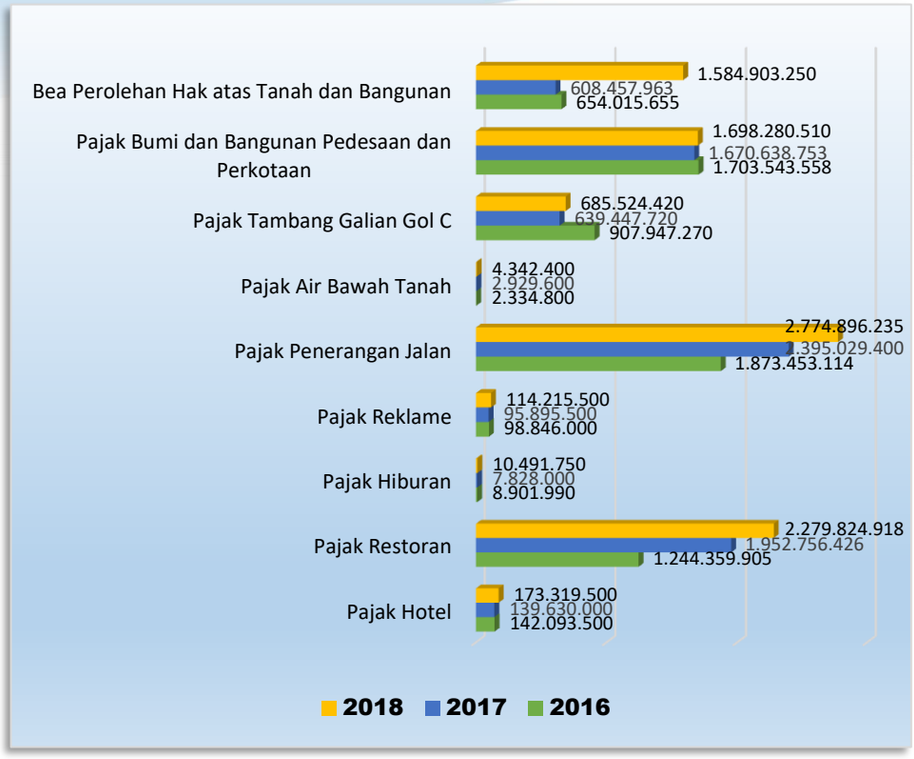
Grafik 3.5
Perkembangan Pajak Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Dari segi Postur Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020, Pajak Penerangan Jalan masih mendominasi dalam pendapatan Pajak Daerah, seperti grafik dibawah ini. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada konteks ini, sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN. Realisasi Pajak Penerangan Jalan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 nilai Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar masih sekitar Rp.1,87 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp.3,18 Milyar lebih. Upaya untuk mendorong penerimaan pajak daerah dilakukan dengan meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kepada masyarakat secara luas dan meningkatkan pelayanan prima dalam pemungutan Pajak Daerah.

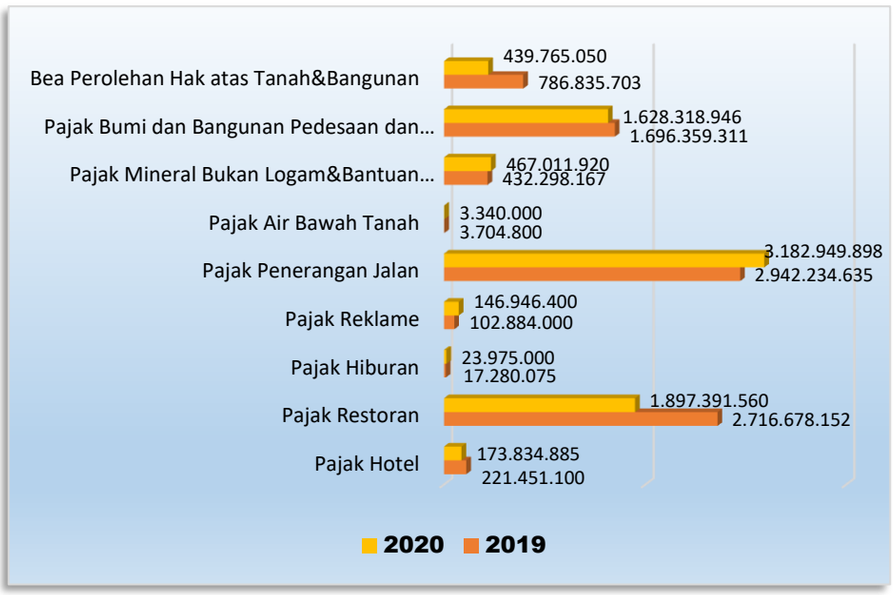
Grafik 3.6
Postur Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2018



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Sejak tahun 2019 Pajak Tambang Galian Gol C menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Mineral Lainnya.

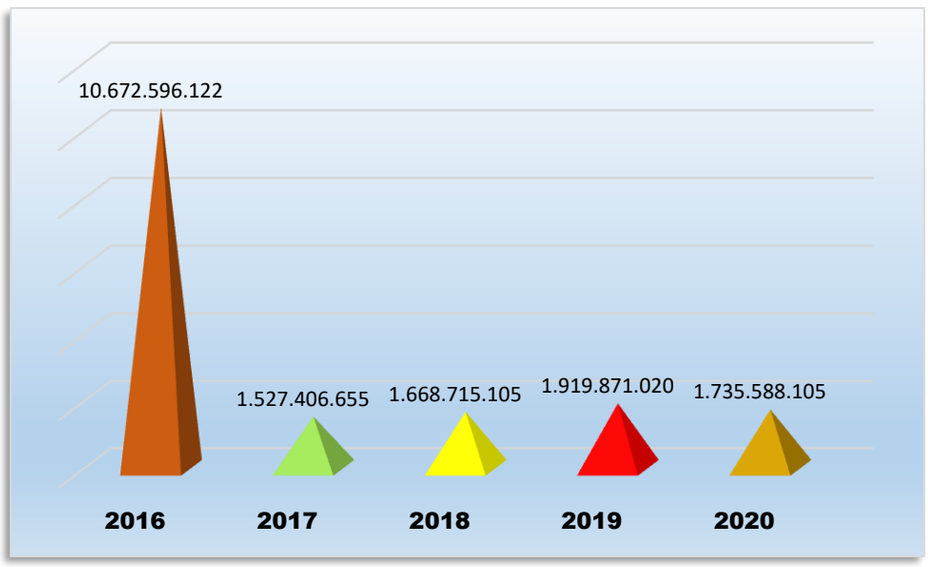
Grafik 3.7
Postur Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020, berkontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Daerah, tetapi tetap dilakukan upaya meningkatkan penerimaannya dengan perbaikan regulasi pengelolaan retribusi. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha telah diperbarui sesuai dengan kondisi saat ini dan dilakukan penyesuaian terhadap potensi obyek dan tarif retribusi yang menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi. Langkah ekstensifikasi juga dilakukan dengan penambahan jenis retribusi baru yang dipungut berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Grafik 3.8
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020



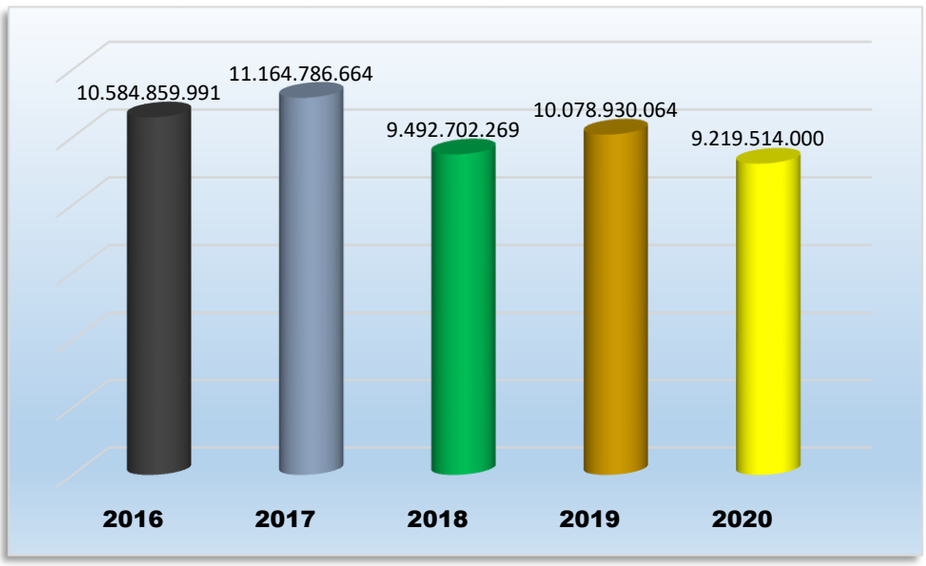
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Realisasi penerimaan retribusi daerah secara kumulatif menunjukkan penurunan yang disebabkan peralihan kewenangan pengelolaan obyek retribusi serta peralihan status unit pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pencatatan penerimaannya bukan lagi pada jenis Retribusi Daerah melainkan pada jenis Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada tahun 2016 retribusi daerah memberi kontribusi sebesar Rp. 10,67 Milyar, namun trendnya terus menurun hingga 2020 yang hanya memberi kontribusi sebesar Rp. 1,73 Milyar lebih. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri meskipun komponen retribusi daerah ini proporsinya kecil jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Jika penurunan rata-rata pertumbuhan

retribusi daerah tersebut tidak mendapatkan perhatian, maka komponen tersebut dapat mempengaruhi kinerja pendapat asli daerah pada periode selanjutnya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Untuk jenis penerimaan ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar di samping deviden dari penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya. Selama tahun 2016-2020, realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan masih fluktuatif, hal ini tergambar pada grafik berikut.

Grafik 3.9
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

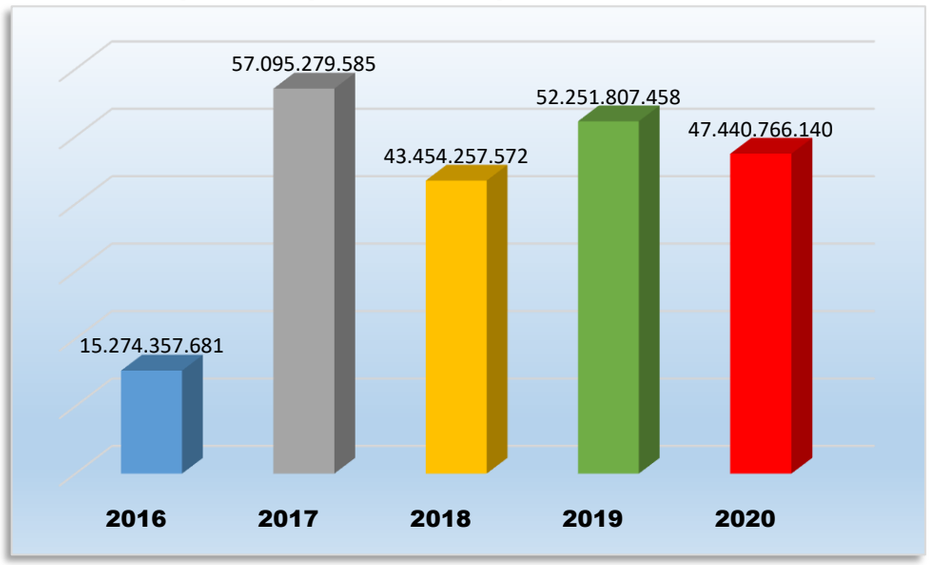
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan; Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Hasil dari pengelolaan dana bergulir; Pendapatan Dana Kapitasi JKN; Penggantian KTP dan Akte Catatan Sipil; Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

Pada komponen penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, kontributor terbesar pada sektor ini adalah penerimaan Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan BLUD pada RSUD K.H. Hayyung. Sejak peralihan status

unit pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2017, pendapatan BLUD terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Untuk menjaga trend positif ini, pengelola senantiasa meningkatkan mutu pelayanan BLUD baik rawat jalan maupun rawat rawat inap.

Sepanjang periode tahun 2016-2020, realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,71 persen. Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 3.10
Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020



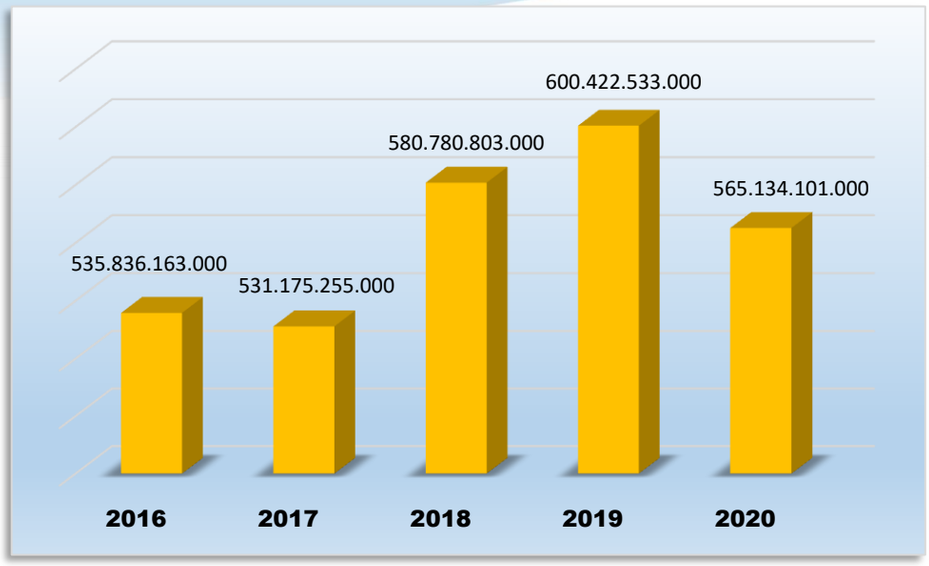
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan 1,49 persen, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

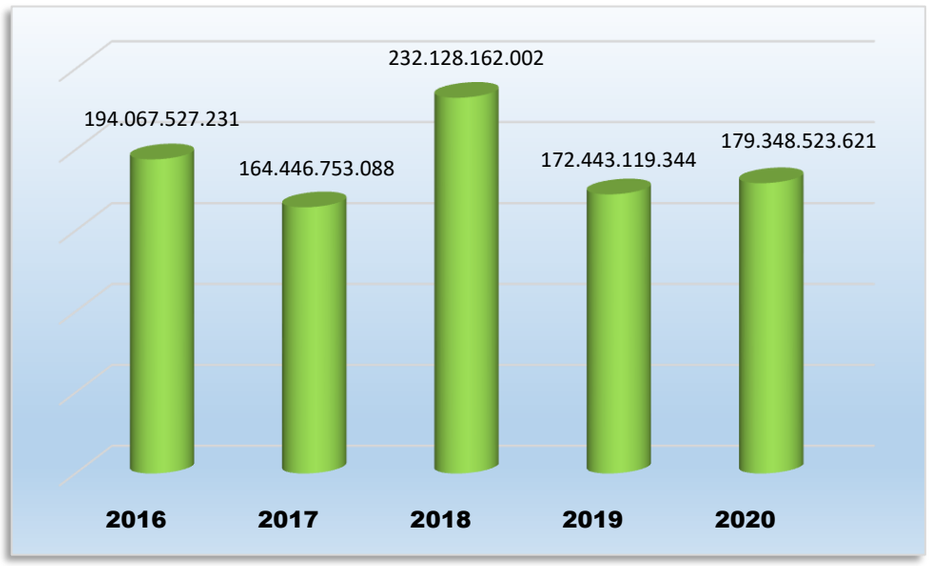
Grafik 3.11
Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi penerimaan DAK ditampilkan seperti grafik dibawah ini.

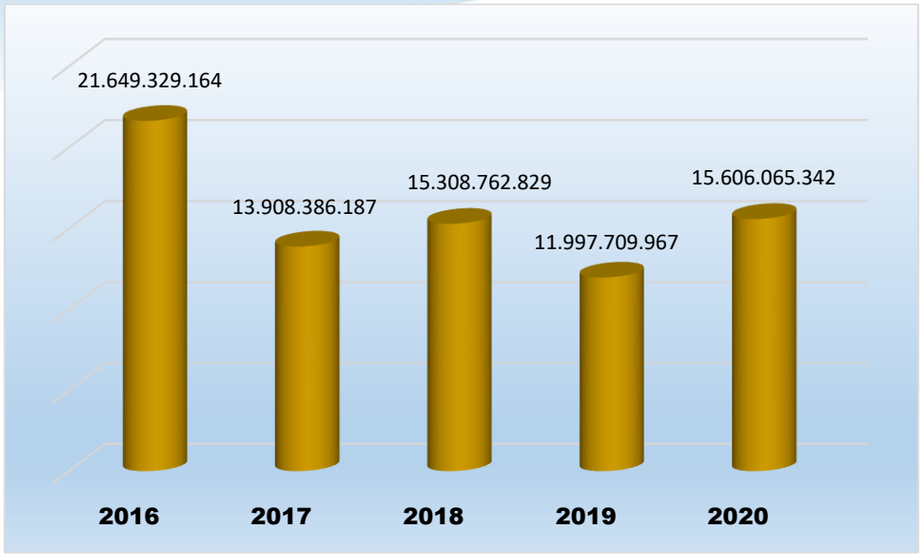
Grafik 3.12
Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentrilisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

Grafik 3.13
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

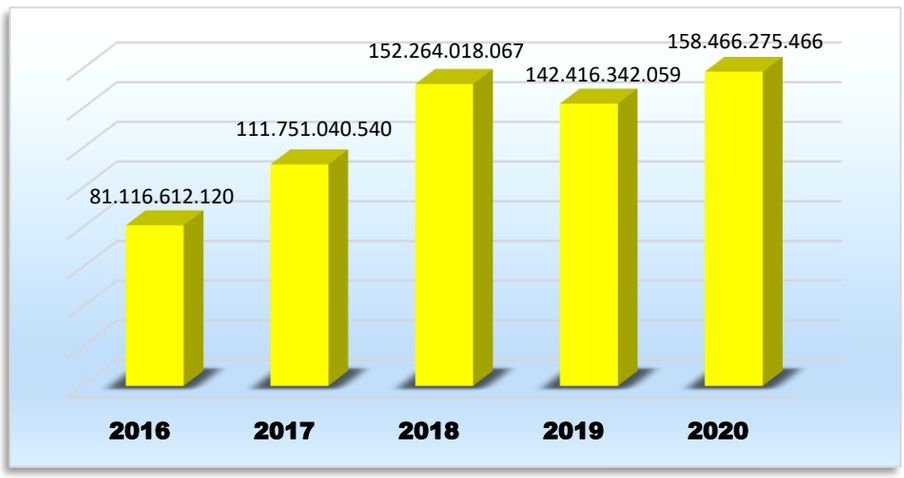


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Grafik 3.14
Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah
Kabupaten Kepulauan SelayarTahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah selama tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 81,11 Milyar lebih dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 111,75 Milyar lebih atau meningkat sebesar 37,77 persen. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 152,57 persen menurun 6,47 persen menjadi Rp. 142,41 Milyar lebih

pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 11,27 persen menjadi Rp.158,46 Milyar lebih.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang memiliki sifat mengurangi nilai kekayaan bersih daerah. Belanja Daerah juga merupakan komitmen dan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan administratif dan seluruh aspek pembangunan kepada publik dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat melalui alokasi dana dalam APBD yang berkualitas.

Secara umum Komponen belanja daerah terdiri dari (1) Belanja Tidak Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif karena adanya penyesuaian dengan tingkat inflasi dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016 – 2020

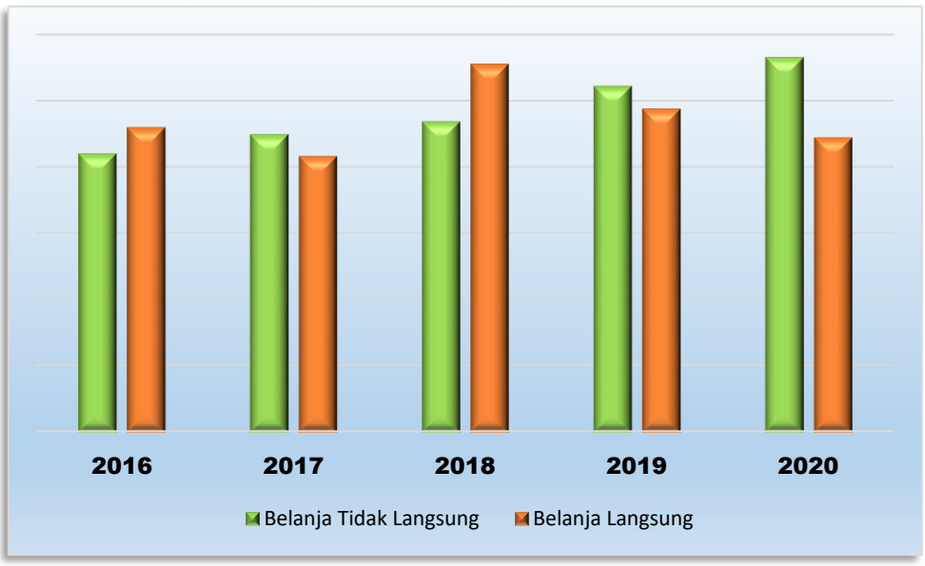
NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	**BELANJA DAERAH**						
2.1	***Belanja Tidak Langsung***	**420,070,471,665**	**449,103,663,142**	**468,414,818,545**	**522,094,315,960**	**565,199,066,706**	**7.73**
2.1.1	Belanja Pegawai	305,142,646,709	279,578,969,730	322,253,152,475	358,602,299,599	348,018,683,522	3.80
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi		681,336,000	3,902,121,499	41,931,628		91.26
2.1.4	Belanja Hibah	5,050,000,000	42,675,494,880	6,032,400,000	10,574,300,000	38,637,800,000	249.97
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	84,500,000	4,051,400,000	3,477,600,000	6,244,900,000	9,144,800,000	1,201.60
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1,782,378,000	1,712,125,000	948,300,000	1,242,601,930	1,273,327,000	(3.76)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	107,342,222,456	120,404,337,532	130,801,244,571	144,418,163,356	143,423,655,529	7.63
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	668,724,500	-	1,000,000,000	970,119,447	24,700,800,655	781.06

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	***Belanja Langsung***	**459,913,172,174**	**416,596,117,738**	**555,316,233,780**	**487,725,387,072**	**444,836,304,948**	**0.73**
2.2.1	Belanja Pegawai	37,221,242,200	78,817,815,909	38,448,721,164	50,298,688,744	57,700,192,630	26.52
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177,503,508,934	164,770,331,320	254,585,757,232	258,435,893,427	214,205,939,961	7.93
2.2.3	Belanja Modal	245,188,421,040	173,007,970,509	262,281,755,384	178,990,804,901	172,930,172,357	(3.25)
JUMLAH BELANJA		**879,983,643,839**	**865,699,780,880**	**1,023,731,052,325**	**1,009,819,703,032**	**1,010,035,371,654**	**3.82**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2016–2020 nilainya fluktuatif. Pada Tahun Anggaran 2016 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 879,98 Milyar lebih dan menjadi sebesar Rp. 1,01 Triliun lebih pada Tahun Anggaran 2020 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,82 persen.

Grafik 3.15
Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020



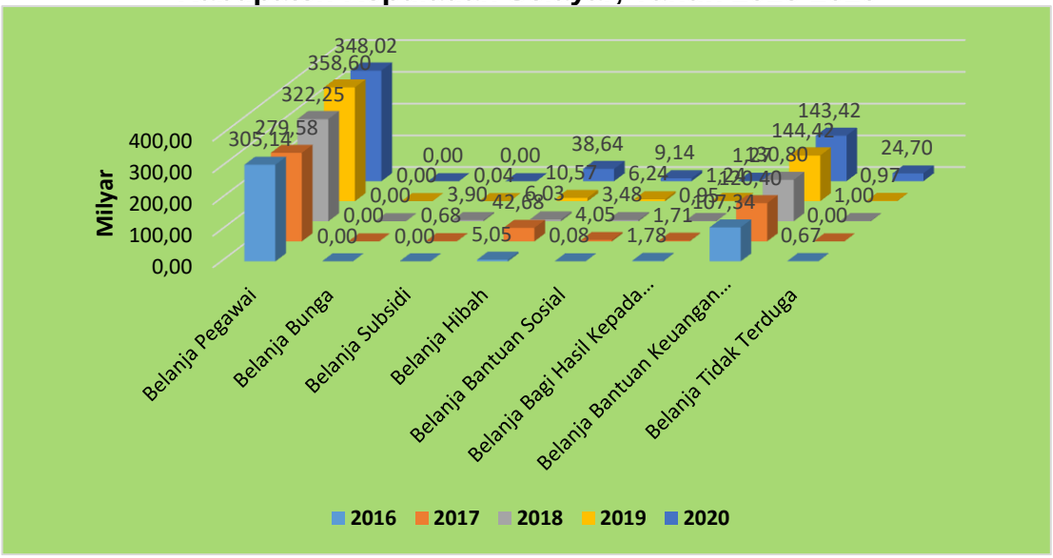
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Belanja tidak langsung cenderung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan belanja langsung. Baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dari tahun ke tahun nilainya fluktuatif. Proporsi belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar 47,74 persen dan di tahun 2020 naik menjadi sebesar 55,96 persen. Sedangkan proporsi belanja tidak langsung pada tahun 2016 sebesar 52,26 persen dan mengalami penurunan menjadi 44,04 persen di tahun 2020.

Idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Guna

meningkatkan komitmen dan keberpihakan kepada penguatan daya dukung pembangunan masyarakat, maka pemerintah daerah pada periode 2021-2026 akan terus berupaya agar proporsi belanja tidak langsung dapat terus ditekan dan pada sisi lain proporsi belanja langsung akan terus ditingkatkan.

Grafik 3.16
Komposisi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020



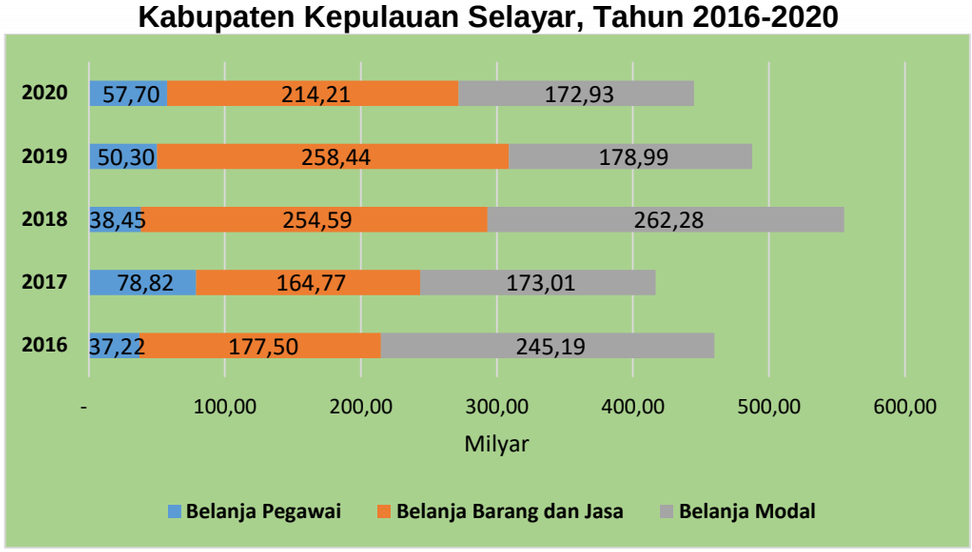
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Dari komposisi belanja tidak langsung pada grafik di atas, pada tahun 2020 sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp.348,02 Milyar, dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan pemerintah desa sebesar Rp.143,42 Milyar. Efisiensi terhadap belanja pegawai terus dilakukan, hal ini terbukti dengan nilai belanja pegawai yang menurun dari Rp.358,60 Milyar di tahun 2019 menjadi Rp.348,02 Milyar di tahun 2020. Belanja hibah merupakan komponen belanja tidak langsung yang berada pada urutan ketiga dengan nilai sebesar Rp.38,64 Milyar di tahun 2020. Selanjutnya untuk komponen belanja tidak terduga sebesar Rp24,70 Milyar, belanja bantuan sosial senilai Rp.9,14 Milyar, dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan pemerintah desa sebesar Rp.1,27 Milyar. Peningkatan efisiensi melalui pengelolaan belanja pegawai perlu menjadi perhatian. Kontribusinya yang sangat besar pada pos belanja tidak langsung memiliki dampak dan pengaruh yang sangat signifikan bagi langkah efisiensi belanja secara keseluruhan.

Komponen penyusun belanja langsung ditunjukkan pada Grafik 3.17 berikut. Berdasarkan grafik, pada tahun 2016-2018 komponen belanja langsung didominasi oleh belanja modal, namun pada tahun 2019-2020 terjadi perubahan, komponen belanja barang dan jasa mengambil porsi terbesar untuk belanja

langsung. Pada tahun 2020 sebagian besar belanja langsung dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp.214,21 Milyar, selanjutnya belanja modal sebesar Rp172,93 Milyar, dan belanja pegawai sebesar Rp.57,70 Milyar.

Grafik 3.17
Komposisi Belanja Langsung
Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, **2021**

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas (1) Penerimaan Pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah; (2)Pengeluaran Pembiayaan Daerah didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
3.1	***Penerimaan Pembiayaan***	**63,856,169,920**	**60,153,287,713**	**90,176,429,668**	**106,911,160,615**	**94,098,199,312**	**12.67**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	63,779,262,057	59,209,467,182	89,911,068,936	106,532,135,011	94,041,496,437	12.86
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	76,907,863	943,820,531	265,360,732	379,025,604	56,702,875	253.28
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	***Pengeluaran Pembiayaan***	**500,000,000**	**3,123,958,980**	**4,336,461,658**	**3,500,000,000**	**1,500,239,000**	**121.79**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	500,000,000	2,500,000,000	-	3,500,000,000	1,500,239,000	80.95
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	623,958,980	4,336,461,658	-	-	247.50
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	**63,356,169,920**	**57,029,328,733**	**85,839,968,010**	**103,411,160,615**	**92,597,960,312**	**12.64**
3.3	***Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)***	***523,269,342,094***	***473,625,446,471***	***641,156,201,790***	***591,136,547,687***	***537,434,265,260***	***7.59***

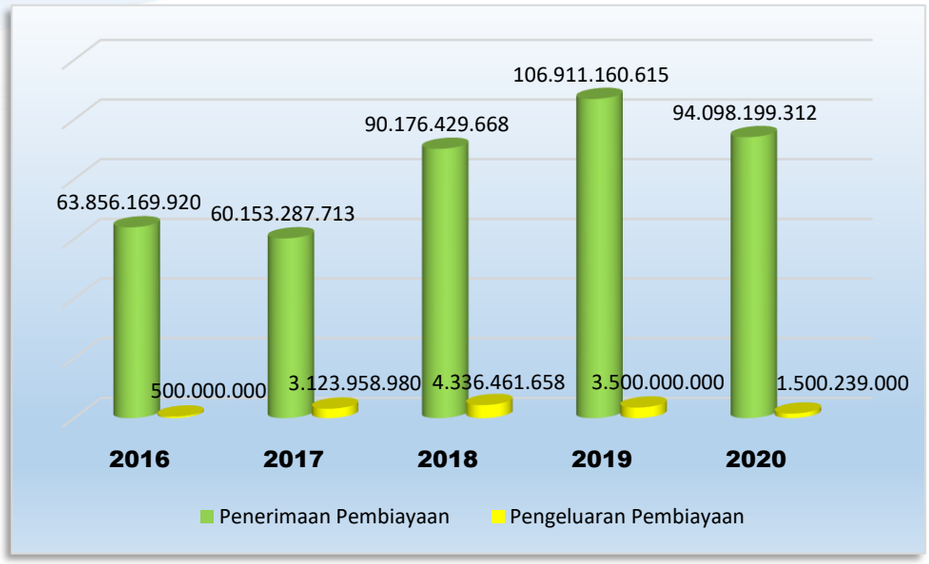
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Memperhatikan Tabel 3.3. diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,64 persen. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,67 persen. Satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan dari realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan sebesar 121,79 persen. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar dipergunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah (PMPD) pada Bank Sulselbar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang.

Realisasi Pembiayaan Daerah selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 63,85 Milyar lebih, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.60,15 Milyar lebih. Mengalami peningkatan pada periode 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.90,17 Milyar dan Rp.106,91 Milyar. Selanjutnya pada tahun 2020 kembali turun menjadi sebesar Rp.94,09 Milyar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 sebesar Rp 500 Juta dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1,5 Milyar lebih. Perkembangan pengeluaran Pembiayaan selama tahun 2016-2020

mengalami fluktatuasi ditunjukan pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.18
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016–2020



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah memuat data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan investasi jangka panjang), kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Hal ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, agar menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan keuangan maupun perencanaan ke depan.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**ASET**						
1.1	**Aset Lancar**						
1.1.1	Kas	59.259.430.056	90.018.959.890	106.532.725.175	94.041.496.437	67.476.955.992	7,57
1.1.2	Piutang	10.176.118.580	9.282.871.424	21.028.746.577	17.092.581.859	11.427.034.470	16,47
1.1.3	Persediaan	13.151.104.714	18.932.198.359	29.247.568.400	16.936.743.582	11.851.647.482	6,58



No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Aset Lancar	82.586.653.349	118.234.029.673	156.809.040.151	128.070.821.878	90.755.637.943	7,08
1.2	**Aset Tetap**						
1.2.1	Tanah	349.923.632.320	344.761.079.030	337.657.632.498	338.584.800.048	340.863.510.728	-0,65
1.2.2	Peralatan dan Mesin	234.441.071.419	248.377.537.603	292.629.183.715	318.093.323.200	360.609.758.464	11,46
1.2.3	Gedung dan Bangunan	462.889.796.908	469.038.137.265	518.379.459.214	587.337.432.875	632.484.991.037	8,21
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.390.763.183.382	1.506.501.992.800	1.698.121.113.309	1.786.221.782.823	1.873.969.055.600	7,79
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	28.854.898.502	36.392.171.732	37.007.513.032	41.369.913.332	44.549.546.385	11,82
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	33.900.436.201	16.404.784.737	40.877.317.496	37.258.784.699	23.379.966.946	12,87
1.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-485.567.715.170	-914.863.624.398	-1.100.308.687.747	-1.223.504.684.313	-1.332.605.030.196	32,20
	Jumlah Aset Tetap	2.015.205.303.562	1.706.612.078.769	1.824.363.531.516	1.885.361.352.663	1.943.251.798.964	-0,50
1.3	**Aset Lainnya**						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	307.075.200	199.414.400	102.563.600	51.561.200	51.561.200	-33,34
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Aset Tak Berwujud	1.742.299.000	838.865.917	746.620.721	731.634.891	758.813.838	-15,29
1.3.5	Aset Lain-lain	20.381.170.298	87.632.396.944	32.884.559.713	35.428.213.101	20.908.427.461	58,56
1.3.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-1.166.449.347	-8.172.897.594	-10.993.603.734	-12.557.360.931	-	137,35
	Jumlah Aset Lainnya	21.264.095.151	80.497.779.667	22.740.140.300	23.654.048.261	21.718.802.499	50,66
1.4	**Investasi Jangka Panjang**	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Investasi non permanen lainnya	568.370.250	-	-	-	-	-100,00
1.4.2	Penyertaan modal pemerintah daerah	52.835.049.504	55.359.978.633	55.799.362.446	59.940.459.873	61.440.698.873	3,87
	Jumlah investasi jangka panjang	**53.403.419.754**	**55.359.978.633**	**55.799.362.446**	**59.940.459.873**	**61.440.698.873**	3,60
	JUMLAH ASET	**2.172.459.471.816**	**1.960.703.866.743**	**2.059.712.074.414**	**2.097.026.682.676**	**2.117.166.938.279**	**-0,48**
	KEWAJIBAN						
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.089.320	107.890.954	590.164	-	-	-10,11
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Utang PPh Pasal 21	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Utang PPh Pasal 22	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Utang PPh Pasal 23	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Utang PPN	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Pendapatan Diterima Dimuka	8.750.000	8.750.000	8.750.000	-	-	-25,00
2.1.9	Utang Beban	2.754.100.027	3.509.034.337	8.359.244.248	6.975.963.507	4.886.981.965	29,78
2.1.10	Utang Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.729.987.274	5.480.123.357	12.028.169.590	6.141.063.189	4.013.792.259	-4,34
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**14.532.926.621**	**9.105.798.648**	**20.396.754.002**	**13.117.026.695**	**8.900.774.224**	**4,70**
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**						
	Utang Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**14.532.926.621**	**9.105.798.648**	**20.396.754.002**	**13.117.026.695**	**8.900.774.224**	**4,70**
3	**EKUITAS DANA**						
3.1	**Ekuitas Dana Lancar**						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**2.157.926.545.195**	**1.951.598.068.094**	**2.039.315.320.412**	**2.083.909.655.982**	**2.108.266.164.055**	**-0,43**
3.2	**Ekuitas Dana Investasi**						
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH EKUITAS DANA		**2,157,926,545,195**	**1.951.598.068.094**	**2.039.315.320.412**	**2.083.909.655.982**	**2.108.266.164.055**	**-0,43**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**2,172,459,471,816**	**1.960.703.866.743**	**2.059.712.074.414**	**2.097.026.682.678**	**2.117.166.938.279**	**-0,48**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Perkembangan neraca daerah menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan nercara daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode pencatatan 2016-2020 ditunjukkan padaTabel 3.4.

3.1.2.1. Aset

Aset daerah meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan investasi jangka panjang. Selama periode 2016-2020, Kabupaten Kepulauan Selayar mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan -0,43 persen, yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar menurun sebesar 0,43 persen setiap tahun. Pertumbuhan aset daerah terutama dikontribusi oleh pertumbuhan aset lainnya yang mencapai 50,66 persen. Jauh melampaui rata-rata pertumbuhan aset lancar

yang hanya rata-rata bertumbuh 7,08 persen dan bahkan pertumbuhan aset tetap yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,50 persen selama periode yang sama 2016-2020. Melambatnya rata-rata pertumbuhan aset daerah, terutama disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rata-rata pertumbuhan aset tetapnya. Penurunan jumlah aset tetap tersebut dikarenakan berkurangnya aset tanah dan akumulasi penyusutan.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban daerah terbagi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kabupaten Kepulauan Selayar hanya terdiri dari kewajiban jangka pendek. Selama periode 2016-2020 kewajiban daerah cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Kewajiban daerah selama periode ini, meningkat rata-rata 4,70 persen setiap tahunnya. Peningkatan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh komponen utang beban yang bertumbuh rata-rata sebesar 29,78 persen. Sementara itu, komponen-komponen kewajiban lainnya menunjukkan penurunan yang cukup berarti, terutama yang terkait dengan pendapatan diterima dimuka, utang perhitungan pihak ketiga, dan utang jangka pendek lainnya yang menunjukkan penurunan tajam selama periode ini.

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang terbagi dalam dua kategori, yakni ekuitas dana lancar, dan ekuitas dana investasi. Ekuitas menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2020, menunjukkan trend negatif, dengan rata-rata pertumbuhan -0,43 persen setiap tahunnya. Negatifnya rata-rata pertumbuhan ekuitas dana tersebut, terutama dikontribusi oleh rata-rata pertumbuhan negatif yang dicapai ekuitas dana lancar.

3.1.2.4. Rasio Keuangan

Informasi aset dalam neraca sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu. Berdasarkan hasil analisis rasio tersebut dapat diketahui tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa analisis rasio keuangan yang

dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk melakukan analisis likuiditas ada beberapa rasio yang digunakan yaitu rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Hasil analisis ketiga rasio tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Rasio Lancar Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2016	82.586.653.349,25	14.532.926.621,10	5,68 : 1
2	2017	118.234.029.672,92	9.105.798.648,35	12,98 : 1
3	2018	156.809.040.151,44	20.396.754.001,80	7,69 : 1
4	2019	128.070.821.878,49	13.117.026.695,21	9,76 : 1
5	2020	90.755.637.943,44	8.900.774.224,31	10,20 : 1

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Rasio lancar membandingkan antara aset lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan kewajiban jangka pendek. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nilai minimal rasio lancar yang bisa diterima adalah 1:1 jika kurang dari itu maka keuangan pemerintah daerah tidak sehat. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang 2016-2020. Nilai rasio lancar dalam lima tahun terakhir berada di atas angka 1:1, artinya bahwa aset lancar dapat menutupi semua kewajiban jangka pendek sehingga kondisi keuangan Kepulauan Selayar dikatakan sehat.

Tabel 3.6
Rasio Kas Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kas (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2016	59.259.430.056,20	14.532.926.621,10	4,08 : 1
2	2017	90.018.959.889,61	9.105.798.648,35	9,89 : 1
3	2018	106.532.725.174,74	20.396.754.001,80	5,22 : 1
4	2019	94.041.496.437,40	13.117.026.695,21	7,17 : 1
5	2020	67.476.955.991,50	8.900.774.224,31	7,58 : 1

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Rasio kas membandingkan antara kas yang tersedia pada pemerintah daerah ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk mengetahui

kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki. Nilai minimal rasio kas yang bisa diterima adalah 1:1. Semakin besar nilai rasio kas semakin baik likuiditas keuangan pemerintah daerah. Tabel di atas menunjukkan rasio kas Kepulauan Selayar yang berfluktuasi sepanjang 2016-2020. Meskipun fluktuatif, rasio kas selama periode 2016-2020 selalu berada di atas angka 1:1. Hal ini mengindikasikan kondisi keuangan Kepulauan Selayar yang sehat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3.7
Rasio Cepat Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2016	82.586.653.349,25	13.151.104.713,54	14.532.926.621,10	4,78 : 1
2	2017	118.234.029.672,92	18.932.198.359,29	9.105.798.648,35	10,91 : 1
3	2018	156.809.040.151,44	29.247.568.399,90	20.396.754.001,80	6,25 : 1
4	2019	128.070.821.878,49	16.936.743.582,31	13.117.026.695,21	8,47 : 1
5	2020	90.755.637.943,44	11.851.647.482,34	8.900.774.224,31	8,86 : 1

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Rasio cepat membandingkan antara aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik. Rasio ini mengindikasikan apakah pemerintah daerah mampu membayar utangnya dengan cepat atau tidak. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemrintah daerah. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat minimal 1:1. Dari tabel di atas terlihat rasio cepat Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2020. Nilai rasio cepat dalam lima tahun terakhir berada di atas angka 1:1, menunjukkan likuiditas keuangan yang baik, artinya Kepulauan Selayar memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dengan cepat.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini membandingkan antara total aset dengan total kewajiban. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan atau aset yang cukup untuk membayar semua utang-utang nya disebut sebagai pemerintah daerah yang *solvable*, sedang yang tidak mampu disebut dengan pemerintah daerah yang *insolvable*. Rasio solvabilitas Kepulauan Selayar ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Rasio Solvabilitas Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio
1	2016	14.532.926.621,10	2.172.459.471.815,77	149,49 : 1
2	2017	9.105.798.648,35	1.960.703.866.742,54	215,32 : 1
3	2018	20.396.754.001,80	2.059.712.074.414,06	100,98 : 1
4	2019	13.117.026.695,21	2.097.026.682.677,67	159,87 : 1
5	2020	8.900.774.224,31	2.117.166.938.279,47	237,86 : 1

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, rasio solvabilitas terbesar berada pada tahun 2020 dan terkecil berada pada tahun 2018. Secara keseluruhan rasio solvabilitas dalam kurun waktu 2016-2020 berada pada ambang yang wajar. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepulauan Selayar memiliki kekayaan atau aset yang cukup untuk membayar utangnya atau *solvable* sehingga kondisi keuangan Kepulauan Selayar cukup sehat.

c. Rasio Utang

Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Terdapat beberapa jenis rasio utang diantaranya rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset modal. Hasil analisis kedua rasio disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.9
Rasio Utang Terhadap Ekuitas
Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Ekuitas Dana (Rp)	Rasio
1	2016	14.532.926.621,10	2.157.926.545.194,67	0,00673 : 1
2	2017	9.105.798.648,35	1.951.598.068.094,19	0,00467 : 1
3	2018	20.396.754.001,80	2.039.315.320.412,26	0,01000 : 1
4	2019	13.117.026.695,21	2.083.909.655.982,46	0,00629 : 1
5	2020	8.900.774.224,31	2.108.266.164.055,15	0,00422 : 1

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani utang. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mengindikasikan pemerintah daerah yang kelebihan utang (*over-laveraged*). Semakin besar rasio ini menunjukkan resiko pemberi utang semakin tinggi. Sementara rasio utang terhadap aset modal

digunakan untuk mengetahui berapa besar bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang.

Tabel. 3.10
Rasio Utang Terhadap Aset Modal
Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset Modal (Rp)	Rasio
1	2016	14.532.926.621,10	2.015.205.303.561,63	0,00721 : 1
2	2017	9.105.798.648,35	1.706.612.078.769,43	0,00534 : 1
3	2018	20.396.754.001,80	1.824.363.531.516,20	0,01118 : 1
4	2019	13.117.026.695,21	1.885.361.352.663,26	0,00696 : 1
5	2020	8.900.774.224,31	2.117.166.938.279,46	0,00420 : 1

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Dari kedua tabel di atas, diketahui bahwa selama periode 2016-2020 nilai rasio utang Kepulauan Selayar cukup kecil, berada dikisaran kurang dari 1, baik rasio utang terhadap ekuitas maupun rasio utang terhadap aset modal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar cukup sehat dan tidak terbebani masalah utang (*non over-leveraged*).

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2016-2020, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejehteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar diantaranya Penyelamatan Aset Daerah, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Peningkatan Kesejahteraan ASN. Khusus penyelamatan aset daerah, Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar mendorong dilakukannya rekonsiliasi aset dengan untuk melancarkan proses sertifikasi dan perlindungan aset milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dilakukan karena sebagian aset pemda dikuasai oleh pihak ketiga. Selama tahun 2019 jumlah aset yang diselamatkan sebesar Rp.2,78 Milyar lebih dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset yang diselamatkan pada sektor pendidikan sebesar Rp.348.431.600.
2. Aset yang diselamatkan pada sektor pertanian sebesar Rp.164.365.300.
3. Aset yang diselamatkan pada sektor kehutanan sebesar Rp.414.321.300
4. Aset yang diselamatkan pada sektor kesehatan sebesar Rp. 364.064.300.
5. Aset yang diselamatkan pada sektor publik sebesar Rp. 1.489.028.900.

Terkait kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa, pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.84,53 miliar lebih untuk memenuhi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa. Pemberian bantuan keuangan kepeda pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tambahan TPP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

3. Mengoptimalikan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
5. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari pusat dan provinsi;
6. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dilakukan melalui strategi pencapaian target sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
3. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
4. Revisi peraturan daerah terkait PAD dengan menambahkan objek pajak/retribusi baru;
5. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
6. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; dan
7. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah: Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow programme*. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1. Penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi;
2. Melaksanakan *mandatory spending* yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pencapaian Visi Misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Program Pembangunan Nasional;
4. Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
5. Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatilan prioritas pembangunan daerah.

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2016	337.742.240.404,00	934.764.807.074,21	36,13
2	2017	322.324.224.500,00	894.019.065.292,20	36,05
3	2018	353.916.375.235,00	1.066.613.839.434,00	33,18
4	2019	400.603.225.395,00	852.871.351.238,74	46,97
5	2020	380.603.531.743,00	822.752.120.730,40	46,26

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Kebijakan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan secara nominal dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Secara proporsi, alokasi

belanja bernilai fluktuatif. Hal ini mengindikasikan masih perlunya upaya ekstra untuk efisiensi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Pada tahun 2016, belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp337,74 Milyar dari total pengeluaran sebesar Rp934,76 Milyar atau dengan proporsi sebesar 36,13 persen. Sedangkan pada tahun 2017, belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp322,32 Milyar dengan proporsi terhadap total pengeluaran sebesar 36,05 persen. Persentase ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2018 dapat terus ditekan hingga menjadi 33,18 persen jika dibandingkan dengan Total Pengeluaran atau sebesar Rp353,92 Milyar. Proporsi alokasi belanja kemabali naik pada tahun 2019 menjadi 46,97 persen atau sebesar Rp.400,60 Milyar. Pada tahun 2020 alokasi belanja mengalamai penurunan baik secara nominal maupun proporsi menjadi 46,26 persen atau sebesar Rp380,60 Milyar. Tren terhadap alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur ini diupayakan akan terus mengalami penurunan, agar efisiensi sisi belanja dapat berjalan secara optimal, namun tetap mempertimbangkan daya dukung terhadap kinerja aparatur dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2.3. Analisis Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD.

Tabel 3.12
Surplus Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	875.836.941.101	898.581.521.082	1.044.423.219.327	1.000.450.038.855	984.914.367.333
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	770.859.043.383	743.583.318.348	891.981.507.754	864.158.937.746	865.338.389.125
3	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	3.123.958.980	4.336.461.658	3.500.000.000	1.500.239.000
(Surplus Riil)		**104,477,897,718**	**151.874.243.754**	**148.105.249.914**	**132.791.101.109**	**118.075.739.208**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Pada bagian mengenai analisis pembiayaan terlebih dahulu akan disajikan data mengenai Surplus Riil Anggaran Daerah. Hal ini menunjukkan kebutuhan riil surplus anggaran yang tidak hanya dicerminkan oleh selisih antara sisi pendapatan dengan sisi belanja saja, namun disajikan perbandingan antara kemampuan fiskal

dari sisi pendapatan dan sisi belanja ditambahkan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun berkenaan. Surplus riil anggaran secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.12 di atas.

Kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Oleh karena itu tidak terdapat defisit riil melainkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah selama periode 2016-2020 pada tabel di atas memperlihatkan surplus anggaran yang nilainya cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat surplus sebesar Rp.104,48 Milyar, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.151,87 Milyar pada tahun 2017, turun menjadi Rp.148,11 Milyar pada tahun 2018, kembali turun menjadi Rp.132,79 Milyar dan Rp.118,08 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa rencana anggaran APBD lebih kecil dari target pengeluaran yang dicanangkan. Hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya beberapa kegiatan, khususnya kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAK Fisik.

Meskipun tidak terjadi defisit, skenario untuk mengatasi defisit telah direncanakan melalui komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar. Selama periode 2016-2020 komposisi penutup defisit riil anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	59.209.467.182	89.911.068.936	106.532.135.011	94.041.496.437	67.485.955.992
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Dari data di atas, komposisi penutup defisit riil sangat mengandalkan SiLPA, dimana periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan. Gambaran realisasi SiLPA dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA		% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	59.150.123.482	7,26	59.209.467.182	51,85	89.911.068.936	18,49	106.532.135.011	11,72	94.041.496.437	28,23
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-		-		-		-		-	
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-		-		-		-		-	
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-		-		-		-		-	
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	14.532.926.621,10	120,31	9.105.798.648,35	37,34	20.396.754.001,80	123,99	13.117.026.695,21	35,69	11.069.892.826,82	15,61
7	Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

3.3. Kerangka Pendanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat (44), kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Oleh sebab itu perlu dihitung terlebih dahulu kemampuan anggaran dari Pemerintah Kepulauan Selayar untuk lima tahun ke depan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah dengan melihat realisasi anggaran beberapa periode sebelumnya ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Target pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2022-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun perhitungan besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun ke depan, tetapi merebaknya wabah COVID-19 dan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar di beberapa sektor antara lain: 1) sektor transportasi dan pergudangan; 2) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; 3) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar pada triwulan ketiga dan keempat 2021 diperkirakan akan menurun 1-2 persen dibandingkan triwulan pertama dan kedua tahun 2021. Jika wabah ini terus meluas, maka perekonomian Kepulauan Selayar diperkirakan akan mengalami perlambatan lebih dalam lagi.

Untuk mencegah ekonomi tidak semakin terpukul, pemerintah daerah harus menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi. Pemerintah memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi seperti keringanan pajak dan biaya perijinan dan pemberian bantuan modal usaha. Pada sektor perikanan dengan memberikan stimulus bagi nelayan berupa bantuan kapal penangkap ikan, mesin diesel, sampan fiber, fish finder, alat penangkap ikan, sarana dan prasarana budidaya air payau, sarana dan prasarana rumput laut, keramba jaring apung, serta bibit dan pakan budidaya air tawar. Untuk sektor pertanian dengan memberikan stimulus bagi petani berupa bantuan benih padi, bibit jeruk keprok, bibit mangga, bibit durian, bibit rambutan, bibit pala, bibit cengkeh, dan bibit jambu mete, bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk dan pestisida. Sedangkan sektor peternakan dengan memberikan stimulus berupa bantuan bibit ayam potong, bibit kambing dan bibit sapi.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kepulauan Selayar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kepulauan Selayar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kepulauan Selayar, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan.

Adanya pandemi COVID-19 berhasil memaksa asumsi-asumsi ekonomi, sosial dan fiskal yang telah direncanakan sebelumnya harus direvisi. Termasuk juga asumsi pendapatan daerah yang turut mendapat imbas dari dampak sosial

dan ekonomi yang ditimbulkan pandemi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar tumbuh negatif 1,78 persen pada tahun 2020. Adapun sektor yang mendapat tekanan paling besar adalah sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh negatif 19 persen. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar tumbuh negatifnya ekonomi Kepulauan Selayar pada tahun 2020.

Tabel 3.15
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

Indikator	Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61–6,14	5,27–7,03	6,50–8,00	6,80–8,30	7,50–8,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,38	2,33	2,20	2,00	1,90
Gini Rasio (nilai)	0,343	0,336	0,320	0,310	0,300
Tingkat Kemiskinan (%)	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25
Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	68,19	68,60	69,00	69,50	70,00

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel dan Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar, 2021

Asumsi makro ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah lima tahun ke depan. Asumsi tersebut mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, tingkat kemiskinan dan IPM. Kelima indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten dan mampu kembali ke angka pertumbuhan normal sebelum terjadi pandemi COVID-19. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat dapat kembali normal bahkan melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Selayar akan

terus meningkat, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga peringkatnya di kawasan regional (lingkup Provinsi Sulsel). Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan Kepulauan Selayar juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksessibilitas ekonomi yang semakin baik.

Selanjutnya, asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan mengalami tren menurun. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 4,88 persen per tahun meskipun dengan kecenderungan yang melambat. Sedangkan dana perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 1,76 persen selama periode 2021-2026 dengan kecenderungan yang juga melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan dana perimbangan bersumber dari pertumbuhan dana alokasi umum yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target dan adanya realokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 3.16
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2026

No	Indikator	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan PAD (%)	8,25	5,48	5,69	3,46	1,52
2	Pertumbuhan Dana Perimbangan (%) :	3.51	1.15	1.27	1.38	1.49
a.	Pertumbuhan DBH (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
b.	Pertumbuhan DAU (%)	4.86	0.85	1.01	1.17	1.32
c.	Pertumbuhan DAK Fisik (%)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
d.	Pertumbuhan DAK Non Fisik (%)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

3.3.2. Target Pendapatan dan Belanja

Untuk kepentingan perencanaan lima tahun kedepan, dilakukan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil perhitungan menurut data *existing* dan asumsi-asumsi maka diperoleh target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk periode 2022-2026 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.17.



Tabel 3.17
Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026

No.	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN DAERAH	**1,095,449,884,500**	**1,110,652,337,000**	**1,138,826,354,000**	**1,166,511,590,000**	**1,194,706,522,000**	**2.19**
1	**Pendapatan Asli daerah**	**94,251,591,000**	**99,419,143,000**	**105,072,125,000**	**108,705,054,000**	**110,354,289,000**	**4.04**
a.	Pajak Daerah	10,719,840,000	10,842,081,000	10,965,969,000	11,130,459,000	11,297,416,000	1.32
b.	Retribusi Daerah	2,400,308,000	2,491,206,000	2,554,753,000	2,620,594,000	2,678,562,000	2.78
c.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	11,079,994,000	11,246,194,000	11,414,887,000	11,586,111,000	11,759,903,000	1.50
d.	Lain-Lain PAD yang sah	70,051,449,000	74,839,662,000	80,136,516,000	83,367,890,000	84,618,408,000	4.86
2.	**Pendapatan Transfer**	**979,770,912,000**	**988,734,535,000**	**1,010,130,634,000**	**1,033,001,763,000**	**1,057,395,408,000**	**1.93**
a.	**Transfer Pemerintah Pusat**	**918,377,840,000**	**931,341,463,000**	**945,737,562,000**	**961,608,691,000**	**979,002,336,000**	**1.61**
a.1.	Dana Perimbangan	808,384,714,000	817,650,712,000	828,000,487,000	839,435,699,000	851,958,043,000	1.32
	1.a. Transfer Umum	**602,796,127,000**	**607,950,352,000**	**614,106,119,000**	**621,263,443,000**	**629,422,341,000**	**1.09**
	1.a.1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	15,422,404,000	15,576,629,000	15,732,396,000	15,889,720,000	16,048,618,000	1.00
	1.b.1. Dana Alokasi Umum	587,373,723,000	592,373,723,000	598,373,723,000	605,373,723,000	613,373,723,000	1.09



No.	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.b. Transfer khusus	**205,588,587,000**	**209,700,360,000**	**213,894,368,000**	**218,172,256,000**	**222,535,702,000**	**2.00**
	1.b.1. Dana Alokasi Khusus Fisik	116,760,257,000	119,095,463,000	121,477,373,000	123,906,921,000	126,385,060,000	2.00
	1.b.2. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	88,828,330,000	90,604,897,000	92,416,995,000	94,265,335,000	96,150,642,000	2.00
a.2.	Dana Insentif Daerah	23,615,385,000	26,449,232,000	29,623,140,000	33,177,917,000	37,159,267,000	12.00
a.3.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
a.4.	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
a.5.	Dana Desa	86,377,741,000	87,241,519,000	88,113,935,000	88,995,075,000	89,885,026,000	1.00
b.	**Transfer Antar Daerah**	**61,393,072,000**	**57,393,072,000**	**64,393,072,000**	**71,393,072,000**	**78,393,072,000**	**6.59**
b.1.	Pendapatan Bagi Hasil	35,000,000,000	36,000,000,000	38,000,000,000	40,000,000,000	42,000,000,000	**4.67**
b.2.	Bantuan Keuangan	26,393,072,000	21,393,072,000	26,393,072,000	31,393,072,000	36,393,072,000	**9.82**
3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**21,427,381,500**	**22,498,659,000**	**23,623,595,000**	**24,804,773,000**	**26,956,825,000**	**5.92**
a.	Hibah	-	-	-	-	-	-
b.	Dana darurat						

No.	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	21,427,381,500	22,498,659,000	23,623,595,000	24,804,773,000	26,956,825,000	5.92
	BELANJA DAERAH	**1,112,949,884,500**	**1,128,152,337,000**	**1,156,326,354,000**	**1,184,011,590,000**	**1,212,206,522,000**	**2.16**
1.	**Belanja Operasi**	**738,819,011,500**	**750,434,636,000**	**755,928,563,000**	**749,708,998,000**	**762,931,694,000**	**0.81**
2.	**Belanja Modal**	**214,534,373,000**	**216,669,841,000**	**237,775,758,000**	**269,983,484,000**	**283,135,655,000**	**7.29**
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**0.00**
4.	**Belanja Transfer**	**156,596,500,000**	**158,047,860,000**	**159,622,033,000**	**161,319,108,000**	**163,139,173,000**	**1.03**
a.	Belanja Bagi Hasil	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0.00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	155,096,500,000	156,547,860,000	158,122,033,000	159,819,108,000	161,639,173,000	1.04
	PEMBIAYAAN DAERAH	**17,500,000,000**	**17,500,000,000**	**17,500,000,000**	**17,500,000,000**	**17,500,000,000**	0.00
1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**	0.00
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0.00
b.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	**0.00**
a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
b.	Penyertaan Modal Daerah	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0.00
c.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-	-	-
e.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan						-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

3.3.2.1. Target Pendapatan

Target pendapatan selama lima tahun ke depan tersebut berdasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
   a. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peremajaan data baik objek dan wajib pajak daerah maupun objek dan wajib retribusi daerah mengakibatkan bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi daerah;
   c. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) secara berkala pada pada subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   d. Terbentuknya sistem zona nilai tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan pendapatan transfer setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
   a. DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji pegawai;
   b. DAK cenderung meningkat setiap tahun;
   c. Pemerataan dana bagi hasil pajak / bukan pajak mengalami Kenaikan setiap tahun.
3. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.
4. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.

3.3.2.2. Target Belanja

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja. Belanja daerah terutama digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial. Memprioritaskan pemenuhan *mandatory spending* yaitu bidang pendidikan sebesar 20 persen, bidang kesehatan sebesar 10 persen, bidang peningkatan Sumber Daya Manusia sebesar 0,16 persen dan bidang pengawasan sebesar 0,75 persen. Sedangkan pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 30 persen.

Target belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi - asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi;
2. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai, dan penambahan jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
4. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

3.3.2.3. Target Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Target pembiayaan selama lima tahun ke depan tersebut berdasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;

2. Meningkatkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah setiap tahun dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Bagian ini menguraikan perhitungan kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dan program lima tahun ke depan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini yang selanjutnya dialokasikan untuk mendukung program-program perangkat daerah guna mewujudkan Visi dan Misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan dana non-APBD seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan kemitraan dengan lembaga internasional.

Target kapasitas riil kemampuan keuangan daerah secara lengkap disajikan dalam Tabel 3.18. Berdasarkan Tabel 3.18, diketahui bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mencapai Rp.1,11 Triliun di tahun 2022. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan di tahun 2023 menjadi Rp.1,12 Triliun dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar Rp.1,15 triliun, selanjutnya diprediksi akan terus mengalami peningkatan di tahun 2025 dan 2026 masing masing sebesar Rp.1,18 triliun dan Rp.1,21 triliun. Berdasarkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas, pertumbuhan pendapatan selalu lebih besar dibandingkan pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan. Hal ini mengakibatkan kapasitas riil keuangan daerah cenderung meningkat sepanjang periode 2022-2026.

Tabel 3.18.
Target Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 – 2026

No.	Uraian	Target (Rp)				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	1,095,449,884,500	1,110,652,337,000	1,138,826,354,000	1,166,511,590,000	1,194,706,522,000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
Total Penerimaan		**1,115,449,884,500**	**1,130,652,337,000**	**1,158,826,354,000**	**1,186,511,590,000**	**1,214,706,522,000**
Dikurangi						
4	Pengeluaran Pembiayaan	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**1,112,949,884,500**	**1,128,152,337,000**	**1,156,326,354,000**	**1,184,011,590,000**	**1,212,206,522,000**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Setelah menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk lima tahun ke depan, tahapan selanjutnya adalah menyusun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja operasi dan belanja modal dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.19.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daearah dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158 adalah sebagai berikut:

1) Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2) Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah;
3) Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencanan penggunaan kapasitas riil Kabupaten Kepulauan Selayar prioritas I diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib serta pemenuhan standar pelayanan minimal termasuk untuk prioritas bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II digunakan untuk program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program Prioritas II berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Program Prioritas III merupakan program prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Prioritas III berhubungan dengan program/kegiatan OPD yang berdampak pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi dan berhubungan dengan tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.



Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 – 2026

No.	Uraian	Target (Rp)									
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	**1,112,949,884,500**	**100**	**1,128,152,337,000**	**100**	**1,156,326,354,000**	**100**	**1,184,011,590,000**	**100**	**1,212,206,522,000**	**100**
2	Prioritas I	289,888,965,904	26.047	293,223,320,848	25.991	269,900,125,568	23.341	307,649,148,580	25.984	314,930,007,266	25.980
3	Prioritas II	231,447,347,010	20.796	234,672,254,772	20.801	235,545,040,314	20.370	246,320,657,598	20.804	252,201,933,951	20.805
4	Prioritas III	591,613,571,586	53.157	600,256,761,381	53.207	650,881,188,118	56.289	630,041,783,821	53.212	645,074,580,783	53.215

Sumber: BPKPD dan Bappelitbangda, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan kapasitas riil terbesar terdapat pada Prioritas III dengan rata-rata 53,82 persen selama periode 2022-2026. Prioritas III terdiri dari program-program Organisasi Perangkat Daerah yang tidak termuat pada Prioritas I dan Prioritas II. Besarnya persentase pada Prioritas III disebabkan oleh adanya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang termuat dalam prioritas ini. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten merupakan program rutin yang dianggarkan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah dan memuat penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), penyediaan peralatan dan perengkapan kantor, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor (gaji pegawai harian lepas), pelayanan dan penunjang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta layanan keuangan dan kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alokasi terbesar kedua berada pada Prioritas I dengan rata-rata 25,47 persen selama periode 2022-2026. Prioritas I terdiri dari program-program urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada prioritas ini termuat beberapa program pemenuhan SPM yang juga mendukung Visi Misi Kepala Daerah. Sedangkan Prioritas II memiliki alokasi terkecil dengan rata-rata 20,72 persen dalam periode lima tahun. Prioritas ini terdiri dari program-program yang mendukung Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Tabel 3.20
Alokasi Anggaran Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 – 2026
Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

No	Kelompok Prioritas	Alokasi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PRIORITAS I		**289,888,965,904**	**293,223,320,848**	**269,900,125,568**	**307,649,148,580**	**314,930,007,266**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	52,720,674,000	52,842,420,027	49,165,065,800	55,464,485,729	56,787,868,358
2	Dinas Kesehatan	110,716,206,000	112,231,910,860	100,041,075,589	117,800,910,992	120,611,640,729
3	Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung	27,369,146,000	27,743,829,609	22,838,257,664	29,120,491,465	29,815,306,392
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	83,897,730,845	85,012,065,781	82,077,342,786	89,106,353,240	91,172,780,829
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6,167,762,600	6,252,199,270	6,408,691,818	6,562,436,334	6,719,016,065
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	628,430,959	637,034,179	652,979,144	668,644,114	684,597,963
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,069,015,500	1,083,650,322	1,110,774,090	1,137,421,560	1,164,560,439
8	Dinas Sosial	7,320,000,000	7,420,210,800	7,605,938,676	7,788,405,145	7,974,236,492

No	Kelompok Prioritas	Alokasi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PRIORITAS II		**231,447,347,010**	**234,672,254,772**	**235,545,040,314**	**246,320,657,598**	**252,201,933,951**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	165,200,000	167,461,588	171,653,152	175,771,111	179,965,009
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1,339,383,891	1,357,720,056	1,391,703,789	1,425,090,763	1,459,093,429
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,134,681,000	4,191,284,783	4,296,192,641	4,399,258,302	4,504,224,606
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7,449,233,788	7,551,213,799	7,740,220,680	7,925,908,574	8,115,020,753
5	Dinas Lingkungan Hidup	6,775,000,000	6,867,749,750	7,039,649,526	7,208,530,718	7,380,526,261
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	274,000,000	277,751,060	284,703,169	291,533,198	298,489,180
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,745,000,000	1,768,889,050	1,813,164,343	1,856,662,156	1,900,962,115
8	Dinas Perhubungan	3,170,000,000	3,213,397,300	3,293,828,634	3,372,847,583	3,453,323,727
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4,353,341,379	4,412,938,622	4,523,394,476	4,631,910,710	4,742,428,099
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,576,380,000	4,589,030,642	4,703,894,079	4,816,740,498	4,931,667,926
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2,986,698,000	3,007,585,896	3,082,865,771	3,156,823,720	3,232,145,534
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	286,157,750	290,075,250	297,335,833	304,468,920	311,733,548
13	Dinas Perikanan	6,654,406,100	6,745,504,920	6,914,344,908	7,080,220,042	7,249,154,092
14	Sekretariat Daerah	6,013,423,000	6,095,746,761	6,248,323,302	6,398,220,578	6,550,882,121
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4,632,700,000	4,696,515,244	4,813,008,026	4,933,413,856	5,055,190,573
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	161,251,500,000	163,459,033,035	162,550,412,632	171,569,947,031	175,663,605,967
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,141,326,843	1,156,951,607	1,185,910,106	1,214,360,090	1,243,334,721
18	Inspektorat	3,274,320,000	3,319,145,441	3,402,223,651	3,483,842,997	3,566,967,490
19	Kecamatan	10,955,583,926	11,231,565,870	11,512,691,964	11,788,881,444	12,070,164,155
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	269,011,333	272,694,098	279,519,631	286,225,307	293,054,643
PRIORITAS III		**591,613,571,586**	**600,256,761,381**	**650,881,188,118**	**630,041,783,821**	**645,074,580,783**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	223,776,669,987	226,840,172,599	232,517,982,119	238,096,088,510	243,777,061,182
2	Dinas Kesehatan	52,338,995,303	53,055,516,149	54,383,495,718	55,688,155,780	57,016,875,177
3	Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung	56,361,043,092	57,132,625,772	58,562,655,395	59,967,573,498	61,398,399,802
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9,599,273,858	9,730,687,917	9,974,247,036	10,213,529,222	10,457,224,029
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,641,142,082	3,690,989,317	3,783,374,780	3,874,137,941	3,966,574,872
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9,922,439,041	10,058,277,231	10,310,035,911	10,557,373,672	10,809,272,608
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,129,463,800	3,172,306,159	3,251,708,983	3,329,717,481	3,409,164,540
8	Dinas Sosial	4,003,169,656	4,057,973,049	4,159,544,114	4,259,331,577	4,360,959,229
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu	6,448,058,109	6,536,332,025	6,699,936,415	6,860,667,890	7,024,363,426

No	Kelompok Prioritas	Alokasi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Pintu dan Tenaga Kerja					
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,715,719,000	5,793,967,193	5,938,990,192	6,081,466,567	6,226,570,359
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17,969,091,212	18,215,088,071	18,671,011,725	19,118,929,296	19,575,106,949
12	Dinas Lingkungan Hidup	8,423,365,000	8,538,680,867	8,752,404,049	8,962,374,222	9,176,216,471
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,525,068,000	4,587,016,181	4,701,829,196	4,814,626,078	4,929,503,057
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,612,393,000	3,661,846,660	3,753,502,682	3,843,549,211	3,935,256,296
15	Dinas Perhubungan	7,329,994,863	7,430,342,493	7,616,323,965	7,799,039,577	7,985,124,662
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4,032,808,621	4,088,017,771	4,190,340,856	4,290,867,133	4,393,247,223
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7,983,450,000	8,142,743,431	8,346,556,299	8,546,790,184	8,750,716,598
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6,418,302,000	6,526,168,554	6,689,518,553	6,850,000,103	7,013,441,106
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,609,288,180	3,658,699,335	3,750,276,580	3,840,245,715	3,931,873,977
20	Dinas Perikanan	6,222,010,631	6,307,189,957	6,465,058,921	6,620,155,685	6,778,112,599
21	Sekretariat Daerah	29,113,863,681	29,512,432,475	30,251,128,660	30,976,853,236	31,715,960,954
22	Sekretariat DPRD	38,017,000,000	38,537,452,730	39,502,045,172	40,449,699,236	41,414,829,059
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4,442,168,796	4,502,982,087	4,615,691,728	4,726,422,173	4,839,194,606
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	28,492,109,000	28,882,165,972	29,605,086,586	30,315,312,614	31,038,635,973
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,533,733,157	6,623,179,964	6,788,958,158	6,951,825,265	7,117,695,815
26	Inspektorat	7,202,860,000	7,301,467,153	7,484,222,876	7,663,769,383	7,846,626,921
27	Kecamatan	28,980,541,046	29,251,284,653	29,983,444,308	30,702,747,137	31,435,314,683
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,769,550,471	4,421,155,617	40,131,817,142	4,640,535,435	4,751,258,611
TOTAL KESELURUHAN		**1,112,949,884,500**	**1,128,152,337,000**	**1,156,326,354,000**	**1,184,011,590,000**	**1,212,206,522,000**

Sumber: BPKPD dan Bappelitbangda, 2021

3.4. Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Corona virus Disease 2019 (COVID-19), yang berawal dari Wuhan Tiongkok lalu merebak ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya menimbulkan isu kesehatan di tingkat global, namun juga menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas, baik sosial maupun ekonomi. COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus*

corona 2 (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian. Meskipun vaksin penyakit tersebut telah ditemukan, upaya vaksinasi di Indonesia belum dilakukan secara menyeluruh. Ditengah upaya vaksinasi, mutasi virus yang tinggi menyebabkan tingkat penularan yang sangat cepat sehingga memberikan ancaman serius pada kesehatan masyarakat, terutama terlihat dari jumlah kematian yang terus meningkat.

Penyebaran COVID-19 terus meluas di seluruh dunia, termasuk di Kepulauan Selayar. Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang mengabaikan penerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam kesehatan masyarakat, mendorong pemerintah pada 17 April 2020 memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Langkah penanganan COVID-19 berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja.

Pendemi COVID-19 juga memberi dampak sangat besar diberbagai bidang yang membuat ekonomi menjadi terpuruk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang sangat drastis. Dampak COVID-19 dari sisi ekonomi berimplikasi kepada tidak bergeraknya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber pendapatan. COVID-19 turut mengganggu kegiatan-kegiatan yang selama ini bersumber dari sektor PAD yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Kurangnya pendapatan yang diterima dari sektor usaha itu, tentu menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan prioitas lainnya sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk diarahkan pada agenda penanggulangan COVID-19.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Selayar pada tahun 2020 menurun 9,31 persen. Semua komponen PAD dalam APBD Pokok tahun anggaran 2020 mengalami kontraksi. Pajak Daerah tumbuh negatif 10,72 persen, Retribusi Daerah

tumbuh negatif 6,91 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh negatif 16,30 persen dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah juga tumbuh negatif 9,21 persen. Diantara semua komponen PAD, Pajak Daerah mengalami kontraksi paling dalam. Penyebabnya adalah penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan turun 44,11 persen, pajak restoran turun 30,16 persen, pajak hotel turun 21,50 persen, pajak air bawah tanah turun 9,85 persen, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan juga turun 4,01 persen.

Kelesuan penerimaan negara juga berimplikasi pada terganggunya dana perimbangan kepada pemerintah daerah (pemda), baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebagian besar APBD di tiap pemda bertumpu pada alokasi dana perimbangan dari pusat. Dalam struktur APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, tumpuan anggaran dari dana perimbangan pada tahun 2020 besarnya sekitar 77,17 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah hanya mempu berkontribusi sebesar 6,74 persen terhadap APBD Kepulauan Selayar.

Pada tahun 2020 dana perimbangan berkurang sebesar 3,16 persen. Komponen yang memberikan efek paling besar terhadap penurunan dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran DAU Kepulauan Selayar pada tahun 2020 terpangkas sebesar Rp.35,28 Milyar atau menurun 5,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya DAU tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan realokasi dan refokusing dana perimbangan untuk mendanai penanganan pandemi virus COVID-19.

Satu-satunya komponen pendapatan daerah yang tumbuh positif pada tahun 2020 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pertumbuhan positif tersebut disokong oleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Desa yang tumbuh positif masing-masing sebesar 63,16 persen, 62,68 persen dan 2,81 persen. Sebaliknya, komponen Bagi Hasil dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2020 turun sebesar 9,97 persen.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri mengambil beberapa langkah dalam penanganan COVID-19, antara lain:

1. Melakukan penjagaan di pintu masuk Pelabuhan Pamatata, Pelabuhan Rauf Rahman, Pelabuhan Pattumbukan, Bandara Aroeppala, serta pelabuhan rakyat.
2. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Membentuk Posko Induk dan Call Center di bawah naungan Sekretariat COVID-19 sebagai wadah pelaporan masyarakat.
4. Melaksanakan sosialisasi penerapan PPKM di semua Kecamatan Kepulauan Selayar.
5. Melaksanakan Operasi Yustisi terkait dengan Protokol Kesehatan dan PPKM.

Adapun agenda penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

1. Penanganan Kesehatan dan Keselamatan, melalui kegiatan:
   a. 3T, yaitu *Testing*, dengan menggencarkan pemeriksaan swab PCR untuk penegakan diagnosa COVID-19); *Tracing*, dengan menggiatkan penelusuran kasus yang kontak erat dengan penderita terkonfirmasi COVID-19; dan *Treatment,* dengan melakukan perawatan sesuai standar pada penderita COVID-19, terutama dengan melakukan isolasi baik secara mandiri maupun terpusat pada fasilitas pelayanan kesehatan.
   b. 3M, yaitu Menjaga jarak minimal 1,5 meter; Memakai masker dengan benar; dan Mencuci tangan dengan benar.
   c. Vaksinasi atau pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh.
   d. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
2. Penanganan Dampak Sosial, melalui kegiatan:
   a. Pembagian bahan kebutuhan pokok berupa beras dan mie instant kepada masyarakat berpenghasilan rendah selama dua bulan.
   b. Jaring pengaman sosial.
   c. Fasilitasi jaminan kesehatan masyarakat.
3. Penanganan Dampak Ekonomi, melalui kegiatan:
   a. Peningkatan produksi sektor perikanan dengan memberikan stimulus bagi nelayan berupa bantuan kapal penangkap ikan, mesin diesel, sampan fiber, *fish finder*, alat penangkap ikan, jaring insang lingkar,

jaring insang tetap, jaring sampling, sarana dan prasarana budidaya air payau, jaring keramba, mesin alkon dan pompa, sarana dan prasarana rumput laut, keramba jaring apung, serta bibit dan pakan budidaya air tawar.

b. Peningkatan produksi sektor pertanian dengan memberikan stimulus bagi petani berupa bantuan benih padi, bibit jeruk keprok, bibit mangga, bibit durian, bibit rambutan, bibit pala, bibit cengkeh, dan bibit jambu mete, bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk dan pestisida.
c. Peningkatan produksi sektor peternakan dengan memberikan stimulus berupa bantuan bibit ayam potong, bibit kambing dan bibit sapi.
d. Pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19

3.5. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan lainnya Kabupaten Kepulauan Selayar selain bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten.

Tabel 3.21
Realisasi Dana Tugas Pembantuan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	OPD Pengelola	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.639.954.000	4.354.548.804	4.093.725.000	2.074.146.444	1.512.900.003
2	Dinas Perikanan	5.421.437.250	0	0	0	0
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	19.293.220.427	12.534.227.754	2.452.883.108
TOTAL		**16.061.391.250**	**4.354.548.804**	**23.386.945.427**	**14.608.374.198**	**3.965.783.111**

Sumber: Bappelitbangda, 2021

Pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan dana non-APBD lainnya seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan kemitraan dengan lembaga internasional.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perencanaan Pembangunan Daerah akan efektif bila berangkat dari tujuan untuk menyelesaikan masalah utama atau isu daerah, oleh karena itu penting untuk lebih mengenali dan merumuskan isu dan permasalahan utama yang akan tercantum dalam dokumen perencanaan. Bila dikaitkan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 maka isu dan masalah utama perlu diidentifikasi di setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu atau permasalahan utama dalam pembangunan pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka waktunya, yang biasanya dikenal dua jenis isu, yaitu isu umum dan isu spesifik. Isu umum adalah isu yang menyangkut masyarakat, daerah, atau sistem ekonomi daerah secara keseluruhan. Adapun isu spesifik adalah isu-isu yang sama, hanya cakupannya terkait pada sebagian lokasi dan kelompok masyarakat tertentu.

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung selama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian disusun menjadi isu strategis pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Sehingga identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diharapkan dapat meningkatkan aksesbilitas prioritas pembangunan daerah, dapat dioperasionalkan serta secara moral maupun etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis isu-isu strategis Kabupaten Kepulauan Selayar untuk RPJMD diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Penjelasan selengkapnya, akan diuraikan pada bagian berikut :

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah-masalah yang melekat dan terus berkembang di dalamnya. Serangkaian tindakan yang diatur dalam rangka penyelesaian masalah tersebut akan berhasil dengan baik jika ditunjang oleh suatu proses perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu prasyarat bahwa proses pembangunan akan mencapai sasarannya adalah dengan mengetahui apakah isu-isu dan permasalahan utama di suatu daerah dapat dikenali dan dirumuskan dengan baik.

Secara konseptual, proses pembangunan memiliki titik awal dan titik akhir. Proses tersebut memiliki serangkaian kegiatan yang dimulai dari awal dan diakhiri pada suatu tujuan tertentu. Serangkaian kegiatan tersebut tertata dalam urutan-urutan tertentu, yang menuju pada pencapaian akhir (tujuan). Dalam kerangka ini, pemetaan isu dan permasalahan utama pembangunan daerah merupakan langkah awal yang perlu untuk dilakukan. Pandangan-pandangan yang mengungkapkan bahwa perencanaan sebagai suatu panduan bagi aksi-aksi di masa yang akan datang dapat terwujud bila ada pemahaman atas isu dan permasalahan. Pemahaman atas isu dan permasalahan merupakan suatu modal utama yang sangat dibutuhkan dalam upaya menyusun suatu arahan perencanaan dalam masa-masa yang akan datang.

Permasalahan pembangunan memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pembangunan pada periode lalu yang masih belum mencapai target atau standar yang diinginkan atau direncanakan. Permasalahan pokok dianggap prioritas ketika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk prioritas dari level kebijakan nasional maupun propinsi yang bersifat mandatori. Masalah pokok merupakan masalah yang sifatnya makro bagi daerah, yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Masalah merupakan penyebab-penyebab dari masalah pokok, yang mana dapat dipecahkan melalui rumusan strategi. Sementara akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, yang pemecahannya melalui rumusan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sesuai amanat RPJPD 2005-2025, maka dalam lima tahun ke depan, agenda prioritas daerah akan diimplementasikan Tiga Pilar Pembangunan Daerah yaitu Pembangunan Distribusi Logistik (PDL), Pembanguna Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT), dan satu Program Unggulan Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANGSARI). Namun masih terdapat permasalahan pokok daerah yang dapat menghambat terwujudnya agenda dimaksud, antara lain :

4.1.1. Masih lemahnya sistem, kelembagaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dimulai pada penataan kelembagaan dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk menyesuaikan kapasitas organisasi dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Namun ditengah semangat memperbaiki tata pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel, masih ada beberapa permasalahan dasar yang menyebabkan birokrasi kurang efektif dan pelayanan yang belum maksimal, termasuk masih lemahnya sistem, kelembagaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.

Perangkat daerah selama ini dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanannya belum sepenuhnya berbasis kinerja. Antara sasaran dengan program kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal. Disamping itu masih sangat lemahnya evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Perangkat daerah. Secara akumulasi, hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator yang masih sangat rendah atau belum mencapai target, ataupun nilainya atau pencapaian lebih tertinggal ketika dibandingkan dengan nilai pencapaian provinsi ataupun nasional.

Data pada tahun 2020 memberikan gambaran bahwa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi masih berada pada pencapaian C (33,89), terlihat masih lebih rendah dibanding pencapaian indeks reformasi birokrasi provinsi yang telah berada pada pencapaian B. demikian pula dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan masih pada kategori sedang dengan nilai indeks 0,6668, sehingga masih dibutuhkan upaya-upaya peningkatan pelayanan berkualitas pada semua aspek pelayanan. Selanjutnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) masih sangat rendah dengan nilai 58,85 (CC) yang berarti nilai kinerja instansi pemerintah masih jauh dari harapan sesuai standar pelayanan ideal.

Terakhir adalah hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) baru akan dilaksanakan pada tahun 2021 melalui sistem terpusat dari Kemendagri. Untuk nilai tren capaian tahun sebelumnya belum ada. Namun dengan melihat beberapa aspek penilaian yaitu Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan Daerah, dan OPini BPK, tergambar bahwa masih ada beberapa aspek penilaian yang belum optimal pelaksanaanya. Dalam hal keseuaian dokumen perencanaan dan penganggaran program kegiatan pada RPJMD periode lalu, RKPD, KUA-PPAS belum menunjukkan singkronisasi hubungan yang runtut dan masih bias. Sementara untuk transparansi pengelolaan keuangan masih belum optimal dalam hal pemanfaatan website Pemerintah Daerah serta hal penyerapan anggaran masih belum bisa dimaksimalkan.

Satu hal yang cukup menggembirakan adalah opini BPK yang telah selama 5 tahun terakhir WTP, namun hal ini bukannya tanpa permasalahan, tetapi untuk mempertahankan opini BPK tersebut merupakan satu tantangan tersendiri, dimana upaya untuk mempertahankan akan sangat sulit dan untuk berbuat lebih baik lagi. Perlu upaya pendampingan dan penanganan serius terhadap penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah agar tetap dalam kerangka kesesuaian terhadap sistem akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1.2. Masih rendahnya pemberdayaan, lapangan pekerjaan, dan lapangan usaha bagi masyarakat perdesaan

Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat desa dan kota sangat dipengaruhi oleh rendahnya pemberdayaan masyarakat desa lapangan pekerjaan dan lapangan usaha yang sangat terbatas di wilayah perdesaan. Pada tahun 2020 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada angka 0,357 yang berarti sedikit sudah lebih baik dari Rasio Gini Provinsi 0,382 bahkan Nasional 0,385. Tetapi bukan berarti hal ini tanpa masalah ke depannya mengingat perlu upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mempertahankan dan memperbaiki nilai Rasio Gini tersebut di tengah sensitifnya keadaan kondisi daerah yang dapat berubah-ubah setiap saat. Keadaan yang tidak stabil ini disebabkan kondisi pandemi covid-19 yang belum ada gambaran jelas kapan akan berakhir. Dan sepanjang keadaan seperti ini maka kondisi tidak stabil dan berubah-ubah dapat saja terjadi setiap saat.

Kondisi masyarakat desa yang tergambar dalam kondisi status desa di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM)

pada tahun 2020 masih mempunyai 3 desa sangat tertinggal, 34 desa desa tertinggal, 41 desa berkembang, 3 desa maju dan belum ada desa mandiri. Secara rata-rata nilai IDM Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai nilai indeks 0,6061 atau berkategori berkembang. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah untuk meningkatkan status desa tersebut, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa secara umum.

Sumber daya perdesaan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan melimpah dalam hal kuantitas, mulai lagi sumber daya pertanian yang beraneka ragam terkhusus sumber daya perikanan yang juga menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Juga sumber daya pariwisata yang termasuk lengkap, mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata kuliner, dan wisata budaya.

Namun kesemuanya belum mampu memberikan manfaat nyata terhadap perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha untuk masyarakat, sehingga data tahun 2020 menyajikan bahwa masih ada 2,44% tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Selayar dan 12,46% tingkat kemiskinan hal mana jauh lebih besar dari tingkat kemiskinan provinsi dan nasional, yaitu 8,99% tingkat kemiskinan provinsi dan 10,19% tingkat kemiskinan nasional. Hambatan dalam pengelolaan sumber daya lokal, khususnya terkait pengembangan ekonomi berbasis perdesaan, masih terhambat pada pelaku usaha ekonomi (SDM), permodalan, akses pasar, maupun transportasi. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai fungsinya sebagai fasilitator dalam pengembangan ekonomi berbasis perdesaan. Peningkatan aktifitas ekonomi lokal berbasis sumberdaya desa yang dimiliki sesuai karakteristik wilayah, menjadi pilihan tepat untuk dapat menggerakan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan berusaha menuju perbaikan tingkat ekonomi masyarakat dan pemerataan wilayah.

4.1.3. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Sumber daya manusia sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Namun sejauh ini, ukuran kualitas SDM yang ditandai dengan nilai IPM Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada angka 67,38 ditahun 2020, masih berada

pada rangking 21 dari 24 kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan. Angak ini masih dibawah angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 71,93 dan angka IPM Nasional yaitu 71,94.

Kondisi IPM Kepulauan Selayar ini dibentuk oleh masih rendahnya pencapaian terhadap Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, yang kesemuanilainya masih berada dibawah angka provinsi dan nasional. Data pada tahun 2020 memberikan gambaran bahwa Umur Harapan Hidup 68,46 tahun masih berada dibawah Provinsi 70,57 tahun dan Nasional 71,47 tahun. Hal ini disebabkan belum maksimalnya beberapa indikator kinerja sektor kesehatan sehingga tingginya angka kematian ibu dan anak. Harapan Lama Sekolah 12,65 tahun juga masih berada dibawah Provinsi 13,36 tahun dan Nasional 12,95 tahun. Rata-rata Lama Sekolah 7,88 tahun masih berada dibawah Provinsi 8,38 tahun dan Nasional 8,48 tahun. Akar masalah dari rendahnya kinerja indikator pendidikan ini diantaranya masih rendahnya akses layanan pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni masyarakat. Sementara untuk Pengeluaran Perkapita Disesuaikan 8.970.000 rupiah juga masih berada dibawah Provinsi 11.079.000 rupiah dan Nasional 11.013.000 rupiah. Akar masalahnya berada pada tingkat daya beli masyarakat yang masih tergolong rendah. Hal ini juga sangat tergantung pada tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan mengoptimalisasi capaian atas alokasi 10% anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan/ sarana kesehatan yang berkualitas termasuk memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah sebagai keharusan pengalokasian anggaran/ mandatori.

Peningkatan tingkat derajat pendidikan masyarakat dan kesesuaian dengan kebutuhan tuntutan global termasuk arah pembangunan daerah, merupakan tantangan tersendiri dalam era sekarang ini dalam rangka menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat global. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa perlu meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya, termasuk dimulainya menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan atau pihak lain untuk menjawab tuntutan perkembangan pasar kerja melalui pendidikan vokasi.

4.1.4. Masih rendahnya infrastruktur perekonomian dan akses permodalan

Dalam memacu kegiatan perekonomian masyarakat dan pengembangan kawasan kebutuhan akan infrastruktur merupakan keniscayaan, karena merupakan input bagi segala aktifitas kegiatan ekonomi masyarakat. Kawasan sebagai pusat pertumbuhan akan sangat menstimulus peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 berada pada angka -1,78%, angka yang memberikan tekanan kepada pertumbuhan ekonomi Sulsel sehingga juga berada pada angka -0,70%, masih lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi nasional -2,07%. Demikian pula dengan PDRB perkapita yang masih berada jauh dibawah angka provinsi dan nasional.

Infrastruktur perekonomian dan akses permodalan dinilai masih sangat rendah dan terbatas sehingga perlu upaya serius oleh berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, bahkan swasta untuk dapat memecahkan masalah ini, dalam rangka peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat dan daerah. Selain itu, kondisi keberadaan infrastruktur penunjang kawasan dan kegiatan perekonomian secara umum dirasakan juga masih sangat terbatas dan belum merata sehingga masih perlu untuk ditingkatkan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Infratsruktur dimaksud berupa infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, ketenagalistrikan, termasuk beberapa fasilitas penunjang kegiatan ekonomi lainnya seperti lembaga permodalan, pasar dan fasilitas lainnya. Infrastruktur jalan dan jembatan serta perhubungan sebagai urat nadi pergerakan ekonomi masih sangat dibutuhkan peningkatannya utamanya dalam memberikan akses kemudahan dalam hal perdagangan serta mobilisasi barang, jasa dan penumpang.

Sub sektor perikanan yang diharap sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun cukup memberikan hasil yang memuaskan dengan trend peningkatan produksi hasil perikanan yang didaratkan. Ini ditandai dengan adanya trend peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB beberapa tahun terakhir cukup baik sebelum pandemi covid 19 melanda yang menyebabkan penurunan angka kontribusi. Namun secara individual maupun kelompok nelayan belum kelihatan hasil yang signifikan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana proses produksi dan olahan belum memadai, pengolahan dan pemasaran belum optimal, produktifitas masih rendah, belum ada nilai tambah ekonom, industri pengolahan masih rendah sehingga PDRB perkapita masyarakat sangat rendah.

Salah satu yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten adalah pengembangan pariwisata dengan berbagai macam potensi yang dimiliki. kontribusi

PAD sektor Pariwisata terhadap total PAD kabupaten belum memberikan nilai yang signifikan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki. Masih minimnya sumber-sumber pendapatan ditambah belum optimalnya peran tenaga pemungut pendapatan sehingga diduga masih ada kebocoran penerimaan pendapatan. Optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan dan diimplementasikan sesegera mungkin.

Demikian pula dengan sektor industri, perdagangan, dan transportasi diharapkan ke depan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan nilai PDRB kabupaten. Perhatian terhadap hal ini akan diejawantahkan melalui program Pembangunan Distribusi Logistik, sehingga sektor-sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah, peningkatan infrastruktur perekonomian dan pergerakan ekonomi masyarakat setempat.

4.1.5.Terjadinya pergeseran nilai budaya dan agama.

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya partisipasi dan peranserta masyarakat, khususnya dalam memelihara tatanan kehidupan sosial yang kondusif berdasarkan nilai kearifan lokal dan keagamaan. Nilai atau *value* yang berkembang dimasyarakat dapat menjadi motivasi dan penyemangat dalam setiap nafas aktifitas pelaksanaan pembangunan. Namun disadari saat ini, pergeseran nilai dan kearifan lokal sementara mewarnai pola kehidupan masyarakat kekinian yang menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan sosial masyarakat dengan masih adanya peluang terjadinya kriminalitas, meskipun angkanya befluktuasi naik turun dari tahun ke tahun.

Keadaan ini sangat bertentangan dengan tujuan utama pembangunan untuk tetap menjaga partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan, yaitu dengan meningkatkan aktualisasi nilai budaya dan meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan, yang kesemuanya diharapkan menjadi nilai dasar untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan yang sementara sedang giat-giatnya dilaksanakan. Kesalehan sosial menjadi kunci perbaikan tatanan kehidupan masyarakat, dan mengejawantahan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang jauh sejak masa lalu menjadi suatu keniscayaan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pertama kalinya pada periode RPJMD ini akan diupayanan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Kesalehan Sosial sebagai penanda bahwa nilai budaya dan nilai agama menjadi spirit, motivasi, serta alas pelaksanaan segala aktifitas pembangunan dan kemasyarakatan.

4.1.6. Terjadinya penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati

Dinamika pengelolaan SDA yang berkelanjutan belum secara konsisten dijadikan acuan pembangunan sektor lain dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup yang mengarah pada visi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. SDA lebih banyak dimanfaatkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga diperlakukan terutama sebagai modal pembangunan. Sebagai akibatnya, keberlanjutan SDA seringkali terabaikan yang menyebabkan semakin kritisnya ketersediaan SDA, penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) masih belum optimal dapat memberikan tanda perbaikan atas pengelolaan lingkungan selama ini. Belum optimalnya mitigasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi dalam menyelaraskan upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung. Ditambah lagi begitu rendahnya koordinasi sinergitas antara lembaga pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga pencapaian kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati belum optimal.

Bercermin dari pengalaman tersebut, pengelolaan SDA yang berkelanjutan baik itu air, udara, maupun keadaan lahan, harus dilakukan secara arif dan adil untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan pemanfaatan SDA bukan saja bagi kebutuhan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dengan mempertimbangkan manfaat sosial bagi masyarakat dan terjaminnya kelestarian fungsi lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Keberadaan air bersih masih menjadi masalah krusial khususnya di wilayah kepulauan, dengan masih adanya pulau yang belum memiliki sumber air bersih bagi masyarakat. Demikian pula dengan keadaan tutupan lahan, masyarakat kota masih belum menikmati secara merata Ruang Terbuka Hijau yang keberadaannya masih sangat perlu upaya penataan menjadi lebih baik sehingga diharapkan dapat berfungsional dengan baik. Intensitas dan efektifitas reboisasi menjadi salah satu perhatian selain masih maraknya pembukaan hutan dan lahan yang belum terkontrol secara optimal.

4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan daerah dianggap prioritas etika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk prioritas dari level kebijakan nasional maupun propinsi yang bersifat mandatori. Dalam perumusan masalah

pembangunan daerah dapat menggunakan pendekatan akar masalah, dimana dipetakan permasalahan melalui masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Masalah pokok merupakan masalah yang sifatnya makro bagi daerah, yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Masalah merupakan penyebab-penyebab dari masalah pokok, yang mana dapat dipecahkan melalui rumusan strategi. Sementara akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, yang pemecahannya melalui rumusan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Berikut Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar :

4.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.2.1.1. Pendidikan

a. Belum meratanya akses pendidikan pada seruluh lapisan masyarakat
b. Infrastruktur dasar dan fasilitas pendidikan yang belum memadai
c. Jumlah dan distribusi guru yang tidak proporsional
d. Pendidik yang belum tersertifikasi pada lembaga PAUD
e. Kurangnya buku mata pelajaran Muatan Lokal di sekolah

4.2.1.2. Kesehatan

a. Dana Operasional terutama di Puskesmas dan jaringannya (Posyandu) terbatas sehingga pengelolaan sarana tidak optimal
b. Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarakat untuk penyakit tertentu
c. Distribusi tenaga Kesehatan, tenaga Dokter dan Bidan yang belum merata terutama di wilayah kepulauan
d. Proses rujukan pasien yang belum optimal
e. Informasi kesehatan belum merata menjangkau lapisan Masyarakat

4.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Masih tingginya Proporsi panjang jalan yang rusak
b. Pemeliharaan Jalan tidak maksimal
c. Masih lemahnya pengendalian dan penegakan peraturan daerah tataruang
d. Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
e. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
f. Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB

4.2.1.4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Masih sulit dan terbatanya pemenuhan air bersih di beberapa pulau di wilayah Kepulauan

b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi.
c. Belum adanya ketersediaan lahan untuk relokasi.
d. Belum adanya database prasarana, sarana dan utilitas dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.

e. Fasilitas Layanan Dasar Permukiman (Drainase, Air Bersih) tidak memadai

4.2.1.5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Rendahnya Kuantitas SDM Personil Satpol PP berkompetensi PPNS
b. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana patroli belum optimal
c. Masih terbatanya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran
d. Belum adanya sistem informasi terintegrasi kebencanaan
e. Belum terbentuknya Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan

4.2.1.6.Sosial

a. Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah / panti sosial
b. Belum adanya sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penampungan sementara bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis.
c. Kondisi dan luasan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang sangat terbatas

4.2.1.7.Penanggulangan Bencana

a. Pengelolaan database bencana belum terkelola dengan baik
b. Kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih sangat rendah
c. Masih kurangnya SDM kebencanaan yang memahami tentang penanggulangan bencana
d. Belum adanya kajian resiko bencana berupa Rencana Kontijensi di Kabupaten

4.2.2.Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.2.2.1. Tenaga Kerja

a. Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Masih kurangnya aparatur berkompetensi K3
c. Pemanfaatan dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal
d. Kondisi Pencari Kerja mengalami kesulitan mengakses informasi mengenai kesesuaian keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan

4.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

a. Masih rendahnya partisipasi perempuan dibidang politik dan pemerintahan
b. Masih tingginya tenaga kerja dibawah umur
c. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus
d. Kurangnya life skill untuk perempuan di perdesaan

4.2.2.3.Pertanian (Pangan)

a. Masih minimya sosialisasi regulasi tentang ketahanan pangan
b. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
c. Masih tingginya penggunaan pestisida pada tanaman sayur dan buah
d. Belum adanya sertifikasi sistem pertanian/ petani yang ramah lingkungan (tanpa penggunaan bahan kimia)

4.2.2.4.Pertanahan

a. Masih maraknya sengketa tanah garapan.
b. Masih banyaknya yang belum terselesaikan ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan.
c. Belum tertibnya penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
d. Belum maksimalnya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah.

4.2.2.5. Lingkungan Hidup

a. Kurangnya fasilitas sarana prasarana dan tenaga pengelola persampahan
b. Masih maraknya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
c. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen lingkungan hidup
d. Masih rendahnya pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun
e. Masih tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor
f. Makin berkurangnya sumber-sumber mata air
g. Belum adanya taman hutan raya kabupaten

4.2.2.6. Kependudukan dan Capil

a. Belum meratanya layanan sampai ke kepulauan akibat faktor geografis dan keberadaan jaringan internet
b. Kurang Kepeduliaan masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akte kelahiran dan NIK terutama di wilayah terpencil
c. Sumber daya pengelola system informasi belum optimal
d. Masih adanya data ganda karena pembinaan dan pengawasan masih lemah.

4.2.2.7.Masyarakat dan Desa

a. Belum adanya desa yang berstatus mandiri
b. Belum optimalnya pengelolaan potensi SDA perdesaan
c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa
d. Pemerintah desa belum memaksimalkan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.
e. Belum berkembang dan meratanya aktifitas BUMDes.

4.2.2.8. Perhubungan

a. Tata kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal.
b. Pelayanan satu pintu penerbitan Izin perhubungan belum berjalan maksimal
c. Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya.
d. Belum adanya studi beberapa pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun.
e. Masih minimnya keberadaan tanda-tanda perlengkapan jalan
f. Belum tersedianya alat uji kendaraan bermotor

4.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

a. Belum meratanya keberadaan jaringan internet di seluruh wilayah layanan
b. Pengelola sistem informasi daerah belum terintegrasi dan terpusat
c. Belum terkelolanya dengan baik informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
d. Belum efektifnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
e. Belum terkelolanya e-government di lingkup Pemerintah Daerah.

4.2.2.10. Koperasi dan UKM

a. Masih rendahnya kapasitas SDM kader koperasi untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat.

b. Masih rendahnya fasilitasi pelaksanaan ART.
c. Masih rendahnya pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan koperasi
d. Belum berkembangnya kapasitas usaha karena kurangnya pengetahuan ilmu dan teknologi
e. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan KUKM
f. Belum optimalnya fasilitasi SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM

4.2.2.11.Penanaman Modal

a. Data, informasi, promosi investasi tentang potensi dan peluang serta kewenangan perizinan penanaman modal belum optimal
b. Belum optimalnya insentif dan kemudahan kepada para investor
c. Pembuatan peta potensi Investasi belum optimal
d. Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai
e. Belum adanya Tim Teknis ditempatkan secara permanen di Dinas PMPTSP
f. Belum adanya UPT perizinan di semua kecamatan dengan aplikasi layanan yang sama

4.2.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi pemuda
b. Belum optmalnya fasilitasi, pendampingan dan peningkatan prestasi olahraga
c. Terbatasnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda pelopor
d. Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten belum memadai
e. Belum optimalnya pemberian reward atau penghargaan kepada atlet berprestasi
f. Kegiatan festival dan olahraga rekreasi/ wisata, petualang masih kurang

4.2.2.13. Statistik dan Persandian

a. Waktu penerbitan buku perstatistikan yang tidak sesuai dengan waktu kebutuhan
b. Belum optimalnya penyelenggaranya statistik sektoral.
c. Belum optimalnya penyelenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah

4.2.2.14. Perpustakaan dan Arsip

a. Masih kurangnya SDM berkompetensi pengelola arsip
b. Perpustakaan belum terkelola secara optimal

c. Pelestarian Naskah Kuno belum terkelola dengan baik
d. Pengelolaan arsip statis belum terkelola dengan baik
e. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional belum dimanfaatkan dengan baik

4.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

a. Belum adanya kawasan pendaratan ikan yang mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan
b. Masih kurangnya sarana dan prasarana, dan beberapa infrastruktur perikanan belum dimanfaatkan dengan baik pada PPI Bonehalang dan sentra-sentra pendaratan ikan lainnya.
c. Belum optimalnya pengembangan kerjasama kelembagaan antara nelayan tangkap dengan pengusaha perikanan di daerah.
d. Usaha budidaya tambak masih didominasi skala kecil, tradisional, dan subsistem.
e. Usaha budidaya rumput laut di beberapa lokasi tidak berhasil akibat tercemarnya perairan.
f. Masih rendahnya produksi dan produktifitas nelayan kecil.
g. Belum dilakukannya penataan penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan.
h. Belum dilakukannya penataan penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil.
i. Belum terintegrasinya pendataan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.
j. Masih rendahnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

4.2.3.2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Belum terkelolanya dengan baik potensi destinasi yang ada.
b. Masih kurangnya event dan atraksi yang menambah lama kunjungan.
c. Angka kunjungan wisatawan masih relatif rendah karena permaslahan akses dan transportasi
d. Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal masih mengandalkan potensi wisata alam
e. Amenitas pariwisata belum maksimal
f. Terbatasnya SDM pemasaran pariwisata

g. Belum tersedianya Sentra Ekonomi Kreatif sebagai wadah promosi untuk insan kreatif

4.2.3.3. Pertanian (selain pangan) dan Peternakan

a. SDM masyarakat pertanian yang masih rendah.
b. Upaya produktivitas pasca panen yang masih rendah
c. Nilai jual petani yang masih rendah
d. Keterbatasan SDM petugas dan petani dalam penerapan teknologi tepat guna
e. Masih berlangsungnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (pemukiman)
f. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian serta tidak ada keberlanjutan pengelolaan prasarana pertanian
g. Belum optimalnya kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa

4.2.3.4. Energi Baru Terbarukan

a. Belum adanya izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah.

4.2.3.5. Perdagangan

a. Masih kurangnya dukungan terhadap perdagangan kecil dan eceran
b. Tenaga penyuluh perdagangan yang belum memadai
c. Masih kurangnya pemahaman Pelaku Usaha Terhadap tempat penyimpanan yang aman
d. Masih seringnya terjadi kelangkaan, barang dan instabilitas harga
e. masih terjadinya upaya penimbunan produk

4.2.3.6. Perindustrian

a. Masih belum berkembangnya usaha industri
b. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat kecil
c. Masih kurangnya investasi industri besar dan menengah
d. Masih rendahnya kapasitas SDM penyuluh IKM untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat.
e. Belum akuratnya data pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)

4.2.3.7.Transmigrasi

a. Belum adanya upaya transmigrasi lokal
b. Belum adanya pengembangan satuan permukiman karena belum terlaksananya kegiatan transmigrasi.

4.2.4. Unsur Pendukung Pemerintahan

4.2.4.1. Sekretariat Daerah

a. Masih rendahnya sistem koordinasi pelaksanaan tugas-tugas OPD
b. Masih rendahnya kualitas penyusunan kebijakan
c. Belum jelasnya sistem dan prosedur kerja
d. Belum optimalnya pembinaan administrasi dan aparat Pemerintah Daerah
e. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
f. Pembagian tugas dalam organisasi belum merata.

4.2.4.2. Sekretariat DPRD

a. Belum Optimalnya Dukungan layanan Sekretariat DPRD Terhadap Peningkatan Kapasitas/kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas fungsinya yakni fungsi anggaran, fungsi pembentukan perda dan fungsi pengawasan

4.2.5. Unsur Penunjang

4.2.5.1. Bappelitbangda

a. Masih adanya inkonsistensi perencanaan pembangunan antara program OPD terhadap RPJMD dan RKPD.
b. Belum adanya standarisasi perencanaan pendanaan pembangunan daerah.
c. Belum efektifnya pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah.
d. Masih rendahnya fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
e. Masih rendahnya upaya penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi.

4.2.5.2. BPKPAD

a. Belum optimalnya penyusunan rencana anggaran daerah.
b. Belum optimalnya pengelolaan perbendaharaan daerah.
c. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
d. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.
e. Belum optimalnya pendapatan daerah.

4.2.5.3. BKPPD

a. Kebutuhan diklat teknis dan fungsional setiap tahun dari OPD belum dapat dipenuhi.
b. Program "DIKLAT SATU PINTU" yang tidak optimal karena masih ada OPD yang melakukan alokasi penganggaran untuk peningkatan kapasitas ASN

c. Kebutuhan diklat struktural setiap tahun dari OPD belum dapat dipenuhi
d. Adanya regulasi yang berubah-ubah sehingga ASN menjadi kesulitan memenuhi standar kompetensi profesi/jabatan manajerial dan fungsional

4.2.6. Unsur Pemngawasan Urusan Pemerintahan

4.2.6.1. Inspektorat

a. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang pengawasan
b. Kurangnya pejabat fungsional (auditor dan P2UPD) dalam rangka penyelenggaraan pengawasan internal
c. Terbatasnya SDM karena kurangnya Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti diklat-diklat atau bimbingan teknis pengawasan internal.

4.2.7. Unsur Kewilayahan

4.2.7.1. Kecamatan

a. Masih lemahnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah
b. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan Desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal
c. Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
d. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan

4.2.8. Urusan Pemerintahan Umum :

4.2.8.1. Kesbangpol

a. Melemahnya semangat kebangsaan dan nasionalisme
b. Belum optimalnya proses kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
c. Ormas, Lsm dan Yayasan yang ada belum maksimal menjalankan fungsinya
d. Kurangnya Akses Informasi Dalam Pemberian Data/Informasi Atau Bahan Keterangan Untuk Kepentingan Tugas Pendeteksian Dan Pencegahan Dini Kejadian Di Masyarakat
e. Tidak Adanya Pusat Komunikasi Dan Informasi Dalam Penyampaian Laporan Secara Cepat, Tepat Dan Akurat

4.3. Analisis Isu Strategis

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya.

Sementara, isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu atau permasalahan utama dalam pembangunan pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka waktunya, yang biasanya dikenal dua jenis isu, yaitu isu umum dan isu spesifik. Isu umum adalah isu yang menyangkut masyarakat, daerah, atau sistem ekonomi daerah secara keseluruhan. Adapun isu spesifik adalah isu-isu yang sama, hanya cakupannya terkait pada sebagian lokasi dan kelompok masyarakat tertentu.

Isu Strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang, sehingga Isu Strategis lebih berorientasi ke masa depan.

4.3.1. Isu Strategis Internasional

4.3.1.1. *Fenomena* Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020, dunia menghadapai krisis yang belum pernah dialami generasi yang hidup saat ini. Kemampuan kita mengatasi krisis ini akan menentukan bagaimana masa depan kita sebagai bangsa bahkan sebagai umat manusia. Tidak ada satupun individu atau institusi yang pernah memprediksi krisis ini akan terjadi. Jika ingin segera keluar dari krisis atau paling tidak mengurangi sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil saat ini. Keputusan yang dimasa normal dapat diambil dalam waktu bukan atau bahkan tahun, sekarang harus diputuskan dalam hitungan hari bahkan jam.

Diawal terjadinya, masyarakat dunia dikejutkan oleh wabah COVID-19 yang menewaskan banyak orang di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Lalu kemudian merebak dengan cepat hampir merata ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing. Ada yang menutup jalur migrasi manusia dari dan ke China, melakukan karantina pada orang-orang yang baru kembali bepergian dari China, hingga melakukan rapid-test sebagai bentuk antisipasi penyebaran. Dikenallah istilah kebijakan *Lock-down* atau isolasi dari dan ke negara tertentu atau dari satu wilayah ke wilayah lain di suatu negara) baik total maupun parsial seperti yang dilakukan di Indonesia dimana masyaraktnya bekerja dan belajar di rumah serta dengan menginstruksikan pembatasan social (*social distancing).* Hal terakhir dengan dilarang berkerumun banyak orang serta membuat jarak antar orang minimal 1,5 meter.

Kejadian yang berlangsung sudah memasuki tahun kedua ini, sangat berdampak terhadap segala sendi kehidupan masyarakat. Dampak paling terasa

terjadi pada dimensi ekonomi, sosial, dan kehidupan kemasyarakatan. Dari segi perekonomian sebagai urat nadi kehidupan, Covid-19 memukul baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Semua aktifitas ekonomi dipengaruhi hampir semua sektor, baik produksi, perdagangan, pariwisata, manufaktur, sampai mobilitas manusia dan barang melalui penerbangan. Tak terkecuali mempengaruhi postur APBD yang berubah-ubah sejak ditetapkan karena adanya kebijakan ***Refocusing*** **anggaran** untuk memberikan ruang pembiayaan terhadap penanggulangan covid-19 berupa biaya terkait kesehatan, penanggulangan bencana, perlindungan sosial dan bantuan ekonomi masyarakat dengan berbagai macam bentuknya termasuk dana stimulus KUR, insentif pajak, BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan langsung tunai.

Belanja kesehatan menjadi fokus pada sisi belanja dengan memastikan bahwa Covid 19 dapat ditangani termasuk dampaknya, dan perekonomian bisa menjadi baik. Karena tren kenaikan covid 19 masih ada dan antisipasi pemerintah sudah sangat masif diadakan termasuk kebijakan belanja pembangunan dialokasikan khusus menangani dampak covid termasuk pelaksaan vaksinasi dan pengembangan inovasi pembangunan saat pandemi dalam bentuk *new normal life.*

4.3.1.2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. **SDGs** berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. *SDGs* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Hasil identifikasi pencapaian indikator *SDGs* Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator *SDGs* yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan gambaran sebagai berikut :

1) Indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional sebanyak 90 indikator atau 46 persen;
2) Indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 51 indikator atau 26 persen;
3) Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 17 indikator atau 9 persen; dan
4) Indikator yang belum memiliki data sebanjyak 38 indikator atau 19 persen.

Dari uraian tersebut, total indikator *SDGs* yang telah dilaksanakan dan tersedia data sebanyak 141 indikator atau 72 persen, sehingga masih terdapat 55 indikator atau 28 persen yang belum dilaksanakan dan belum ada data. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian *SDGs* di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga diupayakan dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi indikator *SDGs*, terdapat 25 Perangkat Daerah yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian indikator *SDGs*. Adapun Perangkat Daerah tersebut adalah :

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Polinmas (4)
2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (10)
3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (7)
4) Badan Pengelolaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (8)
5) Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (3)
6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah (2)
7) Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (9)
8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat (2)
9) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
10) Dinas Kepariwisataan (4)
11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (5)
12) Dinas Kesehatan (37)
13) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (9)
14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (8)
15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (4)
16) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (24)
17) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker (15)
18) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (14)
19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (6)

20) Dinas Perhubungan (1)
21) Dinas Perikanan dan Kelautan (3)
22) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (4)
23) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemikiman (3)
24) Dinas Sosial (11)
25) Inspektorat Daerah (2)

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

Tabel 4.1
Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD

No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1.	Resiko Bencana	(11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2.	Kemiskinan	(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.
3.	Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi	(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
4.	Pekerjaan Layak	(8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.
5.	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan serta perikanan
6.	Aksesibilitas dan Infrastruktur	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah
7.	Tata Kelola Pemerintahan	(16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator dan target yang akan digunakan sebagai kriteria pengukuran. Terdapat 93 indikator TPB yang direkomendasikan. Sementara untuk merealisasikan indikator tersebut

direkomendasi beberapa program dan kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dapat mendukung pencapaian *SDGs* dan penyelesaian isu prioritas pembangunan berkelanjutan.

4.3.1.3. Transformasi Digital

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengamatkan di tahun 2125 seluruh wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyelenggarakan E–Government. Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan pula Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Hal tersebut disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga penyiapan data melalui sistem informasi terintegrasi menjadi salah satu dari program prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026 ini.

Sistem informasi terintegrasi akan dibangun melalui sistem jaringan intra pemerintah daerah, dimana diharapkan seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar menyesuaikan aplikasi yang ada berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk selanjutnya diintegrasikan dengan aplikasi yang akan segera dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian.

4.3.1.4. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties* (*COP)* -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

4.3.2. Isu Strategis Nasional

4.3.2.1. *Standar* Pelayanan Minimum (SPM)

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 298 terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Adapun 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Inilah salah satu perbedaan paradigma penerapan SPM menurut Undang-undang 23 Tahun 2014, dimana SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Perubahan mendasar terletak dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Jenis SPM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, terkait dengan Jenis Layanan Dasar Kabupaten/ Kota berjumlah 29 jenis layanan dasar. Masing-masing jenis layanan dasar tersebut diurai sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan 3 jenis layanan dasar yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan;

2. SPM Kesehatan 12 jenis layanan dasar yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.
3. SPM Pekerjaan Umun 2 jenis layanan dasar yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
4. SPM Perumahan Rakyat 2 jenis layanan dasar yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, danfasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5 jenis layanan dasar yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. SPM Sosial 5 jenis layanan dasar yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti anak telantar, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti lanjut usia telantar, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti gelandangan dan pengemis, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

4.3.2.2. Bonus Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepuluan Selayar Tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 berjumlah 137.071 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan

Benteng yaitu sebanyak 24.849 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.009 per km2. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatiff rendah dan berfluktuasi. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 adalah 131.605 jiwa, kemudian tumbuh menjadi 133 003 jiwa pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 sebesar 134 283 jiwa, tahun 2019 sebesar 135.642 jiwa, dan data terakhir tahun 2020 menjadi 137.071 jiwa, atau tumbuh rata-rata sebesar 1,00% pertahun dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Benteng 24.846 jiwa dan terendah di Kecamatan Buki 6.742 jiwa.

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar masih mempunyai struktur penduduk sedang. Pada tahun 2019 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 34.138 jiwa, terdiri dari 17.647 laki-laki dan 16.491 perempuan dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia 15-64 tahun berjumlah 83.854 jiwa (terdiri dari 33.630 laki-laki dan 50.224 perempuan) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 10.256 jiwa (terdiri dari 5.269 laki-laki dan 4.987 perempuan).

4.3.2.3. RPJMN

RPJMN 2020-2024, telah mengagendakan lima program prioritas yang akan direalisasikan. Prioritas tersebut adalah; (1) Pengembangan Infrastruktur, menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat; kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan; (2) SDM dan Teknologi, menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi; (3) Investasi dan Ekspor, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya; (4) Reformasi Birokrasi dan Struktur, agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga; serta (5) Penghematan APBN, menjamin penggunaan APBN yang fokus

dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Lima prioritas Pembangunan Nasional ini merupakan tahapan menggapai harapan Indonesia Maju dan Hebat di 2050. Memprediksi di tahun 2050, Indonesia akan memiliki PDB 10 triliun dolar US dan PDRB 31.000 dolar US yang nantinya akan mengantar Indonesia di peringkat-4 dunia setelah China, Amerika Serikat dan India. Pada tahun 2018 lalu PDB Indonesia untuk pertama kainya tembus di angka 1 triliun dolar US dengan PDRB atau pendapatan perkapita sekitar 3.900 dolar US atau 54 juta rupiah per tahun.

Tantangan terbesar saat ini adalah membangun frekuensi yang sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat karena masing-masing tidak dapat bekerja sendiri, harus bersama dan saling menguatkan sebagai satu sistem pembangunan. Ada hal yang menyangkut *mandatory* yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 bagi Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dari 230 kawasan yang terdapat dalam RPJMN, pada 2022 memberikan prioritas kepada 128 kawasan yang akan dijadikan prioritas yang terdapat di setiap pulau mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Papua. untuk Pulau Sulawesi terdapat 25 kawasan yang akan menjadi prioritas, antara lain KEK Bitung, Kawasan Industri/ KEK Palu, hingga DPP Manado-Likupang, **DPP Baru Toraja, Makassar, Selayar,** serta DPP Wakatobi.

Hal ini merupakan peluang tersendiri bagi Kepulauan Selayar untuk mengakselerasi pembangunan, disamping mempunyai tantangan dan permasalahan tertentu khususnya dalam penyiapan segala input bagi terimplementasinya amanat RPJMN ini. Tantangan penyiapan Sumber Daya Manusia atau ketersediaan tenaga kerja berkualitas. Upaya peningkatan daya saing tenaga kerja sektor pariwisata merupakan keniscayaan untuk dapat bersaing ditengah makin terbukanya pasar global. Pendidikan Vokasi melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan yang berkualifikasi dapat menjadi solusi penyiapan tenaga kerja sektor pariwisata dalam menjawab tuntutan global.

Disamping itu, tantangan dan permasalahan yang harus diperhatikan adalah ketersediaan infrastruktur wilayah dan pariwisata dalam hal kemudahan mengakses lokasi destinasi wisata yang ada. Infrastruktur akan sangat menentukan keinginan wisatawan untuk datang mengunjungi atau berlama-lama disuatu tempat wisata. Namun dalam penyiapannya bukan persoalan yang mudah karena sangat berhubungan dengan ketersediaan anggaran pembangunan yang terbatas, diantaranya berhadapan dengan pembiayaan program kegiatan yang termasuk

dalam Standar Pelayanan Minimal, mandatory spanding untuk kesehatan, pendidikan, pengawasan, dan lain-lain, yang juga telah diamanatkan oleh undang-undang.

Tangangan dan permasalahan selanjutnya adalah terkait tata pengelolaaan kawasan wisata. Masih banyaknya kawasan wisata yang belum terkelola secara baik dan efektif dalam menunjang pengembangan sektor pariwisata. Kawasan wisata yang telah terkelola dengan baik akan memberikan dampak pada adanya peningkatan kunjungan wisatawan secara terus menerus dan konsisten, dan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata. Melalui pengelolaan yang baik, beberapa kegiatan ikutan akan eksis diantaranya berkembangnya ekonomi kreatif, pertunjukan, maupun event-event lainnya.

4.3.3. Isu Strategis Daerah

4.3.3.1. Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Sementara itu pada Perubahan **RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023**, berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa isu strategis, yaitu :

1. **Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat**

   Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continously*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

2. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan.**

   Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya.

Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

3. Kualitas infrastruktur yang Menunjang Kegiatan Perekonomian

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir. Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana Jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07 persen dari panjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningakatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi.Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%).

4. Pemerataan Pendapatan bagi Warga Sulawesi Selatan

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan

data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 persen pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6 persen.

5. **Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.**

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65 persen dati total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan tahun 2019 berada di angka 71,66 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah 8,26 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

6. **Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.**

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut sulawesi selatan mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan nasional. Sektor

pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

7. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan.

8. Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Terkait isu strategis pada Perubahan RPJMD Sulawesi Selatan Provinsi 2018-2023 sebagaimana yang telah dijelaskan, sejatinya setiap kabupaten/ kota dapat menempatkan diri dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan berkembang ke depannya. Sebagaimana Kabupaten Kepulauan Selayar akan berupaya memanfaatkan peluang isu strategis terkait revitalisasi paradigma pengelolaan komoditi (petik, olah, jual) dan Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim. Hal ini sangat sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam misi pembangunan 2021-2026 yakni meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan, dan mengembangkan pengelolaan potensi kelautan. Selain itu isu strategis ini juga merupakan peluang emas bagi Kabupaten Kepulauan Selayar yang menempatkan tiga pilar pembangunan sebagai penopang Visi Bandar Maritim yakni pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Tantangan utamanya terletak pada penyediaan anggaran pelaksanaan program kegiatan terkait penyelesaian permasalahan dan isu strategis mengingat

kebutuhan pendanaan pembangunan makin meningkat dari tahun ke tahun, sementara pendapatan daerah cenderung stagnan bahkan semakin menurun. Selain itu, kondisi geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari gugusan pulau-pulau merupakan tantangan sendiri dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, aktifitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sementara itu, target pembangunan makro ekonomi Sulawesi Selatan yang akan dikontrinbusikan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar tidak cukup signifikan mengingat posisi dan keadaan indikator makro ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dari lima indikator Makro yang telah ditetapkan pada Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2019, empat indikator makro masih berada di bawah angka Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Hanya ada satu indikator makro yang berada sedikit di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Gini Rasio.

4.3.3.2. Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD yang lalu, dapat ditarik beberapa isu strategis, yaitu kondisi yang berpotensi menjadi masalah besar jika tidak dipecahkan segera maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang untuk berkembang sekaligus mensejahterakan masyarakat. Isu Strategis dimaksud berorientasi ke masa depan, sehingga untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan diintervensi secara konsisten.

Hal yang tak kalah pentingnya diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis disamping memperhatikan faktor internal dan eksternal dan dokumen terkait lainnya (RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan), adalah kajian terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Tujuan kajian tersebut agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan kombinasi dan kajian terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih tersebut, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Status Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

4. Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Meningkatkan Partisipasi dan Peranserta Masyarakat
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Selain isu strategis pembangunan 2021-2026 yang telah dikemukanan, perlu juga disampaikan bahwa ada beberapa **Program Strategis dan Program Prioritas Kepala Daerah** yang merupakan janji politik yang akan diimplementasikan lima tahun ke depan. Program Strategis dimaksud terdiri atas tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Strategis tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Sementara Program Prioritas yang akan tetap dilaksanakan terdiri atas :

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Pelaksanaan Bantuan Gratis/ Hibah;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
4. Pembentukan Sistem Informasi Terintegrasi.

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih, bahwa Visi Bandar Maritim dimaksud merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, yang ditandai dengan :

1. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT);
4. Terimplementasinya Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari).

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2032, serta Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal ini menandakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 adalah:

" Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia "

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. ***Bandar Maritim*** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. ***Kawasan Timur Indonesia*** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Tabel 5.1.

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia	Bandar Maritim	seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.
	Kawasan Timur Indonesia	berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Table 5.2.
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Pernyataan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Misi
1.	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas	Bandar Maritim
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan	Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutaan menuju dimensi peningkatan status desa, dan dimensi peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan menjadi tujuan, dengan sasaran utama Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan, Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	Bandar Maritim
3.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauaan Selayar yang dibangun agar mempunyai	Bandar Maritim

Pernyataan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Misi
		derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik	
4.	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman	Pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki	Bandar Maritim
5.	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah	Bandar Maritim
6.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutaan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi	Bandar Maritim

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauaan Selayar 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, dengan **sasaran** berikut ini :
   a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan **sasaran** berikut ini:
   a) Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan
   b) Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan **sasaran** berikut ini :
   a) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
   b) Maningkatnya Daya Beli Masyarakat

Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman, dengan **sasaran** berikut ini:
   a) Meningkatnya Usaha Perikanan
   b) Meningkatnya Usaha pariwisata
   c) Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya, dengan **sasaran** berikut ini :
   a) Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial.
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan, dengan **sasaran** berikut ini :
   a) Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi-6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki **tujuan** pembangunan:

a. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, dengan **sasaran** berikut ini :
   a) Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan.



Tabel 5.3.
Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia											
1.	**Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**										
		Tujuan-1: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka / Huruf**	**33,89 (C)**	**55,00 (CC)**	64,**00 (CC)**	**68,00 (B)**	**73,00 (B)**	**76,00 (A)**	**76,00 (A)**
		Sasaran-1: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	66,68	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00	85,00
			Nilai Sakip Daerah	Angka / Huruf	58,85 (CC)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka / Kategori	n/a	65,323 (Sangat Perlu Perbaikan)	72,015 (Perlu Perbaikan)	73,943 (Perlu Perbaikan)	77,642 (Perlu Perbaikan)	79,325 (Baik)	79,325 (Baik)
2	**Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**										
		Tujuan-2: Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	**Rasio Gini**	**Angka**	**0,357**	**0,343**	**0,336**	**0,320**	**0,310**	**0,300**	**0,300**
		Sasaran-2 Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6061 (Berkembang)	0,6300 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7150 (Maju)	0,7300 (Maju)	0,7300 (Maju)
		Sasaran-3: Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2,38	2,33	2,20	2,00	1,90	1,90
			Tingkat Kemiskinan	%	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25



No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
3	**Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**										
		Tujuan-3: Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**67,38**	**68,19**	**68,60**	**69,00**	**69,50**	**70,00**	**70,00**
		Sasaran-4: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	50,92	52,55	54,19	55,83	57,47	59,10	59,10
			Indeks Kesehatan	Angka	68,46	68,64	68,81	68,99	69,16	69,34	69,34
		Sasaran-5: Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan	Rp	8.970.000	9.200.000	9.450.000	9.700.000	10.000.000	10.250.000	10.250.000
4	**Misi 4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman**										
		Tujuan-4: Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	**Pertumbuhan Ekonomi Daerah**	**%**	**-1,78**	**4,61 - 6,14**	**5,27 – 7,03**	**6,50 – 8,00**	**6,80 – 8,30**	**7,50 – 8,50**	**7,50 – 8,50**
			PDRB / Kapita	**Rp. Juta**	**46,71**	**49,83**	**53,50**	**55,00**	**57,50**	**60,00**	**60,00**
		Sasaran-6: Meningkatnya Usaha Perikanan	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	25,96	26,50	27,00	28,00	29,00	30,00	30,00
		Sasaran-7: Meningkatnya Usaha Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	3,93	4,76	5,59	6,41	7,24	8,07	8,07



No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Sasaran-8: Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	12,61	13,50	14,00	15,00	15,50	16,00	16,00
5	**Misi 5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan**										
		Tujuan-5: Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Angka**	**n/a**	**40,00**	**44,00**	**48,00**	**52,00**	**55,00**	**55,00**
		Sasaran-9: Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,6817	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150	0,7150
		Tujuan-6: Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	**Indeks Kesalehan Sosial**	Angka	**n/a**	**63,00**	**65,15**	**67,30**	**70,00**	**75,00**	**75,00**
		Sasaran-10: Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	Kasus	146	130	115	105	95	85	85



No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
6	**Misi 6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup**										
		Tujuan-7: Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	**Angka / Huruf**	**74,28 (Baik)**	**63,46 (Cukup Baik)**	**64,80 (Cukup Baik)**	**66,14 (Cukup Baik)**	**67,48 (Cukup Baik)**	**68,82 (Cukup Baik)**	**68,82 (Cukup Baik)**
		Sasaran-11: Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	Angka	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
			Indeks Kualitas Udara	Angka	88,80	85,39	85,49	85,59	85,69	85,79	85,79
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	89,12	42,57	45,06	47,56	50,06	52,56	52,56

5.4. Keterkaitan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan RPJPD Kab. Kepulauan Selayar dan RPJMD

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang berarti bahwa mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan harus tergambar sinkronisasi mulai dari visi yang ditetapkan sampai dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Menjaga sinkronisasi ini bertujuan agar supaya cita-cita pembangunan mulai dari daerah sampai tingkat pusat dapat diupayakan dan diraih bersama segenap elemen dan tingkatan pemerintahan.

Berikut ini digambarkan keterkaitan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar :

Visi RPJPN 2005 – 2025 :
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

Visi RPJPD Prov. Sulsel 2005 – 2025 :
Wilayah Terkemuka di Indonesia melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Berdafaskan Keagamaan

Visi RPJPD Kab. Kepulauan Selayar 2005 – 2025 :
Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, mandiri, dan Berkelanjutan

Visi RPJMD 2021 – 2026 :
Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Demikian pula dengan Misi sebagai cara untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, harus tergambar sinkronisasi dan keterkaitannya sebagai upaya tetap menjaga kesinambungan apa yang akan dilakukan mulai rencana jangka panjang sampai rencana jangka menengah. Berikut disajikan keterkaitan antara Misi RPJPD dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar :

Tabel 5.4.
Keterkaitan Misi RPJPD Kab. Kepulauan Selayar dengan Misi RPJMD

No.	Misi RPJPD	Misi RPJMD
1.	Mengotimalkan pengelolaan potensi sumberdaya kemaritiman.	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman (Misi – 4).
2.	Meningkatkan kualitas SDM.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Misi – 3).
3.	Mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah.	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan (Misi – 1)
		Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan (Misi – 2).
		Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan (Misi – 5).
4.	Melestarikan fungsi lingkungan hidup.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup (Misi – 6).

Sementara itu, Berdasarkan Table 5.3 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 7 tujuan, 11 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 8 indikator tujuan dan 17 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 25 indikator.

Tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 ini juga diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005–2025. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 7 uraian sasaran pokok RPJPD 2005–2025 yang didukung oleh 7 tujuan dan 11 sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.
Hubungan Sasaran RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2021-2026
Kabupaten Kepulauan Selayar

Sasaran RPJPD	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD 2026
(S-1) Terwujudnya pengelolaan potensi sumberdaya kemaritiman secara optimal ditandai tersedianya infrastruktur perhubungan laut, sarana dan prasarana kemaritiman, unggul pada produksi komoditi, keamanan laut terjamin yang berimplikasi terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perekonomian daerah, dan menurunnya	**Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-4)**	**Pertumbuhan Ekonomi Daerah**	**7,50 – 8,50**
		PDRB / Kapita	60,00 Juta
	Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	30,00%
	Meningkatnya usaha pariwisata (S-7)	Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	8,07%
	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan (S-8)	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap	20,00%

Sasaran RPJPD	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD 2026
praktek pengelolaan sumberdaya alam yang potensial merusak lingkungan		PDRB	
(S-2) Terwujudnya SDM bahari yang berkualitas	**Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (T-3)**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**70,00**
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (S-4)	Indeks Pendidikan	59,10
		Indeks Kesehatan	69,34
	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat (S-5)	Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan	10.250.000
(S-3) - Terwujudnya daya saing daerah ditandai dengan menguatnya kelembagaan pemerintah dan masyarakat, semakin membaiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas kehidupan social masyarakat - Terwujudnya kemandirian daerah yang ditandai dengan meningkatnya PAD, semakin terbukanya lapangan pekerjaan secara luas dan disertai dengan semakin menurunnya pengangguran, tersedianya infrastruktur dasar secara memadai	**Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**76,00 (A)**
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 %
		Nilai Sakip Daerah	80,00 (A)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,325 (Baik)
	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-2)	**Rasio Gini**	**0,300**
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan (S-2)	Indeks Desa Membangun	0,7300 (Maju)
	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan (S-3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,90 %
		Tingkat Kemiskinan	9,25 %
	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya (T-5)	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	55,00
	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social (S-9)	Indeks Ketahanan Sosial	0,7150
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan (T-6)	**Indeks Kesalehan Sosial**	75,00
	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan (S-10)	Angka Kriminalitas	75
(S-4) - Terpeliharanya sumber-sumber air yang ditandai dengan meningkatnya persediaan air baku dan air tanah - Semakin membaiknya fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan - Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan	**Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup (T-7)**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	**68,82 (Cukup Baik)**
	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan (S-11)	Indeks Kualitas Air	60,00
		Indeks Kualitas Udara	85,79
		Indeks Kualitas Tutupan Lanah	52,56

5.5. Keterkaitan Misi RPJMN, Perubahan RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar

Demikian pula dengan Misi RPJMN, Misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar harus tetap terjaga sinkronisasi dan keterkaitannya sehingga perumusan selanjutnya berupa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat berkesinambungan dalam sebuah rangkaian perencanaan yang terintegratif dari pusat ke daerah.

Berikut disajikan keterkaitan Misi RPJMN, Misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar :

Tabel 5.6.
Keterkaitan Misi RPJMN, Perubahan RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	MISI RPJMN	NO	MISI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI	NO	MISI RPJMD KABUPATEN
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	4	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
				5	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	4	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	6	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	1	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya				
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga				
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya				
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan				

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Berikut lebih rinci akan digambarkan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah khususnya keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah disajikan sebelumnya.

6.1. Strategi

Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menciptakan nilai tambah *(value added)* dari hasil perencanaan pembangunan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan. Di sisi lain, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:



Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1. Meningkatkan efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan sistem kelembagaan dan pengawasan, dan meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan		
2. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	2. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan produktifitas masyarakat perdesaan dan kualifikasi desa
	3. Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan	3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lokal dalam rangka mengembangkan lapangan kerja dan lapangan usaha di perdesaan
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
3. Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	4. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan
	5. Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	6. Meningkatnya Usaha Perikanan	6. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan, penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	7. Meningkatnya Usaha Pariwisata	7. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kepriwisataan, daya tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi, dan sumberdaya manusia pariwisata
	8. Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan	8. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pengembangan industri, peningkatan akses transportasi dan infrastruktur pelabuhan, dan akselerasi perdagangan dalam dan luar wilayah melalui kerjasama antar Daerah

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan		
5. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	9. Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	9. Meningkatkan peran lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan Daerah
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	10. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
7. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	11. Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terwujudnya Visi Bandar Maritim pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah sesuai strategi dan arah kebijakan yang tepat. Untuk mendapatkan program prioritas, maka program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Sementara itu untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran agar lebih berkesinambungan, maka ditentukan tema atau fokus pembangunan setiap tahun RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi

program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggarannya. Hal ini didasari pada prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Tema pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2022 - 2026 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.1
Tema Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026





Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan							
1 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1 Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1 Meningkatkan efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah serta meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan	1 Pengintegrasian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah 2 Pengembangan dan implementasi e-government	1 Penginternalisasian pemerintahan yang bersih & berakuntabilitas 2 peningkatan sarana & prasarana, kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur	1 Pelembagaan pemerintahan yang bersih & berakuntabilitas 2 Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik 2 Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten	1 peningkatan efektifitas, efisiensi & akuntabilitas pemerintahan daerah 2 Penguatan Pengembangan dan implementasi e-government yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi Pemerintah
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan							
2 Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	2 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	2 Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan produktifitas masyarakat perdesaan dan kualifikasi desa	1 Peningkatan Harmonisasi regulasi pembangunan desa 2 Peningkatan sarana dan prasarana bidang pemerintahan	1 Peningkatan Harmonisasi regulasi pembangunan desa 2 Peningkatan sarana dan prasarana bidang pemerintahan	1 Peningkatan Harmonisasi regulasi pembangunan desa 2 Peningkatan sarana dan prasarana bidang pemerintahan	1 Peningkatan Harmonisasi regulasi pembangunan desa 2 Peningkatan sarana dan prasarana bidang pemerintahan	1 Peningkatan Harmonisasi regulasi pembangunan desa 2 Peningkatan sarana dan prasarana bidang pemerintahan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3 Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan	3 Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lokal dalam rangka mengembangkan lapangan kerja dan lapangan usaha di perdesaan	1 Pemetaan usaha ekonomi yang berbasis potensi lokal desa 2 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana bidang pembangunan desa	1 Pengembangan kapasitas pelaku usaha ekonomi yang berbasis potensi lokal desa 2 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana bidang pembangunan desa	1 Akselerasi kapasitas pelaku usaha ekonomi yang berbasis potensi lokal desa 2 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana bidang pembangunan desa	1 pengembangan & penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM berbasis potensi lokal desa serta pengembangan BUMDes 2 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana bidang pembangunan desa	1 Pemantapan pembangunan ekonomi perdesaan & kerjasama ekonomi perdesaan
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat							
3 Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	4 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	4 Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Peningkatan kualitas sarana/ prasarana pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan 2 peningkatan kapasitas pelayanan dasar 3 peningkatan akses pendidikan menengah & terampil yang bisa mendukung Potensi Kemaritiman	1 Peningkatan kualitas sarana/ prasarana pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan 2 peningkatan kapasitas pelayanan dasar 3 peningkatan akses layanan pendidikan menengah & terampil yang bisa mendukung Potensi Kemaritiman	1 Peningkatan kualitas sarana/ prasarana pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan 2 peningkatan kapasiatas pelayanan dasar 3 peningkatan akses layanan pendidikan menengah & terampil yang bisa mendukung Potensi Kemaritiman	1 Peningkatan kualitas sarana/ prasarana pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan 2 peningkatan kapasiatas pelayanan dasar 3 peningkatan akses layanan pendidikan menengah & terampil yang bisa mendukung Potensi Kemaritiman	1 Peningkatan kualitas sarana/ prasarana pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan 2 peningkatan kapasiatas pelayanan dasar 3 peningkatan akses layanan pendidikan menengah & terampil yang bisa mendukung Potensi Kemaritiman



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	5 Meningkatkan pendapatan masyarakat	1 Peningkatan sarana & prasarana produksi 2 Peningkatan akses pasar produksi	1 Peningkatan sarana & prasarana produksi 2 Peningkatan akses pasar produksi	1 Peningkatan sarana & prasarana produksi 2 Peningkatan akses pasar produksi	1 Peningkatan sarana & prasarana produksi 2 Peningkatan akses pasar produksi	1 Peningkatan sarana & prasarana produksi 2 Peningkatan akses terhadap pasar produksi
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman							
4 Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	6 Meningkatnya Usaha Perikanan	6 Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan, penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1 Penyusunan regulasi peningkatan usaha & industry perikanan 2 Peningkatan sarana dan prasarana produksi & pengembangan usaha perikanan	1 Peningkatan sarana dan prasarana produksi & pengembangan usaha perikanan 2 Peningkatan kerja sama pengelolaan usaha perikanan dan pemasaran hasil perikanan	1 Peningkatan sarana dan prasarana produksi industry perikanan 2 Peningkatan kerja sama pengelolaan industry perikanan dan pemasaran hasil perikanan	1 Peningkatan sarana dan prasarana produksi & pengembangan industry perikanan 2 Peningkatan kerja sama pengelolaan industry perikanan dan pemasaran hasil perikanan	1 Pemantapan Peningkatan kapasitas industry perikanan 2 Pemantapan Peningkatan kerja sama pengelolaan industry perikanan dan pemasaran hasil perikanan
	7 Meningkatnya Usaha Pariwisata	7 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kepriwisataan, daya tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi, dan sumberdaya manusia pariwisata	1 Penyusunan regulasi pendukung pariwisata	1 Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata dan peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.	1 akselerasi Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata dan peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.	1 akselerasi Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata dan peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.	1 Pemantapan Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata dan peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2 Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata dan peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.	2 pengembangan promosi wisata	2 pengembangan promosi wisata	2 pengembangan promosi wisata	2 pengembangan promosi wisata
	8 Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan	8 Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pengembangan industri, peningkatan akses transportasi dan infrastruktur pelabuhan, dan akselerasi perdagangan dalam dan luar wilayah melalui kerjasama antar Daerah	1 Penyusunan regulasi pendukung kepelabuhanan 2 Peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan & pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.	1 Peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan & pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.	1 Peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan & pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.	1 Peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan & pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.	1 Peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan & pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga.
Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan							
5 Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	9 Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	9 Meningkatkan peran lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan Daerah	1 Penyusunan regulasi pendukung pembinaan kehidupan sosial & keagamaan	1 Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan bhudaya dalam kehidupan pembangunan	1 Akselerasi Peningkatan aktualisasi penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan pelayanan keagamaan.	1 Akselerasi Peningkatan aktualisasi penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan pelayanan keagamaan.	1 Pemantapan aktualisasi penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan pelayanan keagamaan.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	10 Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan		2 Peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman & nyaman 3 penyediaan sarana & prasarana pembangunan kebudayaan dan keagamaan 4 Pemberdayaan Lembaga keagamaan pesantren & penyelenggaraan keagamaan	2 peningkatan penyediaan sarana & prasarana pembangunan kebudayaan dan keagamaan 3 peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan	2 Akselerasi peningkatan penyediaan sarana & prasarana pembangunan kebudayaan dan keagamaan	2 Akselerasi peningkatan penyediaan sarana & prasarana pembangunan kebudayaan dan keagamaan	2 peningkatan penyediaan sarana & prasarana pembangunan kebudayaan dan keagamaan
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
7 Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	11 Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	10 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	1 Penyusunan regulasi terkait pengelolaan lingkungan Hidup 2 Peningkatan kapasitas sarana & prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Peningkatan kapasitas sarana & prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Peningkatan kapasitas SDM pengelola Lingkungan Hidup	1 Akselerasi Peningkatan kapasitas sarana & prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Akselerasi Peningkatan kapasitas SDM pengelola Lingkungan Hidup	1 Akselerasi Peningkatan kapasitas sarana & prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Akselerasi Peningkatan kapasitas SDM pengelola Lingkungan Hidup	1 Pemantapan Peningkatan kapasitas sarana & prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemantapan Peningkatan kapasitas SDM pengelola Lingkungan Hidup



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3 Peningkatan kapasitas SDM pengelola Lingkungan Hidup 4 Penegakan Hukum terkait pengelolaan LH 5 Peningkatan bidang pembinaan dan pembangunan fasilitas mitigasi bencana	3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH 4 Penegakan Hukum terkait pengelolaan LH 5 Peningkatan pembinaan dan pembangunan fasilitas mitigasi bencana	3 Akselerasi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH 4 Akselerasi Penegakan Hukum terkait pengelolaan LH 5 Peningkatan pembinaan dan pembangunan fasilitas mitigasi bencana	3 Akselerasi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH 4 Akselerasi Penegakan Hukum terkait pengelolaan LH 5 Peningkatan pembinaan dan pembangunan fasilitas mitigasi bencana	3 Pemantapan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH 4 Pemantapan Penegakan Hukum terkait pengelolaan LH 5 Peningkatan pembinaan dan pembangunan fasilitas mitigasi bencana

6.3. Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah sesuai yang telah ditentukan dan diarahkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih terdiri dari dua program besar yakni Program Strategis dan Program Prioritas.

Program Srategis dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim, yang terdiri atas :

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan :

1) Pembangunan Distribusi Logistik (PDL)

Program Strategis Pembangunan Distribusi Logistik (PDL) akan berpusat di Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene dan sekitarnya. Kawasan PDL di Pamatata dan sekitarnya tersebut terdiri dari 3 (tiga) zona pengembangan, masing-masing zona distribusi, zona pelabuhan/ petikemas, dan zona industri. Sementara itu tahapan pengembangan dibagi juga kedalam 3 (tiga) tahapan besar, masing-masing tahapan pembentukan, tahapan pembangunan, dan tahapan pengelolaan.

Setiap tahapan berisi seperangkat kegiatan yang saling mendukung untuk mewujudkan PDL yang pendanaannya terurai selama 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan periodesasi RPJMD ini. Setiap kegiatan dan pendanaan diberikan tanggungjawab kepada masing-masing Perangkat Daerah teknis untuk menganggarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerahnya, mendasari skenario pembangunan yang telah disusun. Selain itu, pembiayaan dari skenario pembangunan tersebut juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan Swasta/ Badan Usaha.

Secara kewilayahan, Kawasan Pusat Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, akan didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :

a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.

d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambar 6.2
Peta Kawasan Pusat Distribusi Logistik Kawasan Timur Indonesia



Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Pusat Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

a. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan Kawasan PDL;
b. Dimulainya pembangunan non fisik PDL;
c. Dimulainya pembangunan prasarana umum (utilitas) kawasan;
d. Dimulainya pengembangan pelabuhan umum;
e. Dimulainya pembangunan pelabuhan peti kemas;
f. Dimulainya pembangunan gudang produksi;
g. Masuknya investasi pada program pembangunan PDL; dan
h. Dimulainya pembangunan Sub Kawasan PDL.

2) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Program Strategis Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata akan dipusatkan di Pulau Pasi Gusung dan Matalalang dengan luasan 7.160.000 m2. Lokasi ini merupakan lokasi yang telah diusulkan ke Dewan KEK Nasional, yang berarti pembangunan dalam lokasi KEK akan dilakukan oleh konsorsium pengusul dan pembangunan di luar lokasi KEK akan dilakukan melalui pendanaan pemerintah dengan dukungan APBN, APBD Provinsi, maupun APBD

Kabupaten.

Pembangunan dalam lokasi KEK akan mendasari dari hasil Fisibility Study dan Master Plan yang telah disusun oleh Konsorsium Pengusul, sementara pembangunan di luar lokasi KEK akan mendasari skenario pembangunan KEK yang khusus disusun oleh Pemerintah Daerah.

Skenario tersebut berisi seperangkat kegiatan yang saling mendukung untuk mewujudkan KEK yang pendanaannya terurai selama 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan periodesasi RPJMD ini. Setiap kegiatan dan pendanaan diberikan tanggungjawab kepada masing-masing Perangkat Daerah teknis untuk menganggarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerahnya. pembiayaan dari skenario pembangunan tersebut juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan Swasta/ Badan Usaha.

Gambar 6.3
Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata



Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, berupa :

a. Terbentuknya KEK;
b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar/ infrastruktur pendukung di luar kawasan;

3) Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Program Strategis Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) akan berpusat di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu. Kawasan KIPT terdiri dari 5 (lima) zona pengembangan, masing-masing zona pemberdayaan,

zona industri ikan hidup, zona distribusi ikan beku, zona industri produk akhir, dan zona industri berbahan baku ikan.

Sementara itu tahapan pengembangan dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan besar, masing-masing tahapan pembentukan, tahapan pembangunan, dan tahapan pengelolaan.

Setiap tahapan berisi seperangkat kegiatan yang saling mendukung untuk mewujudkan KIPT yang pendanaannya terurai selama 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan periodesasi RPJMD ini. Setiap kegiatan dan pendanaan diberikan tanggungjawab kepada masing-masing Perangkat Daerah teknis untuk menganggarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerahnya, mendasari skenario pembangunan yang telah disusun dan disepakati bersama. pembiayaan dari skenario pembangunan tersebut juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan Swasta/ Badan Usaha.

Secara kewilayahan, Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambar 6.4
Peta Kawasan Industri PerikananTerpadu



Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa:

a. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan Kawasan KIPT;
b. Dimulainya pembangunan non fisik KIPT;
c. Dimulainya pembangunan prasarana umum (utilitas) KIPT;
d. Dimulainya pembangunan prasarana pada zona pemberdayaan masyarakat dalam KIPT;
e. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan Hangkoang;
f. Masuknya investasi pada program pembangunan KIPT; dan
g. Dimulainya pembangunan Sub Sentra KIPT.

4) Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penopang atau sebagai penguat dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dalam hal ini nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan Perangkat Daerah yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran adanya desa berstatus mandiri, bertambahnya jumlah desa berstatus maju, dan dikeluarkannya desa yang masih berstatus sangat tertinggal.

Tabel 6.3.
Keadaan Status Desa pada Tahun 2020 dan 2026

No.	Status Desa	Keadaan Jumlah Desa 2020	Keadaan Jumlah Des 2026
1.	Mandiri	0	3
2.	Maju	3	10
3.	Sangat Tertinggal	3	0

Guna mewujudkan peningkatan status desa tersebut ada 3 (tiga) indeks yang harus diperkuat yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan, dengan berbagai macam dimensi dan perangkat indikatornya.

Dimensi dan perangkat indikator inilah yang merupakan seperangkat kegiatan yang saling mendukung untuk mewujudkan peningkatan IDM yang pendanaannya terurai selama 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan periodesasi RPJMD ini. Setiap kegiatan dan pendanaan diberikan tanggungjawab kepada masing-masing Perangkat Daerah teknis untuk menganggarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerahnya.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026 sebagai penekanan yang termaktup pada indikator sasaran RPJMD ini ditandai dengan terbentuknya Desa Mandiri sebanyak 3 desa, Desa Maju sebanyak 10 desa dan desa dengan status desa sangat tertinggal tidak ada lagi, sehingga merupakan kerja-kerja kolektif OPD yang terlibat untuk mewujudkan terbentuknya 3 Desa Mandiri, 10 Desa Maju, dan Desa Sangat Tertinggal menjadi tidak ada lagi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Segenap OPD memberikan dukungan penganggaran program dan kegiatan maupun dari dukungan kebijakan/ regulasi. Desa lainnya tetap akan diintervensi sebagaimana biasa baik dari dukungan anggaran maupun dukungan kebijakan dari semua level mulai pusat, provinsi, kabupaten, dan desa sesuai hasil Musyawarah Desa menuju pada peningkatan pencapaian status desa masing-masing.

Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dipilih masing-masing 5 (lima) desa sasaran untuk pembangunan desa wisata, desa nelayan, desa tani, dan desa koperasi, usaha kecil menengah, melalui parameter sesuai latarbelakang potensi wilayah yang dimiliki masing-masing desa termasuk kesiapan sumberdaya masyarakatnya. Adapun desa-desa yang tercakup dan terpilih sebagai desa pengembangan antara lain :

a. Desa Wisata : Desa Menara Indah, Bontomarannu, Bahuluang, Patilereng, Polassi.
b. Desa Koperasi dan UMKM : Desa Bahuluang, Bontosunggu, Bungaiya, Bontomarannu, Appatanah.
c. Desa Nelayan : Bontosunggu, Bonea, Mekar Indah, Appatanah, Ujung.
d. Desa Tani : Pengembangan Kampong Munte, Desa Maharayya, Onto, Kohala, Lantibongan, Tamalanrea, Bontotangga, Kaburu, Bontolembangan, Batangmata Sapo, Laiyolo Baru. Pengembangan Padi, Desa Ujung,

Kembangragi, Bontobulaeng, Bontosaile, Bontomalling, Labuang Pamajang, Lembang Baji, Ma'minasa, Bontobaru, Teluk Kampe. Pengembangan Palawija, Desa Kayuadi, Bonerate, Kalaotoa, Bonea Timur, Lowa. Pengembangan Peternakan, Desa Bungaiya, Binanga Sombaiyya, Nyiur Indah, Tanamala, Bonerate.

Diharapkan dengan perputaran ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Unggulan Gerbangsari ini, akan dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat desa. Disamping itu sangat diharapkan desa-desa pengembangan tersebut dapat memberikan efek pengganda bagi perkembangan desa-desa lain disekitarnya. Salah satu yang menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah sebagai wujud implementasi program pemanfaatan SDA dan penyelamatan lingkungan khususnya aspek keanekaragaman hayati adalah Pembangunan Kebun Raya Gojang Desa Bontomarannu, yang bertujuan terbangunnya kawasan hutan untuk pelestarian dan terbinanya keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas ekonomi, sosial, budaya, sarana rekreasi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan baik kualitas air, tanah, udara, dan tutupan lahan.

Selanjutnya terkait pembangunan ekonomi desa, ada 5 (lima) indikator pembangunan ekonomi desa yang hendak dituju, masing-masing :

a. Infrastruktur desa yang baik;
b. Fasilitas umum yang memadai;
c. Akses informasi yang merata;
d. Kualitas SDM yang unggul; dan
e. Pendapatan penduduk yang makin meningkat.

Lebih jauh dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan diwujudkan melalui pembangunan desa (wisata, nelayan, tani, dan Koperasi UMKM), mempunyai tujuan masing-masing :

1. Desa pengembangan Wisata, bertujuan :
   a. Penguatan infrastruktur dasar;
   b. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya;
   c. Peyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata;
   d. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata; dan
   e. Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
2. Desa Pengembangan Nelayan, bertujuan :
   a. Pengalokasian pemberdayaan sumberdaya;

b. Penguatan kelembagaan;
c. Penguatan teknologi; dan
d. Pemberdayaan sumberdaya manusia.

3. Desa Pengembangan Pertanian, bertujuan :
   a. Meningkatkan produksi produk pertanian dan peternakan;
   b. Meningkatkan produktifitas produk pertanian dan peternakan; dan
   c. Meningkatkan daya saing produk pertanian dan peternakan.
4. Desa pengembangan Koperasi dan UMKM, bertujuan :
   a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM;
   b. Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pembentukan produk unggulan daerah, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan ekspor.
   c. Pengembangan akses produksi melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal berbasis sumberdaya lokal.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implementasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Selanjutnya Program Pembangunan Daerah dapat di urai pada tabel sebagai berikut :



Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia																
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan																
Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah		**Indeks Reformasi Birokrasi**	33,89 (C)	55,00 (CC)		64,00 (CC)		68,00 (B)		73,00 (B)		76,00 (A)		76,00 (A)		
Sasaran 1: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	66,68	70,00		72,50		75,00		80,00		85,00		85,00		
		Nilai Sakip Daerah	58,85 (CC)	60,00 (B)		65,00 (B)		70,00 (BB)		75,00 (BB)		80,00 (A)		80,00 (A)		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	n/a	65,323 (Sangat Perlu Perbaikan)		72,015 (Perlu Perbaikan)		73,943 Perlu Perbaikan)		77,642 (Perlu Perbaikan)		79,325 (Baik)		79,325 (Baik)		
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas (%)	n/a	50,00	1.000.187.750	100,00	1.013.880.320	100,00	1.039.257.745	100,00	1.064.189.538	100,00	1.089.581.100	100,00	1.089.581.100	Diskominfo SP
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100	100	4.483.938.800	100	4.545.323.922	100	4.659.093.380	100	4.770.865.030	100	4.884.697.870	100	4.884.697.870	Setda
		Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100	100		100		100		100		100		100		
3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (%)	87,12	89,21	1.141.326.843	90,40	1.156.951.607	92,60	1.185.910.106	93,80	1.214.360.090	94	1.243.334.721	94	1.243.334.721	BKPSDM
		Persentase ASN yang berkinerja baik (%)	99,7	100		100		100		100		100		100		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	314.610.000	20 menit	467.917.011	15 menit	479.628.974	10 menit	491.135.273	8 menit	502.853.760	8 menit	502.853.760	Semua Kecamatan
5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	75,72	80	980.000.000	85	2.493.809.781	90	2.556.229.840	95	2.120.212.273	95	2.173.281.186	100	2.173.281.186	Bappelitbangda



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2+	3	3.274.320.000	3	3.319.145.441	3+	3.402.223.651	3+	3.483.842.997	4	3.566.967.490	4	3.566.967.490	Itda
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	6,97	6,00	161.251.500.000	5,50	163.459.033.035	5,00	162.550.412.632	4,50	171.569.947.031	4,00	175.663.605.967	4,00	175.663.605.967	BPKPD
8	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan KTP-el (%)	96,00	97,00	274.000.000	98,00	277.751.060	99,00	284.703.169	100,00	291.533.198	100,00	298.489.180	100,00	298.489.180	Disdukcapil
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	30,00	32,00		35,00		36,00		37,00		40,00		40,00		
9	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	404.829.626	100	410.371.744	100	420.643.348	100	430.734.582	100	441.011.909	100	441.011.909	Satpol PP, Damkar
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (%)	100	100		100		100		100		100		100		
10	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	0,12	0,25	135.000.000	0,25	136.848.150	0,26	140.273.459	0,27	143.638.619	0,28	147.065.837	0,28	147.065.837	DP3AP2KB
11	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi (%)	n/a	50,00	3.353.153.629	100,00	3.399.058.302	100,00	3.484.136.731	100,00	3.567.721.172	100,00	3.652.846.999	100,00	3.652.846.999	Diskominfo SP
12	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	n/a	80,00	1.302.700.000	85,00	1.320.533.963	90,00	1.353.586.928	95,00	1.386.059.478	95,00	1.419.130.858	100,00	1.419.130.858	Bappelitbangda
13	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah (%)	100	100	2.350.000.000	100	882.171.500	100	903.191.258	100	1.427.142.105	100	1.462.778.529	100	1.462.778.529	Bappelitbangda
14	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)	100	100	16.941.603.188	100	17.173.533.736	100	17.603.387.285	100	18.025.692.546	100	18.455.785.570	100	18.455.785.570	Setwan



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan																
Tujuan 2 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan		**Rasio Gini**	0,357	0,343		0,336		0,320		0,310		0,300		0,300		
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan		**Indeks Desa Membangun**	0,6061 (Berkembang)	0,6300 (Berkembang)		0,6650 (Berkembang)		0,7000 (Maju)		0,7150 (Maju)		0,7300 (Maju)		0,7300 (Maju)		
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten (%)	69,71	71,43	42.161.685.345	72,31	42.604.653.818	73,19	38.608.473.302	74,09	44.594.665.577	75,00	45.599.044.298	75,00	45.599.044.298	Dis PUTR
		Proporsi panjang jalan desa yang terbangun (%)	70	80,00		85,00		85,00		90,00		95,00		95,00		
		Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten (%)	97,88	98,00		98,50		99,00		99,50		100,00		100,00		
16	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	100	100	695.000.000	100	704.514.550	100	722.148.549	100	739.472.893	100	757.116.716	100	757.116.716	DISPMD
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembagan kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	33,33	33,33	810.000.000	33,33	821.088.900	33,33	841.640.755	33,33	861.831.717	33,33	882.395.022	33,33	882.395.022	DISPMD
18	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa (%)	3,70	3,70	240.000.000	3,70	243.285.600	3,70	249.375.039	2,46	255.357.546	2,46	261.450.377	16,05	261.450.377	DISPMD
19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Pertanian (%)	100	100	6.299.233.788	100	6.385.470.299	100	6.545.298.620	100	6.702.320.334	100	6.862.237.697	100	6.862.237.697	Distan KP
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	9.350.874.844	100	9.333.888.321	100	9.567.515.545	100	9.797.040.243	100	10.030.797.623	100	10.030.797.623	Semua Kecamatan
21	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	3,3	4,30	286.157.750	4,40	290.075.250	4,50	297.335.833	4,60	304.468.920	4,70	311.733.548	4,70	311.733.548	DPK
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	1,30	1,30	2.920.000.000	1,30	2.959.974.800	1,30	3.034.062.969	1,30	3.106.850.140	1,30	3.180.979.584	1,30	3.180.979.584	DLH
23	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasiraan bencana (%)	100	100	1.069.015.500	100	1.083.650.322	100	1.110.774.090	100	1.137.421.560	100	1.164.560.439	100	1.164.560.439	BPBD



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	38	40,00	165.200.000	50,00	167.461.588	60,00	171.653.152	70,00	175.771.111	80,00	179.965.009	80,00	179.965.009	Disdikpora
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	n/a		0	40,00	20.000.000	30,00	20.000.000	20,00	20.000.000	10,00	20.000.000	10,00	20.000.000	Dinkes
Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan		**Tingkat Kemiskinan**	12,48	11,34		10, 54		10,00		9,65		9,25		9,25		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,44	2,38		2,33		2,20		2,00		1,90		1,90		
26	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	0,40	0,40	580.000.000	1,17	587.940.200	2,00	602.656.343	3,42	617.114.069	5,85	631.838.411	5,85	631.838.411	Dinas PMPTSPTK
27	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	12,50	19,84	166.000.000	25,00	168.272.540	31,50	172.484.402	39,69	176.622.302	50,00	180.836.511	50,00	180.836.511	Dinas PMPTSPTK
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan (%)	100	100	600.000.000	100	598.214.000	100	613.187.296	100	627.897.660	100	642.879.298	100	642.879.298	Disperindag KUKM
29	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	15,62	19,17	215.000.000	22,72	217.943.350	26,27	223.398.472	29,82	228.757.801	33,37	234.215.963	33,37	234.215.963	Distan KP
30	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan luas kawasan kumuh (%)	2,00	2,11	940.400.000	3,16	953.274.076	4,22	977.134.526	5,27	1.000.575.983	6,33	1.024.449.726	6,33	1.024.449.726	DPKP
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)			998.800.000		1.012.473.572		1.037.815.786		1.062.712.986		1.088.069.318		1.088.069.318	DP3AP2KB
		BKB	0,7386	0,7386		0,74		0,74		0,74		0,74		0,74		
		BKR	0,6136	0,6136		0,61		0,61		0,61		0,61		0,61		



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BKL	0,6156	0,6156		0,62		0,62		0,62		0,62		0,62		
		PIK R	0,5119	0,5119		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		
		UPPKS	0,909	0,909		0,91		0,91		0,91		0,91		0,91		
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat																
Tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia		**Indeks Pembangunan Manusia**	67,38	68,19		68,60		69,00		69,50		70,00		70,00		
Sasaran 4: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat		**Indeks Pendidikan**	50,92	52,55		54,19		55,83		57,47		59,10		59,10		
		Indeks Kesehatan	68,46	68,64		68,81		68,99		69,16		69,34		69,34		
32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (%)	95,14	100	52.299.149.000	100	52.415.124.350	100	48.727.074.912	100	55.015.987.439	100	56.328.668.900	100	56.328.668.900	Disdikpora
		Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (%)	93,96	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	98,42	100		100		100		100		100		100		
33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi (%)	30,11	35,15	260.000.000	38,12	263.559.400	42,15	270.156.292	45,5	276.637.341	50	283.237.908	50	283.237.908	Dinsos
34	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	18,99	100,00	6.385.000.000	100,00	6.472.410.650	100,00	6.634.415.089	100,00	6.793.574.707	100,00	6.955.669.399	100,00	6.955.669.399	Dinsos
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	31,99	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	17,35	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	17,36	18,36		21,32		24,50		25,92		28,22		28,22		
35	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	300.000.000	100	304.107.000	100	311.718.798	100	319.196.932	100	326.812.971	100	326.812.971	Dinsos
36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten (%)	87,00	88,00	11.226.027.900	90,00	11.379.712.222	92,00	11.664.546.419	95,00	11.944.378.887	99,00	12.229.371.768	92,00	12.229.371.768	Dis PUTR
		Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (%)	29,83	34,00		38,00		45,00		50,00		55,00		31,80		
		Persentase Luas Daerah irigasi kewenagan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi (%)	1,74	1,80		1,85		1,92		1,98		2,20		2,20		
37	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	48,30	100,00	12.204.663.400	100,00	12.371.745.242	100,00	12.681.410.025	100,00	12.985.637.052	100,00	13.295.474.352	100,00	13.295.474.352	Dis PUTR



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	39,62	100,00	8.953.229.550	100,00	9.075.799.263	100,00	9.302.966.518	100,00	9.526.144.685	100,00	9.753.438.497	100,00	9.753.438.497	Dis PUTR
39	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	n./a	100,00	600.000.000	100,00	608.214.000	100,00	623.437.596	100,00	638.393.864	100,00	653.625.942	100,00	653.625.942	DPKP
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	n/a	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
40	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	n/a	0,58	2.590.000.000	1,41	2.625.457.100	3,42	2.691.172.291	8,27	2.755.733.514	20,00	2.821.485.316	20,00	2.821.485.316	DPKP
41	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (%)	91,10	100,00	223.601.333	100,00	226.662.435	100,00	232.335.796	100,00	237.909.532	100,00	243.586.053	100,00	243.586.053	Satpol PP, Damkar
		Waktu Tanggap *(Response Time)* Penangnan Kebakaran	11,95	11,26		10,93		10,61		10,30		10,00		10,00		
42	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan (%)	9,09	27,27	935.000.000	36,36	947.800.150	45,45	971.523.588	54,55	994.830.439	63,64	1.018.567.093	63,64	1.018.567.093	Distan KP
43	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	78,02	78,45	3.000.881.000	78,80	3.041.963.061	80,00	3.118.103.396	80,35	3.192.906.697	80,50	3.269.089.451	80,50	3.269.089.451	DP3AP2KB
44	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	28/100.000 Penduduk	31/100.000 Penduduk	0	36/100.000 Penduduk	80.000.000	36/100.000 Penduduk	80.000.000	45/100.000 Penduduk	80.000.000	45/100.000 Penduduk	80.000.000	45/100.000 Penduduk	80.000.000	Dinkes



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan(%)	81,00	100	110.230.872.000	100	111.639.932.638	100	99.436.783.152	100	117.184.520.579	100	119.982.929.240	100	119.982.929.240	Dinkes
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	75,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan(%)	79,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	63,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	76,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	93,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	75,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	93,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	92,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (%)	100,00	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100,00	100		100		100		100		100		100		



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	93,00	100		100		100		100		100		100		
		Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Utama	27.369.146.000	Utama	27.743.829.609	Utama	22.838.257.664	Utama	29.120.491.465	Utama	29.815.306.392	Utama	29.815.306.392	RSUD
Sasaran 5 : Maningkatnya Daya Beli Masyarakat		**Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan**	8.970.000	9.200.000		9.450.000		9.700.000		10.000.000		10.250.000		10.250.000		
46	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	100	100	450.000.000	100	456.160.500	100	467.578.197	100	478.795.398	100	490.219.456	100	490.219.456	Disperindag KUKM
47	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (%)	100,00	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	10.250.300	100,00	10.496.205	100,00	10.746.644	100,00	10.746.644	Disperindag KUKM
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman																
Tujuan 4 : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman		**Pertumbuhan Ekonomi Daerah**	-1,78%		4,61% – 6,14%		5,27% - 7,03%		6,50% - 8,00%		6,80% - 8,39%		7,50% - 8,50%	7,50% - 8,50%		
		PDRB / Kapita	46,71 Juta	49,83 Juta		53,50 Juta		55,00 Juta		57,50 Juta		60,00 Juta		60,00 Juta		
Sasaran 6 : Meningkatnya Usaha Perikanan		**Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB**	25,96%	26,50%		27,00%		28,00%		29,00%		30,00%		30,00%		
48	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	30	40	251.850.891	50	255.298.730	60	261.688.857	70	267.966.773	80	274.360.460	80	274.360.460	Dinas PMPTSPTK
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	18.729,20	21.845,74	4.024.406.100	23.593,40	4.079.500.220	25.480,87	4.181.610.110	27.519,34	4.281.926.937	29.720,89	4.384.093.713	29.720,89	4.384.093.713	Disper
50	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	837,36	976,72	1.380.000.000	1.054,86	1.398.892.200	1.139,25	1.433.906.472	1.230,39	1.468.305.888	1.328,82	1.503.339.667	1.328,82	1.503.339.667	Disper
51	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100	100	1.529.484.200	100	1.550.422.839	100	1.589.229.922	100	1.627.355.548	100	1.666.184.252	100	1.666.184.252	Setda



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	160,84	186.57	1.250.000.000	201.49	1.267.112.500	231.34	1.298.828.326	249.84	1.329.987.217	269.82	1.361.720.712	269,82	1.361.720.712	Disper
53	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional (%)	30	33	0	40	50.000.000	45	51.251.500	60	52.481.023	70	53.733.221	70	53.733.221	Disperindag KUKM
Sasaran 7 : Meningkatnya usaha pariwisata		**Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten**	3,93%	4,76%		5,59%		6,41%		7,24%		8,07%		8,07%		
54	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD (%)	3,44	5,00	1.407.120.000	6,00	1.406.383.473	7,00	1.441.585.251	8,00	1.476.168.881	9,00	1.511.390.271	9,00	1.511.390.271	Disparbud
55	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	5,00	5,00	322.000.000	5,00	326.408.180	5,00	334.578.177	5,00	342.604.707	5,00	350.779.256	5,00	350.779.256	Disparbud
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar (%)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
		Tingkat huniaan akomodasi (%)	6,5	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pandaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	n/a		0	100,00	5.000.000	100,00	5.125.150	100,00	5.248.102	100,00	5.373.322	100,00	5.373.322	Dishub
57	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	n/a	100	1.112.578.000	100	1.127.809.193	100	1.156.038.257	100	1.183.771.615	100	1.212.016.405	100	1.212.016.405	Disparbud
58	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%)	100	100	150.000.000	100	152.053.500	100	155.859.399	100	159.598.466	100	163.406.485	100	163.406.485	Disperindag KUKM
59	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor (%)	15,00	17,00	180.000.000	19,00	182.464.200	21,00	187.031.279	23,00	191.518.159	25,00	196.087.783	25,00	196.087.783	Disperindag KUKM
60	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja (%)	10,00	12,00	3.196.380.000	15,00	3.140.138.442	18,00	3.218.736.107	20,00	3.295.953.587	22,00	3.374.595.039	22,00	3.374.595.039	Disperindag KUKM



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sasaran 8 : Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan		**Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB**	12,61%	13,50%		14,00 %		15,00%		15,50%		16,00%		16,00%		
61	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39.200	52.000	322.573.000	59.000	326.989.024	67.000	335.173.560	74.500	343.214.373	82.000	351.403.468	82.000	351.403.468	Dinas PMPTSPTK
62	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100	100	18.960.000	100	19.219.562	100	19.700.628	100	20.173.246	100	20.654.580	100	20.654.580	Dinas PMPTSPTK
63	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi (%)	n/a	55,73	1.490.000.000	60,66	1.510.398.100	63,94	1.548.203.364	70,50	1.585.344.763	73,78	1.623.171.089	73,78	1.623.171.089	Dishub
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten (%)	30,54	30,69	1.680.000.000	30,77	1.697.999.200	30,85	1.740.500.120	30,92	1.782.254.718	31,00	1.824.779.315	31,00	1.824.779.315	Dishub
Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan																
Tujuan 5 : Meningkatkan aktualisasi nilai budaya		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	n/a	40,00		44,00		48,00		52,00		55,00		55,00		
Sasaran 9 : Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial		**Indeks Ketahanan Sosial**	0,6817	0,6900		0,7000		0,7100		0,7150		0,7150		0,7150		
65	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan (%)	n/a	100	134.505.667	100	136.347.049	100	139.759.816	100	143.112.654	100	146.527.322	100	146.527.322	Badan Kesbangpol
66	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (%)	100	100	145.000.000	100	146.985.050	100	150.664.086	100	154.278.517	100	157.959.603	100	157.959.603	Disparbud
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	620.400.500	0,00	673.893.783	0,00	690.761.344	0,00	707.332.709	0,00	724.209.667	0,00	724.209.667	Semua Kecamatan



No	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan keagamaan		**Indeks Kesalehan Sosial**	n/a	63,00	39.505.667	65,15		67,30		70,00		75,00		75,00		
Sasaran 10 : Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan		**Angka Kriminalitas**	146 Kasus	130 Kasus		115 Kasus		105 Kasus		95 Kaus		85 Kaus		85 Kasus		
68	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	n/a	1,00	669.698.582	1,00	755.866.756	1,00	774.786.100	1,00	793.373.219	1,00	812.303.104	1,00	812.303.104	Semua Kecamatan
69	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan (%)	n/a	100	134.505.667	100	136.347.049	100	139.759.816	100	143.112.654	100	146.527.322	100	146.527.322	Badan Kesbangpol
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup																
Tujuan 7 : Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	74,28 (Baik)	63,46 (Cukup Baik)		64,80 (Cukup Baik)		66,14 (Cukup Baik)		67,48 (Cukup Baik)		68,82 (Cukup Baik)		68,82 (Cukup Baik)		
Sasaran 11 : Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan		**Indeks Kualitas Air**	50,00	52,00		54,00		56,00		58,00		60,00		60,00		
		Indeks Kualitas Udara	88,80	85,39		85,49		85,59		85,69		85,79		85,79		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,12	42,57		45,06		47,56		50,06		52,56		52,56		
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	2,59	1.980.000.000	2,59	2.007.106.200	2,59	2.057.344.068	2,59	2.106.699.752	2,59	2.156.965.608	2,59	2.156.965.608	DLH
71	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	1,38	1,38	1.760.000.000	1,38	1.784.094.400	1,38	1.828.750.283	1,38	1.872.622.002	1,38	1.917.302.763	1,38	1.917.302.763	DLH
72	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan (%)	63,64	64,00	115.000.000	64,00	116.574.350	66,00	119.492.206	68,00	122.358.824	70,00	125.278.306	70,00	125.278.306	DLH
73	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sarana Prasarana Persampahan (%)	n/a	0	0	100	50.000.000	100	51.251.500	100	52.481.023	100	53.733.221	100	53.733.221	PUTR

Sumber: BPKPD dan Bappelitbangda, 2021

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikasi program serta kerangka pendanaan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang didalamnya berisikan program-program dari organisasi perangkat daerah untuk menunjang keberhasilan Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Bab ini penting karena menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam waktu lima tahun ke depan. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 diimplementasikan dalam program perangkat daerah yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak sehingga perlu dituangkan ke dalam kebijakan umum dan program prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan kerangka pendanaan berdasarkan kemampuan pendanaan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pendanaan penunjang lainnya.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan dicerminkan oleh kapasitas riil keuangan daerah. Penyusunan program pembangunan lima tahun ke depan memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1. Hal ini dimaksudkan agar penentuntuan target dan anggaran selama lima tahun ke depan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Besarnya kapasitas riil diperoleh dari total pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan di tahun berkenaan. Kapasitas riil inilah yang akan digunakan untuk membiayai selurah belanja pemerintah daerah. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja, erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas riil keuangan daerah sehingga penguatan kapasitas riil menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Berdasarkan Tabel 7.1. target kapasitas riil daerah pada 2022 sebesar Rp.1,11 triliun dan selanjutnya terus mengalami peningkatan di tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026 masing masing sebesar Rp.1,13 triliun, Rp.1,16 triliun, Rp.1,18 triliun dan Rp1,21 triliun.



Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

No.	Kapasitas Rill / Belanja	Target (Rp)				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
KAPASITAS RIIL KEUANGAN		**1,112,949,884,500**	**1,128,152,337,000**	**1,156,326,354,000**	**1,184,011,590,000**	**1,212,206,522,000**
	BELANJA	**1,112,949,884,500**	**1,128,152,337,000**	**1,156,326,354,000**	**1,184,011,590,000**	**1,212,206,522,000**
1	**Belanja Operasi**	**738,819,011,500**	**750,434,636,000**	**755,928,563,000**	**749,708,998,000**	**762,931,694,000**
2	**Belanja Modal**	**214,534,373,000**	**216,669,841,000**	**237,775,758,000**	**269,983,484,000**	**283,135,655,000**
3	**Belanja Tidak Terduga**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
4	**Belanja Transfer**	**156,596,500,000**	**158,047,860,000**	**159,622,033,000**	**161,319,108,000**	**163,139,173,000**
4.a.	Belanja Bagi Hasil	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
4.b.	Belanja Bantuan Keuangan	155,096,500,000	156,547,860,000	158,122,033,000	159,819,108,000	161,639,173,000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berbasis permasalahan serta isu strategis daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan SDGs, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2022-2026 yang merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan, dan unsur pemerintahan umum pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada Tabel 7.2. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



Tabel 7.2.
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Program Pada Semua OPD				**555.695.238.577**		**563.114.706.393**		**577.209.467.494**		**591.056.722.619**		**605.159.336.021**		**605.159.336.021**	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91	63,03	555.695.238.577	70,28	563.114.706.393	70,53	577.209.467.494	71,51	591.056.722.619	72,31	605.159.336.021	72,31	605.159.336.021	Semua OPD
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	79,35	83,00		85,00		88,00		91,00		95,00		95,00		Semua OPD
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**289.888.965.904**		**293.223.320.848**		**269.900.125.568**		**307.649.148.580**		**314.930.007.266**		**314.930.007.266**	
1	**01**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**				**52.720.674.000**		**52.842.420.027**		**49.165.065.800**		**55.464.485.729**		**56.787.868.358**		**56.787.868.358**	
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (%)	95,14	100,00	52.299.149.000	100,00	52.415.124.350	100,00	48.727.074.912	100,00	55.015.987.439	100,00	56.328.668.900	100,00	56.328.668.900	Disdikpora
				Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (%)	93,96	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	98,42	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar (%)	100	100,00	96.000.000	100,00	97.314.240	100,00	99.750.015	100,00	102.143.018	100,00	104.580.151	100,00	104.580.151	Disdikpora
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum (%)	100	100,00	281.322.500	100,00	285.173.805	100,00	292.311.705	100,00	299.324.263	100,00	306.466.140	100,00	306.466.140	Disdikpora
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat			0		0		0		0		0		0	Disdikpora
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah (%)	100,00	100,00	44.202.500	100,00	44.807.632	100,00	45.929.167	100,00	47.031.008	100,00	48.153.168	100,00	48.153.168	Disdikpora
1	**02**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**				**138.085.352.000**		**139.975.740.469**		**122.879.333.253**		**146.921.402.458**		**150.426.947.120**		**150.426.947.120**	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan(%)	81,00	100,00	110.230.872.000	100,00	111.639.932.638	100,00	99.436.783.152	100,00	117.184.520.579	100,00	119.982.929.240	100,00	119.982.929.240	Dinkes
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan(%)	79,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	63,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	76,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	93,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	93,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	92,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	93,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Utama	27.369.146.000	Utama	27.743.829.609	Utama	22.838.257.664	Utama	29.120.491.465	Utama	29.815.306.392	Utama	29.815.306.392	RSUD K.H. Hayyung
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	28/100.000 Penduduk	31/100.000 Penduduk	0	36/100.000 Penduduk	80.000.000	36/100.000 Penduduk	80.000.000	45/100.000 Penduduk	80.000.000	45/100.000 Penduduk	80.000.000	45/100.000 Penduduk	80.000.000	Dinkes
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Peersentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (%)	100,00	100,00	485.334.000	100,00	491.978.222	100,00	504.292.437	100,00	516.390.413	100,00	528.711.488	100,00	528.711.488	Dinkes
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	N/A		0	40,00	20.000.000	30,00	20.000.000	20,00	20.000.000	10,00	20.000.000	10,00	20.000.000	Dinkes



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**03**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**83.897.730.845**		**85.012.065.781**		**82.077.342.786**		**89.106.353.240**		**91.172.780.829**		**91.172.780.829**	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (%)	87	88,00	11.226.027.900	90,00	11.379.712.222	92,00	11.664.546.419	95,00	11.944.378.887	99,00	12.229.371.768	99,00	12.229.371.768	Dis PUTR
				Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (%)	29,83	34,00		38,00		45,00		50,00		55,00		55,00		
				Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1,74	1,80		1,85		1,92		1,98		2,20		2,20		
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	48,3	100,00	12.204.663.400	100,00	12.371.745.242	100,00	12.681.410.025	100,00	12.985.637.052	100,00	13.295.474.352	100,00	13.295.474.352	Dis PUTR



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan (%)	n.a		0	100,00	50.000.000	100,00	51.251.500	100,00	52.481.023	100,00	53.733.221	100,00	53.733.221	Dis PUTR
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	39,62	100,00	8.953.229.550	100,00	9.075.799.263	100,00	9.302.966.518	100,00	9.526.144.685	100,00	9.753.438.497	100,00	9.753.438.497	Dis PUTR
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat (%)	95,00	95,55	3.753.251.200	96,45	3.804.633.209	96,88	3.899.863.178	97,22	3.993.420.896	97,43	4.088.703.918	97,43	4.088.703.918	Dis PUTR
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Pemukiman terbangun pada Kawasan Strategis (%)	n.a		0	5,00	50.000.000	10,00	51.251.500	15,00	52.481.023	20,00	53.733.221	20,00	53.733.221	Dis PUTR
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan IMB (%)	80,00	83,00	3.166.973.450	85,00	3.210.329.317	88,00	3.290.683.859	90,00	3.369.627.365	95,00	3.450.026.674	95,00	3.450.026.674	Dis PUTR
				Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah (%)	60,00	60,92		70,11		81,61		88,51		100,00		100,00		
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya (%)	58,00	58,73	736.220.000	69,84	746.298.852	82,54	764.978.712	92,06	783.330.551	100,00	802.020.818	100,00	802.020.818	Dis PUTR
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten (%)	69,71	71,430 51966	42.161.685.345	72,31	42.604.653.818	73,19	38.608.473.302	74,09	44.594.665.577	75,00	45.599.044.298	75,00	45.599.044.298	Dis PUTR



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Proporsi panjang jalan desa yang terbangun (%)	70	80		85,00		85,00		90,00		95,00		95,00		
				Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten (%)	97,88	98		98,50		99,00		99,50		100,00		100,00		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	19,40	21,11	714.680.000	22,02	724.463.969	22,97	742.597.302	23,97	760.412.212	25,00	778.555.647	25,00	778.555.647	Dis PUTR
				Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	0,00	5,00		10,00		12,00		15,00		15,00		15,00		
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR (%)	95,00	96,00	981.000.000	97,00	994.429.890	98,00	1.019.320.470	99,00	1.043.773.968	100,00	1.068.678.415	100,00	1.068.678.415	Dis PUTR
1	**04**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**6.167.762.600**		**6.252.199.270**		**6.408.691.818**		**6.562.436.334**		**6.719.016.065**		**6.719.016.065**	
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	n.a	100,00	600.000.000	100,00	608.214.000	100,00	623.437.596	100,00	638.393.864	100,00	653.625.942	100,00	653.625.942	DPKP
				Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh (%)	2,00	2,11	940.400.000	3,16	953.274.076	4,22	977.134.526	5,27	1.000.575.983	6,33	1.024.449.726	6,33	1.024.449.726	DPKP
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1,58	3,72	2.017.036.000	5,91	2.044.649.223	8,14	2.095.826.793	10,40	2.146.105.678	12,66	2.197.311.759	12,66	2.197.311.759	DPKP
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	N/A	0,58	2.590.000.000	1,41	2.625.457.100	3,42	2.691.172.291	8,27	2.755.733.514	20,00	2.821.485.316	20,00	2.821.485.316	DPKP
1	04	06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rekemondasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan (%)	N/A	100,00	20.326.600	100,00	20.604.871	100,00	21.120.611	100,00	21.627.295	100,00	22.143.322	100,00	22.143.322	DPKP
1	**05**		**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**1.697.446.459**		**1.720.684.501**		**1.763.753.234**		**1.806.065.674**		**1.849.158.401**		**1.849.158.401**	
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	404.829.626	100	410.371.744	100	420.643.348	100	430.734.582	100	441.011.909	100	441.011.909	Satpol PP, Damkar



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (%)	91,1	100,00	223.601.333	100,00	226.662.435	100,00	232.335.796	100,00	237.909.532	100,00	243.586.053	100,00	243.586.053	Satpol PP, Damkar
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,95	11,26		10,93		10,61		10,30		10,00		10,00		
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasiraan bencana (%)	100	100	1.069.015.500	100	1.083.650.322	100	1.110.774.090	100	1.137.421.560	100	1.164.560.439	100	1.164.560.439	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**06**		**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**				**7.320.000.000**		**7.420.210.800**		**7.605.938.676**		**7.788.405.145**		**7.974.236.492**		**7.974.236.492**	
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Diberdayakan (%)	17,74	32,67	355.000.000	37,59	359.859.950	42,40	368.867.245	44,81	377.716.370	50,00	386.728.682	50,00	386.728.682	Dinsos
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	18,99	100,00	6.385.000.000	100,00	6.472.410.650	100,00	6.634.415.089	100,00	6.793.574.707	100,00	6.955.669.399	100,00	6.955.669.399	Dinsos
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	31,99	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	17,35	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	17,36	18,36		21,32		24,50		25,92		28,22		28,22		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi (%)	30,11	35,15	260.000.000	38,12	263.559.400	42,15	270.156.292	45,5	276.637.341	50,00	283.237.908	50,00	283.237.908	Dinsos



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	300.000.000	100,00	304.107.000	100,00	311.718.798	100,00	319.196.932	100,00	326.812.971	100,00	326.812.971	Dinsos
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola (unit)	1	1	20.000.000	1	20.273.800	1	20.781.253	1	21.279.795	1	21.787.531	1	21.787.531	Dinsos
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**31.013.933.399**		**31.438.514.147**		**32.225.420.156**		**32.998.507.986**		**33.785.852.386**		**33.785.852.386**	
2	**07**		**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**				**849.777.000**		**861.410.447**		**882.971.551**		**904.154.038**		**925.727.153**		**925.727.153**	
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang mengacu pada RTK (%)	N/A	70,00	20.000.000	73,00	20.273.800	75,00	20.781.253	77,00	21.279.795	80,00	21.787.531	80,00	21.787.531	Dinas PMPTSPTK
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	0,40	0,40	580.000.000	1,17	587.940.200	2,00	602.656.343	3,42	617.114.069	5,85	631.838.411	5,85	631.838.411	Dinas PMPTSPTK
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	12,50	19,84	166.000.000	25,00	168.272.540	31,50	172.484.402	39,69	176.622.302	50,00	180.836.511	50,00	180.836.511	Dinas PMPTSPTK
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak (%)	0,30	0,60	83.777.000	0,90	84.923.907	1,17	87.049.553	1,50	89.137.871	1,80	91.264.701	1,80	91.264.701	Dinas PMPTSPTK



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	**08**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**317.760.000**		**322.110.134**		**330.172.551**		**338.093.391**		**346.160.299**		**346.160.299**	
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	0,12	0,25	135.000.000	0,25	136.848.150	0,26	140.273.459	0,27	143.638.619	0,28	147.065.837	0,28	147.065.837	DP3AP2KB
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	39 / 100.000 penduduk perempuan	33 / 100.000 penduduk perempuan	35.000.000	28 / 100.000 penduduk perempuan	35.479.150	23 / 100.000 penduduk perempuan	36.367.193	18 / 100.000 penduduk perempuan	37.239.642	12 / 100.000 penduduk perempuan	38.128.180	12 / 100.000 penduduk perempuan	38.128.180	DP3AP2KB
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi (%)	0,03	0,05	35.000.000	0,06	35.479.150	0,08	36.367.193	0,09	37.239.642	0,10	38.128.180	0,10	38.128.180	DP3AP2KB
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak (%)	0,18	0,18	20.000.000	0,36	20.273.800	0,54	20.781.253	0,72	21.279.795	0,88	21.787.531	0,88	21.787.531	DP3AP2KB
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%)	50	50	32.760.000	52,50	33.208.484	55,00	34.039.693	57,50	34.856.305	60,00	35.687.976	60,00	35.687.976	DP3AP2KB
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)	100,00	100,00	60.000.000	100	60.821.400	100	62.343.760	100	63.839.386	100	65.362.594	100	65.362.594	DP3AP2KB



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	**09**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**				**1.210.000.000**		**1.226.564.900**		**1.257.265.819**		**1.287.427.626**		**1.318.145.650**		**1.318.145.650**	
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase desa rawan pangan yang ditangani (%)	37,5	50	175.000.000	36,36	177.395.750	75	181.835.966	87,5	186.198.210	100	190.640.900	100	190.640.900	Distan KP
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan (%)	9,09	27,27	935.000.000	36,36	947.800.150	45,45	971.523.588	54,55	994.830.439	63,64	1.018.567.093	63,64	1.018.567.093	Distan KP
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	47,5	52,5	80.000.000	57,5	81.095.200	62,5	83.125.013	67,5	85.119.182	72,50	87.150.126	72,50	87.150.126	Distan KP
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	80,00	80,00	20.000.000	80,00	20.273.800	80,00	20.781.253	80,00	21.279.795	80,00	21.787.531	80,00	21.787.531	Distan KP
2	**10**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**				**2.616.315.550**		**2.652.132.910**		**2.718.515.797**		**2.783.732.991**		**2.850.152.860**		**2.850.152.860**	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	N/A	0	0	50,00	15.000.000	70,00	15.375.450	80,00	15.744.307	90,00	16.119.966	90,00	16.119.966	Dis PUTR



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
				Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)	N/A	0		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
				Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal (%)	N/A	0		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	N/A	60	15.000.000	70,00	15.205.350	80,00	15.585.940	90,00	15.959.847	100,00	16.340.649	100,00	16.340.649	Dis PUTR
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan (%)	100	100	2.451.315.550	100,00	2.454.874.060	100,00	2.516.319.558	100,00	2.576.686.064	100,00	2.638.165.793	100,00	2.638.165.793	Dis PUTR
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%)	100	100	20.000.000	40,00	20.273.800	60,00	20.781.253	80,00	21.279.795	100,00	21.787.531	100,00	21.787.531	Dis PUTR
2	10	07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase luas lahan Ulayat yang di tetapkan (%)	N/A	0	0	40,00	15.000.000	60,00	15.375.450	70,00	15.744.307	80,00	16.119.966	80,00	16.119.966	Dis PUTR
2	10	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya (%)	N/A	40	75.000.000	50,00	76.026.750	60,00	77.929.700	70,00	79.799.233	80,00	81.703.243	80,00	81.703.243	Dis PUTR
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi izin membuka tanah untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan (%)	N/A	100,00	15.000.000	100,00	15.205.350	100,00	15.585.940	100,00	15.959.847	100,00	16.340.649	100,00	16.340.649	Dis PUTR



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah (%)	N/A	30,00	40.000.000	40,00	40.547.600	60,00	41.562.506	80,00	42.559.591	90,00	43.575.063	90,00	43.575.063	Dis PUTR
2	**11**		**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**				**7.375.000.000**		**7.475.963.750**		**7.663.087.123**		**7.846.924.583**		**8.034.152.203**		**8.034.152.203**	
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (%)	0,00	12,50	350.000.000	12,50	354.791.500	12,50	363.671.931	25,00	372.396.421	37,50	381.281.799	37,50	381.281.799	DLH
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	2,59	1.980.000.000	2,59	2.007.106.200	2,59	2.057.344.068	2,59	2.106.699.752	2,59	2.156.965.608	2,59	2.156.965.608	DLH
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	1,38	1,38	1.760.000.000	1,38	1.784.094.400	1,38	1.828.750.283	1,38	1.872.622.002	1,38	1.917.302.763	1,38	1.917.302.763	DLH
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Lembaga/Perusahaan penghasil Limbah B3 yang Diawasi (%)	100	100	110.000.000	100	111.505.900	100	114.296.893	100	117.038.875	100	119.831.423	100	119.831.423	DLH



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	63,64	64,00	115.000.000	64,00	116.574.350	66,00	119.492.206	68,00	122.358.824	70,00	125.278.306	70,00	125.278.306	DLH
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH, yang diakui keberadaannya (%)	N/A	1,14	30.000.000	2,27	30.410.700	3,41	31.171.880	4,55	31.919.693	5,68	32.681.297	5,68	32.681.297	DLH
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat (%)	N/A	23,08	60.000.000	23,08	60.821.400	23,08	62.343.760	23,08	63.839.386	23,08	65.362.594	23,08	65.362.594	DLH
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat / Garing Dunia Usaha / Garing Dunia Pendidikan yang Berprestasi (%)	20,00	33,33	15.000.000	33,33	15.205.350	33,33	15.585.940	33,33	15.959.847	33,33	16.340.649	33,33	16.340.649	DLH
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan (%)	80,00	100,00	35.000.000	100,00	35.479.150	100,00	36.367.193	100,00	37.239.642	100,00	38.128.180	100,00	38.128.180	DLH
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	1,30	1,30	2.920.000.000	1,30	2.959.974.800	1,30	3.034.062.969	1,30	3.106.850.140	1,30	3.180.979.584	1,30	3.180.979.584	DLH



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	**12**		**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**				**510.000.000**		**516.981.900**		**529.921.957**		**542.634.785**		**555.582.051**		**555.582.051**	
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el (%)	96,00	97,00	274.000.000	98,00	277.751.060	99,00	284.703.169	100,00	291.533.198	100,00	298.489.180	100,00	298.489.180	Disdukcapil
				Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	30,00	32,00		35,00		36,00		37,00		40,00		40,00		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (%)	93,75	94,00	140.000.000	94,50	141.916.600	95,00	145.468.772	95,50	148.958.568	96,00	152.512.720	96,00	152.512.720	Disdukcapil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	46,15	76,92	81.000.000	88,46	82.108.890	100,00	84.164.076	100,00	86.183.172	100,00	88.239.502	100,00	88.239.502	Disdukcapil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan (%)	100	100,00	15.000.000	100,00	15.205.350	100,00	15.585.940	100,00	15.959.847	100,00	16.340.649	100,00	16.340.649	Disdukcapil
2	**13**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**1.790.000.000**		**1.814.505.100**		**1.859.922.163**		**1.904.541.695**		**1.949.984.060**		**1.949.984.060**	
2	13	02	Program Penataan Desa	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi (%)	100	100,00	45.000.000	100,00	45.616.050	100,00	46.757.820	100,00	47.879.540	100,00	49.021.946	100,00	49.021.946	DISPMD
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa (%)	3,70	3,70	240.000.000	3,70	243.285.600	3,70	249.375.039	2,46	255.357.546	2,46	261.450.377	16,05	261.450.377	DISPMD



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100	100,00	695.000.000	100,00	704.514.550	100,00	722.148.549	100,00	739.472.893	100,00	757.116.716	100,00	757.116.716	DISPMD
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33	33,33	810.000.000	33,33	821.088.900	33,33	841.640.755	33,33	861.831.717	33,33	882.395.022	33,33	882.395.022	DISPMD
2	**14**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				**4.019.681.000**		**4.074.710.433**		**4.176.700.435**		**4.276.899.478**		**4.378.946.300**		**4.378.946.300**	
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,09	2,08	20.000.000	2,07	20.273.800	2,06	20.781.253	2,05	21.279.795	2,04	21.787.531	2,04	21.787.531	DP3AP2KB
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	78,02	78,45	3.000.881.000	78,80	3.041.963.061	80,00	3.118.103.396	80,35	3.192.906.697	80,50	3.269.089.451	80,50	3.269.089.451	DP3AP2KB
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) (%)			998.800.000		1.012.473.572		1.037.815.786		1.062.712.986		1.088.069.318		1.088.069.318	DP3AP2KB
				BKB	0,7386	0,74		0,74		0,74		0,74		0,74		0,74		
				BKR	0,6136	0,61		0,61		0,61		0,61		0,61		0,61		
				BKL	0,6156	0,62		0,62		0,62		0,62		0,62		0,62		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				PIK R	0,5119	0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		
				UPPKS	0,909	0,91		0,91		0,91		0,91		0,91		0,91		
2	**15**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**				**3.170.000.000**		**3.213.397.300**		**3.293.828.634**		**3.372.847.583**		**3.453.323.727**		**3.453.323.727**	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Lalu lintas Kabupaten (%)	30,54	30,69	1.680.000.000	30,77	1.697.999.200	30,85	1.740.500.120	30,92	1.782.254.718	31,00	1.824.779.315	31,00	1.824.779.315	Dishub
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi (%)	n/a	55,73	1.490.000.000	60,66	1.510.398.100	63,94	1.548.203.364	70,50	1.585.344.763	73,78	1.623.171.089	73,78	1.623.171.089	Dishub
2	15	04	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pandaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	n/a		0		5.000.000	100,00	5.125.150	100,00	5.248.102	100,00	5.373.322	100,00	5.373.322	Dishub
2	**16**		**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**				**4.353.341.379**		**4.412.938.622**		**4.523.394.476**		**4.631.910.710**		**4.742.428.099**		**4.742.428.099**	
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas (%)	N/A	50,00	1.000.187.750	100,00	1.013.880.320	100,00	1.039.257.745	100,00	1.064.189.538	100,00	1.089.581.100	100,00	1.089.581.100	Diskominfo SP
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi (%)	N/A	50,00	3.353.153.629	100,00	3.399.058.302	100,00	3.484.136.731	100,00	3.567.721.172	100,00	3.652.846.999	100,00	3.652.846.999	Diskominfo SP



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	**17**		**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**				**1.675.000.000**		**1.697.930.750**		**1.740.429.957**		**1.782.182.871**		**1.824.705.755**		**1.824.705.755**	
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (%)	100,00	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	10.250.300	100,00	10.496.205	100,00	10.746.644	100,00	10.746.644	Disperindag KUKM
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	100,00	100,00	120.000.000	100,00	121.642.800	100,00	124.687.519	100,00	127.678.773	100,00	130.725.188	100,00	130.725.188	Disperindag KUKM
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi KSP/USP yang sehat (%)	100,00	100,00	125.000.000	100,00	126.711.250	100,00	129.882.833	100,00	132.998.722	100,00	136.172.071	100,00	136.172.071	Disperindag KUKM
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan (%)	100,00	100,00	170.000.000	100,00	172.327.300	100,00	176.640.652	100,00	180.878.262	100,00	185.194.017	100,00	185.194.017	Disperindag KUKM
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan (%)	100,00	100,00	185.000.000	100,00	187.532.650	100,00	192.226.592	100,00	196.838.108	100,00	201.534.665	100,00	201.534.665	Disperindag KUKM
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan (%)	100,00	100,00	600.000.000	100,00	598.214.000	100,00	613.187.296	100,00	627.897.660	100,00	642.879.298	100,00	642.879.298	Disperindag KUKM
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100,00	100,00	475.000.000	100,00	481.502.750	100,00	493.554.764	100,00	505.395.143	100,00	517.453.871	100,00	517.453.871	Disperindag KUKM



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	**18**		**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				**680.983.891**		**690.306.560**		**707.584.934**		**724.559.896**		**741.847.895**		**741.847.895**	
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah (%)	30	40	50.000.000	50	50.684.500	60	51.953.133	70	53.199.489	80	54.468.828	80	54.468.828	Dinas PMPTSPTK
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	16	20	251.850.891	28	255.298.730	32	261.688.857	36	267.966.773	36	274.360.460	0,15	274.360.460	Dinas PMPTSPTK
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan(%)	100,00	100,00	37.600.000	100,00	38.114.744	100,00	39.068.756	100,00	40.006.015	100,00	40.960.559	100,00	40.960.559	Dinas PMPTSPTK
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39.200	52.000	322.573.000	59.000	326.989.024	67.000	335.173.560	74.500	343.214.373	82.000	351.403.468	82.000	351.403.468	Dinas PMPTSPTK
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100,00	100,00	18.960.000	100,00	19.219.562	100,00	19.700.628	100,00	20.173.246	100,00	20.654.580	100,00	20.654.580	Dinas PMPTSPTK
2	**19**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**				**463.845.500**		**470.195.545**		**481.964.539**		**493.526.869**		**505.302.420**		**505.302.420**	
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	n/a	4,20	200.000.000	8,83	202.738.000	18,55	207.812.532	30,01	212.797.955	82,00	217.875.314	82,00	217.875.314	Disdikpora



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	38,00	40,00	165.200.000	50,00	167.461.588	60,00	171.653.152	70,00	175.771.111	80,00	179.965.009	80,00	179.965.009	Disdikpora
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya (%)	n/a	4,06	98.645.500	4,26	99.995.957	4,51	102.498.856	4,75	104.957.803	5,00	107.462.096	5,00	107.462.096	Disdikpora
2	**20**		**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**				**343.328.076**		**348.028.237**		**356.739.384**		**365.297.562**		**374.013.562**		**374.013.562**	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	343.328.076	100	348.028.237	100	356.739.384	100	365.297.562	100	374.013.562	100	374.013.562	Diskominfo SP
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100		100		100		100		100		100		
2	**21**		**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**				**344.094.253**		**348.804.903**		**357.535.490**		**366.112.766**		**374.848.217**		**374.848.217**	
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase keamanan informasi pemerintah (%)	n/a	100,00	344.094.253	100,00	348.804.903	100,00	357.535.490	100,00	366.112.766	100,00	374.848.217	100,00	374.848.217	Diskominfo SP



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	**22**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**888.000.000**		**900.156.720**		**922.687.643**		**944.822.919**		**967.366.394**		**967.366.394**	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (%)	100,00	100,00	145.000.000	100,00	146.985.050	100,00	150.664.086	100,00	154.278.517	100,00	157.959.603	100,00	157.959.603	Disparbud
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pembinaan kesenian Tradisional (%)	n.a	20,00	0	30,00	10.000.000	40,00	10.250.300	50,00	10.496.205	60,00	10.746.644	60,00	10.746.644	Disparbud
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pembinaan Sejarah lokal (%)	n.a	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	10.250.300	100,00	10.496.205	100,00	10.746.644	100,00	10.746.644	Disparbud
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100,00	100,00	133.000.000	100,00	134.820.770	100,00	138.195.334	100,00	141.510.640	100,00	144.887.084	100,00	144.887.084	Disparbud
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah museum yang dikelola secara terpadu (unit)	1	1	610.000.000	1	598.350.900	1	613.327.623	1	628.041.353	1	643.026.419	1	643.026.419	Disparbud
2	**23**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**				**308.331.500**		**312.552.558**		**320.375.749**		**328.061.563**		**335.889.112**		**335.889.112**	
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	3,30	4,30	286.157.750	4,40	290.075.250	4,50	297.335.833	4,60	304.468.920	4,70	311.733.548	4,70	311.733.548	DPK
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (%)	100,00	17,00	22.173.750	33,00	22.477.309	50,00	23.039.916	83,00	23.592.643	100,00	24.155.564	100,00	24.155.564	DPK



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	**24**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**				**98.475.250**		**99.823.376**		**102.321.955**		**104.776.659**		**107.276.630**		**107.276.630**	
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	90,00	90,00	42.357.750	90,00	42.937.628	91,60	44.012.356	91,60	45.068.213	95,00	46.143.540	95,00	46.143.540	DPK
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	95,00	95,00	33.943.750	95,00	34.408.440	95,00	35.269.683	95,00	36.115.803	97,50	36.977.526	100,00	36.977.526	DPK
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Arsip dapat Diakses yang Sifatnya Tertutup/Rahasia (%)	10,00	10,00	22.173.750	10,00	22.477.309	10,00	23.039.916	10,00	23.592.643	10,00	24.155.564	10,00	24.155.564	DPK
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**25.166.923.620**		**25.511.458.804**		**26.150.010.618**		**26.777.349.373**		**27.416.256.929**		**27.416.256.929**	
3	**25**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				**6.674.406.100**		**6.765.778.720**		**6.935.126.161**		**7.101.499.837**		**7.270.941.624**		**7.270.941.624**	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	18729,20	21846	4.024.406.100	23593	4.079.500.220	25481	4.181.610.110	27519	4.281.926.937	29721	4.384.093.713	29721	4.384.093.713	Disper



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	837,36	976,72	1.380.000.000	1054,9	1.398.892.200	1139,3	1.433.906.472	1230,4	1.468.305.888	1328,8	1.503.339.667	1328,8	1.503.339.667	Disper
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan usaha perikanan budidaya dalam kabupaten terhadap peraturan perundang-undangan (%)	5,00	5,27	20.000.000	10,54	20.273.800	15,81	20.781.253	21,07	21.279.795	26,34	21.787.531	26,34	21.787.531	Disper
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	160,84	186,57	1.250.000.000	201,49	1.267.112.500	231,34	1.298.828.326	249,84	1.329.987.217	269,82	1.361.720.712	269,82	1.361.720.712	Disper
3	**26**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**				**2.841.698.000**		**2.880.600.846**		**2.952.702.285**		**3.023.537.613**		**3.095.679.220**		**3.095.679.220**	
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD (%)	3,44	5,00	1.407.120.000	6,00	1.406.383.473	7,00	1.441.585.251	8,00	1.476.168.881	9,00	1.511.390.271	9,00	1.511.390.271	Disparbud
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	5,00	5,00	322.000.000	5,00	326.408.180	5,00	334.578.177	5,00	342.604.707	5,00	350.779.256	5,00	350.779.256	Disparbud
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar (%)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
				Tingkat huniaan akomodasi (%)	6,5	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif (%)	n/a	16,66	0	33,34	20.000.000	66,68	20.500.600	83,35	20.992.409	100	21.493.288	0	21.493.288	Disparbud
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan (%)	n.a	100,00	1.112.578.000	100,00	1.127.809.193	100,00	1.156.038.257	100,00	1.183.771.615	100,00	1.212.016.405	100,00	1.212.016.405	Disparbud
3	**27**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				**11.054.439.520**		**11.205.774.797**		**11.486.255.340**		**11.761.810.606**		**12.042.447.407**		**12.042.447.407**	
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Sarana pertanian (%)	100	100	3.976.926.892	100	4.031.371.021	100	4.132.276.238	100	4.231.409.545	100	4.332.370.976	100	4.332.370.976	Distan KP
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian (%)	100	100	6.299.233.788	100	6.385.470.299	100	6.545.298.620	100	6.702.320.334	100	6.862.237.697	100	6.862.237.697	Distan KP
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular (%)	5,85	5,65	419.528.840	5,28	425.272.190	5,02	435.916.753	4,76	446.374.396	4,53	457.024.889	4,53	457.024.889	Distan KP
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian (%)	23,15	21,99	143.750.000	20,89	145.717.938	19,85	149.365.257	18,86	152.948.530	17,91	156.597.882	17,91	156.597.882	Distan KP



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase fasiltasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian (%)	100,00	5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	0	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	15,62	19,17	215.000.000	22,72	217.943.350	26,27	223.398.472	29,82	228.757.801	33,37	234.215.963	33,37	234.215.963	Distan KP
3	**28**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas Taman Hutan Raya (Tahura) yang Dikelola			0		0		0		0		0		0	DLH
3	**29**		**Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
3	**30**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**				**1.400.000.000**		**1.419.166.000**		**1.454.687.725**		**1.489.585.684**		**1.525.127.198**		**1.525.127.198**	
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan (%)	100,00	100,00	100.000.000	100,00	101.369.000	100,00	103.906.266	100,00	106.398.977	100,00	108.937.657	100,00	108.937.657	Disperindag KUKM
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%)	100,00	100,00	150.000.000	100,00	152.053.500	100,00	155.859.399	100,00	159.598.466	100,00	163.406.485	100,00	163.406.485	Disperindag KUKM
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	100,00	100,00	450.000.000	100,00	456.160.500	100,00	467.578.197	100,00	478.795.398	100,00	490.219.456	100,00	490.219.456	Disperindag KUKM



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor (%)	15,00	17,00	180.000.000	19,00	182.464.200	21,00	187.031.279	23,00	191.518.159	25,00	196.087.783	25,00	196.087.783	Disperindag KUKM
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur yang ditera (%)	100,00	100,00	420.000.000	100,00	425.749.800	100,00	436.406.317	100,00	446.875.705	100,00	457.538.159	100,00	457.538.159	Disperindag KUKM
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipasarkan (%)	25,00	28,00	100.000.000	33,00	101.369.000	37,00	103.906.266	39,00	106.398.977	42,00	108.937.657	42,00	108.937.657	Disperindag KUKM
3	**31**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				**3.196.380.000**		**3.240.138.442**		**3.321.239.107**		**3.400.915.634**		**3.482.061.481**		**3.482.061.481**	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja (%)	10,00	12,00	3.196.380.000	15,00	3.140.138.442	18,00	3.218.736.107	20,00	3.295.953.587	22,00	3.374.595.039	22,00	3.374.595.039	Disperindag KUKM
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	15,00	20,00	0	25,00	50.000.000	30,00	51.251.500	35,00	52.481.023	40,00	53.733.221	40,00	53.733.221	Disperindag KUKM
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional (%)	30,00	33,00	0	40,00	50.000.000	45,00	51.251.500	60,00	52.481.023	70,00	53.733.221	70,00	53.733.221	Disperindag KUKM
3	**32**		**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**22.955.026.188**		**23.269.280.497**		**23.851.710.587**		**24.423.913.124**		**25.006.667.691**		**25.006.667.691**	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	**01**		**Sekretariat Daerah**				**6.013.423.000**		**6.095.746.761**		**6.248.323.302**		**6.398.220.578**		**6.550.882.121**		**6.550.882.121**	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100,00	100,00	4.483.938.800	100,00	4.545.323.922	100,00	4.659.093.380	100,00	4.770.865.030	100,00	4.884.697.870	100,00	4.884.697.870	Setda
				Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100,00	100,00	1.529.484.200	100,00	1.550.422.839	100,00	1.589.229.922	100,00	1.627.355.548	100,00	1.666.184.252	100,00	1.666.184.252	Setda
4	**02**		**Sekretariat DPRD**				**16.941.603.188**		**17.173.533.736**		**17.603.387.285**		**18.025.692.546**		**18.455.785.570**		**18.455.785.570**	
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)	100	100	16.941.603.188	100	17.173.533.736	100	17.603.387.285	100	18.025.692.546	100	18.455.785.570	100	18.455.785.570	Setwan
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**171.385.358.543**		**173.732.017.682**		**173.079.469.090**		**182.356.537.321**		**186.711.629.764**		**186.711.629.764**	
5	**01**		**Perencanaan**				**2.282.700.000**		**3.814.343.744**		**3.909.816.768**		**3.506.271.751**		**3.592.412.044**		**3.592.412.044**	
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	75,72	80,00	980.000.000	85,00	2.493.809.781	90,00	2.556.229.840	95,00	2.120.212.273	95,00	2.173.281.186	100,00	2.173.281.186	Bappelitbangda



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	n/a	80,00	1.302.700.000	85,00	1.320.533.963	90,00	1.353.586.928	95,00	1.386.059.478	95,00	1.419.130.858	100,00	1.419.130.858	Bappelitbangda
5	**02**		**Keuangan**				**163.866.237.700**		**166.109.566.494**		**165.267.288.943**		**174.352.001.205**		**178.512.039.954**		**178.512.039.954**	
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	6,97	6,00	161.251.500.000	5,50	163.459.033.035	5,00	162.550.412.632	4,50	171.569.947.031	4,00	175.663.605.967	4,00	175.663.605.967	BPKPD
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Assets Management	ada	ada	640.000.000	ada	648.761.600	ada	665.000.103	ada	680.953.455	ada	697.201.005	ada	697.201.005	BPKPD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah (%)	78,36	84,00	1.974.737.700	87,50	2.001.771.859	90,00	2.051.876.209	93,30	2.101.100.719	95,00	2.151.232.982	95,00	2.151.232.982	BPKPD
5	**03**		**Kepegawaian**				**1.141.326.843**		**1.156.951.607**		**1.185.910.106**		**1.214.360.090**		**1.243.334.721**		**1.243.334.721**	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (%)	87,12	89,21	1.141.326.843	90,40	1.156.951.607	92,60	1.185.910.106	93,80	1.214.360.090	94,00	1.243.334.721	94,00	1.243.334.721	BKPSDM
				Persentase ASN yang berkinerja baik (%)	99,70	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	**04**		**Pendidikan dan Pelatihan**				**1.745.094.000**		**1.768.984.337**		**1.813.262.015**		**1.856.762.171**		**1.901.064.516**		**1.901.064.516**	
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Sosio-kultural dan Diklat Teknis (%)	18,96	80,25	1.745.094.000	81,00	1.768.984.337	81,50	1.813.262.015	83,00	1.856.762.171	83,75	1.901.064.516	83,75	1.901.064.516	BKPSDM



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	**05**		**Penelitian dan Pengembangan**				**2.350.000.000**		**882.171.500**		**903.191.258**		**1.427.142.105**		**1.462.778.529**		**1.462.778.529**	
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah (%)	6 Dokumen / Kajian	8 Dokumen / Kajian	2.350.000.000	8 Dokumen / Kajian	882.171.500	8 Dokumen / Kajian	903.191.258	8 Dokumen / Kajian	1.427.142.105	8 Dokumen / Kajian	1.462.778.529	8 Dokumen / Kajian	1.462.778.529	Bappelitbangda
5	**06**		**Penghubung**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**3.748.220.000**		**3.799.533.132**		**3.894.635.446**		**3.988.067.750**		**4.083.223.047**		**4.083.223.047**	
6	**01**		**Inspektorat Daerah**				**3.748.220.000**		**3.799.533.132**		**3.894.635.446**		**3.988.067.750**		**4.083.223.047**		**4.083.223.047**	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2+	3	3.274.320.000	3	3.319.145.441	3+	3.402.223.651	3+	3.483.842.997	4	3.566.967.490	4	3.566.967.490	Itda
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,8	3	473.900.000	3,2	480.387.691	3,3	492.411.795	3,4	504.224.754	3,5	516.255.556	3,5	516.255.556	Itda
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**				**11.932.749.800**		**12.284.109.145**		**12.591.580.397**		**12.893.652.410**		**13.201.294.957**		**13.201.294.957**	
7	**01**		**Kecamatan**				**11.932.749.800**		**12.284.109.145**		**12.591.580.397**		**12.893.652.410**		**13.201.294.957**		**13.201.294.957**	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	12.000.000	20 menit	72.164.280	15 menit	73.970.552	10 menit	75.745.105	8 menit	77.552.384	8 menit	77.552.384	Kecamatan Bontomatene
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	2.439.424.475	100,00	2.367.820.196	100,00	2.427.086.736	100,00	2.485.312.546	100,00	2.544.612.104	100,00	2.544.612.104	Kecamatan Bontomatene



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	19.600.000	1,00	49.868.324	1,00	51.116.528	1,00	52.342.814	1,00	53.591.713	1,00	53.591.713	Kecamatan Bontomatene
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	121.900.500	0,00	138.569.318	0,00	142.037.708	0,00	145.445.192	0,00	148.915.515	0,00	148.915.515	Kecamatan Bontomatene
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	429.871.000	55,00	435.755.934	60,00	446.662.905	65,00	457.378.348	70,00	468.291.395	70,00	468.291.395	Kecamatan Bontomatene
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	12.000.000	20 menit	12.164.280	15 menit	12.468.752	10 menit	12.767.877	8 menit	13.072.519	8 menit	13.072.519	Kecamatan Buki
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	31.500.000	100,00	31.931.235	100,00	32.730.474	100,00	33.515.678	100,00	34.315.362	100,00	34.315.362	Kecamatan Buki
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	8.000.000	1,00	8.109.520	1,00	8.312.501	1,00	8.511.918	1,00	8.715.013	1,00	8.715.013	Kecamatan Buki
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	38.000.000	0,00	38.520.220	0,00	39.484.381	0,00	40.431.611	0,00	41.396.310	0,00	41.396.310	Kecamatan Buki
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	45,00	50,00	14.500.000	55,00	14.698.505	60,00	15.066.409	65,00	15.427.852	70,00	15.795.960	70,00	15.795.960	Kecamatan Buki



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	10.000.000	20 menit	10.136.900	15 menit	10.390.627	10 menit	10.639.898	8 menit	10.893.766	8 menit	10.893.766	Kecamatan Bontomanai
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	10.000.000	100,00	10.136.900	100,00	10.390.627	100,00	10.639.898	100,00	10.893.766	100,00	10.893.766	Kecamatan Bontomanai
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	23.000.000	1,00	23.314.870	1,00	23.898.441	1,00	24.471.765	1,00	25.055.661	1,00	25.055.661	Kecamatan Bontomanai
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,0	0,0	5.000.000	0,0	5.068.450	0,0	5.195.313	0,0	5.319.949	0,0	5.446.883	0,0	5.446.883	Kecamatan Bontomanai
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	15.000.000	55,00	15.205.350	60,00	15.585.940	65,00	15.959.847	70,00	16.340.649	70,00	16.340.649	Kecamatan Bontomanai
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	80.000.000	20 menit	101.095.200	15 menit	103.625.613	10 menit	106.111.591	8 menit	108.643.414	8 menit	108.643.414	Kecamatan Benteng
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	4.723.085.056	100,00	4.747.744.090	100,00	4.866.580.125	100,00	4.983.329.382	100,00	5.102.231.621	100,00	5.102.231.621	Kecamatan Benteng
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	88.031.970	1,00	109.237.128	1,00	111.971.333	1,00	114.657.525	1,00	117.393.254	1,00	117.393.254	Kecamatan Benteng



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	108.000.000	0,00	109.478.520	0,00	112.218.767	0,00	114.910.896	0,00	117.652.670	0,00	117.652.670	Kecamatan Benteng
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	196.969.874	55,00	199.666.392	60,00	204.664.041	65,00	209.573.932	70,00	214.574.366	70,00	214.574.366	Kecamatan Benteng
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	27.500.000	20 menit	47.876.475	15 menit	49.074.823	10 menit	50.252.128	8 menit	51.451.144	8 menit	51.451.144	Kecamatan Bontoharu
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	1.800.903.525	100,00	1.825.557.894	100,00	1.871.251.608	100,00	1.916.142.934	100,00	1.961.862.105	100,00	1.961.862.105	Kecamatan Bontoharu
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	443.700.000	1,00	449.774.253	1,00	461.032.103	1,00	472.092.263	1,00	483.356.384	1,00	483.356.384	Kecamatan Bontoharu
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	70.000.000	0,00	70.958.300	0,00	72.734.386	0,00	74.479.284	0,00	76.256.360	0,00	76.256.360	Kecamatan Bontoharu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	145.600.000	55,00	147.593.264	60,00	151.287.523	65,00	154.916.911	70,00	158.613.229	70,00	158.613.229	Kecamatan Bontoharu
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	30.000.000	20 menit	30.410.700	15 menit	31.171.880	10 menit	31.919.693	8 menit	32.681.297	8 menit	32.681.297	Kecamatan Bontosikuyu



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	30.000.000	100,00	30.410.700	100,00	31.171.880	100,00	31.919.693	100,00	32.681.297	100,00	32.681.297	Kecamatan Bontosikuyu
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	35.000.000	1,00	35.479.150	1,00	36.367.193	1,00	37.239.642	1,00	38.128.180	1,00	38.128.180	Kecamatan Bontosikuyu
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	37.000.000	0,00	37.506.530	0,00	38.445.318	0,00	39.367.622	0,00	40.306.933	0,00	40.306.933	Kecamatan Bontosikuyu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	25.000.000	55,00	25.342.250	60,00	25.976.567	65,00	26.599.744	70,00	27.234.414	70,00	27.234.414	Kecamatan Bontosikuyu
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	112.110.000	20 menit	113.644.786	15 menit	116.489.315	10 menit	119.283.894	8 menit	122.130.007	8 menit	122.130.007	Kecamatan Takabonerate
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	113.000.000	100,00	114.546.970	100,00	117.414.081	100,00	120.230.844	100,00	123.099.552	100,00	123.099.552	Kecamatan Takabonerate
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	24.388.612	1,00	24.722.492	1,00	25.341.296	1,00	25.949.234	1,00	26.568.382	1,00	26.568.382	Kecamatan Takabonerate
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	124.500.000	0,00	126.204.405	0,00	129.363.301	0,00	132.466.727	0,00	135.627.383	0,00	135.627.383	Kecamatan Takabonerate



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	20.000.000	55,00	20.273.800	60,00	20.781.253	65,00	21.279.795	70,00	21.787.531	70,00	21.787.531	Kecamatan Takabonerate
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	0	20 menit	19.000.000	15 menit	19.475.570	10 menit	19.942.789	8 menit	20.418.624	8 menit	20.418.624	Kecamatan Pasimasunggu
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	10.000.000	100	10.136.900	100	10.390.627	100	10.639.898	100	10.893.766	100	10.893.766	Kecamatan Pasimasunggu
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	0	1,00	12.000.000	1,00	12.300.360	1,00	12.595.446	1,00	12.895.973	1,00	12.895.973	Kecamatan Pasimasunggu
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	30.000.000	0,00	30.410.700	0,00	31.171.880	0,00	31.919.693	0,00	32.681.297	0,00	32.681.297	Kecamatan Pasimasunggu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	0	55,00	32.000.000	60,00	32.800.960	65,00	33.587.855	70,00	34.389.261	70,00	34.389.261	Kecamatan Pasimasunggu
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	12.000.000	20 menit	12.164.280	15 menit	12.468.752	10 menit	12.767.877	8 menit	13.072.519	8 menit	13.072.519	Kecamatan Pasimasunggu Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	100,00	16.500.000	100,00	16.725.885	100,00	17.144.534	100,00	17.555.831	100,00	17.974.713	100,00	17.974.713	Kecamatan Pasimasunggu Timur



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	11.462.000	1,00	11.618.915	1,00	11.909.736	1,00	12.195.451	1,00	12.486.434	1,00	12.486.434	Kecamatan Pasimasunggu Timur
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	30.000.000	0,00	30.410.700	0,00	31.171.880	0,00	31.919.693	0,00	32.681.297	0,00	32.681.297	Kecamatan Pasimasunggu Timur
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	71.225.000	55,00	72.200.070	60,00	74.007.238	65,00	75.782.672	70,00	77.590.846	70,00	77.590.846	Kecamatan Pasimasunggu Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	0	20 menit	30.000.000	15 menit	30.750.900	10 menit	31.488.614	8 menit	32.239.932	8 menit	32.239.932	Kecamatan Pasimarannu
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	134.751.788	100,00	136.596.540	100,00	140.015.551	100,00	143.374.524	100,00	146.795.441	100,00	146.795.441	Kecamatan Pasimarannu
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	0	1,00	15.000.000	1,00	15.375.450	1,00	15.744.307	1,00	16.119.966	1,00	16.119.966	Kecamatan Pasimarannu
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	0	0,00	30.000.000	0,00	30.750.900	0,00	31.488.614	0,00	32.239.932	0,00	32.239.932	Kecamatan Pasimarannu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	0	55,00	30.000.000	60,00	30.750.900	65,00	31.488.614	70,00	32.239.932	70,00	32.239.932	Kecamatan Pasimarannu



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	19.000.000	20 menit	19.260.110	15 menit	19.742.191	10 menit	20.215.806	8 menit	20.698.155	8 menit	20.698.155	Kecamatan Pasilambena
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	41.710.000	100,00	42.281.010	100,00	43.339.304	100,00	44.379.013	100,00	45.437.897	100,00	45.437.897	Kecamatan Pasilambena
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	16.516.000	1,00	16.742.104	1,00	17.161.159	1,00	17.572.855	1,00	17.992.143	1,00	17.992.143	Kecamatan Pasilambena
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	56.000.000	0,00	56.766.640	0,00	58.187.509	0,00	59.583.427	0,00	61.005.088	0,00	61.005.088	Kecamatan Pasilambena
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	100,00	59.000.000	100,00	59.807.710	100,00	61.304.697	100,00	62.775.397	100,00	64.273.218	100,00	64.273.218	Kecamatan Pasilambena
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**1.163.468.469**		**1.779.396.352**		**37.423.934.643**		**1.867.690.835**		**1.912.253.938**		**1.912.253.938**	
8	**1**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**				**1.163.468.469**		**1.779.396.352**		**37.423.934.643**		**1.867.690.835**		**1.912.253.938**		**1.912.253.938**	
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,015	0,026	79.011.333	0,026	80.092.998	0,026	82.097.726	0,01	84.067.250	0,026	86.073.095	0,026	86.073.095	Badan Kesbangpol



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Politik (%)	100,00	100,00	712.423.137	100,00	1.322.176.210	100,00	36.955.270.280	100,00	1.387.783.214	100,00	1.420.895.722	100,00	1.420.895.722	Badan Kesbangpol
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina (%)	100,00	100,00	29.011.333	100,00	29.408.498	100,00	30.144.593	100,00	30.867.762	100,00	31.604.266	100,00	31.604.266	Badan Kesbangpol
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan (%)	n.a	100,00	269.011.333	100,00	272.694.098	100,00	279.519.631	100,00	286.225.307	100,00	293.054.643	100,00	293.054.643	Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme / radikalismedan konflik sosial (%)	n.a	100,00	74.011.333	100,00	75.024.548	100,00	76.902.413	100,00	78.747.301	100,00	80.626.212	100,00	80.626.212	Badan Kesbangpol
Total Keseluruhan							1.112.949.884.500		1.128.152.337.000		1.156.326.354.000		1.184.011.590.000		1.212.206.522.000		1.212.206.522.000	

Sumber: BPKPD dan Bappelitbangda, 2021

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDG's) pada akhir periode masa jabatan.

8.1.1. Indikator kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Kepualauan Selayar Tahun 2022-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka / Nilai	67,38	68,19	68,60	69,00	69,50	70,00	70,00
2	Tingkat Kemiskinan	%	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,44	2,38	2,33	2,20	2,00	1,90	1,90
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,78%	4,61 – 6,14	5,27 – 7,03	6,50 – 8,00	6,80 – 8,30	7,50 – 8,50	7,50 – 8,50
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	46,71	49,83	53,50	55,00	57,50	60,00	60,00
6	Rasio Gini	Angka	0,357	0,343	0,336	0,320	0,310	0,300	0,300

8.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut dapat di lihat pada tabel 8.2 dan table 8.3



Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (T1)	Angka / Huruf	33,89 (C)	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)	76,00 (A)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (S1)	Angka	66,68	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00	85,00
3	Nilai Sakip Daerah (S1)	Angka / Huruf	58,85 (CC)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S1)	Angka / Kategori	n/a	65,323 (Sangat Perlu Perbaikan)	72,015 (Perlu Perbaikan)	73,943 (Perlu Perbaikan)	77,642 (Perlu Perbaikan)	79,325 (Baik)	79,325 (Baik)
5	Rasio Gini (T2)	Angka	0,357	0,341	0,320	0,310	0,305	0,300	0,300
6	Indeks Desa Membangun (S2)	Angka	0,6061 (Berkembang)	0,6300 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7150 (Maju)	0,7300 (Maju)	0,7300 (Maju)
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (S3)	%	2,44	2,38	2,33	2,20	2,00	1,90	1,90
8	Tingkat Kemiskinan (S3)	%	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25
9	Indeks Pembangunan Manusia (T3)	Angka	67,38	68,19	68,60	69,00	69,50	70,00	70,00
10	Indeks Pendidikan (S4)	Angka	50,92	52,55	54,19	55,83	57,47	59,10	59,10
11	Indeks Kesehatan (S4)	Angka	68,46	68,64	68,81	68,99	69,16	69,34	69,34
12	Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan (S5)	Rp	8.970.000	9.200.000	9.450.000	9.700.000	10.000.000	10.250.000	10.250.000
13	Pertumbuhan Ekonomi Daerah (T4)	%	-1,78	4,61 – 6,14	5,27 – 7,03	6,50 – 8,00	6,80 – 8,30	7,50 – 8,50	7,50 – 8,50
14	PDRB / Kapita (T4)	Rp. Juta	46,71	49,83	53,50	55,00	57,50	60,00	60,00
15	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (S6)	%	25,96	26,50	27,00	28,00	29,00	30,00	30,00



No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
16	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten (S7)	%	3,93	4,76	5,59	6,41	7,24	8,07	8,07
17	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB (S8)	%	12,61	13,50	14,00	15,00	15,50	16,00	16,00
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (T5)	Angka	n/a	40,00	44,00	48,00	52,00	55,00	55,00
19	Indeks Ketahanan Sosial (S9)	Angka	0,6817	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150	0,7150
20	Indeks Kesalehan Sosial (T6)	Angka	n/a	63,00	65,15	67,30	70,00	75,00	75,00
21	Angka Kriminalitas (S10)	Kasus	146	130	115	105	95	85	75
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (T7)	Angka / Huruf	74,28 (Baik)	63,46 (Cukup Baik)	64,80 (Cukup Baik)	66,14 (Cukup Baik)	67,48 (Cukup Baik)	68,82 (Cukup Baik)	68,82 (Cukup Baik)
23	Indeks Kualitas Air (S11)	Angka	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
24	Indeks Kualitas Udara (S11)	Angka	88,80	85,39	85,49	85,59	85,69	85,79	85,79
25	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (S11)	Angka	89,12	42,57	45,06	47,56	50,06	52,56	52,56



Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadapa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026

No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	1		FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	1	1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,78	4,61	5,27	6	6,5	7,03	7,03
1	1	2	Laju Inflasi	%	1,85	1,83	1,82	1,82	1,81	1,8	1,8
1	1	3	PDRB per kapita (juta)	Rp / Juta	46,71	47,78	48,33	48,88	49,44	50	50
1	1	4	Gini Ratio	%	0,357	0,343	0,336	0,324	0,312	0,300	0,300
1	1	5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	12,48	11,34	10,54	10,00	9,50	9,25	9,25
1	1	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	67,38	68,19	68,60	68,70	68,75	68,8	68,8
1	1	7	Angka Melek Huruf (AMH)	%	93,95	93,97	93,97	93,98	93,99	94	94
1	1	8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,86	10	10,5	11	11,5	12	12
1	1	9	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,46	68,97	69,23	69,48	69,74	70	70
1	1	10	Persentase Balita Stunting	%	19,17	18,94	18,83	18,72	18,61	18,5	18,5
1	1	11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,18	68,78	69,08	69,39	69,69	70	70
1	1	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2,38	2,33	2,28	2,23	2,18	2,18
1	1	13	Rasio penduduk yang bekerja	%	98	98,33	98,50	98,67	98,83	99	99
1	1	14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	0,067	0,07	0,07	0,07	0,07	0,075	0,075
1	1	15	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1	1	16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	79,8	79,87	79,90	79,93	79,97	80	80
1	1	17	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,65	7,85	8,48	9,15	9,89	11,92	11,92



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	1	18	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	19.567	21.232	22.117	23.039	24.000	25.000	25.000
1	1	19	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	16,03	16,83	17,16	17,39	17,62	18,04	18,04
1	1	20	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	2,94	3,09	3,28	3,37	3,47	3,60	3,60
1	1	21	Kontribusi sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,99	0,99	1,04	1,05	1,06	1,07	1,09
1	1	22	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	10,99	10,99	11,54	11,66	11,77	11,89	11,89
1	1	23	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,11	1,17	1,18	1,19	1,20	1,22	1,22
1	1	24	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	21,85	23,73	24,73	25,78	26,87	28	28
1	1	25	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,81	7,84	7,85	7,87	7,88	7,9	7,9
1	1	26	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,81	2,84	2,85	2,87	2,88	2,9	2,9
1	1	27	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp.000	14.300.000	14.529.626	14.645.819	14.762.940	14.880.998	15.000.000	15.000.000
2			ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	1		URUSAN WAJIB								
2	1		PELAYANAN DASAR								
2	1		PENDIDIKAN								
2	1	1	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	95,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
2	1	2	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	93,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
2	1	3	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	98,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
2	1	4	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
2	1	5	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
2	1	6	Persentase Jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat	%	48,44	53,28	58,61	64,47	70,92	78,01	78,01
2	1	7	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
2	2		KESEHATAN								
2	2	1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
2	2	9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	13	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	14	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	28/1000 Penduduk	31/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	45/1000 Penduduk	45/1000 Penduduk	45/1000 Penduduk
2	2	15	Peersentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	2	16	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	%	N/A	40,00	30,00	20,00	10,00	10,00	10,00
2	2	17	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
2	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
2	3	1	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	87%	88%	90%	92%	95%	98%	98%
2	3	2	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	%	29.83%	34%	38%	45%	50%	55%	55%



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	3	3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	1,74	1,80	1,85	1,92	1,98	2,20	2.20
2	3	4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	48,3	100	100	100	100	100	100
2	3	5	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	%	n.a	100	100	100	100	100	100
2	3	6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	39,62	100	100	100	100	100	100
2	3	7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	%	95,00	95,55	96,45	96,88	97,22	97,43	97,43
2	3	8	Persentase Infrastruktur Pemukiman terbangun pada Kawasan Strategis	%	n.a	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00
2	3	9	Persentase kepatuhan IMB	%	80,00	83,00	85,00	88,00	90,00	95,00	95,00
2	3	10	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah	%	60,00	60,92	70,11	81,61	88,51	100	100
2	3	11	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	%	58,00	58,73	69,84	82,54	92,06	100	100
2	3	12	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	69,71	71,43	72,31	73,19	74,09	75,00	75,00
2	3	13	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	%	70	80	85,00	85,00	90,00	95,00	95,00
2	3	14	Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	%	97,88	98	98,50	99,00	99,50	100	100
2	3	15	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	19,40	21,11	22,02	22,97	23,97	25,00	25,00
2	3	16	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0,00	5,00	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	17	Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	%	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100	100
2	4		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
2	4	1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n.a	100	100	100	100	100	100
2	4	2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	4	3	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	%	2,00	2,11	3,16	4,22	5,27	6,33	6,33
2	4	4	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	1,58	3,72	5,91	8,14	10,40	12,66	12,66
2	4	5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	N/A	0,58	1,41	3,42	8,27	20,00	20,00
2	4	6	Persentase rekemondasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	5		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
2	5	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	5	2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	100	100	100	100	100	100
2	5	3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	91,11	91,41	91,55	91,70	91,85	92	92



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
2	5	4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11,95	11,26	10,93	10,61	10,30	10	10
2	5	5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasiraan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
2	5	6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
2	5	7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
2	6		SOSIAL								
2	6	1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Diberdayakan	%	17,74	32,67	37,59	42,40	44,81	50,00	50,00
6	6	2	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	18,99	100	100	100	100	100	100
2	6	3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	31,99	100	100	100	100	100	100
2	6	4	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,35	100	100	100	100	100	100
2	6	5	PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	25,00	100	100	100	100	100	100
2	6	6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	17,36	18,36	21,32	24,50	25,92	28,22	28,22
2	6	7	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi	%	30,11	35,15	38,12	42,15	45,5	50,00	50,00



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
2	6	8	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
2	6	9	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
3			NON PELAYANAN DASAR								
3	1		TENAGA KERJA								
3	1	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (RTK)	%	N/A	70,00	73,00	75,00	77,00	80,00	80,00
3	1	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,40	0,40	1,17	2,00	3,42	5,85	5,85
3	1	3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	12,5	19,84	25	31,5	39,69	50,00	50,00
3	1	4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	%	0,30	0,60	0,90	1,17	1,50	1,80	1,80
3	2		PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
3	2	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,12	25	25	26	27	28	28
3	2	2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	39 / 1000 penduduk perempuan	33 / 1000 penduduk perempuan	28 / 1000 penduduk perempuan	23 / 1000 penduduk perempuan	18 / 1000 penduduk perempuan	12 / 1000 penduduk perempuan	12 / 1000 penduduk perempuan
3	2	3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang terstandarisasi	%	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,10
3	2	4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	%	0,18	0,18	0,36	0,54	0,72	0,88	0,88
3	2	5	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (skor indicator KLA)	%	50	50	52,50	55,00	57,50	60,00	60,00
3	2	6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten	%	100	100	100	100%	100	100	100



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
3	3		PANGAN								
3	3	1	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	%	37,5 %	50%	62,50%	75,00%	87,50%	100 \%	100%
3	3	2	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	%	9,09%	27,27%	36,36%	45,45%	54,55%	63,64%	63,64%
3	3	3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	47,5%	52,50%	57,50%	62,50%	67,50%	72,50%	72,50%
3	3	4	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80%	80%	80,00	80,00	80,00	80,00	80%
3	4		PERTANAHAN								
3	4	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	N/A	50	70	80	90	90	40
3	4	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	N/A	40	60	80	100	100	30
3	4	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Lokasi	N/A	60	70	80	90	90	40
3	4	4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	N/A	60	70,00	80,00	90,00	100	100
3	4	5	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	4	6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	40,00	60,00	80,00	100	100
3	4	7	Persentase luas lahan Ulayat yang di tetapkan	%	N/A	0	40,00	60,00	70,00	80,00	80,00
3	4	8	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya	%	N/A	40	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
3	4	9	Persentase rekomendasi izin membuka tanah untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan	%	N/A	100	100	100	100	100	100



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
3	4	10	Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah	%	N/A	30,00	40,00	60,00	80,00	90,00	90,00
3	5		LINGKUNGAN HIDUP								
3	5	1	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang trintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	%	N/A	12,5	12,5	25	27,5	37,5	37,5
3	5	2	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Point	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
3	5	3	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
3	5	4	Persentase Lembaga/Perusahaan penghasil Limbah B3 yang Diawasi (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
3	5	5	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / Atau Kegiatan	%	63,64	64,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00
3	5	6	Persentase MAH Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui beneradaannya	%	N/A	1,14	2,27	3,41	4,55	5,58	5,58
3	5	7	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberikan Diklat	%	N/A	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
3	5	8	Persentase Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan yang berprestasi	%	20,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
3	5	9	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%	80	100	100	100	100	100	100
3	5	10	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3	6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
3	6	1	Persentase Penerbitan KTP-el	%	96,00	97,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
3	6	2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	30,00	32,00	35,00	36,00	37,00	40,00	40,00
3	6	3	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	93,75	93,75	94,00	94,50	95,00	95,50	95,50



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
3	6	4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	46,15	57,69	76,92	88,46	100,00	100,00	100,00
3	6	5	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
3	7	1	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	7	2	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	%	N/A	3,7	3,7	3,7	2,46	2,46	16,05
3	7	3	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	7	4	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	N/A	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
3	8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
3	8	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Point	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04
3	8	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,2	78,45	78,8	80	80,35	80,5	80,5
3	8	3	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)								
			BKB	%	73.86	73.86	74,23	74,60	74,97	75,35	75,35
			BKR	%	61,36	61,36	61,67	61,98	62,29	62,60	62,60
			BKL	%	61,56	61,56	61,87	62,18	62,49	62,80	62,80
			PIK-R	%	51,19	51,19	51,45	51,70	51,96	52,22	52,22
			UPPKS	%	90,9	90,9	91,35	91,81	92,27	92,73	92,73



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
3	9		PERHUBUNGAN								
3	9	1	Persentase Kinerja Lalu lintas Kabupaten	%	30,54	30,69	30,77	30,85	30,92	31,00	31,00
3	9	2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi (%)	%	N/A	55,73	60,66	63,94	70,50	73,78	73,78
3	9	3	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pandaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	%	N/A	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
3	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
3	10	1	Persentase layanan system informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	%	N/A	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	10	2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	%	N/A	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	11		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
3	11	1	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	100	100	100	100	100	100	100
3	11	2	Persentase koperasi sehat	%	100	100	100	100	100	100	100
3	11	3	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	%	100	100	100	100	100	100	100
3	11	4	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	11	5	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	11	6	Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	11	7	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100	100
3	12		PENANAMAN MODAL								
3	12	1	Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah	%	30	40	50	60	70	80	80
3	12	2	Jumlah Investor PMDN/PMA	%	16	20	28	32	36	36	36



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
3	12	3	Persentase Izin yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	12	4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	Rp	39.200	52.000	59.000	67.000	74.500	82.000	82.000
3	12	5	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
3	13	1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95	4,2	8,83	18,55	39,01	82	82
3	13	2	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	0,1	0,39	0,77	1,53	3,03	6	6
3	13	3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	3,66	4,06	4,26	4,51	4,75	5	5
3	14		STATISTIK SEKTORAL								
3	14	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100
3	14	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100
3	15		PERSANDIAN								
3	15	1	Persentase keamanan informasi pemerintah	%	N/A	100	100	100	100	100	100
3	16		KEBUDAYAAN								
3	16	1	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	16	2	Persentase Pembinaan kesenian Tradisional	%	N/A	20	30	40	50	60	60
3	16	3	Cakupan pembinaan sejarah lokal	%	N/A	100	100	100	100	100	100
3	16	4	Benda situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	16	5	Jumlah pengelolaan museum		1 Museum	1 Museum	1 Museum	1 Museum	1 Museum	1 Museum	1 Museum



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
3	17		PERPUSTAKAAN								
3	17	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70	4,70	71,30
3	17	2	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	N/A	17 %	33 %	50 %	83 %	100 %	100 %
3	18		KEARSIPAN								
3	18	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	90	90	90	90	95	95	95
3	18	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	95	95	95	95	97,5	100	100
3	18	3	Persentase Arsip dapat Diakses yang Sifatnya Tertutup/Rahasiah (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
4			PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
4	1		KELAUTAN DAN PERIKANAN								
4	1	1	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.729,2	21.845,74	23.593,4	25.480,87	27.519,34	29.720,89	29.720,89
4	1	2	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	837,36	976,72	1.054,86	1.139,25	1.230,39	1.328,82	1.328,82
4	1	3	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	160,84	186,57	201,49	231,34	249,84	269,82	269,82
4	1	4	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dalam Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Perundang-undangan (%)	%	N/A	5,27	10,54	15,81	21,07	26,34	26,34
4	2		PARIWISATA								
4	2	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,44	5	5	6	7	8	8
4	2	2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	5%	5%	5%	5%	5%	5%



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
4	2	3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	%	10	10	10	10	10	10	10
4	2	4	Persentase huniaan akomodasi	%	10	10	10	10	10	10	10
4	2	3	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	%	N/A	16,6	33,34	66,68	83,35	100	100
4	2	4	Persentase SDM/ tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	3		PERTANIAN								
4	3	1	Persentase Cadangan Pangan	%	0,02	0,07	0,10	0,12	0,13	0,14	0,14
4	3	2	Cakupan Sarana pertanian	%	100	100	100	100	100	100	100
4	3	3	Cakupan Prasarana Pertanian	%	100	100	100	100	100	100	100
4	3	4	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	%	5,85	5,65	5,28	5,02	4,76	4,5	0,10
4	3	5	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	%	23,15	21,99	20,89	19,85	18,86	17,91	17,91
4	3	6	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	100	100	100	100	100
4	3	7	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	15,62	19,17	22,72	26,27	29,82	33,37	33,37
4	4		PERDAGANGAN								
4	4	1	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	4	2	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	4	3	Persentase jenis komoditi yang dipantau	%	100	100	100	100	100	100	100
4	4	4	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	%	100	100	100	100	100	100	100
4	4	5	Persentase alat ukur yang ditera	%	100	100	100	100	100	100	100
4	4	6	Persentase produk lokal yang dipasarkan	%	100	100	100	100	100	100	100



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
4	5		PERINDUSTRIAN								
4	5	1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	%	10,00	12,00	15,00	18,00	20,00	22,00	22,00
4	5	2	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	%	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
4	5	3	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	%	30,00	33,00	40,00	45,00	60,00	70,00	70,00
5			PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1		Sekretariat Daerah								
5	1	1	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	1	2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	1	3	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	2		Sekretariat DPRD								
5	2	1	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJM dan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
6			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1		Perencanaan								
6	1	1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	75,72	80	85	90	95	95	95
6	1	2	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	%	n/a	80	85	90	95	95	95
6	2		Keuangan								
6	2	1	Persentase SILPA terhadap APBD		6,97	6,00	5,50	5,00	4,00	4,00	4,00
6	2	2	Assets Management	%	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
6	2	3	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah	%	78,36	85	89	92,6	95	100	100
6	3		Kepegawaian								
6	3	1	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah	%	87,12	89,21	90,40	92,60	93,80	94,00	94,00
6	3	2	Presentase Pegawai Berkinerja Baik	%	99,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	4		Pendidikan dan Pelatihan								
6	4	1	Cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/ manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis	%	18,96	80,25	81,00	81,50	83,00	83,75	83,75
6	5		Penelitian dan Pengembangan								
6	5	1	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
6	6		Transparansi dan Partisipasi Publik	%							
6	6	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6	6	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
7	1		Inspektorat Daerah								
7	1	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2.8	3	3	3+	3+	4	4
7	1	2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2+	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
8			UNSUR KEWILAYAHAN								
8	1		Kecamatan								
8	1	1	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	30 menit	25 menit	20 menit	15 menit	10 menit	8 menit	8 menit



No			Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
8	1	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	1	3	Penurunan kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	%	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1	4	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	5	program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	%	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
9	1		Kesatuan Bangsa dan Politik								
9	1	1	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	%	0,015	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
9	1	2	Persentase Partai Politik yang Mengikuti Pendidikan Politik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	1	3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	1	4	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dirumuskan	%	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	1	5	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme / radikalismedan konflik sosial	%	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10			ASPEK DAYA SAING DAERAH								
10	1		FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI								
10	1	1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	982570	988346	991247	994156	997074	1000000	1.000.000
10	1	2	Nilai tukar petani	Poin	97,86	100,18	101,37	102,56	103,77	105	105
10	1	3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	57,81	60,42	61,77	63,15	64,56	66	66

8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel 8.4



Tabel 8.4.
Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan / Indikator	Target Nasional	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Dasar						
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Pendidikan Kesetaraan						
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini						
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kesehatan						
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Pelayanan kesehatan balita						
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,						
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;						
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi						
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan / Indikator	Target Nasional	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Pelayanan kesehatanorang terduga tuberkulosis						
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus						
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pekerjaan Umum						
3.1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	74.05%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5.87%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Perumahan Rakyat						
4.1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota						
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota						
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Trantibumlinmas						
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						



No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan / Indikator	Target Nasional	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpenyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Sosial						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti						
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti						
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti						
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota						
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada table 8.5.



Tabel 8.5.
Penetapan Target Indikator TPB/SDG
Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
Pilar Pembangunan Sosial								
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan								
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	12,48	11,87	11,57	11,28	11,00	10,73
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	96,7	97,1	97,6	98,1	98,5	99
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	43,31	44,57	45,87	47,21	48,58	50
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	18,99	20	22	23	24	25
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	KPM	6.597	6.600	6.650	6.700	6.750	6.800
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnyamasyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	75,11	77,88	80,75	83,72	86,80	90,00
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	69,7	74,15	78,89	83,93	89,29	95,00
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	56,65	58,23	59,85	61,52	63,24	65,00

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	22,98	6,51	6,85	7,22	7,60	7,60
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	24,52	44	59	79	99	199
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	%	18,73	15,14	13,61	12,24	11,00	9,89
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	%	99	99	99	99	99	99
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	%	89	92,12	93,72	95,34	97,00	98,68
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	71,77	81,95	87,57	93,58	100,00	100,00
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi/Desa	5	8	10	13	15	17
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	%	100	100	100	100	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	100	100	100	100	100	100
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Lokasi/Desa	5	8	10	13	15	17
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Poin	155	150,8	146,7	142,7	138,8	135
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan								
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	6,30	5,01	3,98	3,16	2,52	2,00
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remajaperempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	19,17	18,9	18,77	18,63	18,5	18,37
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	21,90	20,30	18,82	17,45	16,18	15,00
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	68,60	63,05	57,95	53,27	48,96	45,00
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	58,10	61,14	64,35	67,72	71,27	75,00



Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	79,8	79,87	79,9	79,93	79,97	80
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera								
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	kematian per 100.000 kelahiran hidup	324 per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup	294 per 100.000 kelahiran hidup	267 per 100.000 kelahiran hidup	242 per 100.000 kelahiran hidup	220 per 100.000 kelahiran hidup
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	75,1	77,88	80,75	83,72	86,80	90,00
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	69,8	73,44	77,27	81,30	85,54	90,00
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.							
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1000 kelahiran hidup	3,7 per 1000 kelahiran hidup	2,8 per 1000 kelahiran hidup	2,2 per 1000 kelahiran hidup	1,7 per 1000 kelahiran hidup	1,3 per 1000 kelahiran hidup	1 per 1000 kelahiran hidup
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	per 1000 Penduduk	0,10/1000 Penduduk	0,1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,00071	0,00066	0,00062	0,00058	0,00054	0,0005
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS)	159	150	142	134	127	120
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	16,35	10,74	7,06	4,63	3,04	2,00

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	78,2	78,45	78,8	80	80,35	80,5
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	56,65	58,23	59,85	61,52	63,24	65
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	15,25	16,10	17,00	17,94	18,94	20,00
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	158	1,53	1,37	1,24	1,11	1,00
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Poin	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	0,3	0,2	0,1	0,1	0	0
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	99,7	99,8	99,9	99,9	100	100
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas								
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	63,83	69,5	81,56	85,11	88,65	92,2
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	65,38	69,23	73,08	76,92	80,77	84,62
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	107,82	106,21	104,62	103,06	101,52	100
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	89,50	91,51	93,56	95,66	97,81	100
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00



Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.							
	(1) SD/MI/ sederajat;	%	99,29	99,46	99,54	99,63	99.71	99,8
	(2) SMP/MTs/ sederajat;	%	79,83	85,77	88,90	82,15	99,51	99
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	93,95	95,60	96,44	97,29	98,14	99
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	99,67	99,78	99,83	99,89	99,94	100
Tujuan 5. Kesetaraan Gender								
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100	100	100	100	100
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan							
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Usia	22	23	23	24	24	25
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	1,70	1,46	1,26	1,08	0,93	0,80
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	24,00	24,20	24,40	24,60	24,80	25
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	63,11	63,48	63,86	64,24	64,62	65
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut							
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	8,46	8,15	7,80	7,50	7,00	6,50



Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	100	100	100	100	100	100
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	%	100	100	100	100	100	100
Pilar Pembangunan Lingkungan								
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak								
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	85,96	81,35	82,56	83,45	84,56	85,3
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan							
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	74,94	6.51	6.85	7.22	7.6	8
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	88	44	59	79	99	119
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	n/a	52	54	56	58	60
6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Das	1	1	1	1	1	1
Pilar Pembangunan Sosial								
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau								
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	%	94,31	94,45	94,59	94,72	94,86	95,00
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kwh	27.223	27.377	27.531	27.687	27.843	28.000

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi								
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta/Jiwa	46,71 Juta	49,83 Juta	53,50 Juta	55,00 Juta	57,50 Juta	60,00 Juta
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	9,72	10,13	10,34	10,56	10,78	11,00
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	51,10	52,68	53,49	54,32	55,15	56,00
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	20	22	24	26	26	26
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	0,22	0,36	0,47	0,60	0,78	1
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	155	160	180	210	240	280
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	5734	5800	6300	6800	7300	7800
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur								
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Unit	1	1	1	1	1	1
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	2	2	2	2	2	2
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Unit	7	7	7	7	7	7
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	%	179,4	182,80	188,29	193,94	199,76	205,75



Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	%	89,1	89,3	89,5	89,6	89,8	90,0
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan								
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini.	Poin	0,357	0,341	0,320	0,310	0,305	0,300
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	12,48	11,34	10,54	10	9,65	9,25
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	5	2	4	6	8	10
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal.	Desa	34	32	30	28	26	24
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	0	1	1	2	2	3
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	43,31	44,57	45,87	47,21	48,58	50
Tujuan 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan								
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	14,22	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab								
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton/Tahun	5.999,26	650	675	700	725	750
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka							
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Unit	2	3	4	5	6	7
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.							
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk	26	27	28	29	30	31

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim								
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	N/A	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	N/A	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tujuan 14. Ekosistem Lautan								
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	100	100	100	100	100	100
Tujuan 15. Ekosistem Daratan								
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Ha	N/A	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.							
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	100	100	100
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.							
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1
15.9	Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
15.c	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.							
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	100	100	100
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola								
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	0,00070	0,00063	0,00056	0,00050	0,00045	0,0004
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Poin	3,84	6,14	9,80	15,67	25,03	40,00
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	100	100	100	100	100	100
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	24,00	24,20	24,40	24,60	24,80	25
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	6,45	6,93	7,18	7,45	7,72	8
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	2,07	4,50	9,76	21,20	46,05	100
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional							
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	%	100	100	100	100	100	100
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Badan Publik	1	1	1	1	1	1
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	%	100	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Orang	N/A	5	30	30	35	60
Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan								
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	0,72	0,76	0,80	0,85	0,95	1,00

BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 ayat (7) menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2025 yang akan datang merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati / Wakil Bupati H. Muh. Basli Ali dan H. Saiful Arif, SH.

Terkait hal tersebut, maka dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang menyisakan dua tahun terakhir pelaksanaan dan RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan sampai Perda RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, dan/atau menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 yang disusun pada Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2026 yang disusun Tahun 2025, tetap berpedoman pada RPJMD 2021-2026, meski RKPD Tahun 2025 dan 2026 merupakan rencana tahunan pada tahun pertama dan kedua Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati selanjutnya.

Hal tersebut dilaksanakan untuk tetap menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2025 dan 2026 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan RKPD Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021 - 2026

pelaksanaan RPJMD harus didasarkan pada pencapaian tujuan mewujudkan